



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Perangkat ...

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.

Pasal 2

RPJMD ini disusun berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. keterpaduan;
- d. kepentingan umum;
- e. keterbukaan;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 dengan memperhatikan RPJPD.

BAB II

RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri dari:

- | | |
|----------|--|
| BAB I | Pendahuluan; |
| BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah; |
| BAB III | Gambaran Keuangan Daerah; |
| BAB IV | Permasalahan dan Isu-isu Strategis; |
| BAB V | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; |
| BAB VII | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; |
| BAB VIII | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan |
| BAB XI | Penutup. |

(2) Uraian ...

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam Menyusun Renstra PD;
- b. bahan penyusunan dan penyesuaian dengan memperhatikan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD;
- c. pedoman bagi pemerintah daerah dalam Menyusun RKPD; dan
- d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra PD.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun rancangan tekhokratik RPJMD periode tahun 2026-2031.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada:
 - a. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
 - b. RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025;
 - c. RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 periode kelima; dan
 - d. RPJMN 2020-2024.

BAB III

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 September 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR :



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN KUTAI
TIMUR**

TAHUN 2021-2026

TAHUN 2021

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I -5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I -7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I -12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I -12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II -1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II -1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II -12
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II -15
2.1.4. Aspek Demografis	II -25
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II -31
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II -31
2.2.2. Pertumbuhan PDRB	II -34
2.2.3. Struktur Ekonomi	II -35
2.2.4. PDRB Perkapita	II -38
2.2.5. Kemiskinan	II -39
2.2.6. Ketimpangan Indeks Gini	II -40
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II -41
2.2.8. Indeks Pembangunan Desa (IPD)	II -42
2.2.9. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II -45
2.2.10. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II- 51
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II -52
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II -52
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II -74
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II -89
2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan	II -99
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II -101
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II -102
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II -103
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II -106
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II -108



BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III -2
3.2.	ANALISIS KEUANGAN DAERAH	III -18
3.2.1	Kapasitas Fiskal Daerah	III -18
3.2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	III -20
3.2.3	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	III -22
3.2.4.	Kemandirian Keuangan Daerah	III -23
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	III -24
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Ditinjau dari Pilar Pembangunan Berkelanjutan	IV -1
4.1.2.	Permasalahan Pembangunan Daerah Per Urusan Pemerintahan	IV -3
4.2.	TELAAH DOKUMEN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	IV -7
4.2.1	Telaah dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024).....	IV -7
4.2.2	Telaah dokumen RPJMD Kalimantan Timur 2019- 2023	IV -11
4.2.3.	Telaah dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2006-2025.....	IV -13
4.2.4.	Telaah dokumen RTRW Kabupaten Kutai Timur 2013-2032.....	IV -17
4.2.5.	Telaah dokumen perencanaan lainnya	IV -21
4.3.	ISU STRATEGIS	IV-27
4.3.1	Isu eksternal	IV -28
4.3.2.	Isu internal.....	IV -50
4.4.	RUMUSAN ISU STRATEGIS.....	IV -57
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	V-1
5.1.	VISI.....	V-1
5.2.	MISI	V-2
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	V -7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1



6.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH	VI -6
6.3	PROGRAM UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	VI -7
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN.....	VII -1
7.2	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII -4
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII -1
8.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	VIII-1
8.2	INDIKATOR KINERJA DAERAH	VIII -5
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1.	PEDOMAN TRANSISI	IX-1
9.2	KAJIAN PELAKSANAAN	IX-1

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Timur..	II-2
Tabel 2.2	Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur	II-5
Tabel 2.3	Kondisi Topografi Daratan Kabupaten Kutai Timur	II-5
Tabel 2.4	Luas Kawasan Bukit Karst di Kutai Timur	II-6
Tabel 2.5	Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur.....	II-8
Tabel 2.6	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Bulan Januari, Juli dan Desember di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019.....	II-9
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan Menurut Kawasan di Kabupaten Kutai Timur.....	II-11
Tabel 2.8	Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.....	II-12
Tabel 2.9	Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Kutai Timur.....	II-16
Tabel 2.10	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Kutai Timur	II-18
Tabel 2.11	Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kutai Timur	II-19
Tabel 2.12	Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Kabupaten Kutai Timur	II-21
Tabel 2.13	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kutai Timur	II-23
Tabel 2.14	Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung Di Kabupaten Kutai Timur	II-24
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.16	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2020.....	II-26
Tabel 2.17	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2020	II-27
Tabel 2.18	Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016–2020	II-29
Tabel 2.19	Capaian Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.20	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2.21	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020 (Juta Rp).....	II-36
Tabel 2.22	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020.....	II-37
Tabel 2.23	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-40
Tabel 2.25	Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-40
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020	II-41
Tabel 2.27	Kategori Desa Berdasarkan Skor dan IPD.....	II-42
Tabel 2.28	Skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.	II-43
Tabel 2.29	Kategori Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2020	II-43
Tabel 2.30	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020	II-46



Tabel 2.32	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2.33	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.34	Angka Kelahiran dan Kematian serta Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.35	Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.36	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.37	Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (%).....	II-56
Tabel 2.38	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2.39	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.40	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2.41	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-62
Tabel 2.42	Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.43	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.44	Cakupan Puskesmas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.45	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.46	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.47	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.48	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.49	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.50	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.51	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.52	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.53	Regulasi Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.54	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020	II-78
Tabel 2.55	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.56	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.57	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan KB dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.58	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.59	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten .	II-83
Tabel 2.60	Data Blank Spot Telepon Selular dan Internet di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	II-83
Tabel 2.61	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-85



Tabel 2.62	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.63	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.64	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel 2.65	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.66	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.67	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.68	Potensi Obyek Wisata di Kutai Timur.....	II-90
Tabel 2.69	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-91
Tabel 2.70	Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.71	Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.72	Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-94
Tabel 2.73	Pertumbuhan dan Peranan Katagori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur (Persen), tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.74	Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-96
Tabel 2.75	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.76	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.77	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 ..	II-98
Tabel 2.78	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2020	II-100
Tabel 2.79	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.80	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2020	II-102
Tabel 2.81	Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.82	Capaian Aspek Daya Daerah Saing Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.83	Jumlah Penginapan/hotel di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.84	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	II-105
Tabel 2.85	Sarana Air Bersih PDAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.86	Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Sektor Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019.....	II-106
Tabel 2.87	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019.....	II-107
Tabel 2.88	Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 3.1	Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.2	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	III-8



Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	III-10
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	III-10
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	III-11
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	III-11
Tabel 3.7	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020	III-12
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	III-12
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020.....	III-13
Tabel 3.10	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2020.....	III-15
Tabel 3.11	Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Kutai Timur, 2016-2020	III-17
Tabel 3.12	Kapasitas Fiskal Kabupaten Kutai Timur, 2016-2020.....	III-19
Tabel 3.13	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020....	III-23
Tabel 3.14	Proyeksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 (Rupiah)	III-25
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur	IV-2
Tabel 4.2	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV-3
Tabel 4.3	Telaah RPJMN Tahun 2020-2024	IV-8
Tabel 4.4	Target Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur Pada RPJMN Tahun 2020-2024..	IV-10
Tabel 4.5	Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	IV-11
Tabel 4.6	Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2032	IV-18
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur Tahun	V-10
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2022-2026.....	VI-1
Tabel 6.2	Arah Tematik Tahunan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur.....	VI-7
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kutai Timur.....	VI-10
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kutai Timur.....	VII-5
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.....	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran Kabupaten Kutai Timur	VIII-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur.....	I-3
Gambar 1.2 Kerangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.....	I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-8
Gambar 1.4 Integrasi Muatan Laporan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD	I-11
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kutai Timur.....	II-3
Gambar 2.2 Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018	II-9
Gambar 2.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Kutai Timur	II-17
Gambar 2.4 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Kutai Timur.....	II-19
Gambar 2.5 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kutai Timur....	II-20
Gambar 2.6 Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Kabupaten Kutai Timur.....	II-22
Gambar 2.7 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kutai Timur.....	II-24
Gambar 2.8 Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung Di Kabupaten Kutai Timur.....	II-25
Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2020.....	III-6
Gambar 3.2 Komposisi Belanja Kabupaten Kutai Timur, 2016 - 2020	III-15
Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2020.....	III-22
Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah.....	III-23
Gambar 4.1 Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan	IV-1
Gambar 4.2 Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025.....	IV-15
Gambar 4.3 Skenario RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025.....	IV-16
Gambar 4.4 Skenario Pembangunan Tahun 2021-2025 berdasarkan RPJPD Tahun 2006-2030	IV-17
Gambar 4.5 Skema pembangunan berkelanjutan.....	IV-22
Gambar 4.6 Formulasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kutai Timur	IV-27
Gambar 5.1 Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026	V-2
Gambar 5.2 Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026	V-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah menghadapi masalah yang semakin kompleks, terutama terkait masuknya era digital hingga munculnya revolusi industri 4.0 serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Menurut Kaul (1997) pemerintah daerah dituntut segera melakukan berbagai upaya inovasi baik dalam struktur organisasi maupun sistem pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk efisiensi, lebih responsif, dan memberikan layanan publik yang lebih baik.

Revolusi industri 4.0 sebagaimana diungkapkan oleh Schwab (2017) dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah dengan mengubah secara fundamental cara hidup dan bekerja yang didominasi oleh digitasi dan jaringan. Pada dasarnya, revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Penerapan Revolusi Industri 4.0 di pemerintah daerah dikenal dengan istilah *Smart City* dengan tetap mengedepankan peran manusia sebagai sumberdaya vital pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah fokus pada tercapainya efisiensi waktu, aparatur, dan belanja program/ kegiatan.

Pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka (Brundtland, 2016; Ukko et al., 2019). Dengan kata lain, Kabupaten Kutai Timur memerlukan perubahan yang tidak hanya sekedar transformasi kemanusiaan tetapi mentransformasi organisasi pemerintahan itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh Osborne and Gaebler (1992). Transformasi ini ditandai adanya perubahan tata kelola berdasar *New Public Management* menuju *New Digital Era* (Dunleavy and Margetts, 2015). Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar keberlanjutan yaitu pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggungjawab sosial (GSSB, 2016). Realisasi pembangunan berkelanjutan tersebut harus dimulai dengan perencanaan yang memadai baik jangka panjang, menengah dan pendek, serta memiliki keterkaitan satu sama lain. Perencanaan sangat diperlukan mengingat pemerintah daerah menghadapi tingginya dinamika dan ketidakpastian lingkungan yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa diluar kendali (Kemp, 2018).



Salah satu peristiwa di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia. Pandemi ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia dan sangat memungkinkan munculnya ancaman krisis multidimensi, yang semula hanya pada permasalahan kesehatan namun meluas ke masalah sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak hanya dituntut untuk mengatasi dampak Covid-19, namun juga upaya pencegahan serta adaptasi kebiasaan hidup baru (*New Normal*).

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur menggambarkan proses tahapan-tahapan kegiatan pembangunan. Perencanaan tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar Kutai Timur. Selain itu, perencanaan memuat alokasi dan pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian perencanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial, serta adaptasi terhadap *new public management* menuju new digital era.

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terdiri dari: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan (c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kabupaten Kutai Timur telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun 2020. Pilkada tersebut telah menetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik diwajibkan menyusun RPJMD. Adapun persiapan penyusunan RPJMD telah diatur dalam Pasal 41 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Persiapan penyusunan tersebut meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun

RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

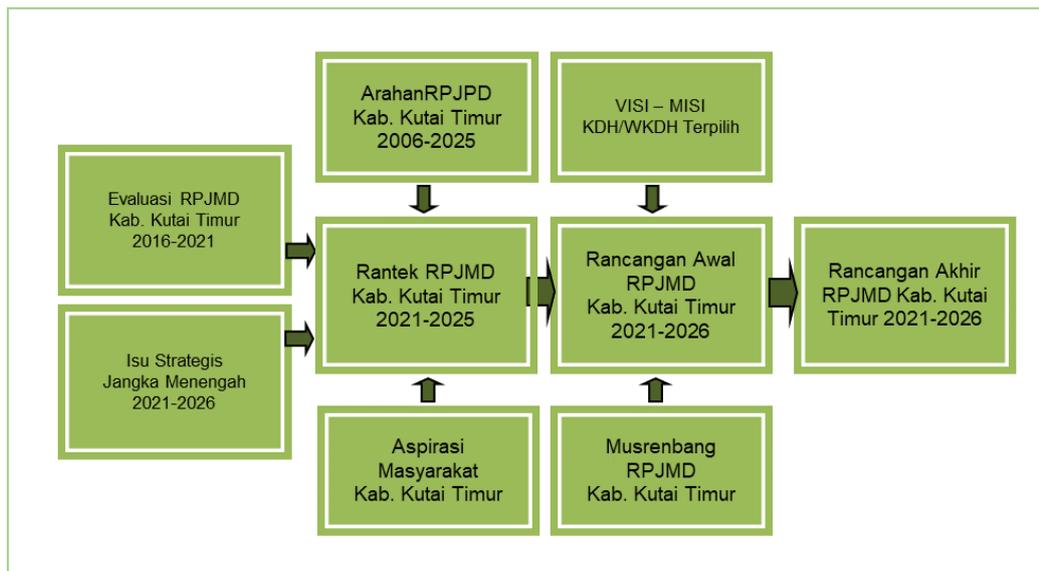
Selanjutnya RPJPD tersebut dijabarkan ke dalam RPJMD, yaitu: (a) Tahap I (2006-2010); (b) Tahap II (2011-2015); (c) Tahap III (2016-2021), dan (d) Tahap IV (2021-2025). Tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur disajikan pada Gambar 1.1. Selain memperhatikan RPJPD, penyusunan RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang wilayah (Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035).



Sumber : RPJPD Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2006-2025 (diolah)

Gambar 1.1
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur

Berikut adalah kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026:



Gambar 1.2
Kerangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. RPJMD Kabupaten Kutai Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur lima tahun ke depan yang dalam penyusunan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 yaitu “Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan



- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

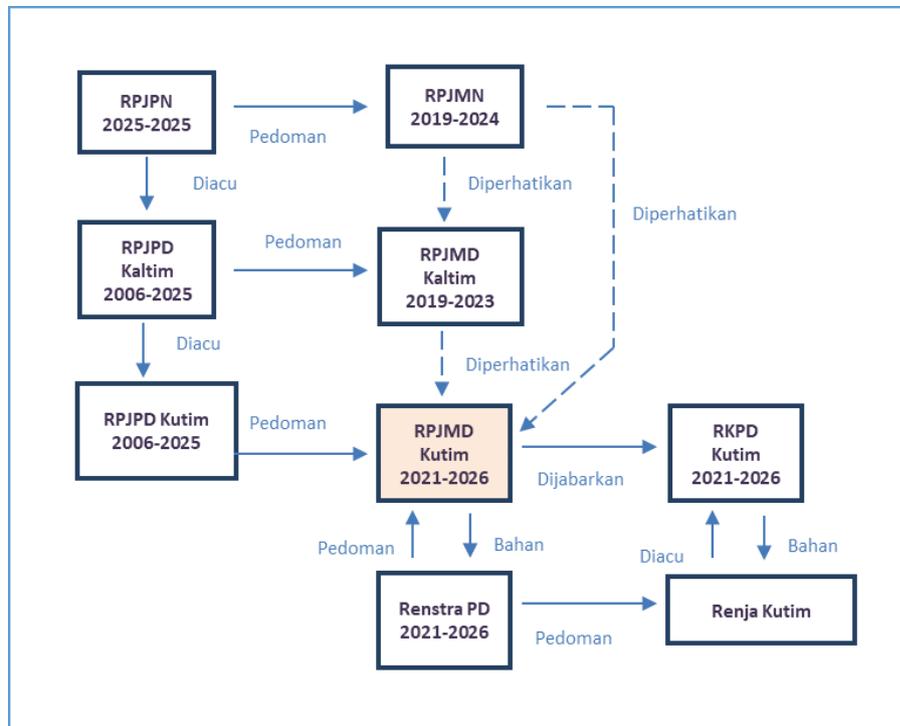


- Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan timur Tahun 2021-2041;
 25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
 27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara. RPJMD Kabupaten Kutai Timur secara tidak langsung mengacu pada RPJPN serta RPJPD dan RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur. Selanjutnya, RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu, RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber : UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004 (diolah)

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Berikut adalah penjabaran dari keterkaitan antar dokumen yang digunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

1. Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJPD Kabupaten Kutai Timur

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan tahap IV pada RPJPD Kabupaten Kutai Timur. Pada dokumen RPJPD prioritas pembangunan pada tahap IV (tahun 2021-2025) diarahkan pada periode pematangan dengan skenario masyarakat serta wilayah Kutai Timur stabil. Pemahaman tentang skenario “Kutai Timur Tegar” adalah bahwa perkembangan dan pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan kehidupannya. Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, selanjutnya berakibat pada perubahan sosial budaya, sosial ekonomi dan lingkungan fisik yang dapat berdampak positif atau negatif. Kebijakan “Kutai Timur Tumbuh” dimaksudkan sebagai usaha untuk menanggapi



perkembangan dan pertumbuhan daerah agar dapat terkendali sehingga semua bidang pembangunan dapat tumbuh secara harmonis, serasi, selaras dan seimbang serta berkeadilan. Dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan tidak hanya pada wilayah dan sektor tertentu saja namun meliputi semua bidang pembangunan.

2. Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 merupakan tahun keempat dari RPJPD 2006-2025 yang dalam RPJMD tersebut dirumuskan visi dan misi RPJMD Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat". Visi tersebut mengarahkan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Kabupaten Kutai Timur harus memiliki keterpaduan pembangunan dengan Kalimantan Timur. Sehingga dalam pembangunan harus tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten baik dalam penyediaan fisik, penyediaan lahan maupun dukungan perencanaan dan pendanaan.

3. Hubungan RPJMD Kutai Timur dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perencanaan tersebut menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan.

4. Hubungan RPJMD dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 huruf d Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

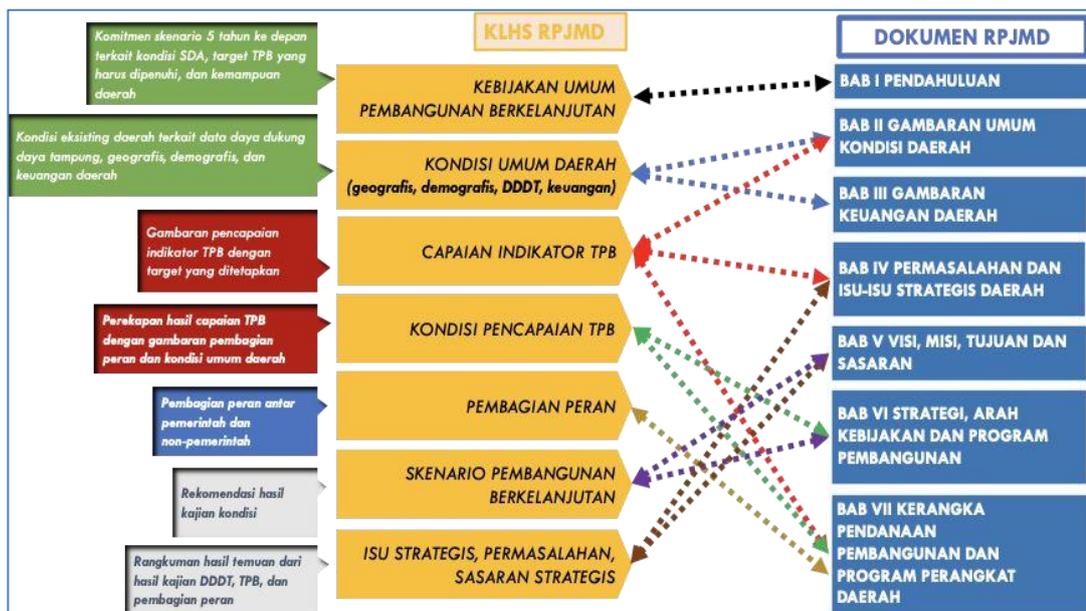


Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (KLHS RPJMD). Strategi dan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Kutai Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRW dan KLHS. RPJMD, RTRW dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan. Dokumen KLHS RPJMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Hal ini sesuai dengan amanat pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mengisyaratkan bahwa RPJMD

harus memperhatikan rencana target pencapaian pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Daya Dukung Daya Tampung (D3T) daerah dan Isu-Isu Strategis serta permasalahan-permasalahan daerah terkait. Dengan demikian, KLHS RPJMD merupakan arahan pemerintah daerah untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kabupaten Kutai Timur akan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu; a. Pilar Pembangunan Sosial (aspek kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender); b. Pilar Pembangunan Ekonomi (energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industry inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan); c. Pilar Pembangunan Lingkungan (isu terkait air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan); d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).



Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri

Gambar 1.4
Integrasi Muatan Laporan KLHS RPJMD ke dalam RPJMD



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur adalah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program prioritas pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Adapun sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Kabupaten Kutai Timur, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab II ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan yang meliputi, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab III ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Pembahasan bab ini terdiri dari: Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab IV ini mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab V ini menerjemahkan visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Dalam rangka pencapaian visi dan misi maka bab ini menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.



Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Karakteristik lokasi wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana disajikan dalam aspek geografi wilayah. Di sisi lain, perubahan jumlah dan komposisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu; disajikan dalam aspek demografi.

Aspek geografi sangat penting dalam proses pembangunan. Beberapa alasan mengapa aspek geografi harus dipertimbangkan, diantaranya: (i) geografi menggambarkan kondisi alam dan wilayah suatu daerah; (ii) geografi menyajikan informasi tentang kondisi masa lalu, masa kini dan kemungkinan kondisi alam (bumi) di masa yang akan datang; (iii) geografi menggambarkan proses interaksi manusia dan alam; contoh kondisi banjir. Banjir yang semakin sering terjadi merupakan sebab akibat antara aktivitas manusia dan alam. Sejarah menunjukkan kondisi banjir berkaitan dengan penyimpangan proses pembangunan wilayah pemukiman, pertanian dan industri (Davies, 2019); dan (iv) geografi memberi gambaran potensi pengembangan wilayah. Ilmu geografi bersama-sama dengan bidang ilmu-ilmu eksakta dan ilmu sosial lainnya dapat menggambarkan bagaimana perubahan iklim terjadi dan menggambarkan bagaimana dampaknya pada kehidupan manusia.

Kombinasi dari karakteristik penduduk (demografi) dan geografi menentukan bagaimana perencanaan pembangunan dibuat dan mengupayakan agar capaian baik dari pembangunan dapat dinikmati secara berkesinambungan (Marsiglio et al., 2018). Aspek penduduk dan geografi sama-sama merupakan input dalam proses produksi dan pelaksanaan pembangunan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km² (28,1 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu 127.267,52 km²). Wilayah tersebut terbagi menjadi 18 (delapan belas) wilayah administrasi kecamatan. Jumlah desa di setiap kecamatan bervariasi antara 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) desa. Kecamatan Muara Wahau merupakan wilayah



kecamatan terluas, yaitu 5.742,32 ha. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki kelurahan di samping desa, yaitu Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Rincian Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Kutai Timur disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa		Luas	
		Desa	Kelurahan	Km ²	%
1	Muara Ancalong	9		2.739,30	7,66
2	Busang	6		3.721,62	10,41
3	Long Mesangat	7		526,98	1,47
4	Muara Wahau	10		5.724,32	16,01
5	Telen	8		3.129,61	8,75
6	Kombeng	7		581,27	1,63
7	Muara Bengkal	7		1.522,80	4,26
8	Batu Ampar	7		204,50	0,57
9	Sangatta Utara	3	1	1.262,59	3,53
10	Bengalon	11		3.196,24	8,94
11	Teluk Pandan	6		831,00	2,32
12	Rantau Pulung	9		1.660,85	4,65
13	Sangatta Selatan	3	1	143,82	0,40
14	Kaliorang	7		3.322,58	9,29
15	Sangkulirang	15		438,91	1,25
16	Sandaran	9		3.419,30	9,57
17	Kaubun	8		257,45	0,72
18	Karangan	7		3.064,36	8,57
Kabupaten Kutai Timur		139	2	35.747,50	100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Kabupaten Kutai Timur mengalami 2 (dua) kali pemekaran kecamatan. Semula kabupaten ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan; dimekarkan menjadi 11 (sebelas) kecamatan (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999); dan dimekarkan lagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan (Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005). Sementara itu, rata-rata luas desa tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Sangkulirang dengan luas 438,91 (1,25 persen) memiliki 15 (lima belas) desa; sebaliknya Kecamatan Muara Wahau seluas 5.724,32 (16,01 persen) hanya memiliki 10 (sepuluh) desa.

2) Letak Astronomis dan Posisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Kutai Timur terletak pada koordinat 115°58'37" Bujur Barat – 118°59'31.37" Bujur Timur dan 1°50'42" Lintang Utara - 0°0'32" Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur berbatasan langsung dengan: Kabupaten Berau, Kabupaten

Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Peta batas wilayah Kabupaten Kutai Timur ditunjukkan dalam Gambar 2.1 di bawah ini.



Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Kutai Timur

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur memberi banyak potensi strategis bagi Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam berinteraksi dengan dunia luar. Pembangunan fasilitas transportasi yang memadai akan mendukung Kabupaten Kutai Timur dalam berinteraksi kegiatan ekonomi dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Potensi posisi strategis tersebut dapat dikaitkan dengan luas wilayah sebagai berikut:

- Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan. Jalur ini menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II)-Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I-Ibu Kota Provinsi)-Balikpapan (Kota Orde I)-Kabupaten Penajam Pasir Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Keberadaan jalur regional Trans Kalimantan ini akan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan kedalam Kabupaten Kutai Timur. Distribusi barang dan jasa yang lancar akan memicu aktivitas ekonomi, yaitu produksi dan konsumsi yang semakin tinggi.
- Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang 152 km (sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW). Namun dalam perhitungan yang baru, wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur ditemukan sepanjang \pm 522 km. Wilayah perairan ini berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Bagian Laut Kalimantan Timur merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini diatur dalam PP



Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan. Hal ini yang menyebabkan posisi Kutai Timur menjadi posisi strategis; karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

3) Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi, yang terdiri dari: pantai, dataran, berbukit hingga pegunungan pantai. Wilayah daratan mempunyai ketinggian tanah yang bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15 persen, dengan total luas wilayah 2.516.233 ha (76,37 persen dari total luas lahan). Sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Timur juga berupa lereng. Rata-rata wilayah memiliki luas lereng di atas 40 persen. Kondisi ini tersebar di seluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut. Di bagian wilayah ini, rata-rata ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik topografi seperti ini termasuk kategori lahan kritis, karena area ini berpotensi mengalami degradasi lingkungan berupa erosi tanah.

Wilayah Kabupaten Kutai dengan kelerengan di bawah 15 persen (<2 s.d. 15), merupakan kawasan yang relatif datar dan landai. Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah dataran seluas 778.686 ha (23,63 persen). Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong serta sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Kecamatan Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur dan bukit Karst. Pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu masing-masing 1.608.915 ha dan 1.429.922,25 ha. Kabupaten Kutai Timur memiliki gunung sebanyak 9 buah. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Menyapa, dengan ketinggian mencapai 2000 m. Selain pegunungan dan perbukitan, wilayah ini juga memiliki dataranlandai seluas 536.212,5 ha yang terdiri dari dataran, rawa serta sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat hampir di seluruh kecamatan. Menurut peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) pada tahun 2016, Kabupaten Kutai Timur memiliki kurang lebih 282 sungai, dengan total panjang 6.151,9 km, diantaranya sebanyak 63 sungai besar dengan panjang 3.353,6 km. Terdapat 12 sungai terpanjang di Kutai Timur, disajikan dalam Tabel berikut:



Tabel 2.2
Sungai Terpanjang di Kabupaten Kutai Timur

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Telen	334,00
2	Sungai Bengalon	235,50
3	Sungai Kelinjau	206,50
4	Sungai Wahau	187,50
5	Sungai Antan	176,50
6	Sungai Sangatta	159,50
7	Sungai Manubar	153,40
8	Sungai Senyur	121,80
9	Sungai Marah	112,30
10	Sungai Karang	110,30
11	Sungai Kedang Kepala	93,50
12	Sungai Pesah	82,90
Panjang Sungai (Total)		1.973,70

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa Kecamatan. Kecamatan Muara Bengkal memiliki 4 danau, yaitu: (1) Danau Gelombang 7,56 ha; (2) Danau Ngayantua seluas 1.900ha; (3) Danau Padam Api seluas 511,36 ha; (4) Danau Karang dengan luas 750 ha. Kecamatan Muara Ancalong juga memiliki 3 danau, yaitu: (1) Danau Empaif seluas 6,46 ha; (2) Danau Kliring seluas 9,90 Ha; (3) Danau Setepus seluas 7,25 ha. Kecamatan Teluk Pandan memiliki Danau Redan seluas 6,66 ha. Sumber mata air lainnya yang juga menyerupai danau, dan masih dalam proses identifikasi nama, diantaranya: (1) Danau Tapal Kuda seluas 353,43 ha; dan (2) Danau/situ seluas 1.661,82 ha.

Tabel 2.3
Kondisi Topografi Daratan Kabupaten Kutai Timur

No	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Kemiringan (derajat)	Luas (ha)
1	Bakunan	Lembah-lembah kecil diantara perbukitan	< 2	15.717
2	Gambut	Rawa-rawa gambut yang dalam dengan permukaan umumnya lengkung	< 2	31.199
3	Kajapah	Dataran lumpur didaerah pasang surut dibawah bakau dan nipah	< 2	25.84
4	Klaru	Dataran banjir yang selalu tergenang	< 2	16.831
5	Sebangau	Jalur kelokan sungai-sungai besar dengan tanggul yang lebar	< 2	14.161



No	Sistem Lahan	Deskripsi Umum	Kemiringan (derajat)	Luas (ha)
6	Kahayan	Dataran pantai/sungai yang tergabung	2 s/d 8	19.097
7	Kapor	Dataran karst yang berombak mengandung karst kecil-kecil	2 s/d 8	30.394
8	Lawanguang	Dataran batuan berombak hingga bergelombang	2 s/d 8	434.835
9	Pakau	Teras-teras berpasir berombak	2 s/d 8	188.834
10	Sungai Medang	Dataran vulkanik bergelombang	9 s/d 15	1.778
11	Gunung Baju	Dataran karst berbukit kecil	16 s/d 25	111.691
12	Teweh	Dataran batuan endapan berbukit kecil	16 s/d 25	809.91
13	Beriwit	Kuesta-kuesta bergunung batupasir dengan arah lereng tertoreh	26 s/d 40	35.058
14	Tewai Baru	Dataran bukit kecil dengan punggung terjal sejajar	26 s/d 40	95.545
15	Maput	Perbukitan batuan bukan endapan yang tidak simetris	41 s/d 60	530.667
16	Mantalat	Kelompok punggung panjang batuan endapan, dengan arah lereng	41 s/d 60	3.194
17	Pendereh	Pegunungan batuan endapan yang tidak teratur	41 s/d 60	738.127
18	Bukit Pandan	Kelompok punggung gunung batuan bukan endapan	> 60	32.027
19	Batu Ajan	Gunung-gunung apitertoreh dengan pola drainase radial	> 60	2.604
20	Lohai	Kelompok punggung gunung yang panjang dan sempit	> 60	39.891
21	Okki	Punggung-punggung dan gunung karst yang curam	> 60	117.519

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007

Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 meter di atas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat.

Tabel 2.4
Luas Kawasan Bukit Karst di Kutai Timur

No	Kawasan Bukit Karst	Luas (ha)
1	Batu Aji	3.538,80
2	Batu Lepoq	6.496,00
3	Batu Onyen	6.681,59
4	Batu Thayib	44,76
5	Batu Tumok	16,47
6	Gunung Gergaji	5.832,58
7	Karangan	27.756,10
8	Kongbeng	90,65
9	Kulat	12.846,91
10	Mandu Dalam	370,52
11	Pengadan	997,52



No	Kawasan Bukit Karst	Luas (ha)
12	Sandaran	56.255,08
13	Sekerat	9.052,60
14	Susuk	30.020,19
15	Teluk Bakung	2.235,50
16	Tepian Terap	498,01
17	Tutunambo Nyere	9.191,03
Total Luas Bukit Batu Karst		171.924,31

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Luasan bukit karst di atas tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 140K/40/MEM/2019 Tanggal 30 Juli 2019. Dalam Surat Keputusan yang terakhir ditetapkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki 17 zona bentangan alam bukit karst. Hal ini disajikan dalam Tabel 2.4.

Total wilayah yang berupa daratan dan bukit karst di Kabupaten Kutai Timur tercatat sekitar 140.000-an ha. Jenis topografi wilayah yang berbentuk karst pada umumnya mampu menyimpan air antara tiga hingga empat bulan setelah berakhirnya musim penghujan (Endah dkk, 2017). Endapan karst dapat mengeluarkan air secara perlahan-lahan ke bawah tanah dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di sisi lain, ahli geologis menjelaskan bahwa batuan karst juga berperan untuk proses mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan CO₂ (Utama, 2016). Dengan demikian secara alamiah topografi daratan Kabupaten Kutai Timur dapat menjamin keberlangsungan sumber air bersih dan air irigasi bagi masyarakat namun juga menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem.

4) Geologi

Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, dan podsol. Secara geologi Kabupaten Kutai Timur hampir sebagian besar didominasi oleh formasi pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta *alluvium* yang tersebar di sepanjang pantai. Terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kwarter. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat. Berdasarkan aspek geologi, wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur tersusun dari 21 jenis formasi, namun 9 yang terluas sebagai berikut.



Tabel 2.5
Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur

No	Sistem Lahan	Luas (Ha)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.840
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-teras	70.105

Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

Kondisi lereng yang terjal mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air dan memicu terjadinya erosi. Hal ini menyebabkan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Wilayah dataran Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah jenis: podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol. Tanah-tanah dalam jenis ini memiliki tingkat kesuburan yang rendah.

5) Hidrologi

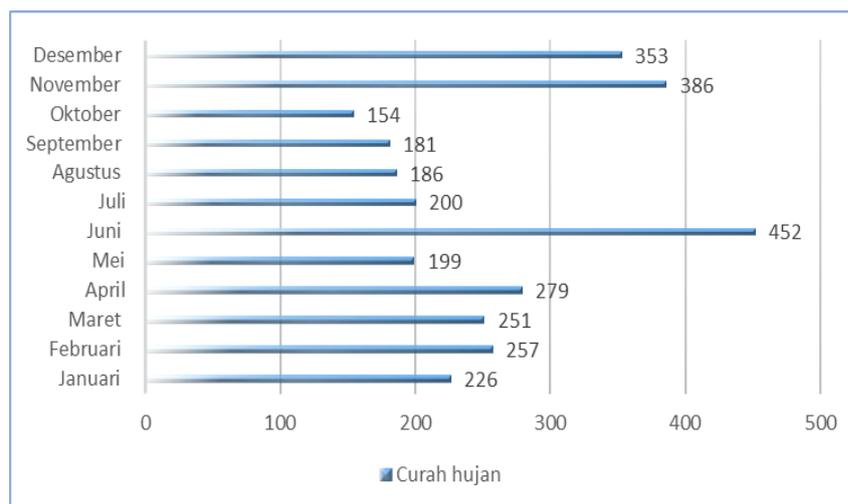
Wilayah perairan di Kabupaten Kutai Timur berupa laut/pantai, sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan. Sungai terpanjang adalah Sungai Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara Wahau, dengan panjang 319 km. Terdapat dua Danau yang terletak di Kecamatan Mura Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 ha dan Danau Karang seluas 750 ha. Wilayah pantai berada disebelah Timur Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombok dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media perairan marikultur komoditi perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).

6) Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur mempunyai iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26°C. Perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°-7°C. Data BPS menunjukkan rata-rata curah hujan (CH) adalah 154-454 mm/bulan pada saat musim hujan. Curah hujan perlu diperhartikan agar tanaman pertanian tidak terlalu kekeringan atau terlalu banyak air. Informasi

curah hujan ini dapat membantu petani khususnya petani tanaman pangan untuk menyesuaikan pola tanam.

Menurut data BPS tahun 2019, Curah Hujan (CH) relatif tinggi ada pada bulan Juni, November dan Desember. Tabel di bawah ini membandingkan jumlah Hari Hujan (HH) dan Curah Hujan (CH) per kecamatan pada tahun 2018. Informasi tentang curah hujan dan hari hujan digunakan petani untuk menyesuaikan jenis tanaman yang akan ditanam, agar komposisi perkiraan volume air yang tersedia dari curah hujan dapat dimanfaatkan oleh tanaman seoptimal mungkin.



Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2019

Gambar 2.2
Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Dalam 3 (tiga) bulan yang diperbandingkan, jumlah HH hampir di atas 10 (sepuluh) hari pada bulan Januari hanya ada di beberapa kecamatan, yaitu: (i) Muara Ancalong; (ii) Muara Wahau; (iii) Long Mesangat; (iv) Telen; (v) Sangatta Utara; dan (vi) Sangatta Selatan.

Tabel 2.6
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Bulan Januari, Juli dan Desember di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

Kecamatan	Januari		Juli		Desember	
	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)
Muara Ancalong	12	290	14	310	8	124
Muara Wahau	19	303	11	175	9	398
Muara Bengkal	11	233	11	576	13	230
Sangatta Utara	13	659	17	647	22	969
Sangkulirang	9	114	11	148	16	233



Kecamatan	Januari		Juli		Desember	
	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)
Busang	10	98	10	111	11	105
Telen	14	105	12	55	7	231
Kongbeng	10	404	7	201	4	108
Bengalon	11	165	16	92	13	142
Kaliorang	9	130	12	164	9	235
Sandaran	<i>na</i>	<i>na</i>	<i>na</i>	<i>Na</i>	<i>na</i>	<i>na</i>
Sangatta Selatan	14	281	13	112	15	1.543
Teluk Pandan	8	247	6	128	7	231
Rantau Pulung	2	76	6	123	16	233
Kaubun	8	45	9	148	8	294
Karangan	6	63	6	107	10	340
Batu Ampar	10	293	11	161	9	278
Long Mesangat	15	336	14	145	10	257

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2019

Pada bulan Januari jumlah HH relatif semakin lama dibanding bulan Juli. Hal ini terjadi di beberapa kecamatan, yaitu: (i) Muara Wahau; (ii) Telen; (iii) Kongbeng; (iv) Sangatta Selatan dan (v) Long Mesangat. Jumlah HH lebih dari 14 hari (dua minggu berturut-turut) terjadi di beberapa kecamatan pada bulan Desember; yaitu: (i) Sangatta Utara; (ii) Sangatta Selatan; (iii) Rantau Pulung, dan (iv) Sangkulirang. Variasi jumlah hari hujan (HH) dan curah hujan (CH) ini hendaknya diperhatikan untuk mendukung produksi dan produktivitas pertanian. Air merupakan komponen utama kesuburan tanah sehingga kondisi curah hujan perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan pola musim tanam di sektor pertanian.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi. Sebanyak 43,08 persendiantaranya merupakan kawasan hutan. Hutan di Kutai Timur diklasifikasikan menjadi: Hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan Rawa, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman. Hutan Primer sebagian besar berada pada daerah pegunungan yang tersebar pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 56,14 persen yang didominasi oleh belukar dan rawa. Luas wilayah hutan dan non hutan masing-masing sebesar 37,65 persen dan 5,76 persen.

Lahan pertanian sebanyak 9,28 persen atau sekitar 296.119,33 ha. Berdasarkan jumlah ini dibagi untuk pemanfaatan perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Penggunaan lahan untuk perikanan masih sangat kecil. Potensi sumber daya ikan sangat besar di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan hendaknya lebih dioptimalkan, baik



dalam bentuk kolam maupun perairan umum. Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur paling banyak untuk aktivitas pertambangan batubara yaitu sebesar 0,70 persen atau sekitar 22.410,51 ha.

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Menurut Kawasan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kawasan	Luasan (Ha)
I	Kawasan Lindung	722.935,06
-	Hutan Lindung	397.098,56
-	Kawasan Resapan Air	9.646,38
-	Konservasi Mangrove	12.626,87
-	Kawasan Gambut	33.611,32
-	Karst	58.133,11
-	KSA/KPA	187.877,62
-	Hutan Kota	41,92
-	Taman Wisata Alam	33,88
-	Tubuh Air	23.865,39
II	Kawasan Budidaya	2.612.287,15
-	KBK	1.491.841,86
-	KBNK	1.120.445,29
III	Kawasan Budidaya Kehutanan	1.491.841,86
-	Hutan Produksi	668.924,10
-	Hutan Produksi/APL	21.809,49
-	Hutan Produksi/HPK	24.078,43
-	Hutan Produksi Konversi	61.739,10
-	Hutan Produksi Konversi/APL	707.832,82
-	Hutan Produksi Terbatas/APL	468,32
-	Hutan Produksi Terbatas/HPK	5.449,35
IV	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	1.120.445,29
-	Perkebunan	892.580,59
-	Permukiman Perkotaan	9.517,62
-	Permukiman Perdesaan	77.396,83
-	Kawasan Bukit Pelangi	280,25
-	Pertambangan	17.521,16
-	Pertanian Tanaman Pangan/Kaw. Food Estate	62.546,78
-	Kawasan Industri	4.942,02
-	Waduk/Bendungan	3.440,56
-	KIPI/Maloy	5.272,44
-	Kawasan Pelabuhan	120,94
-	Pelabuhan Batubara	578,30

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2014

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dibagi dalam pengembangan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Sistem perwilayahan ini menggambarkan satuan wilayah kabupaten yang memiliki pusat di suatu kota kecamatan, dan dijadikan sebagai pusat kegiatan perwilayahan tersebut. SSWP di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

- SSWP Pusat meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Rantau Pulung dan Bengalon;
- SSWP Timur meliputi Kecamatan Karang, Kaubun, Kaliorang, Sangkulirang, dan Sandaran;
- SSWP Utara meliputi Kecamatan Kongbeng, Telen dan Muara Wahau;
- SSWP Selatan meliputi Kecamatan Batu Ampar, Busang, Long Mesangat, Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Potensi masing-masing kawasan di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8
Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Potensi
1.	Muara Ancalong	<ul style="list-style-type: none">- Tanaman pangan: padi ladang, jagung, ubi kayu- Buah-buahan: durian, jeruk, mangga, pisang- Perkebunan: kelapa sawit, kakao dan karet- Perikanan tangkap dan budidaya darat- Konservasi fauna: buaya supit dan bodas
2.	Busang	<ul style="list-style-type: none">- Tanaman pangan: padi ladang, jagung, ubi kayu- Buah-buahan: durian, pisang, jeruk- Perkebunan: kelapa sawit rakyat, kakao- Wisata budaya- Konservasi Fauna: Orangutan (Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia)- Potensi bahan galian dan tambang: berupa emas dan besi
3.	Long Mesangat	<ul style="list-style-type: none">- Tanaman pangan: padi sawah, jagung, kacang tanah- Sayur mayur: kacang tanah, petsai/sawi putih, cabai- Budidaya perikanan darat
4.	Muara Wahau	<ul style="list-style-type: none">- Perkebunan: kelapa sawit, HPH- Pertambangan: batubara- Wisata Budaya dan Hutan Lindung Wehea
5.	Telen	<ul style="list-style-type: none">- Perkebunan: kelapa sawit, kakao dan karet- Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas
6.	Kongbeng	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi sawah- Perkebunan: kelapa, kakao, lada, karet, kelapa sawit



No	Kecamatan	Potensi
		<ul style="list-style-type: none">- Peternakan: sapi, kerbau, ayam potong- Pariwisata: wisata budaya dan wisata geologi (Karst)
7.	Muara Bengkal	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi ladang, ubi kayu, jagung, kedelai- Perkebunan: kelapa sawit, karet- Perikanan: tangkap dan budidaya- Pariwisata: danau gelumbang
8.	Batu Ampar	<ul style="list-style-type: none">- Perkebunan: kelapa sawit, karet dan lada- Peternakan: ayam kampung, kambing, itik- Perikanan: tangkap tradisional- Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.
9.	Sanggata Utara	<ul style="list-style-type: none">- Pertambangan: tambang batubara- Perdagangan dan jasa.- Kawasan wisata konservasi orang utan dan ekowisata
10.	Bengalon	<ul style="list-style-type: none">- Pertambangan: tambang batubara- Perkebunan: kelapa sawit, karet dan kakao- Perikanan: tangkap dan budidaya- Pariwisata: bahari dan geologi
11.	Teluk Pandan	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi sawah dan genjah- Perikanan: budidaya tambak- Perkebunan: kakao- Buah-buahan: pisang
12.	Rantau Pulung	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi ladang, jagung- Perkebunan: kelapa sawit- Peternakan: ayam potong dan itik
13.	Sanggata Selatan	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: jagung- Peternakan: ayam, sapi, kambing- Perikanan: budidaya perikanan dan perikanan tangkap- Potensi wisata bahari dan ekowisata
14.	Kaliorang	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi sawah, jagung- Sayur-mayur: cabai, sawi- Peternakan: sapi, kambing, ayam potong- Perkebunan: kelapa sawit, kakao, kelapa- Buah-buahan: pisang, jeruk- Pariwisata: bahari dan ekowisata- Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK)- Perikanan: tangkap dan budidaya- Pertambangan: potensi galian besi, gipsum dan pasir kuarsa
15.	Sangkulirang	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi ladang- Perikanan: budidaya (darat dan laut)- Perkebunan: kelapa sawit dan karet- Peternakan: sapi, kerbau, itik, ayam
16.	Sandaran	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi ladang, jagung- Perikanan: darat dan laut- Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, kakao- Buah-buahan: durian, rambutan, jeruk, pisang- Pariwisata: bahari dan geologi (Karst)
17.	Kaubun	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi sawah



No	Kecamatan	Potensi
		<ul style="list-style-type: none">- Perkebunan: kelapa sawit, kopi, kakao, karet, lada- Sayur mayur: kacang, sawi, cabai- Peternakan besar: sapi, ayam potong, ayam petelor
18.	Karangan	<ul style="list-style-type: none">- Pertanian tanaman pangan: padi ladang- Perikanan darat- Wisata geologi (Karst)- Perkebunan kakao, sawit, pisang- Kehutanan dan hasil hutan

Sumber: BPS, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019 dan 2020

Berikut beberapa potensi-potensi pengembangan kawasan-kawasan di Kabupaten Kutai Timur.

1) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah dan kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Timur, yaitu data Kecamatan Dalam Angka, dapat diklasifikasikan daerah per Kecamatan yang produktif menghasilkan komoditas tertentu sebagai berikut.

- 1) Komoditas padi sawah atau lahan basah adalah: Long Mesangat, Kombeng, Teluk Pandan, Kaliorang, dan Kaibun.
- 2) Komoditas padi ladang atau lahan kering, adalah di Kecamatan: Muara Ancalong, Busang, Muara Bengkal, Rantau Pulung, Sangkulirang, Sandaran, dan Karang.
- 3) Komoditas perkebunan, khususnya tanaman keras: kelapa sawit, kelapa, kopi, karet, dan lada produktif di kecamatan: Sangkulirang, Kaliorang, Rantau Pulung, Muara Wahau, dan Telen.
- 4) Buah-buahan cukup produktif di Kecamatan: Busang, Kaibun, Bengalon, Karang, Kaliorang, Batu Ampar, dan Sandaran.
- 5) Peternakan besar cukup produktif di Kecamatan: Kombeng, Batu Ampar, Rantau Pulung, Kaliorang, Sangkulirang and Kaibun; dan peternakan kecil (unggas) produktif di Kecamatan: Kaliorang dan Kaibun.
- 6) Perikanan darat dan laut cukup produktif di Kecamatan: Muara Ancalong, Long Mesangat, Muara Bengkal, Bengalon, dan Teluk Pandan.
- 7) Pertambangan potensi dikembangkan di Kecamatan: Busang dan Kaliorang. Pariwisata. Potensi pariwisata cukup strategis dikembangkan, dengan rincian sebagai berikut:



- a. wisata alam (hutan, bukit karst dan konservasi fauna), potensial di Kecamatan: Sandaran, Kombeng, Karang, Batu Ampar, Busang, Muara Wahau dan Muara Bengkal;
- b. wisata ekowisata termasuk wisata bahari dan geologi, potensial dikembangkan di Kecamatan: Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Kaliorang, Bengalon dan Sandaran;
- c. wisata budaya potensial dikembangkan di Kecamatan Busang.

2) Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Timur memiliki kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kebijakan pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara sentra produksi dengan pusat pemasaran, sehingga dapat saling menunjang sistem perwilayahan. Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Kutai Timur direncanakan lebih kurang 70.588,63 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan permukiman perkotaan terletak di 3 (tiga) Kecamatan antara lain: Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Kaliorang. Kecamatan Sangatta Utara sebagai pusat kegiatan wilayah dan sentra pemerintahan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Kecamatan Sangatta Selatan juga merupakan bagian dari pusat kegiatan wilayah dan areal Taman Nasional Kutai (TNK). Permukiman perkotaan lainnya yang direncanakan di Kabupaten Kutai Timur berada di Kecamatan Kaliorang sebagai perwujudan dari konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang dialokasikan seluas lebih kurang 126,04 ha.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Hasil pemetaan rawan bencana di kabupaten Kutai Timur, terdapat 6 (enam) bencana yang mengancam yaitu bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, gempa bumi, dan puting beliung. Berikut adalah hasil identifikasi kawasan rawan bencana di Kabupaten Kutai Timur:

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah lokasi yang secara rutin mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat musim hujan. Kawasan rawan bencana banjir memerlukan



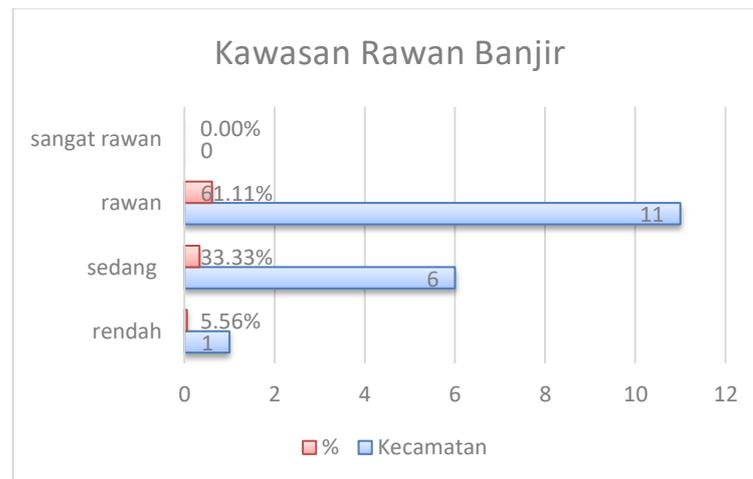
penanggulangan yang intensif dan ramah terhadap pelestarian alam serta kelangsungan hidup ekologi. Upaya penanggulangan banjir dan pelestarian alam yang lebih berorientasi pada kelangsungan hidup ekologi dapat disebutkan sebagai berikut:

- Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya banjir
- Gerakan penghijauan lingkungan
- Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir

Tabel 2.9
Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Kutai Timur

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sangatta utara			√	
Sangatta Selatan			√	
Rantau Pulung			√	
Teluk Pandan		√		
Bengalon			√	
Kaliorang		√		
Sangkulirang	√			
Kaubun		√		
Karangan			√	
Sandaran			√	
Muara Wahau			√	
Telen			√	
Kombeng			√	
Batu Ampar		√		
Muara bengkal			√	
Muara Ancalong			√	
Long Masengat		√		
Busang		√		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Gambar 2.3
Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Kutai Timur

2) Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana gerakan tanah (longsor) merupakan zona yang mudah bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di Kabupaten Timur terdapat beberapa daerah rawan bencana tanah longsor, dengan tingkat kerawanan kategori rendah, sedang dan rawan. Daerah yang rawan mengalami bencana tanah longsor dengan kategori rendah yaitu Pulau Miang (Sangkulirang), batu ampar dan long mesangat (17,65%), sedangkan daerah rawan bencana tanah longsor kategori sedang terdapat hampir di semua kecamatan (58,82%) kecuali Sangatta Selatan, Bengalon, Kaliorang dan Kombeng termasuk dalam daerah kategori rawan bencana tanah longsor (23,53%).

Beberapa kecamatan merupakan kawasan rawan bencana longsor karena mempunyai kelerengan lebih dari 40 persen dan daerah yang berada di aliran sungai dengan arus deras. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana longsor adalah:

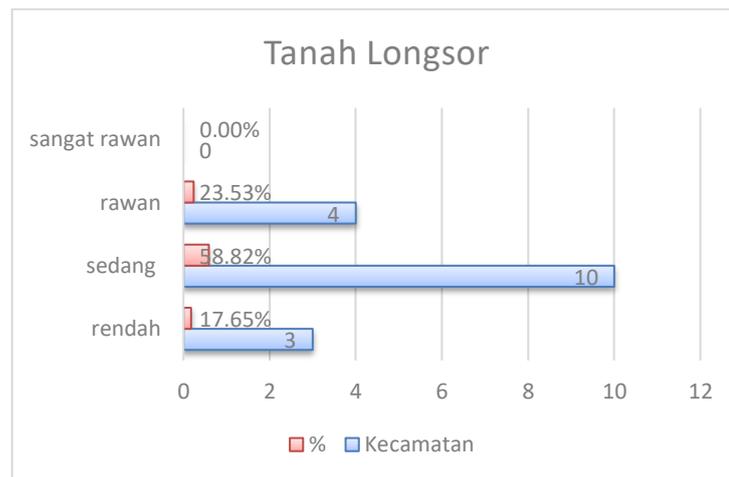
- Membatasi eksploitasi bahan galian
- Gerakan penghijauan lingkungan dengan tanaman yang tepat
- Manajemen pengelolaan dan penanggulangan longsor



Tabel 2.10
Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Kutai Timur

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sangatta utara		√		
Sangatta Selatan			√	
Rantau Pulung		√		
Teluk Pandan		√		
Bengalon			√	
Kaliorang			√	
Sangkulirang	√			
Kaubun		√		
Karangan		√		
Sandaran		√		
Muara Wahau		√		
Telen				
Kombeng			√	
Batu Ampar	√			
Muara bengkal		√		
Muara Ancalong		√		
Long Masengat	√			
Busang		√		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Gambar 2.4
Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Kutai Timur

3) Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Kutai Timur adalah satu daerah yang dikategorikan rawan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan satelit, di wilayah Kutai Timur mulai banyak ditemukan adanya daerah rawan kebakaran. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran. Selain itu, diperlukan peningkatan kesiagaan, mengefektifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta mengambil langkah-langkah konkret secara terkoordinasi dan terpadu untuk mengatasi bahaya kebakaran. Berdasarkan data prediksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur kebakaran lahan berada pada tingkat rawan 50% dan sangat rawan 50%.

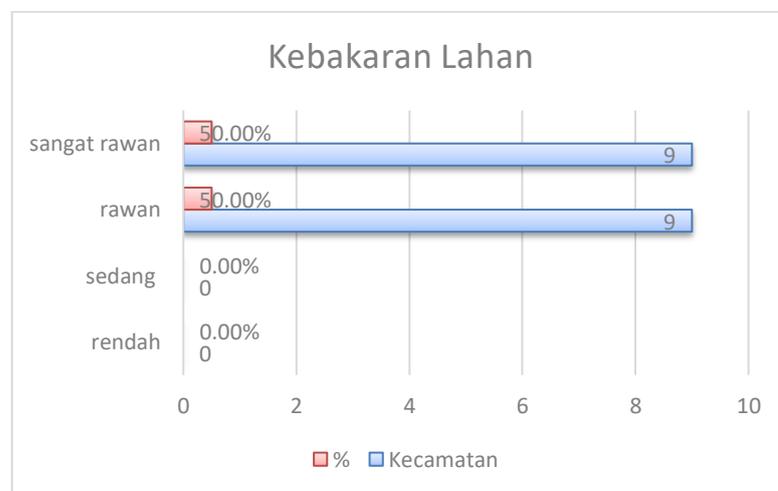
Tabel 2.11
Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Di Kabupaten Kutai Timur

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sangatta utara				√
Sangatta Selatan				√
Rantau Pulung				√
Teluk Pandan			√	
Bengalon				√



KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Kaliorang			√	
Sangkulirang			√	
Kaubun			√	
Karangan				√
Sandaran			√	
Muara Wahau				√
Telen			√	
Kombeng				√
Batu Ampar			√	
Muara bengkal				√
Muara Ancalong				√
Long Masengat			√	
Busang			√	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Gambar 2.5
Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Di Kabupaten Kutai Timur



4) Rawan Bencana Tsunami

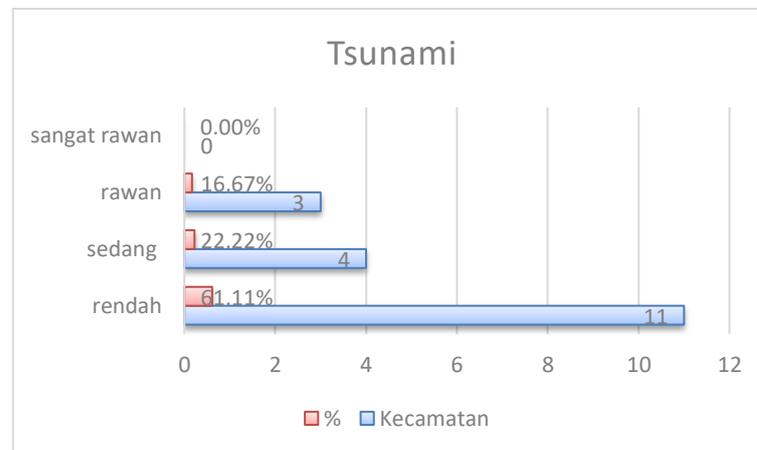
Kabupaten Kutai Timur secara geografis sebagian berada di pesisir pantai dan sedikit pulau menghadapi ancaman bencana berupa tsunami. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur mempunyai ancaman badai tsunami dari rendah hingga rawan bencana seperti ditunjukkan pada Tabel 2.12 berikut. Berdasarkan gambar 2.6, didapatkan gambaran kawasan rawan bencana tsunami dengan status rawan terdapat di tiga daerah yakni, Kaliorang, Sangkuliran dan Sandaran (16,67%) dan empat daerah dalam kondisi sedang (22,22%) dan sisanya sebanyak 11 daerah berada pada katagori rendah bencana tsunami (61,11%)

Tabel 2.12
Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Kabupaten Kutai Timur

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sangatta utara		√		
Sangatta Selatan		√		
Rantau Pulung	√			
Teluk Pandan		√		
Bengalon		√		
Kaliorang			√	
Sangkulirang			√	
Kaubun	√			
Karangan	√			
Sandaran			√	
Muara Wahau	√			
Telen	√			
Kombeng	√			
Batu Ampar	√			
Muara bengkal	√			
Muara Ancalong	√			

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Long Masengat	√			
Busang	√			

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Gambar 2.6
Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Kabupaten Kutai Timur

Beberapa pendekatan untuk Penanggulangan bencana tsunami dapat dilakukan dengan cara:

- Perlindungan garis pantai, contoh: penanaman hutan mangrove.
- Sistem peringatan dini, contoh: alat pendeteksi gempa bumi.
- Pemahaman tentang tsunami; Pendidikan mengenai tsunami.
- Pembentukan Satuan tugas penanganan bencana.

5) Rawan Bencana Gempa Bumi

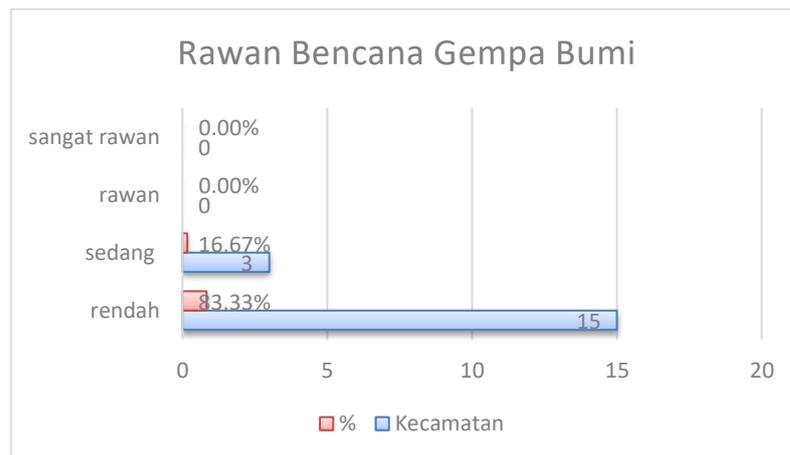
Pulau Kalimantan secara umum tidak mempunyai gunung berapi sehingga bencana gempa bumi relatif tidak terjadi. Khusus di Kabupaten Kutai Timur, rawan bencana gempa bumi secara umum berada pada kondisi rendah sebanyak 15 Kecamatan (83,33%), sisanya sebanyak 3 Kecamatan (16,67%) pada tingkat bencana gempa bumi katagori sedang.



Tabel 2.13
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kutai Timur

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sangatta utara	√			
Sangatta Selatan	√			
Rantau Pulung	√			
Teluk Pandan	√			
Bengalon	√			
Kaliorang	√			
Sangkulirang		√		
Kaubun	√			
Karangan		√		
Sandaran		√		
Muara Wahau	√			
Telen	√			
Kombeng	√			
Batu Ampar	√			
Muara bengkal	√			
Muara Ancalong	√			
Long Masengat	√			
Busang	√			

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Gambar 2.7
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kutai Timur

6) Rawan Bencana Puting Beliung

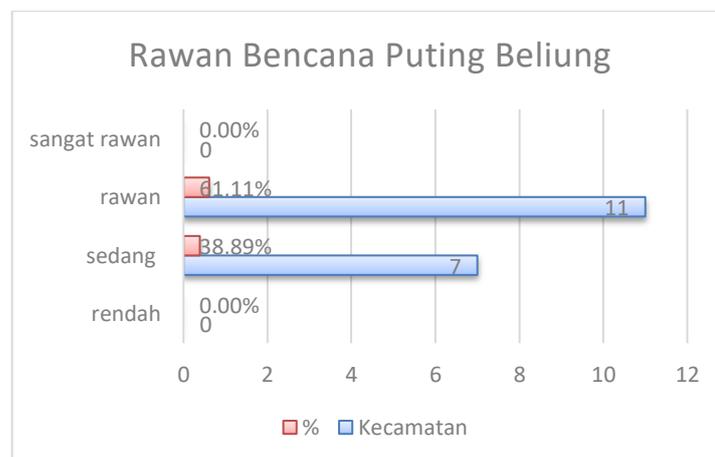
Bencana puting beliung di Kabupaten Kutai Timur perlu mendapatkan perhatian khusus, dari total 18 Kecamatan terdapat 11 Kecamatan (61,11%) yang berada pada kategori rawan dan 7 Kecamatan (38,89%) dalam kategori sedang.

Tabel 2.14
Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung Di Kabupaten Kutai Timur

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sangatta utara			√	
Sangatta Selatan			√	
Rantau Pulung			√	
Teluk Pandan			√	
Bengalon			√	
Kaliorang			√	
Sangkulirang			√	
Kaubun		√		
Karangan		√		

KECAMATAN	RENDAH	SEDANG	RAWAN	SANGAT RAWAN
Sandaran		√		
Muara Wahau		√		
Telen		√		
Kombeng		√		
Batu Ampar			√	
Muara bengkal			√	
Muara Ancalong			√	
Long Masengat			√	
Busang		√		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Gambar 2.8
Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung Di Kabupaten Kutai Timur

2.1.4. Aspek Demografis

Aspek demografis Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari perkembangan dan persebaran penduduk.

1) Perkembangan Penduduk



Perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun terakhir disimak dalam Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	415.553	418.625	420.760	422.905	424.334
2	Pertambahan Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.045	3.072	2.135	2.145	1.429
3	Pertumbuhan Penduduk	0,49	0,73	0,51	0,51	0,33
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	11,62	11,71	11,77	11,83	11,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 mencapai 424.334 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 1.429 jiwa dari tahun sebelumnya sebanyak 422.905 jiwa. Pertumbuhan penduduk sebesar 0,33 persen per tahun. Kenaikan jumlah penduduk juga mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 11,62 jiwa/km² (2016) menjadi sebesar 11,87 jiwa/km² (2020).

Sejak tahun 2016 hingga 2020 Kabupaten Kutai Timur mempunyai penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki sebesar 226.969 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 197.365 jiwa. Perbedaan komposisi demografis ini dapat dimungkinkan oleh adanya migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk laki-laki lebih banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan.

Tabel 2.16
Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2020

Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Muara Ancalong	6.916	6.151	7.069	6.308	7.525	6.753	7.671	6.903	7.657	6.832
Muara Wahau	14.333	12.093	15.193	12.821	15.749	13.438	16.151	13.946	16.546	14.284
Muara Bengkal	7.339	6.493	7.504	6.674	7.544	6.802	7.599	6.888	7.495	6.746
Sanggatta Utara	65.425	54.430	65.837	55.118	67.721	57.068	66.063	57.082	65.353	57.486
Sangkulirang	12.257	10.574	12.298	10.608	12.282	10.792	12.578	11.013	12.461	11.040
Busang	3.283	2.891	3.294	2.887	3.312	2.868	3.248	2.805	3.129	2.761
Telen	6.316	5.309	6.231	5.244	5.976	4.990	5.935	4.971	5.824	4.928
Kongbeng	15.007	12.990	15.257	13.187	15.385	13.351	15.807	13.908	16.181	14.323
Bengalon	24.043	19.043	23.643	18.959	22.530	18.262	22.633	18.634	22.403	18.751
Kaliorang	7.776	6.669	7.780	6.668	7.782	6.649	8.024	6.833	8.278	7.055



Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sandaran	6.828	5.318	6.898	5.347	6.503	5.209	6.583	5.343	6.500	5.420
Sanggata Selatan	17.166	14.263	17.211	14.374	17.047	14.432	16.718	14.380	16.558	14.419
Teluk Pandan	9.187	7.319	8.998	7.180	8.662	7.048	8.336	6.950	8.016	6.917
Rantau Pulung	5.831	5.125	5.858	5.143	6.110	5.350	6.333	5.594	6.528	5.777
Kaubun	8.638	7.062	8.676	7.049	8.408	6.860	8.466	7.067	8.531	7.263
Karangan	8.087	6.463	8.044	6.332	7.336	5.932	7.175	5.912	7.281	6.095
Batu Ampar	3.900	3.346	3.977	3.409	4.216	3.616	4.325	3.727	4.294	3.775
Long Mesangat	4.127	3.555	4.058	3.491	3.890	3.362	3.893	3.411	3.934	3.493
Jumlah	226.459	189.094	227.826	190.799	227.978	192.782	227.538	195.367	226.969	197.365
Jumlah L + P	415.553		418.625		420.760		422.905		424.334	
Rasio Jenis Kelamin	119,76		119,41		118,25		116,47		115,00	
Pertumbuhan (%)	0,49		0,73		0,51		0,51		0,33	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2) Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2020 persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi tiga kecamatan yakni Kecamatan Sanggata Utara (28,95 persen), Kecamatan Bengalon (9,70 persen), dan Kecamatan Sanggata Selatan (7,30 persen).

Tabel 2.17
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016–2020

No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Muara Ancalong	3,14	3,2	3,39	3,45	3,42
2	Muara Wahau	6,36	6,69	6,94	7,12	7,27
3	Muara Bengkal	3,33	3,39	3,41	3,43	3,36
4	Sanggata Utara	28,84	28,89	29,66	29,12	28,95
5	Sangkulirang	5,49	5,47	5,48	5,58	5,54
6	Busang	1,49	1,48	1,47	1,43	1,39
7	Telen	2,8	2,74	2,61	2,58	2,53
8	Kongbeng	6,74	6,79	6,83	7,03	7,19



No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Bengalon	10,37	10,18	9,69	9,76	9,70
10	Kaliorang	3,48	3,45	3,43	3,51	3,61
11	Sandaran	2,92	2,93	2,78	2,82	2,81
12	Sangatta Selatan	7,56	7,54	7,48	7,35	7,30
13	Teluk Pandan	3,97	3,86	3,73	3,61	3,52
14	Rantau Pulung	2,64	2,63	2,72	2,82	2,90
15	Kaubun	3,78	3,76	3,63	3,67	3,72
16	Karangan	3,5	3,43	3,15	3,09	3,15
17	Batu Ampar	1,74	1,76	1,86	1,9	1,90
18	Long Mesangat	1,85	1,8	1,72	1,73	1,75
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Pada Tahun 2020, persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara masih mendominasi jumlah penduduk (28,95 persen) di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota kabupaten dan adanya perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC). Sebaliknya persebaran penduduk di kecamatan lain, terutama pada kecamatan pemekaran dan kecamatan yang aksesibilitas sangat rendah, sebaran penduduk masih belum merata, yaitu kurang dari 2 persen: seperti di Batu Ampar (1,90 persen), Long Mesangat (1,75 persen), dan Busang (1,39 persen).

Jumlah penduduk Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh arus migrasi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi pendatang terutama yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari *dependency ratio* sebagai daerah terbuka yang terkenal adanya potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga menyebabkan mobilitas penduduk yang terjadi cukup tinggi, terutama datang untuk bekerja/mencari kerja, dimana sebagian besar berusia produktif (usia 16-40).



Tabel 2.18
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016–2020

No	Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
1	0 – 4	22.322	20.195	21.584	23.105	22.550
2	5 – 9	43.805	43.506	42.302	42.603	42.207
3	10 – 14	40.471	41.215	42.256	43.328	44.012
4	15 – 19	34.893	36.567	38.336	38.903	39.817
5	20 – 24	38.976	37.199	37.377	38.365	38.018
6	25 – 29	45.496	44.144	41.412	38.624	38.777
7	30 – 34	45.009	45.129	42.337	39.655	38.735
8	35 – 39	40.323	41.130	40.336	38.699	39.709
9	40 – 44	32.130	32.803	33.761	34.160	34.096
10	45 – 49	26.101	26.954	27.043	27.642	29.119
11	50 – 54	17.251	18.792	20.382	21.208	21.795
12	55 – 59	11.956	12.529	13.116	14.082	14.557
13	60 – 64	7.260	7.960	8.604	9.762	9.464
14	65 – 69	4.612	5.036	5.703	5.681	5.510
15	70 – 74	2.485	2.665	2.999	3.375	3.044
16	75 +	2.463	2.832	3.212	3.713	2.924
Jumlah		415.553	418.625	420.760	422.905	424.334

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Data kependudukan khususnya yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur bermanfaat untuk mengetahui beban atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Manfaat integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di Kabupaten Kutai Timur menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Hal ini berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth*). Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, dimana perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal. Selain itu juga, hal yang lebih penting adalah adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di suatu wilayah.



Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: (1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk; (2) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; dan (3) Menyediakan data dan informasi kependudukan guna perencanaan pembangunan daerah. Kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil sangat penting untuk mendukung pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun RPJMD lima tahun mendatang. Adapun isu strategis terkait dengan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah:

1. Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran masih rendah. Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta kelahiran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yakni dengan melakukan inovasi pelayanan. Inovasi yang dimaksud aparatur pemerintah proaktif bekerjasama dengan rumah sakit, Klinik Bersalin, PKH (Pendamping Keluarga Harapan).
2. Target jumlah penduduk yang memiliki KTP–Elektronik. Pemerintah hendaknya memperluas dan menambah petugas lapangan yang secara langsung melayani masyarakat dengan kriteria tertentu untuk perekaman sidik jari. Masyarakat tersebut meliputi: orang jompo, sakit parah, *difable*, cacat mental,serta orang yang bertempat tinggal di wilayah terpencil.
3. Target dan capaian Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah hendaknya mempermudah persyaratan membuat KIA yaitu pengajuan untuk pembuatan KIA secara regular. Penduduk tidak harus datang langsung ke Kantor Dispendukcapil, melainkan dapat juga melalui Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang terdapat di setiap kecamatan atau bahkan kelurahan/desa terdekat.
4. Dokumen tentang Akta Kematian. Layanan ini dapat dipercepat target capaiannya melalui:
 - a) Pembinaan Teknis (Bintek) administrasi kependudukan Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (Lampid) di tingkat RW.
 - b) Membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil tingkat kecamatan kelurahan/Desa yang dapat ditempatkan di setiap wilayah.
 - c) Membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Disdukcapil yang dapat ditempatkan di setiap wilayah yang sulit terjangkau.



5. Peningkatan peralatan SIAK. Hal ini bisa dipercepat dengan: (i) mengalokasikan anggaran peralatan SIAK; dan (ii) memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan sistem daring (*online*) yang *user fiendly* dalam rangka untuk menghemat pengeluaran untuk pembelian peralatan.
6. *Database* penduduk sebanyak 35.538 jiwa belum melakukan perekaman e-KTP. Percepatan capaian target penduduk ber-e-KTP dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga didukung sosialisasi manfaat e-KTP baik bagi masyarakat maupun pemerintah melalui berbagai media, khususnya sosial media.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat difokuskan pada pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Ekonomi mendefinisikan kesejahteraan ekonomi sebagai jumlah dan nilai output yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi dalam sebuah wilayah dalam waktu tertentu. Hal ini dinyatakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten/kota), hal ini disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai pasar (harga dikalikan dengan kuantitas barang/jasa) dari seluruh barang/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

PDRB dapat dinyatakan dengan PDRB hanya berlaku dan PDRB harga konstan. Selisih nilai dari PDRB harga berlaku dengan PDRB harga konstan adalah inflasi. Semakin jauh selisih kedua perhitungan kedua PDRB ini, semakin tinggi faktor inflasi di wilayah bersangkutan. Hal ini berarti tidak terjadi penambahan output secara riil yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan nilai PDRB hanya disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang, bukan disebabkan kenaikan volume output.

Perubahan nilai PDRB riil atau PDRB harga konstan dari tahun ke tahun disebut (laju) pertumbuhan output atau pertumbuhan ekonomi. Secara umum, indikator kesejahteraan ekonomi (PDB dan PDRB) diboboti dengan jumlah penduduk. Nilai PDRB per penduduk disebut juga PDRB perkapita. Semakin besar PDRB semakin sejahtera masing-masing individu di wilayah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila kesejahteraan individu atau nilai PDRB per kapita semakin tinggi di suatu wilayah. Hal ini juga diindikasikan oleh peningkatan dari pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, apalagi dipicu oleh kondisi tertentu (sektoral), akan diikuti oleh indikator lain dalam pembangunan. Indikator tersebut adalah angka kemiskinan dan pemerataan hasil-hasil pendapatan.

Tabel 2.19
Capaian Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{c)}	2020 ^{d)}
1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	-1,07	3,18	2,34	7,97	-3,21
2	PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	89.955.892,62	117.816.985,40	127.779.585,00	133,725,073,90	115.796.044,10
3	PDRB atas dasar harga konstan (juta rupiah)	85.571.498,43	86.458.545,40	88.545.266,40	95.604.475,00	92.585.571,30
4	PDRB perkapita per tahun (juta Rp)	94,92	344,37	353,3	355,54	296,16
5	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	30.840	31.950	33.024	35.310	36.980
6	Persentase penduduk miskin	9,13	9,29	9,22	9,48	9,55
7	IPM	71,1	71,91	72,56	73,49	73,00
8	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	9.960*	10.723	10.614	11.196	10.485

Sumber: a) LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017
b) LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018
c) LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019
d) LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

Informasi Tabel 2.19 dan 2.20 menunjukkan bahwa struktur ekonomi sangat bergantung pada sektor Migas dan Batubara. Pertumbuhan ekonomi tanpa komponen migas dalam tiga tahun terakhir sebelum tahun 2019 cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan tanpa migas dan batubara. Pertumbuhan negatif sempat dialami perekonomian Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016. Data hasil estimasi untuk laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 menunjukkan kondisi sebaliknya yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas menjadi sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2019 ketergantungan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada migas dan batubara semakin tinggi. Ketika Migas tidak bisa berperan banyak, angka pertumbuhan ekonomi turun cukup drastis.



Tabel 2.20
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
2016	94.921.969,38	83.795.053,74	94.529.316,25	83.445.708,60	26.582.533,13	18.750.494,62	1,07	-1,07	1,41
2017	117.816.985,40	86.458.545,40	117.453.051,42	86.163.714,88	31.065.953,33	19.444.194,28	3,18	3,26	3,7
2018	127.779.585,00	88.545.266,40	127.343.063,90	88.228.628,80	31.130.389,30	20.353.474,70	2,34	2,35	5,34
2019*	133.725.073,90	95.604.475,00	133.298.867,00	95.284.358,30	32.927.032,60	21.276.188,80	7,97	8	4,53
2020**	115.796.044,10	92.585.571,30	115.428.197,00	92.258.751,90	34.001.409,80	21.314.282,00	-3,21	-3,23	-0,37

Sumber : BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



2.2.2. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur selama periode 2016-2020 tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara yakni sebesar 80-81 persen dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur dengan migas dan batubara.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat dari Rp94.921.969,38 juta di tahun 2016 menjadi Rp115.796.044,10 juta pada tahun 2020. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada periode 2016-2020 secara berturut-turut yaitu sebesar Rp94.921.969,38 juta, Rp117.816.985,40 juta, Rp127.779.585,0 juta, Rp133.725.073,9 juta, dan Rp Rp115.796.044,10. Sementara PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 secara berturut-turut sebesar Rp26.582.533,13 juta, Rp31.065.953,33 juta, Rp31.130.389,3 juta Rp32.927.032,6 juta dan Rp34.001.409,80 Juta.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari 1,07 persen tahun 2016 menjadi -3,21 persen pada tahun 2020, tanpa migas dari tahun 2016 sebesar -1,07 persen menjadi -3,23 persen pada tahun 2020, serta tanpa migas dan batubara dari tahun 2016 sebesar 1,41 persen menjadi -0,37 persen pada tahun 2020.

Gambaran laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (subsektor pertambangan non migas) yang kontribusinya hingga mencapai 80 persen dari keseluruhan nilai PDRB tahun 2020. Batubara masih menjadi komoditi andalan Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini dikarenakan produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu andalan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dalam mengeksport komoditi non migas khususnya batubara.

Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan potensi batubara, masih merupakan sektor tambang yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur. Namun sebaliknya untuk sektor migas dan sektor lainnya yakni sektor Pertanian belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur. Padahal di dalam visi-



misi kepala daerah terpilih mengedepankan sektor pertanian (agribisnis dan agroindustri). Hal ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar sektor pertanian yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

2.2.3. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan suatu sektor terhadap sektor lainnya di Kutai Timur dapat dilihat dari distribusi persentase suatu sektor terhadap total seluruh sektor dalam membentuk PDRB Kutai Timur. Sektor yang kontribusinya besar setelah sektor Pertambangan dan Penggalan adalah sektor Pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalan dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor pertanian relatif stagnan antara 7-8 persen. Sektor-sektor yang memiliki rata-rata 1-2 persen terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah: (i) Industri Pengolahan; (ii) Konstruksi; (iii) Perdagangan, Hotel dan Perdagangan; (iv) Transportasi dan Pergudangan; (v) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (vi) Jasa Pendidikan.

Sektor dengan kontribusi terkecil (kurang dari 1 persen) adalah: (i) Pengadaan Listrik, Gas; (ii) Pengadaan Air; (ii) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (iii) Informasi dan Komunikasi; (iv) Jasa Keuangan; (v) Real Estate (vi) Jasa Perusahaan (vii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (viii) Jasa Lainnya. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kutai Timur masih belum beranjak dari sektor primer menuju sektor sekunder, termasuk sektor jasa. Sektor lain yang masih perlu ditingkatkan capaiannya adalah sektor-sektor yang memiliki kontribusi 1-2 persen khususnya subsektor perdagangan maupun sektor Hotel dan Restoran perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar agar menjadi sektor pendukung bagi pertumbuhan angkatan kerja pada sektor pertambangan. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.21 di bawah ini.



Tabel 2.21
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020
(Juta Rp)

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	8.225.267,10	9.129.987,80	9.731.513,40	10.233.186,60	10.612.353,80
2	Pertambangan dan Penggalian	75.207.223,14	96.064.874,80	104.293.209,60	109.015.241,90	90.020.255,80
3	Industri Pengolahan	2.826.950,49	3.585.906,20	3.770.792,10	3.860.822,40	4.107.440,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.608,66	10.468,30	12.352,30	13.662,90	15.697,30
5	Pengadaan Air	12.666,34	13.975,30	14.296,80	15.430,70	15.845,30
6	Konstruksi	2.225.632,40	2.248.188,90	2.420.007,30	2.504.525,60	2.570.988,60
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.796.686,19	1.891.655,70	2.205.001,40	2.395.583,00	2.507.306,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.123.716,30	1.188.112,00	1.337.537,10	1.439.980,70	1.486.444,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.976,90	244.767,10	281.520,80	306.518,60	303.061,50
10	Informasi dan Komunikasi	270.654,44	287.943,80	317.298,90	336.875,90	356.188,70
11	Jasa Keuangan	151.173,43	161.293,60	176.845,00	187.387,40	199.006,00
12	Real Estate	301.354,54	318.881,50	346.176,10	366.152,90	381.604,30
13	Jasa Perusahaan	76.436,35	80.051,20	84.294,00	89.829,60	87.889,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.145.704,39	1.121.053,40	1.164.269,40	1.175.706,20	1.213.208,10
15	Jasa Pendidikan	1.021.754,96	1.119.270,20	1.239.355,30	1.360.796,30	1.446.821,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134.649,51	152.251,20	169.756,80	186.520,70	229.157,40
17	Jasa Lainnya	173.508,24	198.304,40	215.358,60	236.852,50	242.775,20
Jumlah		94.921.969,38	117.816.985,40	127.779.585,00	133.725.073,90	115.796.044,10

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dalam lima tahun terakhir (2016-2020) masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Bila diamati lebih lanjut, rata-rata kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kutai Timur selama tahun 2016-2020 telah mencapai 77,74 persen. Apabila nilai PDRB tidak memperhitungkan komponen migas dan batubara, maka sektor pertanian merupakan sektor



yang paling dominan dalam pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2016-2020 telah mencapai 9,16 persen. Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan output (PDRB) ini diikuti oleh sektor industri pengolahan. Rata-rata kontribusi sektor ini selama tahun 2016-2020 sebesar 3,55 persen. Pada masa mendatang, sektor pertanian berpeluang dan diharapkan menjadi sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang bertumpu pada bidang agribisnis.

Tabel 2.22
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	8,69	7,72	7,69	7,69	9,16
2	Pertambangan dan Penggalian	78,92	81,58	81,51	81,42	77,74
3	Industri Pengolahan	3,26	3,01	2,98	2,94	3,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daul Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	2,34	1,87	1,89	1,87	2,22
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,90	1,67	1,72	1,79	2,17
8	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,03	1,05	1,07	1,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,21	0,22	0,23	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	0,29	0,24	0,25	0,25	0,31
11	Jasa Keuangan	0,16	0,14	0,14	0,14	0,17
12	Real Estate	0,32	0,27	0,27	0,27	0,33
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,21	0,94	0,91	0,88	1,05
15	Jasa Pendidikan	1,08	0,94	0,97	1,02	1,25



No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,13	0,13	0,14	0,20
17	Jasa Lainnya	0,18	0,16	0,17	0,18	0,21
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.2.4. PDRB Per Kapita

Ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari komponen nilai PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka secara ekonomi semakin makmur penduduk suatu wilayah. Hal ini bermakna kemampuan memproduksi dan mengonsumsi penduduk di wilayah yang bersangkutan semakin baik. Perkembangan PDRB per kapita dalam komposisi dalam migas, tanpa migas dan tanpa migas dan batubara disajikan dalam tabel 2.23 di bawah ini. Rasio PDRB per kapita tanpa migas dan batubara dibanding nilai PDRB dengan migas berkisar 26 persen pada tahun 2016. Nilai ini nampak semakin turun. Pada tahun 2019, rasio nilai PDRB tanpa migas terhadap PDRB dengan migas hanya 24 persen.

Tabel 2.23
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas dan Batubara
	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
2016	266,4	265,52	76,88
2017	344,37	343,31	90,8
2018	353,3	352,09	86,07
2019*	355,98	354,85	87,98
2020**	296,16	295,21	86,96

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Komposisi PDRB perkapita seperti pada tabel di atas berimplikasi Kabupaten Kutai Timur memerlukan usaha ekstra keras untuk melepaskan dari ketergantungan terhadap hasil tambang yang demikian dominan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor di luar non migas dan non pertambangan melalui kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis. Karena hal ini seiring dengan visi pembangunan



Kabupaten Kutai Timur yang mengedepankan agribisnis sebagai basis penggerak perekonomian di masa mendatang.

2.2.5. Kemiskinan

Salah satu sisi negatif dari pembangunan adalah distribusi aktivitas ekonomi baik dalam sisi produksi maupun konsumsi yang tidak seimbang diantara semua pelaku ekonomi. Beberapa sektor sangat efisien dan produktif, namun sektor yang lain dalam kondisi sebaliknya. Aktivitas pada sektor ekonomi yang efisien akan menyebabkan pendapatan sebagai balas jasa faktor produksi tenaga pada sektor tersebut lebih tinggi dibanding sektor lain. Hal ini yang menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan, dan akhirnya memicu kemiskinan pada kelompok yang berpenghasilan paling rendah.

Teori Konsumsi “Keynes” menyebutkan bahwa kemampuan konsumsi individu dan rumah tangga bergantung pada besaran pendapatan netto yang diterima individu atau rumah tangga yang bersangkutan. Rendahnya kemampuan produksi dan konsumsi pada individu dan rumah tangga ini akan menciptakan kondisi kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan BPS di Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS juga menghitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengurangan penduduk miskin hingga separuh merupakan salah satu target utama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga didunia, yaitu melalui target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mempercepat pencapaian target SDGs, pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya membentuk tim Satgas untuk mempercepat pencapaian SDGs. Secara absolut jumlah penduduk miskin selalu meningkat di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020. Jika dinyatakan dalam bentuk persentase penduduk miskin, angka kemiskinan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, namun kembali meningkat pada tahun 2019. Tabel 2.24 di bawah ini menyajikan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kutai Timur.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	30.170	9,16
2017	31.950	9,29
2018	33.024	9,22
2019	35.314	9,48
2020	36.980	9,55

Sumber : BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

2.2.6. Ketimpangan/ Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur Indeks gini untuk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebesar 0,288 termasuk dalam kategori rendah, sedangkan tahun 2020 meningkat sebesar 0,325. Cukup tingginya ketimpangan di Kabupaten Kutai Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau antar wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.25
Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,314	0,288	0,326	0,346	0,325

Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia adalah menggunakan indikator *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan pembangunan manusia akan tercermin dalam kualitas sumberdaya manusia. Kondisi kualitas sumberdaya manusia sebagai obyek maupun subyek pembangunan tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan untuk menilai tiga komponen dalam kualitas hidup penduduk. Tiga komponen dalam IPM, yaitu: (1) masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH); (2) pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan rata-rata tertimbang baca tulis orang dewasa dan rata-rata tahun bersekolah; dan (3) standar kehidupan (*standard of living*). Komponen yang ketiga ini diukur dengan pengeluaran riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran riil per kapita mencerminkan biaya hidup (Todaro, 2004: 68).

IPM Kabupaten Kutai Timur sebesar 73,00 pada tahun 2020. Angka IPM Kutai Timur masih lebih tinggi dibanding rata-rata IPM Nasional sebesar 71,39; namun masih lebih rendah dibanding rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebesar 76,24. Dibandingkan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur menduduki peringkat keenam setelah Samarinda, Balikpapan, Bontang, Berau dan Kutai Kartanegara dan berada diatas Paser, PPU, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.26, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur berikut :

Tabel 2.26
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2020

No	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	71	71,16	71,61	72,29	72,04
2	Kutai Barat	69,99	70,18	70,69	71,63	71,19
3	Kutai Kartanegara	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
4	Kutai Timur	71,1	71,91	72,56	73,49	73



No	Provinsi/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Berau	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71
6	Penajam Paser Utara	69,96	70,59	71,13	71,64	71,41
7	Mahakam Ulu	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09
8	Balikpapan	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01
9	Samarinda	78,91	79,46	79,93	80,2	80,11
10	Bontang	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02
11	Kalimantan Timur	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24

Sumber : BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

2.2.8. Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Desa Membangun adalah program pembangunan yang difokuskan dan dilaksanakan mulai dari desa dengan harapan akan mewujudkan desa mandiri. Kinerja pembangunan di suatu desa diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Berdasarkan nilai IPD, desa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Ukuran IPD dikembangkan dengan angka indeks komposit. Berdasarkan angka Indeks IPD, desa-desa dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran IPD seperti tabel berikut.

Tabel 2.27
Kategori Desa Berdasarkan Skor dan IPD

Kategori Desa	Skor IPD	IPD
Desa Tertinggal	< 50	Indeks < 0,50
Desa Berkembang	50-74	Indeks 0,50 – 0,74
Desa Mandiri	>75	Indeks > 0,75

Sumber: Bappenas

Tabel 2.28 berikut ini menggambarkan Skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020, pada tahun 2016 skor IPD Kabupaten Kutai Timur 57,74 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 64,12. Peningkatan nilai IPD tersebut diikuti dengan pergeseran kategori desa yang semakin membaik.

Tabel 2.28
Skor Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IPD	57,74	60,67	61,93	63,97	64,12

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Tabel 2.29, menggambarkan perkembangan kategori desa di Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 – 2020, dimana jumlah desa tertinggal mengalami penurunan dari 7 desa di tahun 2019 menjadi 3 desa pada tahun 2020. Sebaliknya, peningkatan terjadi pada katagori desa berkembang dan desa mandiri. Desa berkembang meningkat dari 117 desa pada tahun 2019 menjadi 120 desa pada tahun 2020, sedangkan desa mandiri meningkat dari 15 desa pada tahun 2019 menjadi 16 desa pada tahun 2020.

Tabel 2.29
Kategori Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2020

Kategori Desa	Jumlah Desa				
	2016	2017	2018	2019	2020
Desa Tertinggal	23	12	9	7	3
Desa Berkembang	108	119	116	117	120
Desa Mandiri	4	8	14	15	16
Jumlah Desa	135	139	139	139	139

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Terdapat 5 (lima) variabel atau dimensi utama yang diukur dalam IPD, yaitu:

- 1) Pelayanan Dasar. Dimensi ini mewakili aspek pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Variabel penyusun Pelayanan Dasar adalah:
 - i. Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan;
 - ii. Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan mencakup: rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes dan apotek.
- 2) Kondisi Infrastruktur, mewakili aspek Kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara berkelanjutan. Variabel penyusun kondisi infrastruktur adalah:



- i. Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, warung/kedai makanan, akomodasi hotel/penginapan, serta bank;
 - ii. Ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak;
 - iii. Ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar;
 - iv. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
- 3) Aksesibilitas dan Sarana Transportasi. Hal ini mencakup kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi antar desa. Variabel penyusun aksesibilitas/ transportasi adalah:
 - i. Ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan;
 - ii. Ketersediaan dan operasional angkutan umum dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati.
- 4) Pelayanan Umum. Hal ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya. Variabel penyusun pelayanan umum adalah:
 - i. Penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada beberapa jenis penyakit, diantaranya wabah diare, dan penanganan gizi buruk;
 - ii. Ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
- 5) Penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintahan desa dalam bentuk pelayanan administratif. Variabel-variabel penyusun penyelenggaraan pemerintahan adalah:
 - i. Kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa;

- ii. Kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

2.2.9. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

1) Pendidikan

a) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung berdasarkan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP terkait rata-rata lama sekolah adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.30
Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

No.	Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,69	8,72	9,06	9,18	9,19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2016 adalah 8,69 tahun, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 8,72 tahun dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 9,19 tahun. Apabila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menikmati bangku sekolah setara kelas 3 SMP. Kondisi ini berarti sudah melampaui angka 9 tahun; dan angka ini dapat dimaknai rata-rata penduduk sudah lulus SMP.

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	114,65	125,28	126,29	127,6	126,09
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	95,62	99,2	98,9	104,43	99,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2016–2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 capaian APK SD/MI sebesar 114,65 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar 127,09 persen. Capaian ini jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 113,19 persen di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat sekolah dasar lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah di tingkat sekolah dasar (7-12 tahun). Pada tahun 2020, APM SD/MI sebesar 127,09. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 27,09 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun.

Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi SMP/MTs angka partisipasi kasar (APK) penduduk usia sekolah semakin rendah. Terkait dengan kondisi di Kabupaten Kutai Timur, hal ini mungkin berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua. Kemungkinan lainnya adalah pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga (BPS et al., 2017). Pada tingkat SLTP APK tercatat sebesar 99,18 persen pada tahun 2020. Capaian ini sudah lebih rendah dibanding target RPJMD (minimal 107,67 persen pada tahun 2020).

c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	101,06	109,58	111,18	114,47	117,00
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	75,61	72,11	74,26	75,21	79,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Tabel 2.32 menunjukkan perkembangan APM SD di Kabupaten Kutai Timur meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, dengan peningkatan yang cukup tinggi (15,94 poin) pada tahun 2020 sehingga sudah mencapai 117,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah di Kabupaten Kutai Timur pada tingkat SD/MI. Kondisi yang cukup berbeda terdapat pada pencapaian APM SMP/MTs. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2017, APM SMP/MTs mengalami peningkatan di tahun 2018-2020. Capaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD di tahun 2019 sekitar 81,26 persen.

2) Kesehatan

a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi yang dilahirkan akan bertahan hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1- angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Berdasarkan perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 sebesar 988,45 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 994 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2020. Angka kelangsungan hidup bayi yang semakin tinggi menunjukkan angka kematian bayi di Kutai Timur mengalami penurunan.

Tabel 2.33
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	per 1000 Kelahiran Hidup	987,78	988,45	991	992	994

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Kematian bayi adalah kondisi kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan penyebab kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu kondisi endogen dan kondisi eksogen.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang cukup cepat seperti pada Tabel 2.33 dan sudah tergolong rendah dan sudah berada dibawah target AKB Nasional (16,8 per 1.000 kelahiran hidup) maupun target SDGs yaitu 12,3 per 1.000 kelahiran hidup. AKB mengalami penurunan dari tahun ke tahun, diantaranya terlihat pada penurunan dari 12,2 per 1.000 kelahiran di tahun 2016 menjadi 11,55 per 1.000 kelahiran di tahun 2017, kemudian semakin turun menjadi 6,00 pada tahun 2020.

Capaian penurunan AKB mengindikasikan keberhasilan program-program yang terkait dengan penurunan kematian Ibu (*maternal*) dan Bayi (*neonatal*). Selain itu, kondisi kesehatan ibu-ibu usia produktif usia subur mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa ibu-ibu muda telah memahami arti penting menjaga janin selama kehamilan dengan memakan makanan bergizi dan memeriksakan kesehatannya di tempat sarana kesehatan yang semakin lengkap. Hasil analisis SDKI tahun 2017 menunjukkan pendidikan ibu mempunyai hubungan yang terbalik dengan angka kematian bayi (AKB). AKB cenderung turun signifikan pada kelompok ibu-ibu yang

berpendidikan lebih tinggi. Temuan ini cukup konsisten di berbagai daerah dan antar negara. Rendahnya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Timur dan adanya *trend* menurun dari tahun ke tahun, diduga turut memberikan kontribusi penting dalam peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.34
Angka Kelahiran dan Kematian serta Usia Harapan Hidup
Tahun 2016-2020

Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian bayi/IMR (Per 1000 Kelahiran hidup)	12,2	11,55	9	8	6
Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,41	72,45	72,51	73,03	73,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

b) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kesehatan. AHH juga maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan AHH yaitu rata-rata-tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Tabel 2.34 telah menggambarkan perkembangan AHH di Kabupaten Kutai Timur yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020.

c) Pertanian

Pemanfaatan lahan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penggunaan lahan yang cocok di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan aspek-aspek lain seperti tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan terkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada, maka pola pemanfaatan ruang yang direncanakan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai arahan fungsi kawasan.

**d) Ketenagakerjaan**

Pertumbuhan penduduk di daerah memiliki konsekuensi positif bagi pembangunan, yaitu bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan membawa dampak yang kurang baik apabila tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak akan mendorong peningkatan hasil produksi, jika hanya jika kualitas dari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Tabel 2.35
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016-2020

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%								
Pertanian	52.814	35,69	52.820	35,36	44.075	28,49	52.738	33,97	55.461	31,20
Pertambangan dan Penggalian	16.734	7,24	17.234	11,54	20.554	13,29	32.902	21,19	18.931	10,65
Industri Pengolahan	-	-	-	-	4.634	3	3.807	2,45	4.076	2,29
Listrik, Gas dan Air Bersih	10.653	4,61	10.743	7,19	759	0,49	628	0,4	2.003	1,13
Bangunan	1.741	0,75	1.758	1,18	6.504	4,2	9.467	6,1	10.810	6,08
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.332	4,47	10.332	6,92	12.324	7,97	23.931	15,42	27.591	15,52
Pengangkutan dan Komunikasi	2.995	1,3	3.065	2,05	5.630	3,64	3.417	2,2	19.796	11,14
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	633	0,27	654	0,44	6.170	3,99	244	0,16	33.296	18,73
Jasa-jasa	-	-	-	-	8.692	5,62	2.198	1,42	5.774	3,25
Bidang Lainnya	52.059	22,51	52.759	35,32	45.372	29,33	25.904	16,69	-	-
Pertanian	52.814	35,69	52.820	35,36	44.075	28,49	52.738	33,97	55.461	31,20
Pertambangan dan Penggalian	16.734	7,24	17.234	11,54	20.554	13,29	32.902	21,19	18.931	10,65
Industri Pengolahan	-	-	-	-	4.634	3	3.807	2,45	4.076	2,29



Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	%								
Listrik, Gas dan Air Bersih	10.653	4,61	10.743	7,19	759	0,49	628	0,4	2.003	1,13
Bangunan	1.741	0,75	1.758	1,18	6.504	4,2	9.467	6,1	10.810	6,08
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.332	4,47	10.332	6,92	12.324	7,97	23.931	15,42	27.591	15,52
Pengangkutan dan Komunikasi	2.995	1,3	3.065	2,05	5.630	3,64	3.417	2,2	19.796	11,14
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	633	0,27	654	0,44	6.170	3,99	244	0,16	33.296	18,73
Jasa-jasa	-	-	-	-	8.692	5,62	2.198	1,42	5.774	3,25
Bidang Lainnya	52.059	22,51	52.759	35,32	45.372	29,33	25.904	16,69	-	-
Total	147.961	100	149.365	100	154.714	100	155.236	100	177.738	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja di berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Sektor pertanian, meskipun memiliki nilai tambah yang kecil, namun sektor ini relatif paling stabil dalam masa-masa krisis ekonomi atau kondisi gangguan ekonomi lainnya (Diao, 2010; Gollin et al., 2002; Livingstone, 1968). Surplus tenaga kerja dari sektor formal yang tidak terserap juga dapat diserap oleh sektor pertanian, minimal pada usaha industri agro dan hortikultura (Helliwell et al., 2014). Sektor lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah: (i) Pertambangan; (ii) Perdagangan, Hotel dan Restoran dan (iii) Bidang Lainnya.

2.2.10. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Jati diri dan nilai-nilai budaya daerah hendaknya tetap dipertahankan di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Kutai Timur sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Upaya peningkatan jati

diri masyarakat Kabupaten Kutai Timur seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan.

Perkembangan arus informasi yang semakin baik dan penggunaan media sosial yang semakin intensif, berkaitan dengan semakin mudarnya nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan kepemudaan dan olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan gerak jalan santai.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, *skill*, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan, baik formal maupun non formal yang tepat sasaran. Berikut indikator capaian aspek pelayanan umum urusan pendidikan:

Tabel 2.36
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD (%)	102,62	117,15	118,68	120,06	121,45
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP (%)	115,39	81,06	52,91	76,66	89,63
Rasio Ketersediaan sekolah per satuan penduduk SD	90,14	53,42	52,91	54,66	56,46
Rasio Ketersediaan sekolah per satuan penduduk SLTP	87,85	57,1	57,34	57,29	53,06
Rasio Guru terhadap Murid tingkat SD	16,93	17,98	17,99	17,41	17,84
Rasio Guru terhadap Murid tingkat SMP	13,43	16,99	15,28	14,04	14,92
Pendidikan Anak Usia Dini	99,32	76,04	81,6	75,73	60,57
Angka Putus Sekolah SD (%)	0,1	0,07	0,1	0,05	0,28
Angka Putus Sekolah SLTP (%)	0,42	0,13	0,82	1,01	0,19
Angka Kelulusan SD (%)	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP (%)	100	100	100	100	100
Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,9	92,17	84,11	85,27	77,46
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	95,8	90,93	93,2	94,04	97,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.



APS SD dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, APS SLTP dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang relatif stagnan dan cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2018. APS tingkat SLTP mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

c. Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP/SLTA)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.36 di atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Rasio guru terhadap murid sekolah setingkat SD sejak tahun 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Di sisi lain, sejak tahun 2018 rasio guru SMP terhadap murid mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan.

d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. PAUD memiliki tujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Upaya ini membantu anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Ada dua tujuan diselenggarakannya PAUD, yaitu:

- a) Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.



- b) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Rentang anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas Nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini meliputi: a) *Infant* (0-1 tahun) ; b) *Toddler* (2-3 tahun); c) *Preschool/ Kindergarten children* (3-6 tahun) ; dan d) *Early Primary School* (SD Kelas Awal) (6-8 tahun).

Pada tahun 2016, persentase anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang menikmati PAUD sekitar 99,32 persen. Persentase anak PAUD hingga tahun 2020 masih mengalami fluktuasi, dimana hasil capaian tidak semakin membaik. Angka ini masih cukup jauh dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2020 yaitu 79,04 persen. Hal tersebut dimungkinkan karena pembinaan dan sosialisasi PAUD belum dilakukan secara merata. Selain itu kepedulian pemangku kepentingan dan komponen masyarakat masih terbatas dalam mengembangkan layanan PAUD. Dalam rangka memotivasi seluruh lembaga PAUD sebagai salah satu cara untuk menegakkan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia maka perlu dilaksanakan apresiasi lembaga PAUD berprestasi.

e. Angka Putus Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Secara umum, angka putus sekolah siswa setara SD mengalami trend peningkatan, namun angka putus sekolah setara SMP mengalami peningkatan pada tahun 2020. Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dilakukan dengan peningkatan kesiapan anak bersekolah (*school readiness*).

Berbagai penelitian mengemukakan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di

tingkat sekolah dasar. Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia dini (*early childhood education and development-ECED*) telah meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial terbina dengan lebih baik.

Beberapa penyebab adanya angka putus sekolah disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi geografis tempat tinggal yang biasanya jauh dari lokasi sekolah sehingga menyebabkan siswa tersebut enggan untuk melanjutkan sekolah (Block et al., 2003). Selain itu, faktor ekonomi dan rendahnya partisipasi orang tua menjadi faktor lain yang menyebabkan angka putus sekolah semakin tinggi ke jenjang SMP (Akerlof and Kranton, 2002; Azam and Bhatt, 2012).

f. Angka Kelulusan (SD/SLTP)

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan. Selain itu Angka Lulusan (AL) merupakan indikator output yang memberikan gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.37
Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 (%)

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	100	100	100	100	100
SLTP	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 sebesar 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan tingkat SD dan tingkat SLTP di Kabupaten Kutai Timur cukup baik dimana siswa SD dan SLTP sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase jumlah lulusan yang melanjutkan



ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Angka melanjutkan menjadi indikator yang penting berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menuntaskan pendidikan dasar. Angka ideal AMS adalah 100 persen. Atas capaian ini bermakna semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka siswa melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI dan paket A setara SD terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Tabel 2.38
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,90	92,17	84,11	85,27	77,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Salah satu indikator dari capaian pendidikan adalah Angka Melanjutkan Sekolah (AMS). Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan ini merupakan indikator *outcome* dari pendidikan dasar, khususnya berkaitan dengan kelangsungan pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar. Berdasarkan Tabel 2.38 menyajikan capaian indikator Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2016 hingga 2020 yang masih fluktuatif.

h. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru menetapkan bahwa** Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia



Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi. Terdapat hubungan searah antara kualifikasi akademik guru dengan keberhasilan pendidikan dan kualitas belajar mengajar (Maphoso and Mahlo, 2015). Beberapa kendala yang masih terjadi diantaranya adalah distribusi guru yang tidak merata di perkotaan maupun perdesaan terutama daerah terpencil, sehingga mengakibatkan beberapa guru memiliki beban kerja yang berlebih (Adamson and Darling-Hammond, 2011). Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berarti tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru serta meningkatkan pemerataan distribusinya.

Dalam kondisi normal, infrastruktur sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar di Kabupaten Kutai Timur sudah cukup memadai. Dari sisi gedung sekolah, distribusi sekolah per Kecamatan dan Desa relatif sudah merata. Rasio guru dan murid di Kabupaten Kutai Timur rata-rata sudah memenuhi standar layanan pendidikan, setingkat SD, satu orang guru melayani maksimal 24 orang siswa; dan setingkat SMP satu orang guru maksimal melayani 20 orang murid (Bank-Dunia, 2013). Hingga tahun 2019, sekitar 94 persen guru sudah memenuhi kualifikasi Sarjana Pendidikan (S1) dan Diploma IV. Capaian ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun, kualifikasi pendidikan Guru yang sudah baik belum menjamin bahwa distribusi pendidikan atau spesialisasi Guru untuk semua mata pelajaran sudah merata. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan harus berupaya menjamin distribusi kualifikasi dan keahlian Guru merata diseluruh Kecamatan, agar kualitas pendidikan di Kutai Timur semakin bersaing.

Awal tahun 2020 dunia dan Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pandemi ini berlangsung cukup lama dan mempunyai dampak kesehatan yang cukup signifikan. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagian besar aktivitas ekonomi dibatasi, dan pekerjaan termasuk proses belajar mengajar dilakukan dari rumah (*work from home/WFH*). Hal ini juga berlangsung di Kutai Timur (Diskominfo Kutai Timur, 27 Maret 2020; HalloKaltim, 22 Maret 2020). Kegiatan belajar dari rumah ini dilakukan dengan pembelajaran *online*. Agar kebijakan belajar dari rumah ini dapat berjalan



jalan, dibutuhkan prasarana pendukung berupa media teknologi informasi dan jaringan internet. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) hendaknya memastikan jaringan informasi atau *base transmitter station* (BTS) telah tersedia ke seluruh wilayah desa, terutama wilayah yang terisolir, agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama yang berkontribusi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif. Berikut ini deskripsi indikator dan capaian urusan kesehatan.

Tabel 2.39
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,45	0,51	0,44	0,49	0,51
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Rasio dokter per satuan penduduk	0,35	0,36	0,27	0,23	0,26
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,47	4,2	0,56	0,39	0,54
Rasio Posyandu per satuan balita	7,5	10,41	8	8	7,85
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
Cakupan Puskesmas (%)	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	79,26	75	77,3	80,14	82,27
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	78	61,06	63,2	68,87	70,93
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	87	83,19	85,8	84,07	89,4
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	62,85	61,06	78	83,07	73,76
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (%)	76,69	43,47	76,69	68,26	56,26



Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi (%)	95,04	91,44	88,2	89,9	81,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat dilihat dari beberapa kriteria, yakni lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor keturunan dan perilaku sehat. Di antara empat kriteria tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan kriteria pelayanan kesehatan juga mencakup upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, edukatif. Permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum meliputi: (1) Dana kesehatan yang belum memadai, (2) Belum memadainya jumlah dan tingkat profesionalisme tenaga medis dan paramedis, (3) Mutu layanan medis yang belum baik, (4) Sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki belum maksimal, (5) Mutu gizi masyarakat yang belum layak, dan (6) Wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya secara geografis.

1) Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana pendukung dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya dan semakin baik kualitasnya, akan dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya akan tercapai tingkat kesehatan masyarakat yang baik.

Tabel 2.40 menyajikan variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indikator sarana pendukung pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rasio ini didapatkan dari jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu dibandingkan jumlah penduduk. Jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini diperlukan adanya fungsi dalam pelayanan kesehatan dasar (*essential health care*) dan memerankan puskesmas sebagai *focal point coordinator* sistem PHC (*Primary Health Care*) dalam wilayah kerja, khususnya wilayah perdesaan dan Kecamatan. Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per Kecamatan sudah

menunjukkan kondisi yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Tabel 2.40
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	21	21	21	21	21
Jumlah Poliklinik	33	61	63	74	78
Jumlah Pustu	107	108	109	113	116
Jumlah 1-3	161	190	193	208	215
Jumlah Penduduk	415.553	418.625	420.760	422.905	424.334
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk	0,45	0,51	0,46	0,49	0,51
Jumlah Kecamatan	18	18	18	18	18
Jumlah Desa/Kelurahan	141	141	141	141	141
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Kecamatan	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Rumah sakit menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak hanya sebatas pencegahan tetapi juga aktivitas pengobatan dan rehabilitasi. Dengan demikian pemerintah harus selalu berupaya untuk menyediakan jumlah dan kualitas rumah sakit yang memadai. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Kabupaten Kutai Timur telah mempunyai peningkatan jumlah Rumah Sakit. Sampai dengan tahun 2020, jumlah rumah sakit sebanyak 9 (Sembilan) unit.

Tabel 2.41
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit	7	8	8	8	9
Jumlah Penduduk	413.553	418.625	420.760	422.905	424.334
Rasio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Kinerja Pelayanan sarana kesehatan (Rumah Sakit) dapat diukur dengan: 1) Persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupation Rate (BOR)* yang ideal 60-80 persen; 2) Rata-rata lama rawat seorang pasien atau *Average Length of Stay (ALOS)* yang ideal 6-9 hari; 3) Rata-rata tempat tidur tidak ditempati/*Turn of Interval (TOI)* yang ideal antara 1-3 hari; 4) Angka kematian penderita yang dirawat < 48 jam/*Net Death Rate (NDR)* dengan nilai yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar; 5) Angka kematian umum penderita yang dirawat rumah sakit/*Gross Death Rate (GDR)* dengan angka yang dapat ditolerir maksimum 45.

Jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur akan berimplikasi pada rasio jumlah rumah sakit per satuan penduduk. Kondisi ini masih membutuhkan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu upaya tersebut adalah melaksanakan dan mengevaluasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat memperbaiki rasio rumah sakit per satuan penduduk. Disamping itu kedepan diperlukan adanya arahan untuk percepatan akreditasi rumah sakit baik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Kutai Timur.

3) Rasio dokter per satuan penduduk

Jumlah dan tingkat profesionalisme dokter merupakan faktor yang menentukan tercapainya tingkat layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Disamping pendidikan, kesehatan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia yang sehat dan produktif akan meningkatkan daya saing suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kesehatannya. Hal tersebut merupakan amanah Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Visi pembangunan kesehatan tahun 2020-2024 adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan



berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Tabel 2.42
Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	108	130	111	99	109
Jumlah Dokter Gigi	33	38	29	28	31
Jumlah Dokter Spesialis	37	38	39	37	35
Bidan	427	561	592	575	537
Perawat	762	794	839	848	820
Tenaga Farmasi	76	113	119	127	112
Tenaga Sanitarian	14	27	23	31	27
Kesehatan Masyarakat	68	88	60	54	57
Tenaga Gizi	18	22	28	34	29
Tenaga Terapi Fisik	6	6	8	11	11
Tenaga Keteknisan Medis	72	156	9	20	12
Jumlah Penduduk	415.553	418.625	420.670	422.905	424.334
Rasio dokter terhadap penduduk	1:3.848	1:3.320	1:3.789	1:4.271	1:3.892
Rasio dokter gigi terhadap penduduk	1:12.593	1:11.016	1:14.505	1:15.103	1:13.688
Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	1:11.231	1:11.016	1:10.786	1:10.572	1:12.123
Rasio tenaga gizi terhadap penduduk	1: 23.086	1:19.028	1:15.023	1:12.372	1:14.632
Rasio tenaga bidan terhadap penduduk	1:973	1:746	1:710	1:735	1:790
Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap penduduk	1:6.111	1:4.757	1:7.011	1:7.831	1:7.444

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

Tabel 2.42 memberikan informasi tentang rasio dokter, tenaga kesehatan per Satuan Penduduk tahun 2016-2020. Standar *World Health Organization* (WHO) menetapkan standar rasio dokter dan jumlah penduduk sebesar 1:2.500, satu dokter melayani 2.500 penduduk (WHO, 2006).

4) Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

Indikator rasio tenaga medis per satuan penduduk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Kutai Timur selama 2016-2020 menunjukkan capaian yang positif. Upaya afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk dengan pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan) serta afirmasi pendayagunaan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.

5) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKBM). Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Posyandu berperan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Secara umum posyandu memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empiris di beberapa tempat menunjukkan bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak dapat dilakukan di Posyandu. Tabel 2.43 menyajikan tentang rasio jumlah Posyandu per satuan balita tahun 2016-2020.

Tabel 2.43
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	308	310	307	316	332
Jumlah Balita	34.862	31.494	25.317	30.199	28.750
Rasio Posyandu Per satuan Balita	8,8	10	12,13	10,5	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



Capaian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2016 sebesar 8,8, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator tersebut adalah melakukan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Selain itu, dibutuhkan juga adanya revitalisasi posyandu, posbindu, UKS dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, *screening* dan deteksi dini kasus dengan berbasis data yang akurat.

6) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Indikator ini menunjukkan cakupan penanganan kasus balita gizi buruk di suatu daerah. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaian tahun 2016-2020 adalah 100 persen yaitu semua kasus balita gizi buruk yang terjadi di tahun tertentu mendapat perawatan insentif, oleh karena capaian ini harus terus dipertahankan. Selain itu untuk mempertahankan capaian ini perlu adanya penguatan puskesmas dalam penanganan gizi buruk dan stunting dan penguatan sistem *nutrition surveillance* melalui e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik).

7) Cakupan Puskesmas

Puskesmas adalah kesatuan fungsional yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan pembinaan masyarakat di wilayah kerja yang dilayani. Capaian cakupan puskesmas dalam kurun waktu 201-2020 menunjukkan capaian yang positif yakni sebesar 116,67 persen dan cenderung stagnan. Capaian ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu: (i) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem melalui penguatan sistem koordinasi dan jejaring FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) oleh Puskesmas; (ii) Penguatan promotif dan preventif; (iii) Penguatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) untuk penemuan dini kasus; (iv) Penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh *stakeholder*; dan (v) Penguatan konsep wilayah kerja.

Tabel 2.44
Cakupan Puskesmas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan puskesmas	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67



Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan puskesmas pembantu	79,26	75	77,3	80,14	82,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

8) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yaitu unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Berdasarkan tren capaian pada kurun waktu 2016-2020 menunjukkan adanya kenaikan yakni dari posisi 79,26 persen pada tahun 2016 menjadi 82,27 persen pada tahun 2020. Capaian ini telah dapat memenuhi target indikator pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 75,00 persen.

9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen artinya setiap ibu yang mengalami komplikasi kebidanan mendapat penanganan oleh nakes. Pada tahun 2016, cakupan komplikasi tertangani telah mencapai 78 persen, namun pada akhir tahun 2020 menurun menjadi 70,93 persen. Kecenderungan penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera mendapatkan perhatian yang serius. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan mutu pelayanan yang memenuhi syarat dan memadai, pengoptimalan sistem rujukan dan peningkatan kompetensi SDM kebidanan terkait pelayanan.

10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016-2020 masih fluktuatif yakni berturut-turut sebesar 87 persen (2016) menjadi 89,4 persen (2020). Meskipun capaian ini masih fluktuatif namun tetap pada posisi sudah *on-track* sehingga masih perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan dengan dibarengi mutu pelayanan yang memadai.

11) Cakupan desa/kelurahan yang memenuhi *Universal Child Immunization (UCI)*

Pencapaian *Universal Child Immunization (UCI)* pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Apabila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI, yaitu lebih dari 80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap dalam satu tahun.

Berdasarkan gambar di bawah ini, rata-rata cakupan desa/kelurahan UCI selama tahun 2016-2020 belum memenuhi target. Namun demikian pada tahun 2016, capaian desa/kelurahan UCI telah berada di atas target yaitu sebesar 78. Upaya peningkatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar gedung dan perbaikan pencatatan/monitoring penggunaan PWS imunisasi) agar UCI dapat menyentuh level desa/kelurahan dan peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan *cold chain* serta peningkatan kapasitas SDM imunisasi. Perluasan imunisasi dasar lengkap sangat dibutuhkan terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi.

12) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Bakteri Tahan Asam (BTA)

Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau *Case Detection Rate (CDR)* adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Upaya dalam menanggulangi TB BTA di Kabupaten Kutai Timur, dapat dilihat dari capaian selama lima tahun terakhir yang fluktuatif namun cenderung turun. Kedepan diharapkan

adanya upaya untuk memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri dan meningkatkan cakupan penemuan kasus serta pengobatan pada MDR TB (*Multi Drug Resistant Tuberculosis*). Upaya ini perlu mendapatkan dukungan dari tata kelola yang kuat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam berdarah *dengue* (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *dengue*. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari *genus Flavivirus, famili Flaviviridae*. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*. DBD seringkali menjadi wabah musiman, baik musim hujan maupun musim kemarau. Mutasi virus memungkinkan wabah penyakit baru yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat termasuk didalamnya perekonomian.

Tabel 2.45
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Capaian penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kutai Timur sebesar 100 persen pada tahun 2016 dan tahun 2020. Namun demikian kedepan, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Selain meningkatkan kualitas lingkungan, GERMAS dapat mencegah dan mengendalikan faktor resiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan *real time surveillance* dan pengendalian vektor.

14) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis

kesehatan. Standar kunjungan minimal 4 (empat) kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai 95,04 persen pada akhir tahun 2016. Capaian ini mengalami trend penurunan sejak tahun 2016 hingga hanya sebesar 81,25 persen pada akhir tahun 2020. Perlu adanya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan *antenatal* dan *neonatal*. Selain itu, semenjak adanya ANC (*Ante Natal Care*) maka diperlukan adanya sistem rujukan terpadu yang dapat berkesinambungan dengan fasilitas publik dan swasta.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum mempunyai tugas untuk membangun dan merawat infrastruktur dasar (jalan transportasi, ketersediaan energi listrik, air dan sanitasi) bagi masyarakat. Tabel 2.46 menyajikan informasi tentang indikator dan capaian urusan pekerjaan umum selama tahun 2016-2020.

Dalam bidang transportasi, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik selalu meningkat selama tahun 2016-2020. Di sisi lain, rasio tempat ibadah bagi penduduk; rasio turap dan persentase luas irigasi dalam kondisi baik masih mengalami trend penurunan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk perencanaan pembangunan pada lima tahun kedepan. Kondisi ini hendaknya menjadi perhatian mengingat pentingnya pembangunan agribisnis dan agroindustri yang membutuhkan adanya peningkatan kontribusi di sektor pertanian. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan. Keberadaan RTH dapat menjamin sirkulasi udara yang sehat bagi warga masyarakat di perkotaan.

Tabel 2.46
Capaian Aspek Pelayanan Umum
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/mantap (%)	66,01	69,53	45,42	49,77	51,88
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,670	0,209	0,008	0,130	0,430
Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup	2,74	1,99	0	0,194	Na

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
kewenangan kota					
Persentase Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	55,00	54,96	38,58	44,31	45,03
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan jalan sebagai penunjang transportasi di Kabupaten Kutai Timur berperan penting dan dapat merupakan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dikategorikan menjadi tiga kawasan yang berbeda, yakni kawasan pantai/pesisir, pedalaman, dan kawasan perkotaan. Pada dasarnya ketiga kategori kawasan tersebut mempunyai potensi sumberdaya yang memadai, namun kawasan pedalaman mengalami ketertinggalan dibanding dengan kedua kawasan yang lain. Hal ini disebabkan kawasan pedalaman memiliki letak geografis dan topografi yang tidak mudah dan berat.

Kondisi belum memadainya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih belum merata akan menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional antar kawasan-kawasan tersebut. Kondisi ini dapat diminimalkan dengan salah satu cara, yaitu melakukan pembangunan transportasi yang memudahkan akses di ketiga kawasan tersebut.

Perkembangan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan, khususnya sejak tahun 2017 (69,53 persen). Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik ini masih harus terus ditingkatkan, mengingat Kabupaten Kutai Timur akan menjadi kabupaten penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

2) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna untuk membentuk manusia seutuhnya. Sarana ibadah yang memadai dapat berperan dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama tersebut. Berdasarkan perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2016-2020 (Tabel 2.46) menunjukkan peningkatan dan telah mencapai target tahunan RPJMD yaitu sebesar 0,260.

3) Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2017 capaian turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 1,99 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebesar 2,74 persen.

4) Luas Irigrasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau pengaruh terhadap aspek sosial. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pendistribusian, dan pemamfaatannya. Ketersediaan jaringan irigasi yang cukup akan meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan jumlah saluran irigasi mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Kutai Timur memiliki daerah irigasi (DI) sebanyak tiga unit. DI pertama terletak di daerah Pesap (Kecamatan Kongbeng). DI ini sudah mampu mengairi sawah seluas 365 ha dari target area persawahan seluas 430 ha (84,88 persen). DI yang kedua terletak di Kecamatan Kaubun. DI ini sudah mampu mengairi 1.400 ha dari target luas sawah 2.030 ha (68,97 persen). Selanjutnya, DI yang ketiga adalah DI Tanah Abang (Kecamatan Long Mesangat). DI ini sudah mampu mengairi 100 persen target sawah yang ada di wilayah target, yaitu seluas 215 ha.

Sektor pertanian menjadi tumpuan Kabupaten Kutai Timur untuk menuju kemandirian pangan. Oleh karena itu pembangunan irigasi sebagai pendukung utama sektor pertanian harus menjadi prioritas, terutama di wilayah yang memiliki potensi cetak sawah baru. Kebutuhan pangan utama, khususnya beras, jagung, kentang dan jenis pangan utama lainnya harus mulai ditanam secara kontinyu mengingat kebutuhan pangan utama secara nasional belum dapat dipenuhi secara swasembada penuh.

5) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyediaan RTH adalah: 1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; serta 3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kualitas permukiman merupakan prasyarat untuk menunjang indikator kesehatan masyarakat. Kondisi rumah harus memenuhi kondisi layak huni, mempunyai akses sanitasi yang baik (mempunyai toilet sendiri di dalam rumah, mempunyai akses air bersih, dan kondisi sanitasi lainnya). Indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.47
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	Na	90,70	90,70	Na	Na
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk*	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31
Rasio Rumah Layak Huni	Na	0,20	0,30	0,27	0,30

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, 2021

*Data Diolah RBI Tahun 2016

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi berperan dalam mewujudkan tingkat kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas sanitasi meliputi: sarana air minum/air bersih, sarana pembuangan kotoran kakus/ jamban, sarana pembuangan limbah cair, limbah padat, limbah gas/ debu dan sarana pembuangan sampah. Rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas); dan 4) pembuangan sampah.

2) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini juga menuntut kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

3) Rasio Pemukiman Layak Huni

Pemukiman dan rumah layak huni merupakan kebutuhan setiap insan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat terutama masyarakat

berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Pemerintah juga berupaya untuk memunculkan kepedulian sosial masyarakat mampu, turut berpartisipasi terkait dengan pembangunan pemukiman layak huni. Rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukaan.

E. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dari sisi tugas. Berikut indikator-indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

Tabel 2.48
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
LSM, Ormas dan OKP yang aktif	450	345	178	<i>na</i>	<i>Na</i>
Persentase pengurus dan anggota keagamaan yang dibina (%)	75	80	85	83	83
Jumlah kegiatan Lembaga Keagamaan/Forum Komunikasi Umat Beragama (Kegiatan)	12	15	18	12	1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur, 2021
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur, 2021

Kegiatan Lembaga Keagamaan/ dalam lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kutai Timur jumlahnya semakin meningkat. Setiap tahun, rata-rata ada tiga kegiatan keagamaan baru yang diadakan oleh Lembaga Keagamaan/FKUB. Namun LSM, Ormas dan OKP yang masih aktif mengalami penurunan tiap tahunnya seperti tampak pada Tabel 2.48 di atas.

F. Sosial

Perlindungan sosial tidak hanya sebatas pemenuhan hak, tetapi juga sebagai syarat terlaksananya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan yang layak dan berkelanjutan. Masalah sosial adalah perilaku atau keadaan kompleks yang akibatnya berpengaruh kesejahteraan orang banyak (umum) serta dapat mengganggu kestabilan masyarakat, norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat. Berikut capaian aspek pelayanan umum urusan sosial disajikan dalam Tabel 2.48. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berfluktuasi selama

tahun 2016-2020. Persentase PMKS yang tertangani sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, namun rasio ini meningkat kembali pada tahun 2018.

Tabel 2.49
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang tertangani	54,43	34,49	80,13	94,72	61,80

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar mencakup: ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; ketahanan pangan; lingkungan hidup; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informasi; koperasi dan UKM; dan bidang lainnya.

A. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang aktif memberi kontribusi pada penciptaan output. Tenaga kerja akan semakin produktif apabila tersedia lapangan kerja yang memadai. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.50
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Na	66,75	68,95	68,85	68,96
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	Na	4,61	5,85	5,45	5,45

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi



dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah), demikian juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggungjawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

Capaian TPAK di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan capaian yang baik. Pada tahun 2017, TPAK sebesar 66,75 persen dan mengalami peningkatan menjadi 68,96 persen pada tahun 2020.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah: 1) Pencari kerja; 2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha; 3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan 4) Penduduk yang bekerja tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah rendahnya angka pengangguran. Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan penurunan yang signifikan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.51
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Na	75,48	76,03	76,51	76,26
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	92	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tiga tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 75,48 di tahun 2017 menjadi 76,51 di tahun 2019. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 76,26. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pelaksanaan UU jaminan Sosial sangatlah penting untuk mencapai tujuan perlindungan sosial. Regulasi tersebut diharapkan dapat menghapus kekerasan dan diskriminasi di berbagai kehidupan. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercatat selama tahun 2019 hingga tahun 2020 tercapai 100 persen sesuai dengan target RPJMD.

C. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten. Tabel 2.51 menunjukkan ketersediaan pangan utama di wilayah Kutai Timur masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 capaian ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai 83 ton. Indikator ketersediaan pangan menunjukkan kondisi semakin turun sejak tahun 2017.

Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama untuk Kabupaten Kutai Timur hanya mencapai 43,66 ton.

Tabel 2.52
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan pangan utama (%)	83,10	52,26	59,99	42,82	43,66

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2) Regulasi Ketahanan Pangan

Gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.53
Regulasi Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda/Perkada					
- Ada	√	√	√		√
- Tidak Ada				√	

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur, 2020

Tabel 2.53 menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2020, terdapat regulasi yang mengatur tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur. Hanya pada tahun 2019 tidak ada regulasi tentang ketahanan pangan, baik dalam bentuk Perda maupun Perkada.

D. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang harus mendapat perhatian khusus. Kualitas lingkungan yang baik akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja pada Tabel 2.54. Hasil pengukuran indeks kualitas udara tahun 2018 sebesar 43,47 mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 80,60. Indikator tersebut juga telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 70 pada tahun 2020.

Tabel 2.54
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Hasil pengukuran indeks kualitas air	58,75	58	52,73
Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	43,47	77,72	80,69
Hasil pengukuran indeks kualitas Tutupan Lahan	77,5	77,50	77,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

E. Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator capaian terkait dengan kependudukan dan catatan sipil mencakup kepemilikan KTP elektronik; kepemilikan akte lahir anak dan rasio per 1000 penduduk yang mempunyai KTP. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.55
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	70,17	14,27	96,08	82,78	86,95
Cakupan penerbitan akta kelahiran 0 – 18 (%)	38,11	-11,05	41,14	92,12	92,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 86,95, indikator ini sebaiknya diupayakan untuk mencapai 100 persen, karena KTP merupakan dokumen dasar yang paling utama dalam pencatatan kependudukan. Sedangkan Cakupan penerbitan akta kelahiran 0 – 18 mengalami peningkatan secara signifikan yaitu 41,14 persen pada tahun 2018 menjadi 92,19 persen pada tahun 2020.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam struktur wilayah pemerintahan di Indonesia. Membangun desa dan masyarakat desa diupayakan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya

yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah. Tabel 2.56 menyajikan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilakukan di Kabupaten Kutai Timur. Rata-rata 6 (enam) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksanakan di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan-kegiatan ini hendaknya diupayakan untuk ditingkatkan, minimal satu kegiatan per kecamatan.

Tabel 2.56
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayan Masyarakat dan Perdesaan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Kegiatan)	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

G. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

Penduduk merupakan komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang berkualitas dapat diperoleh melalui proses perencanaan pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dipenuhi melalui program keluarga berencana dan upaya pencapaian keluarga sejahtera. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.57
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan peserta KB aktif (%)	73,66	48,78	61	68,62	69
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Rasio Akseptor KB	73,66	48,78	61	68,62	69

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021



1) Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB aktif (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

2) Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

3) Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Pada tahun 2020, Rasio akseptor KB sebesar 70,12. Pemakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program KB dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi.

H. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur yang paling mudah diamati untuk menunjang aktivitas pemabangunan adalah pembangunan sektor transportasi. Pembangunan sektor perhubungan berperan untuk menunjang aktivitas transportasi. Transportasi memberikan dampak yang cukup besar dalam menunjang perekonomian daerah. Jika transportasi di suatu wilayah sangat mudah dijangkau maka arus distribusi barang berjalan dengan lancar dan ekonomi pada wilayah itu juga tidak akan berhenti. Sebaliknya, jika sektor transportasi lemah, maka dapat disimpulkan bahwa arus perekonomian di wilayah itu juga akan lambat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk. Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

2) Jumlah uji kir angkutan umum

Seluruh angkutan umum yang didatangkan di Kabupaten Kutai Timur baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Data berkaitan dengan persentase jumlah KIR dengan kendaraan yang wajib uji belum tersedia selama tahun 2016-2020. Mengingat belum adanya data yang tersedia persentase jumlah KIR dengan kendaraan yang wajib uji maka diperlukan pendataan yang kontinu untuk mengontrol sarana mobilitas.

Tabel 2.58
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	5.983	8.753	7.791	6.295	3.529
Terminal dan subterminal (unit)	12	12	12	12	12
Pelabuhan Laut (unit)	3	3	3	3	3
Pelabuhan Udara (unit)	1	1	1	1	1
Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	100	100	27,70	27,19	30,69
Pemasangan rambu-rambu (%)	100	100	0	53	100
Jumlah terminal penumpang dan barang yang dikelola (Unit)	12	12	12	12	12
Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun					
a. Jumlah orang melalui dermaga/ bandara/terminal (Orang)	132.746	85.168	115.307	91.573	45.302
b. Jumlah barang melalui dermaga/ bandara/terminal (Ton)	2.707	762	207	1.467	1.418

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kutai Timur Tahun 2021



3) Jumlah Terminal/Pelabuhan Laut/Pelabuhan Udara

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahun. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menargetkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut dan udara guna mengantisipasi perkembangan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahunnya.

4) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Pada tahun 2020 rambu-rambu lalu lintas yang terpasang sebesar 26,78 persen.

5) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang. Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun terminal merupakan indikator mobilitas tersebut.

I. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat penting, terutama dalam pengumpulan data maupun diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan hasil pembangunan berbasis data mutakhir kepada pengguna.

Tabel 2.59
Capaian Aspek Pelayanan Umum
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan layanan komunikasi (%)	na	Na	na	30	60
Persentase Penduduk menggunakan HP/Telepon (%)	na	Na	na	68	80
Proporsi rumah dengan akses internet (%)	na	Na	na	25	40

Sumber: Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Selama periode 2016-2020 data untuk semua indikator urusan komunikasi dan informatika hanya tersedia di tahun 2019 dan tahun 2020. Tiga indikator tersebut adalah: (i) cakupan layanan komunikasi; (ii) persentase penduduk menggunakan HP dan telepon; dan (iii) proporsi rumah tangga yang mempunyai akses internet. Diantara ketiga akses ini, cakupan layanan komunikasi dan persentase penduduk dan rumah tangga yang menggunakan telepon/HP sudah di atas 50 persen sedangkan indikator proporsi rumah dengan akses internet lainnya masih di bawah 50 persen.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur terdapat 14 Kecamatan dengan 30 desa yang masih dalam keadaan *blank spot* / tidak tercakup dalam layanan komunikasi. Terdapat 30 desa dari 139 desa atau sebesar 21,58% berstatus *blank spot* dan 78,42% telah tercakup layanan komunikasi menggunakan telpon selular dan jaringan internet, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2.60
Data Blank Spot Telepon Selular dan Internet di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa
1	Sandaran	1. Sandaran 2. Manubar 3. Tadoan 4. Marukangan 5. Tanjung Mangkalihat
2	Karangan	1. Batu Lepoq



No	Kecamatan	Desa
		2. Ba'ay
3	Sangkulirang	1. Kerayan 2. Saka 3. Mandu Pantai Sejahtera 4. Kolek 5. Perupuk 6. Tepian Terap 7. Mandu Dalam 8. Sempayau
4	Sangatta Selatan	1. Teluk Singkama
5	Teluk Pandan	1. Martadinata
6	Bengalon	1. Tebangan Lembak 2. Muara Bengalon 3. Tepian Langsung
7	Kaubun	1. Bukit Permata 2. Pengadan Baru
8	Kaliorang	1. Bukit Harapan 2. Bukit Makmur 3. Selangkau
9	Batu Ampar	1. Mugi Rahayu 2. Himba Lestari
10	Muara Bengkal	1. Mulupan
11	Muara Ancalong	1. Long Tesak 2. Muara Dun
12	Busang	1. Long Bentuq 2. Rantau Sentosa
13	Telen	1. Lung Melah 2. Keryanyan
14	Long Mesangat	1. Melan 2. Sika Makmur 3. Segoy Makmur

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2021

J. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dapat dilihat dari indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.61. Selama tahun 2016-2020 persentase koperasi aktif mengalami fluktuasi. Tahun 2016 jumlah koperasi aktif mulai meningkat cukup tajam, namun kondisi ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2017. Hal yang sama berlaku dengan jumlah UKM.

Tabel 2.61
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (KUKM) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase koperasi aktif (%)	90,02	59,68	55,21	56,00	57,21
Jumlah UKM (unit)	7.448	7.618	8.428	6.178	6.942

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat yang diharapkan dapat menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan. Lebih jauh hal ini akan menurunkan jumlah kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung dan “lokomotif perekonomian” yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan ekonomi daerah, bahkan dapat menekan angka pengangguran.

K. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan sangat cepat, yang dinilai dari jumlah proyek yang disetujui investor. Pada tahun 2016, hanya terdapat sepuluh proyek yang disetujui, namun pada tahun 2020 sudah tercatat sebanyak (Nib) 720 proyek. Dari jumlah ini ada investor yang berskala nasional dan internasional. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.62
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	10	11	121	241	(Nib) 720
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar dan Triliun Rupiah)	4.600	8.610	3,835 (T)	6,150 (T)	1.036 (T)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Catatan: Tahun 2016-2017, data nilai investasi adalah dalam Milyar Rupiah; dan setelah tahun tersebut data nilai investasi dalam Triliun Rupiah.

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan pembangunan. Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Hadirnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain-lain.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara keduanya sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah dapat member kontribusi dengan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang. Sedangkan Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Aktivitas kepemudaan merupakan salah satu penunjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Jumlah organisasi pemuda meningkat cukup signifikan di setiap daerah. Akan tetapi, jumlah kegiatan kepemudaan ternyata mengalami penurunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakannya.

Tabel 2.63
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi pemuda (Buah)	46	46	46	46	144
Jumlah organisasi olahraga (Buah)	213	213	213	213	213
Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah)	12	4	2	5	5
Jumlah Kegiatan olahraga (kali)	10	10	4	4	3
Gelandang/Balai Remaja (selain milik swasta) (Unit)	3	3	3	3	3
Jumlah Lapangan Olahraga (Unit)	130	142	148	156	160
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	80	90	89	76	76
Persentase wirausaha muda (%)	15	15	15	34	63
Jumlah Prestasi Olahraga	93	138	461	298	8

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

M. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat dilihat ditinjau dari beberapa indikator: Pertama, jumlah festival seni dan budaya. Kedua, sarana dan penyelenggaraan seni budaya. Ketiga, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali dan menginventarisasi warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur.

Gambar 2.64
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kegiatan)	6	5	6	7	0
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	4	9	15	3	4
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	91,6	46	51	42	42

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Ketiga indikator terkait urusan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur cenderung fluktuatif. Indikator pertama tahun 2016 hingga 2019 cenderung berkisar 5 sampai 7 kegiatan,

namun pada tahun 2020 tidak ada capaian dikarenakan Covid-19. Indikator kedua sempat meningkat jumlahnya di tahun 2018 sebanyak 15 unit sarana, namun menurun drastis di tahun 2019 menjadi hanya 3 unit sarana saja. Indikator ketiga hanya meningkat 5 persen di tahun 2018.

N. Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan secara memadai. Pengelolaan yang memadai, selain memiliki koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunaan juga harus memiliki dokumentasi aktivitas pokok yang bermanfaat. Kondisi ini dibutuhkan untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca masyarakat. Tabel 2.65 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perpustakaan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.65
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (Judul)	8.957	8.999	32.708	31.603	9.508

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

O. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Tabel 2.66 menunjukkan Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan anggaran yang menunjang kegiatan kearsipan di setiap OPD berkurang.

Tabel 2.66
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku (%)	14,28	17,14	7,89	7,89	5,26

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

P. Statistik

Statistik yang handal merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.67
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (ada/tidak)	ada	ada	ada	Ada	ada
Buku Kabupaten Dalam Angka (ada/tidak)	ada	ada	ada	Ada	ada
Tersedianya sistem data dan statistic yang terintegrasi (ada/tidak)	ada	ada	ada	Ada	ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

A. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Kegiatan pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Sektor ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kegiatan pariwisata juga memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaku bisnis pariwisata dan penikmat wisata dapat menciptakan aktivitas ekonomi



pada waktu yang bersamaan. Produksi jasa pariwisata dapat dikonsumsi dalam tempat dan waktu yang bersamaan.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur (2018), dari 18 Kecamatan yang ada di Kutai Timur, 12 Kecamatan diantaranya diidentifikasi telah memiliki obyek wisata. Obyek wisata ini disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.68
Potensi Obyek Wisata di Kutai Timur

No	Kecamatan	Desa	Jenis Budaya				Jumlah Obyek Wisata
			Alam	Budaya	Sejarah	Buatan	
1	Sangkulirang	Pulau Miang	-	-	Sumur Minyak	-	1
		Sangkulirang	Mangrove Tungkap	-	-	-	1
2	Teluk Pandan	Desa Martadinata	Gua Sampe Marta	-	-	-	1
		Suka Rahmat	Gua Gajah/Rahmat	-	-	-	1
		Kandolo	-	-	-	Bukit Hijau	1
3	Karangan	Sempayau	Air Terjun Sempayau	-	-	-	1
4	Kaliorang	Kaliorang	Air Terjun Ngarai Hitam	-	-	-	1
		Kaliorang	Air Terjun Tangga Bidadari	-	-	-	1
		Kaliorang	Pantai Marang	-	-	-	1
		Bukit Harapan	-	-	-	Taman Wisata Bukit Harapan	1
		Kaliorang	Goa Segegeh	-	-	-	1
5	Sanggata Selatan	Rindang Benua	Air Terjun Jantur Benua	-	-	-	1
		Sangkima Dalam	Pantai Pasir Putih Teluk Singkama	-	-	-	1
6	Rantau Pulung	Rantau Pulung	Arung Jeram	-	-	-	1
			Air Terjun Manupak	-	-	-	1
7	Bengalon	Tepian Langsat	-	Desa Budaya Marata	-	-	1
8	Sandaran	Sandaran	Air Terjun Langga Duae	-	-	-	1
		Desa Ta'Doan	Danau Ta'Doan	-	-	-	1
		Marukangan	Pantai Badang-badang	-	-	-	1
		Manubar	Pantai Manubar	-	-	-	1
		Birah-Birahan	-	-	-	Kuburan Tua	1
9	Busang	Busang	Sungai Atan	-	-	-	1
10.	Sanggata Utara	Desa Sanggata Utara	-	-	-	Rumah Kelinci Pendidikan	1
11	Kongbeng	Miau Baru	Sungai Mejeang	-	-	-	1



No	Kecamatan	Desa	Jenis Budaya				Jumlah Objek Wisata
			Alam	Budaya	Sejarah	Buatan	
12	Muara Wahau	Muara Wahau	Danau Senal	-	-	-	1
		Muara Wahau	Danau Leihut	-	-	-	1
						Jumlah	26

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Pengembangan obyek wisata yang telah diidentifikasi ini diharapkan mampu menarik penikmat wisatawan, baik dari luar negeri atau wisatawan mancanegara (wisman). Aktivitas wisatawan mancanegara melalui penambahan volume berkunjung akan meningkatkan devisa dan berdampak pada masyarakat lokal. Penerimaan devisa dari aktivitas pariwisata sangat penting untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Potensi pariwisata di Kabupaten Kutai Timur sangat banyak dan belum dieksplorasi. Berdasarkan sajian berita online borneo.id; paling tidak ada Sembilan obyek wisata kekinian yang sedang ramai dikunjungi wisatawan domestik. Wisata kekinian ini wisata yang bisa menyajikan spot-spot unik untuk fotografi atau *selfy* bagi generasi milenial penikmat wisata ini. Beberapa diantara obyek wisata baru ini, mulai mengenalkan ekowisata bahari, seperti lomba memancing dan wisata lainnya. Peningkatan potensi pariwisata, selain meningkatkan kontribusi sektoral yang bersifat *renewable* juga berpotensi meningkatkan kesinambungan pendapatan asli daerah, baik dari sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sektor pariwisata sudah mulai tumbuh di Kutai Timur. Hal ini dapat dinilai dari jumlah kunjungan wisata selama 2016-2020. Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Tabel 2.68 dapat dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2016 hingga 2020 masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 25 ribuan orang. Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 68.532 orang. Informasi tentang perbandingan wisatawan asing dan domestik, rata-rata lama tinggal dan rata-rata pengeluaran wisatawan dibutuhkan untuk memprediksi nilai tambah yang diciptakan oleh sektor ini.

Tabel 2.69
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisata (orang)	28.419	25.625	13.330	68.532	13.493



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

B. Pertanian

Pembangunan dalam 5 (lima) tahun kebelakang di Kabupaten Kutai Timur yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian untuk menuju kabupaten yang unggul dalam agrobisnis dan agroindustri.

Tabel 2.70
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha/tahun)	Na	37,86	30,13	35,07	35,50
Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	52,00	23,43	24,43	14,54	21,25
Produksi Pangan Utama (Ton):					
a. Padi	27.787	32.916	26.766	29.670	22.386
b. Palawija	58.472	7.275	19.881	21.009	19.705
Populasi Sumber Pangan Hewani:					
a. Ternak Besar (sapi) (ekor)	Na	17.376	18.357	19.450	20.315
b. Ternak Kecil (kambing) (ekor)	Na	9.768	8.826	9.093	9.402
c. Unggas: Ayam ras pedaging (Dalam Ribuan) (ekor)	Na	2.508	2.353	1.856	2.944
Produksi:					
a. Daging (sapi) (Ton)	3.542,16	3.635	617	727,21	726,69
b. Telur (Kg)	7.567,38	9.035	386	7.361,54	7.390,08
c. Susu (Liter)	Na	23,94	24,96	na	na
Konsumsi daging (Kg/kap/th)	10,47	10,60	11,56	na	na
Luas areal sawah tadah hujan dan sawah beririgasi (Ha)	Na	5.498	8.716	na	na
Luas Perkebunan (Ha)	470.744	470.413,81	473.317,93	483.865,22	483.751,97
Jumlah Jenis Bibit / Benih Unggul	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kutai Timur. Peranan sektor pertanian menjadi semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan kebijakan pembangunan di lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB kabupaten Kutai Timur.

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering. Kawasan



budidaya tanaman pangan lahan kering difokuskan di wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik tanah seperti derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi. Kegiatan pertanian lahan kering banyak diaplikasikan di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar merata di 18 (delapan belas) kecamatan yang ada. Lahan budidaya tanaman pangan lahan basah adadi sebagian kecil wilayah Kabupaten Kutai Timur. Luas lahan tanaman basah terdapatdi Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Tabel 2.71
Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Luas Lahan (Ha)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi Sawah	7.261	8.716	7.312	4.713	3.841
Padi Ladang	5.427	4.451	4.274	3.785	2.465
Jagung	914	525	640	1.646	1.476
Ubi Kayu	459	390	369	364	378,4
Ubi Jalar	76	90	103	108,8	134,4
Kacang Tanah	108	113	108	93,2	112
Kedelai	43	10	6	8	13,7
Kacang Hijau	22	16	12	3,0	8,1
Sayuran	1.022	945	1.406	1.282	1.768,3
Buah-buahan	4.937	5.020	1.982	2.024	4.882,3

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama pasar lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Komoditas pertanian seperti padi, palawija dan buah-buahan berpotensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, komoditas hasil pertanian Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memenuhi permintaan Kabupaten Kutai Timur mulai melakukan budidaya pertanian yang mencakup kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Luas lahan dan hasil produksi produk-produk pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.71 dan Tabel 2.72. Berdasarkan data luas lahan dan hasil produksi hasil pertanian, dapat diketahui bahwa perkembangan hasil pertanian yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan, terutama komoditas padi sebagai pangan utama.

Seiring dengan perubahan luas lahan, baik padi sawah dan maupun padi ladang dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan yang berarti, demikian juga perluasan lahan tanaman lainnya. Untuk komoditas tanaman pangan, luas lahan padi sawah secara berkesinambungan mengalami peningkatan, namun luas lahan padi lading mulai berkurang. Luas lahan ubi jalar dan ubi kayu, sayuran dan buah-buahan bertambah cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.72
Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Produksi (Ton)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi sawah	14.934	21.770	15.744	16.398	13.636
Padi ladang	12.853	11.455	12.507	13.272	8.750,40
Jagung	1.352	1.131	3.651	8.598	7.495
Ubi kayu	5.667	5.460	14.644	10.913	10.482
Ubi jalar	115	821	1.262	1390	1.599
Kacang tanah	192	96	133	93,4	104,2
Kedelai	90	65	11	13	20
Kacang hijau	57	29	17	1,8	4,9
Sayuran	3.014	1.225	945	6.081	2.223,6
Buah-buahan	26.372	49.228	60.555	84.357	40.585,6

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi dan tanaman pangan, di antaranya: kesuburan tanah, jenis bibit, musim, dan lain-lain. Upaya peningkatan produktivitas produksi pertanian, erat kaitannya dengan intensifikasi pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan teknologi dan metode pertanian menjadi penting untuk pelaksanaan program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2) Produksi padi (ton)

Hasil capaian produksi padi, terutama padi sawah di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 hingga 2020 berfluktuatif dengan peningkatan luas lahan sawah. Beberapa hal yang diduga berpengaruh terhadap produktivitas padi di Kabupaten Kutai Timur diantaranya ketersediaan sumber air irigasi dan tingkat kesuburan tanah di Kutai Timur.

3) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang terintegrasi dengan sistem pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor



pertambahan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD 2016-2020 selalu meningkat tiap tahun. Pembangunan pertanian dalam arti luas dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Untuk melihat keberhasilan pembangunan khususnya di sektor pertanian, selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur daya tukar petani mengingat petani merupakan pelaku utama di sektor pertanian.

Data pengukur daya tukar petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian.

Hingga saat ini Kabupaten Kutai Timur belum memiliki indikator kesejahteraan petani untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui nilai Tukar Petani (NTP). Untuk keperluan mendapatkan gambaran kesejahteraan petani, maka Kabupaten Kutai Timur mencoba membandingkan indikator pendapatan perkapita sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur dengan pendapatan perkapita di wilayah kabupaten berdekatan yang mempunyai nilai NTP dan membandingkan juga dengan nilai pendapatan perkapita dan NTP Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan dengan penimbang dari Pendapatan Perkapita Sektor Pertanian, maka estimasi nilai NTP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.73
Pertumbuhan dan Peranan Kategori Pertanian, Perternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (Persen) dan Estimasi NTP Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,69	7,72	7,69	7,69	9,16
Pertumbuhan Sektor Pertanian	0,20	4,96	7,26	4,38	-1,59
Estimasi NTP***	99,17	98,19	97,18	97,63	111,90

Sumber : BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

***Data Diolah



4) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan karet.

Sub sektor perkebunan dilihat dari sisi luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja, secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Data tentang peningkatan total lahan, total produksi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.73 Terdapat tiga komoditas yang mengalami peningkatan luas lahan secara signifikan, yaitu: (i) tanaman karet, (ii) tanaman aren, dan (iii) kelapa sawit. Sementara komoditas-komoditas lainnya cenderung mengalami penurunan luas lahan.

Tabel 2.74
Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Lahan perkebunan (Ha):						
1	Karet	13.770,24	13.545,49	13.291,58	18.754,27	18.632,02
2	Kelapa	1.385,50	1.352,85	1.296,10	1.296,10	1.286,10
3	Kopi Robusta	121,35	121,35	98,85	98,85	99,35
4	Lada	422,18	407,18	418,75	418,75	418,75
5	Vanili	7,18	6,68	6,68	6,68	6,68
6	Kakao	4.082,76	4.009,51	3.415,43	3.415,43	3.440,33
7	Kelapa Sawit	450.635,31	453.556,18	453.490,69	459.526,26	459.526,27
8	A r e n	286,17	286,17	318,07	318,07	312,07
9	Kemiri	33,52	32,52	30,80	30,80	30,40
Jumlah		470.744,21	473.317,93	472.366,95	483.865,22	483.751,97
Produksi perkebunan (Ton):						
1	Karet	866,70	970,73	907,21	954,70	1.155,87
2	Kelapa	977,15	1.094,40	911,91	937,00	1.055,12
3	Kopi Robusta	43,54	48,74	45,56	41,69	46,97
4	Lada	113,70	127,34	119,01	108,99	122,80
5	Vanili	0,61	0,66	0,62	1,57	1,64
6	Kakao	1.311,44	1.468,36	1.372,30	1.255,65	1.409,77
7	Kelapa Sawit	6.179.635,52	5.874.980,93	5.275.877,28	5.329.823,74	6.452.834,38
8	A r e n	242,59	32,60	30,47	27,89	31,49
9	Kemiri	4,43	4,92	4,60	4,21	4,67



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah		6.183.195,68	5.878.728,68	5.279.052,80	5.333.155,44	6.456.662,72
Produktivitas (Kg/Ha)						
Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:						
1	Karet	1.145,97	1.150,42	951,45	984,37	479,32
2	Kelapa	983,86	1.099,96	916,55	941,76	1.062,62
3	Kopi Robusta	528,06	591,18	552,59	505,61	569,67
4	Lada	658,45	774,50	719,44	658,90	622,20
5	Vanili	187,52	240,29	224,30	569,93	596,06
6	Kakao	544,75	611,01	571,01	522,49	592,42
7	Kelapa Sawit	19.377,08	18.595,23	16.890,54	15.331,64	22.638,45
8	A r e n	2.544,18	341,93	319,53	292,49	326,03
9	Kemiri	190,31	220,63	159,77	146,25	164,56
Jumlah		26.160,18	23.625,15	21.305,18	19.953,4	27.051,33

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, diikuti berkembangnya industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pertanian merupakan sektor dengan kontribusi kedua pada PDRB di kabupaten Kutai, setelah sektor pertambangan.

C. Perindustrian

Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, merupakan prasyarat dalam pengembangan agroindustri, dan daya saing tersebut merupakan interaksi keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis. Dengan proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang semakin rendah, sektor industri, termasuk industri pengolahan akan mampu meningkatkan daya saing yang pada gilirannya akan dapat berkontribusi terhadap PDRB. Sebagai salah satu contoh capaian indikator kinerja disajikan pada Tabel 2.75 berikut:

Tabel 2.75
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perindustrian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,26	3,01	2,98	2,94	3,55

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2021

D. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kutai Timur dikelilingi oleh laut sehingga sebagian wilayah perdesaan merupakan desa pesisir. Sebagai wilayah pesisir, hasil komoditas ikan baik yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun perairan laut cukup memiliki peran yang penting. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.76
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan (Ton)	7.068,66	8.724,21	9.896,28	10.842,90	8.085,61
Konsumsi Ikan (%)	30,29	40,22	62,26	62,26	40,86

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas, baik ke industri hulu (*backward linkage*) maupun hilir (*foreward linkage*), dan menyerap banyak tenaga kerja.

Rumah tangga perikanan dan hasil tangkap ikan selama lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.77. Secara umum beberapa jenis produksi ikan mengalami peningkatan yang cukup baik. Rumah tangga perikanan umum dan kolam budidaya adalah dua jenis produksi ikan yang mulai banyak dilakukan di Kabupaten Kutai Timur. Tahun 2020 tercatat beberapa jenis budidaya hasil ikan dilakukan dengan penangkapan jaring, serta pemanfaatan tanaman rumput laut mulai dikembangkan. Nilai Rupiah yang dihasilkan dari kegiatan ini belum terlalu banyak, namun apabila terus dikembangkan akan menjadi potensi yang cukup menjanjikan.

Tabel 2.77
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga Perikanan (RT):						
1	Perikanan Laut	4.112	4.112	4.124	3.690	1.832
2	Perikanan Perairan Umum	974	974	976	1.820	1.092
3	Tambak	350	384	384	21	65



No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Kolam	301	301	312	673	100
5	Keramba	215	215	224	14	199
6	Budidaya Pantai / Sawah	161	161	163	42	30
7	Rumput Laut	-	-	-	135	24
8	Jaring Apung Tawar	-	-	-	1	2
9	Jaring Tancap	-	-	-	4	4
	Jumlah	6.113	6.141	6.183	6.400	3.318
Produksi Hasil Perikanan (Ton):						
1	Perikanan Laut	4.332,80	4.928,44	5.030,84	5.086	4.976,94
2	Perikanan Perairan Umum	928,45	954,67	1.184,34	1.200	1.178,73
3	Tambak	207,39	529,36	901,85	920	30,62
4	Kolam	175,68	843,55	1.213,47	1.284	495,00
5	Keramba	1,34	36,48	72,69	84	127,00
6	Budidaya Pantai / Sawah	1.427	1.431,71	1.493,09	1.389	869,72
7	Rumput Laut	-	-	-	774,9	372,60
8	Jaring Apung Tawar	-	-	-	35	15,00
9	Jaring Tancap	-	-	-	70	20,00
	Jumlah	7.068,66	8.724,21	9.896,28	10.842,90	8.085,61
Nilai Produksi Hasil Perikanan (Ribu Rp):						
1	Perikanan Laut	120.276.179	147.853.200	150.925.200	152.580.000	151.082.278
2	Perikanan Perairan Umum	25.158.526,40	26.253.425	28.023.875	36.000.000	24.420.881
3	Tambak	10.730.100	28.161.952	47.978.420	27.600.000	765.500
4	Kolam	5.823.300	25.306.500	36.404.100	38.520.000	12.383.000
5	Keramba	86.900	1.094.400	2.180.700	2.520.000	4.050.000
6	Budidaya Pantai / Sawah	4.269.000	44.278.000	4.461.406	41.670.000	21.743.000
7	Rumput Laut	-	-	-	23.247.000	2.049.300
8	Jaring Apung Tawar	-	-	-	1.050.000	450.000
9	Jaring Tancap	-	-	-	2.100.000	600.000
	Jumlah	166.344.005	232.947.477	269.973.701	325.287.000	217.543.959

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan penunjang Pemerintahan mencakup: otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; dan perencanaan daerah.

A. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada Tabel 2.78 berikut:

Tabel 2.78
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Penegakan PERDA (%)	-	1,43	0,19	7,14
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	74,51	77,49	76,02	75,09
Predikat hasil audit oleh BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021
- Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021
- Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

1) Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas Satpol PP adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penerima pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan/ atau kualitatif atas pendapat masyarakat terkait dengan pelayanan yang dilakukan aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Dimensi kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan komponen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komponen IKM yakni: (1) kesederhanaan, (2). kejelasan, (3) kepastian waktu, (4) akurasi, (5) keamanan, (6) tanggungjawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9) kedisiplinan, (10) kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian, (3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan Prasarana.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih belum memadai karena

belum dapat memenuhi kualitas layanan yang diharapkan masyarakat. Hal ini mengingat masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah Kutai Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan, dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan direncanakan.

B. Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	Ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	97,20	83,55

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing

daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah mencakup: konsumsi rumah tangga per kapita; nilai tukar petani; dan pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah, secara umum mempunyai proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding pengeluaran lainnya. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.80
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribuan Rupiah)	10.273	10.558	11.196	10.485

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

B. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non-pangan menunjukkan porsi dari pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi yang bersifat rutin di luar kebutuhan makanan. Tabel 2.81 menyajikan tipikal komponen pengeluaran non makan rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur. Prosi pengeluaran non-makanan rumah tangga yang cukup besar di Kabupaten Kutai Timur adalah untuk biaya perumahan, bahan bakar, penerangan dan air. Kebutuhan untuk kegiatan pesta dan upacara relative tidak terlalu besar.

Tabel 2.81
Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	421.311	423.586	490.324	343.483	366.418
Aneka barang dan jasa	119.640	129.951	189.262	120.217	118.414
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	36.201	51.142	46.379	28.939	29.626
Barang yang tahan lama	64.402	52.720	93.903	48.530	32.264
Pajak pemakaian dan premi asuransi	23.279	28.998	44.203	32.367	38.659
Keperluan pesta dan upacara	17.281	11.064	22.007	8.841	12.191
Jumlah	682.114	697.460	886.078,40	582.377	597.572

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2019 dan Tahun 2021

2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur terhadap beberapa indikator, yaitu:

A. Ketaatan terhadap RTRW

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah, disajikan salah satu indikator kinerja yaitu ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel 2.82 menunjukkan ketaatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terhadap RTRW yang telah ditetapkan cukup tinggi, meskipun pada 2 (dua) tahun terakhir terdapat sedikit penurunan menjadi 90 persen.

Tabel 2.82
Capaian Aspek Daya Daerah Saing Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW (%)	100,00	98,96	98,96	98,96	99,94

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

B. Penginapan/Hotel

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun lima tahun terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang terkait dengan adanya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya pendatang dari luar untuk mengadu nasib maupun maupun melakukan transaksi untuk berbisnis. Situasi ini menyebabkan para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal mengharuskan mereka memerlukan tempat tinggal sementara. Tempat singgah sementara seperti hotel dan penginapan menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya sarana hotel dan penginapan di Kabupaten Kutai Timur sangat dibutuhkan oleh pendatang baik dari lokal maupun asing. Jumlah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami peningkatan yang cukup cepat. Kondisi ini berdampak positif pada potensi wisata dan bisnis di Kutai Timur di masa yang akan datang.

Tabel 2.83
Jumlah Penginapan/hotel di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Hotel	100	95	104	Na	Na

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2019

LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019

RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

C. Penggunaan Air Bersih

Lingkungan merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat karena perannya dalam menentukan baik buruknya derajat kesehatan. Gambaran keadaan lingkungan, disajikan indikator seperti akses air bersih dan jangkauan layanan PDAM. Tersalurnya air bersih secara merata dan terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah ideal guna pemenuhan kebutuhan



air dalam kehidupan untuk sehat.

Tabel 2.84 menunjukkan capaian persentase rumahtangga yang sudah menggunakan air bersih di Kutai Timur selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 baru sekitar 57 persen penduduk Kutai Timur yang mendapat aliran air bersih. Tahun 2019, penambahan infrastruktur air bersih semakin baik, tercatat mencapai 64,45 persen. Air merupakan kebutuhan dan bagian dari kehidupan manusia sebagai prasyarat dan elemen penting untuk dapat hidup sehat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui perusahaan daerah air minum (PDAM) hendaknya terus mengupayakan peningkatan layanan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan air bersih bagi rumah tangga dan bisnis merupakan kebutuhan yang utama. Air bersih menjadi prasyarat agar kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dan dalam upaya menekan peluang munculnya penyakit menular.

Tabel 2.84
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)	Na	57,16	60,88	64,45	Na

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, 2021

Berdasarkan data Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sangatta, terjadi peningkatan tiap tahunnya. Jumlah Air Baku Utama pada tahun 2020 sebesar 13.844.242 m³. Sementara itu, Kapasitas produksi pada tahun 2020 sebesar 645 liter/detik. Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2019 sejumlah 33.276 rumah tangga.

Tabel 2.85
Sarana Air Bersih PDAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Air Baku Utama (m ³)	Na	Na	11.428.771	12.962.093	13.844.242
Jumlah Pelanggan PDAM	20.664	23.349	24.896	28.641	33.276
Kapasitas Produksi (Liter/detik)	522	570	555	600	645
Jumlah air yang disalurkan (m ³)	646.887	10.671.371	11.236.306	12.765.701	13.633.145

Sumber: PDAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi suatu daerah, seperti tingkat keamanan, kecepatan proses pelayanan perijinan serta ada tidaknya pungutan berkaitan dengan minat dan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondisi yang kondusif di wilayah investasi. Kondisi ini mencakup: aspek keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya.

1. Tindak Kriminalitas

Tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi dan mengikuti tren peningkatan.

Tabel 2.86
Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Sektor
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019

No	Kepolisian Sektor	Tahun			Perubahan 2017-2018	Perubahan 2018-2019	Perubahan 2017-2019
		2017	2018	2019			
1	Muara Ancalong	9	9	9	0	0	0
2	Muara Wahau	22	28	39	6	11	17
3	Kombeng	13	21	16	8	-5	3
4	Muara Bengkal	11	8	18	-3	10	7
5	Sanggatta Utara	40	21	39	-19	18	-1
6	Bengalon	38	21	39	-17	18	1
7	Rantau Pulung	8	5	6	-3	1	-2
8	Sangkulirang	28	20	19	-8	-1	-9
9	Kaliorang	5	12	13	7	1	8
Jumlah		174	145	198	-29	53	24

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2020:127, diolah

Menurut data BPS (2020), dari 9 sektor kepolisian yang ada di Kabupaten Kutai Timur, empat sektor diantaranya yaitu: sektor Muara Wahau, sektor Sanggatta Utara, sektor Bengalon dan sektor Sangkulirang; relatif menerima laporan kejadian kriminalitas lebih banyak dibanding sektor lainnya, selama tahun 2017-2019. Angka kriminalitas yang lebih tinggi di tiga wilayah resort kepolisian ini mungkin terkait dengan luas wilayah kerja dengan jumlah polisi. Secara administrasi 3 dari 4 kecamatan yang dimaksud mempunyai luas wilayah di atas 3.000 km².

Tabel 2.87
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017-2019

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Perubahan 2017-2018	Perubahan 2018-2019	Perubahan 2017-2019
		2017	2018	2019			
1	Pembunuhan	7	4	2	-3	-2	-5
2	Penganiayaan berat	0	0	6	0	6	6
3	Penganiayaan ringan	19	9	12	-10	3	-7
4	KDRT	1	1	2	0	1	1
5	Pemerksaam	0	0	3	0	3	3
6	Pencabulan	17	11	19	-6	8	2
7	Penculikan	1	1	0	0	-1	-1
8	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	1	1	1	0	0	0
9	Pencurian biasa (Curbis)	28	12	21	-16	9	-7
10	Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	15	8	11	-7	3	-4
11	Pencurian dengan pemberatan (Curat)	13	6	23	-7	17	10
12	Narkotika dan Psicotropika	63	63	131	0	68	68
13	Penipuan	3	12	5	9	-7	2
14	Penggelapan	17	11	15	-6	4	-2
15	Korupsi	1	0	1	-1	1	0
Jumlah		186	139	252	-47	113	66

Sumber: BPS, Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka 2020:129, diolah

Kasus penyalahgunaan narkotika dan psicotropika merupakan tindak kriminal tertinggi yang dilaporkan selama tahun 2017-2019. Kasus berikutnya adalah pencurian biasa (Curbis), penganiayaan ringan, pencabulan, dan penggelapan. Bila disimak, terjadi peningkatan jumlah kasus lebih dari dua kali lipat selama tahun 2018-2019. Kasus pencurian biasa sempat turun tahun 2018, namun kembali meningkat tahun 2019. Kasus penganiayaan berat belum pernah muncul tahun 2017-2018; namun dilaporkan sebanyak 6 kasus pada tahun 2019. Adanya peningkatan gangguan keamanan, perlu mendapat perhatian lebih serius agar dapat lebih menjamin kantibmas agar kondusif untuk berinvestasi.

Indikator keamanan merupakan salah satu prasyarat dari daya tarik iklim investasi disamping tersedia tidaknya infrastruktur penunjang. Agar iklim investasi dan masuknya PMDN dan PMA di Kabupaten Kutai Timur dapat ditingkatkan, maka efisiensi tugas kepolisian hendaknya ditingkatkan tanpa harus menambah jumlah polisi dalam waktu singkat. Salah satu cara yang dapat diambil adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas polisi.

2. Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modal. Proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur, merupakan biaya tidak langsung bagi investor. Kemudahan memulai bisnis adalah salah satu kelemahan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk mendorong kegiatan investasi di Kabupaten Kutai Timur, maka kemudahan perijinan investasi harus dipercepat. Peningkatan investasi akan menciptakan lapangan kerja, dan selanjutnya akan menciptakan ketersediaan lapangan kerja.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publik, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka panjang hal ini akan membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang baik pula.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.88
Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ketergantungan (%)	39	38	39	40,45	39,54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh Penduduk Dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah



penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh Penduduk Muda/PM dan Penduduk Tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga dibutuhkan evaluasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya guna memprediksi perencanaan anggaran untuk periode selanjutnya.

Reformasi pengelolaan keuangan merupakan aspek kunci dari semua reformasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan telah mengubah penganggaran dari basis tradisional ke basis kinerja. Perubahan tersebut mengindikasikan semakin pentingnya pengukuran kinerja atas alokasi anggaran.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah didasari atas peraturan perundangan yang berlaku yang mengisyaratkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Setiap realisasi anggaran yang telah dialokasikan harus akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dilakukan baik melalui evaluasi program maupun pengukuran kinerja. Manfaat akuntabilitas ini adalah untuk meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan evaluasi program yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, dapat meningkatkan reliabilitas sistem pengukuran kinerja.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau baik dari kinerja keuangan daerah maupun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Berikut adalah uraian mengenai gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu diperlukan untuk memroyeksikan kinerja keuangan dimasa mendatang. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh gambaran kondisi keuangan yang menunjukkan potensi kinerja yang akan datang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mencerminkan kinerja suatu Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020 dapat disimak pada Tabel 3.1 dibawah ini. Realisasi pendapatan daerah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selama tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 4,92 persen. Fluktuasi realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini mempengaruhi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Komposisi dari realisasi pendapatan daerah secara lebih detil dapat disimak di bawah ini.

- 1) **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Selama tahun 2016-2020 realisasi PAD berfluktuasi cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan PAD selama lima tahun sebesar minus 8,48 persen. Ada 4 (empat) komponen dalam PAD yang berkontribusi yaitu: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan lain-lain PAD yang Sah. Di antara 4 (empat) komponen PAD ini, komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfluktuasi secara signifikan selama 2016-2020.

Komponen pertama, yaitu Pajak daerah. Komponen ini mempunyai tren kenaikan cukup signifikan. Penerimaan pajak daerah tahun 2017 **meningkat hampir 100 persen** dibanding nilai penerimaan tahun 2016. Nilai penerimaan pajak relatif bertahan sampai tahun 2018 meskipun dengan tren menurun. Penerimaan pajak daerah kembali meningkat sekitar 71 persen (Rp 64 Milyar tahun 2018; naik menjadi Rp 109 Milyar tahun 2019). Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan sebuah prestasi bagi daerah. Ada 2 (dua) kemungkinan penyebab meningkatnya penerimaan pajak daerah, yaitu (1) kenaikan objek pajak, (2) kenaikan dalam tarif pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur ini diduga berkaitan dengan salah satu faktor di atas dan adanya pengalihan kewenangan objek pajak dari pusat ke daerah atau kewenangan dari provinsi ke kabupaten. Hal ini sesuai dengan berlakunya Undang-Undang pajak daerah, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009.



Komponen kedua yang berpengaruh pada peningkatan PAD Kabupaten Kutai Timur pada periode 2016 - 2020 adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada tahun 2018 – 2019 yaitu dari Rp 6,9 Miliar di tahun 2018 meningkat menjadi Rp 9,4 M di tahun 2019. Peningkatan pendapatan ini mencerminkan kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang semakin baik.

- 2) **Realisasi Pendapatan Transfer.** Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak); Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri dari : Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Bantuan Keuangan terdiri dari : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Selama tahun 2016 - 2020, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 7,80 persen.

Diantara 4 (empat) komponen pendapatan transfer ini, komponen DBH pajak dan DBH SDA mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6,45 persen dan 24,72 persen dari tahun 2018 ke tahun 2019. Penerimaan DBH Pajak dan DBH SDA di Kabupaten Kutai Timur sangat ditentukan oleh kontribusi sektor pertambangan. Ketika kontribusi sektor ini mengalami peningkatan, maka dana transfer DBH Kabupaten Kutai Timur juga meningkat.

Menurut ketentuan dalam PMK Nomor: 39, 40 dan 50 Tahun 2007; secara umum pembagian DBH pajak dan SDA menetapkan komposisi 20 persen dan 80 persen bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari bagian 80 persen ini, hanya 16 persen digunakan oleh pemerintah provinsi dan sebanyak 64 persen didistribusikan kepada kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Timur sebagai penghasil sumber daya tambang yang paling besar menerima sebanyak 32 persen, dan sisanya 32 persen dibagi rata pada kabupaten lain di Kalimantan Timur secara merata.

Dana alokasi umum (DAU) mengalami perkembangan fluktuatif. Poin terbaik yang dapat dicatat dalam komponen dana penerimaan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur adalah peningkatan penerimaan dana alokasi khusus (DAK). Ada beberapa syarat suatu daerah



menerima DAK, yaitu: (i) Daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus), (ii) Daerah mempunyai karakteristik geografi yang sulit, atau merupakan daerah yang mempunyai mandat khusus, misalnya sebagai penyangga lumbung padi nasional. Di Indonesia, hanya ada tiga provinsi yang ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus yaitu: provinsi Aceh, provinsi Yogyakarta, dan Provinsi Papua. Karakteristik geografi daerah yang diprioritaskan mendapat DAK adalah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, daerah ketahanan pangan.

Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi kriteria pertama, yaitu daerah otonomi khusus, namun semua kriteria yang kedua terpenuhi. Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur terletak di wilayah terluar, sebagian merupakan wilayah pesisir, dan sebagian merupakan wilayah tertinggal.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya mengalami pertumbuhan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,15 persen. Komponen bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya pada tahun 2018–2019 mengalami peningkatan sebesar 108,11 persen yaitu Rp 87 Milyar menjadi Rp 182 Milyar.

- 3) **Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.** Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari dua komponen yaitu Pendapatan Hibah dan dan Pendapatan Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016-2020 sebesar 11,06 persen.



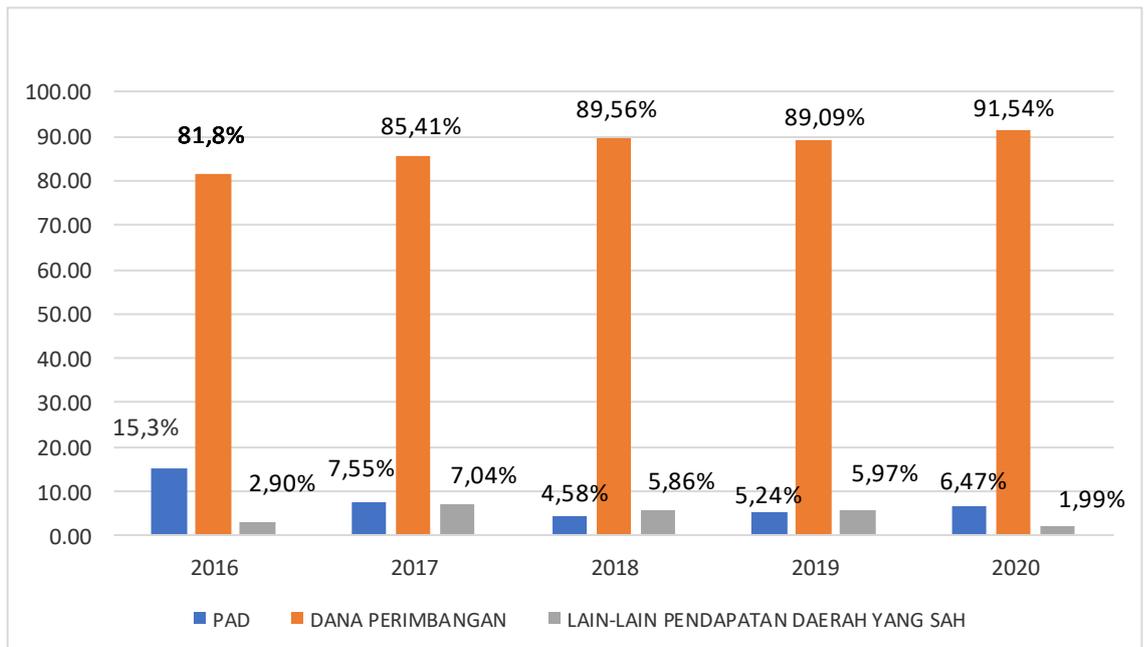
Tabel 3.1
Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN	3.122.663.213.603,80	2.313.030.073.128,44	3.159.094.050.724,79	3.967.561.463.077,27	3.309.865.794.397,59	4,92%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	477.803.740.268,80	174.641.081.100,59	144.594.266.979,72	207.991.778.309,17	214.011.744.385,59	-8,48%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52.287.570.956,29	105.236.329.357,00	64.296.215.593,74	109.901.499.522,61	114.059.971.335,90	34,27%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.653.867.500,00	7.272.918.766,00	6.987.885.840,00	9.405.179.349,00	6.876.867.424,00	8,11%
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.476.032.338,60	8.414.031.130,64	7.471.365.194,28	7.378.191.206,88	4.154.852.866,57	-6,55%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	413.386.269.473,91	53.717.801.846,95	65.838.800.351,70	81.306.908.230,68	88.920.052.759,12	-7,90%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.554.261.249.077,00	1.975.520.191.118,00	2.829.337.750.981,00	3.534.677.684.615,00	3.029.893.185.012,00	7,80%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.221.155.168.077,00	1.527.826.847.118,00	2.291.810.160.981,00	2.708.779.804.360,00	2.503.977.023.693,00	7,36%
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	192.386.443.126,00	113.389.307.457,00	210.988.623.151,00	224.602.117.809,00	193.251.430.668,00	9,38%
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.373.598.969.929,00	722.093.831.363,00	1.369.165.385.570,00	1.707.614.135.375,00	1.503.868.305.681,00	13,74%
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	528.907.493.392,00	565.517.743.274,00	552.776.510.000,00	584.855.941.000,00	570.247.961.000,00	1,99%
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	126.262.261.630,00	126.825.965.024,00	158.879.642.260,00	191.707.610.176,00	236.609.326.344,00	17,45%
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	33.274.329.000,00	33.027.245.000,00	72,24%
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	-	-	-	-	0,00%
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	0,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	33.274.329.000,00	33.027.245.000,00	72,24%
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	275.969.261.000,00	378.425.844.000,00	440.712.590.000,00	609.873.551.255,00	379.220.916.319,00	13,54%
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	275.969.261.000,00	378.425.844.000,00	440.712.590.000,00	609.873.551.255,00	379.220.916.319,00	13,54%
4.2.4	Bantuan Keuangan	57.136.820.000,00	61.767.500.000,00	87.815.000.000,00	182.750.000.000,00	113.668.000.000,00	30,15%
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	57.136.820.000,00	61.767.500.000,00	87.815.000.000,00	182.750.000.000,00	113.668.000.000,00	30,15%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.598.224.258,00	162.868.800.909,85	185.162.032.764,07	224.892.000.153,10	65.960.865.000,00	11,06%
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	45.533.263.328,85	44.652.798.981,69	55.630.598.217,10	65.960.865.000,00	10,31%
4.3.3	Pendapatan Lainnya	90.598.224.258,00	117.335.537.581,00	140.509.233.782,38	169.261.401.936,00	-	-7,57%

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur masih tergantung pada dana perimbangan. Pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

Gambar 3.1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2020



Sumber : Laporan Realisasi APBD Kutim (diolah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Beberapa kewenangan pemerintah daerah adalah: urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Untuk kewenangan yang terakhir, kewenangan ini dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan



pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



Tabel 3.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

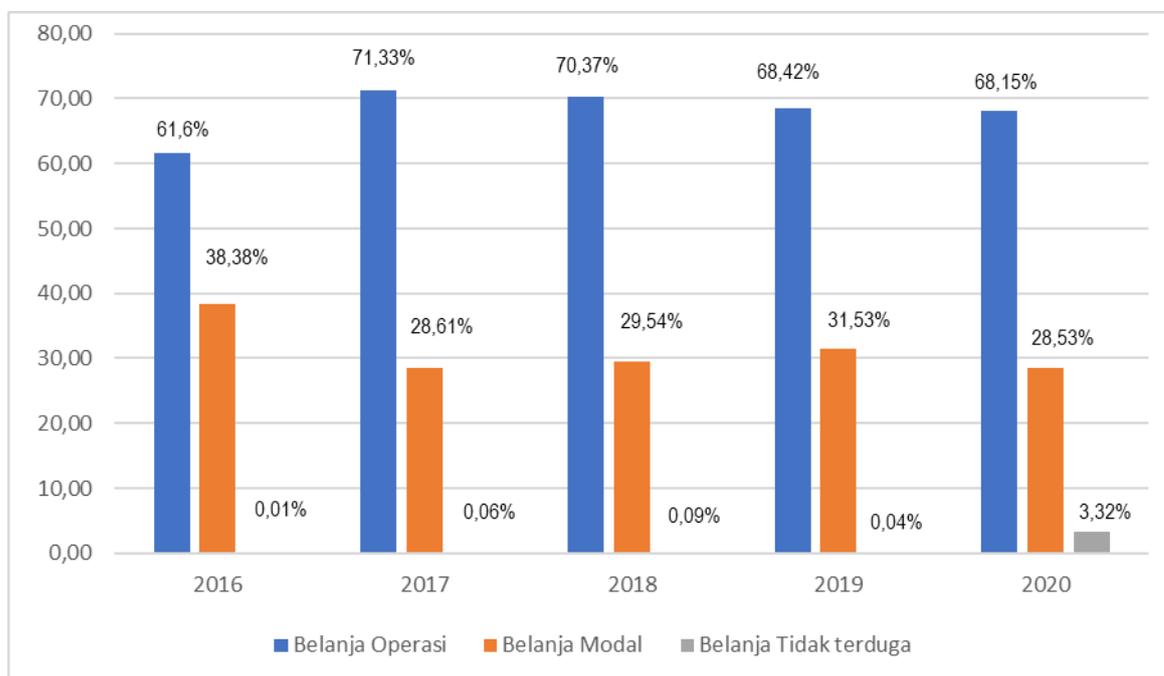
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	BELANJA	2.932.255.740.049,68	2.120.926.482.398,72	2.853.990.613.877,32	3.376.054.592.875,04	2.965.244.619.802,25	3,25%
5.1	Belanja Operasi	1.806.654.545.417,05	1.512.870.305.404,52	2.008.394.549.841,33	2.309.944.499.613,03	2.020.677.785.157,05	4,75%
5.1.1	Belanja Pegawai	699.871.976.143,00	593.902.968.771,00	703.515.152.924,25	710.044.009.363,76	1.047.254.979.350,73	12,93%
5.1.2	Belanja Barang	1.028.763.887.274,05	848.270.525.065,52	1.182.212.489.304,64	1.510.449.236.359,27	841.784.502.181,32	1,33%
5.1.4	Belanja Subsidi	10.183.744.000,00	5.351.612.000,00	493.666.000,00	916.478.000,00	0,00	-38,14%
5.1.5	Belanja Hibah	67.834.938.000,00	62.087.899.568,00	121.418.341.612,44	88.037.993.890,00	131.638.303.625,00	27,28%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	3.257.300.000,00	754.900.000,00	496.782.000,00	0,00	-53 %
5.2	Belanja Modal	1.125.351.194.632,63	606.770.976.994,20	843.100.468.535,99	1.064.610.093.262,01	845.995.807.422,20	-0,35%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	54.435.069.900,00	4.377.373.000,00	53.689.563.016,00	35.595.135.488,00	48.008.398.800,00	258,93%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.566.965.047,63	155.736.469.081,20	152.056.735.146,99	249.896.990.586,75	209.685.868.170,20	9,99%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.375.685.392,00	137.693.732.210,00	117.951.192.790,00	236.642.802.784,00	157.562.287.313,00	7,41%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	661.092.849.097,00	260.938.563.750,00	465.968.018.113,00	478.743.251.738,26	395.789.980.797,00	0,86%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	64.880.625.196,00	48.024.838.953,00	53.434.959.470,00	63.731.912.665,00	34.949.272.342,00	-10,15%
5.3	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	1.285.200.000,00	2.495.595.500,00	1.500.000.000,00	98.571.027.223,00	1734,94%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	1.285.200.000,00	2.495.595.500,00	1.500.000.000,00	98.571.027.223,00	1734,94%

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja operasi. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja operasi mencapai kisaran angka sebesar 62% sampai dengan 71%, sedangkan proporsi belanja modal mencapai kisaran angka 29% sampai dengan 38%. Proporsi belanja tidak terduga mencapai kisaran angka 0,01% sampai dengan 3,32%.

Komposisi belanja operasi yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.2. Komposisi Belanja Kabupaten Kutai Timur, 2016 - 2020



Sumber : Laporan Realisasi APBD Kutai Timur, 2016-2020 (data diolah)

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Tabel 3.2 menyajikan ringkasan realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020. Belanja Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar yaitu: (i) belanja operasi (ii) belanja



modal dan (iii) belanja tidak terduga. Selama tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 3,25 persen.

Secara garis besar rata-rata total serapan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2020 sebesar 90,16 persen dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan. Angka penyerapan yang paling rendah yaitu sebesar 82,17 persen di tahun 2017, sementara yang paling tinggi sebesar 98,25 persen di tahun 2016.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2016	2.984.625.263.828,00	2.932.255.740.049,68	98,25	(52.369.523.778,32)
2017	1.841.192.321.300,00	1.512.870.305.404,52	82,17	(328.322.015.895,48)
2018	2.335.738.863.770,00	2.008.394.549.841,33	85,99	(327.344.313.928,67)
2019	3.574.790.169.584,00	3.376.054.592.875,04	94,44	(198.735.576.708,96)
2020	3.296.244.805.769,00	2.965.244.619.802,25	89,96	(331.000.185.966,75)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

1. **Belanja Operasi.** Target dan realisasi belanja operasi tahun 2016-2020 digambarkan pada Tabel 3.4 berikut ini. Rata-rata penyerapan belanja operasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020 adalah sebesar 89,80 persen. Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2017, masing-masing sebesar 97,76 persen dan 82,17 persen.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2016	1.848.085.354.955,00	1.806.654.545.417,05	97,76	(41.430.809.537,95)
2017	1.841.192.321.300,00	1.512.870.305.404,52	82,17	(328.322.015.895,48)
2018	2.335.738.863.770,00	2.008.394.549.841,33	85,99	(327.344.313.928,67)
2019	2.461.927.689.794,00	2.309.944.499.613,03	93,83	(151.983.190.180,97)
2020	2.264.116.025.910,00	2.020.677.785.157,05	89,25	(243.438.240.752,95)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

2. **Belanja Modal.** Komponen belanja daerah yang kedua adalah belanja modal dengan target dan realisasi tahun 2016-2020 yang digambarkan pada Tabel 3.5 di bawah ini. Rata-rata total serapan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2020 adalah sebesar 87,27 persen dari jumlah yang dianggarkan. Penyerapan terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 63,78



persen. Sedangkan penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 99,04 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kapabilitas yang meningkat dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2016	1.136.239.908.873,00	1.125.351.194.632,63	99,04	(10.888.714.240,37)
2017	721.993.898.045,00	606.770.976.994,20	84,04	(115.222.921.050,80)
2018	1.321.887.333.997,00	843.100.468.535,99	63,78	(478.786.865.461,01)
2019	1.111.362.479.790,00	1.064.610.093.262,01	95,79	(46.752.386.527,99)
2020	903.128.779.859,00	843.995.807.422,20	93,67	(57.132.972.436,80)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

3. **Belanja Tidak Terduga.** Rata-rata penyerapan Belanja Tidak Terduga pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020 adalah sebesar 89,05 persen. Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020, masing-masing sebesar 100 persen dan 76,41 persen.

Secara rinci persentase penyerapan keuangan dari beberapa komponen belanja tidak terduga dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2016	300.000.000,00	250.000.000,00	83,33	(50.000.000,00)
2017	1.500.000.000,00	1.285.200.000,00	85,68	(214.800.000,00)
2018	2.500.000.000,00	2.495.595.500,00	99,82	(4.404.500,00)
2019	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
2020	129.000.000.000,00	98.571.027.223,00	76,41	(30.428.972.777,00)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

C. Transfer

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada pemerintahan desa atau lembaga lain dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan lembaga yang bersangkutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transfer bantuan keuangan terdiri dari tiga komponen yaitu (i) transfer bantuan keuangan ke pemerintah lainnya, (ii) transfer bantuan keuangan ke desa, (iii) transfer bantuan keuangan lainnya.



Rata-rata pertumbuhan realisasi transfer daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur periode 2016–2020 sebesar 16,01 persen.

Tabel 3.7
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
6	TRANSFER	190.926.892.943,00	177.952.440.719,00	312.767.180.098,00	449.075.125.712,00	231.245.857.237,00	16,01
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	190.926.892.943,00	177.952.440.719,00	312.767.180.098,00	449.075.125.712,00	231.245.857.237,00	16,01
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	0	0	3.000.000.000,00	0	0	0
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	190.279.162.475,00	177.952.440.719,00	309.297.625.474,00	448.609.105.388,00	230.784.784.933,00	15,95
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	647.730.468,00	0	469.554.624,00	466.020.324,00	461.072.304,00	-25,45

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

Rata-rata penyerapan transfer daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020 adalah sebesar 79,35 persen. Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020, masing-masing sebesar 98,99 persen dan 54,58 persen.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Transfer Daerah
Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2016	194.197.975.039,00	190.926.892.943,00	98,32	(3.271.082.096,00)
2017	259.200.283.000,00	177.952.440.719,00	68,65	(81.247.842.281,00)
2018	410.387.755.663,00	312.767.180.098,00	76,21	(97.620.575.565,00)
2019	453.663.275.702,00	449.075.125.712,00	98,99	(4.588.149.990,00)
2020	423.667.094.740,00	231.245.857.237,00	54,58	(192.421.237.503,00)

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang ditujukan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.



Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perhitungan SiLPA tahun anggaran 2016-2020 mengalami fluktuasi, terutama terjadi pada periode 2019 – 2020.
- 2) Realisasi penyertaan modal investasi pemerintah daerah tahun 2020 sebesar Rp 5 M.

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
7	Pembiayaan	17.464.253.861,96	16.944.834.473,08	31.095.984.484,00	23.705.548.089,08	159.230.318.401,31
7.1	Penerimaan Pembiayaan	17.464.253.861,96	16.944.834.473,08	31.095.984.484,00	23.705.548.089,08	164.230.318.401,31
7.1.1	Penggunaan SILPA	17.464.253.861,96	16.944.834.473,08	31.095.984.484,00	23.705.548.089,08	164.230.318.401,31
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	5.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	5.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

E. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Kutai Timur pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp9,9 triliun yang kemudian menurun menjadi sebesar Rp 9,6 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset kembali menurun menjadi sebesar Rp9,3 triliun dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp9,7 triliun serta meningkat kembali di tahun 2020 sebesar Rp9,8triliun.



Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya dominan timbul karena utang jangka pendek lainnya. Pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai kewajiban dengan pihak ketiga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020 nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat.



Tabel 3.10
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RERATA PERTUMBUHAN (%)
ASET	9.899.475.230.857,18	9.654.516.664.765,83	9.368.599.850.533,87	9.780.644.494.000,34	9.889.919.115.439,58	0,00
ASET LANCAR	323.004.438.951,19	226.870.197.825,35	268.578.261.170,92	289.046.081.157,75	485.557.583.610,77	0,16
KAS	37.309.036.711,64	34.767.732.500,11	25.393.515.386,89	166.137.294.982,31	272.612.678.007,55	1,46
Kas di Kas Daerah	10.043.036.491,86	447.417.721,98	1.239.453.284,14	132.915.792.174,26	243.353.106.356,12	26,97
Kas di Bendahara Penerimaan	14.961.500,00	13.418.500,00	127.275.000,00	127.747.500,00	147.989.670,00	2,14
Kas di Bendahara Pengeluaran	33.387.312,00	154.908,00	1.569.070,00	-	8.978.967,00	4,07
Kas di BLUD	21.692.466.496,69	27.938.649.057,26	19.439.984.585,96	20.504.381.777,12	22.336.185.328,69	0,03
Kas di Bendahara FKTP	-	-	1.889.596.232,67	2.268.688.432,88	1.775.504.275,79	-0,01
Kas di JKN	-	2.441.071.462,00	-	-	-	-
Kas Lainnya-BOSNAS	-	2.829.619.083,87	1.625.728.034,12	10.320.682.695,05	4.983.880.209,05	1,47
Kas Lainnya	5.525.184.911,09	1.097.401.767,00	1.069.909.180,00	2.403,00	7.033.200,90	731,00
PIUTANG	165.898.084.895,77	122.094.753.029,76	148.965.357.526,41	46.744.556.864,04	103.469.694.118,00	0,12
Piutang Pendapatan	184.338.637.815,64	142.331.162.859,69	179.832.654.008,28	93.986.106.648,58	151.028.265.430,90	0,04
Piutang Lainnya	2.158.321.854,62	1.684.108.994,51	1.941.513.588,38	1.733.684.761,06	2.317.413.343,11	0,04
Penyisihan Piutang	- 20.598.874.774,49	- 21.920.518.824,44	- 32.808.810.070,25	- 48.975.234.545,60	- 49.875.984.656,01	0,27
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	97.553.015,67	763.015.125,00	451.533.125,00	1.310.565.708,33	1.169.977.941,66	2,05
PERSEDIAAN	119.699.764.328,11	69.244.697.170,48	93.767.855.132,62	74.853.663.603,07	108.305.233.543,56	0,04
INVESTASI JANGKA PANJANG	112.663.180.695,97	113.121.550.784,84	111.524.320.002,88	154.393.236.883,21	162.516.334.330,37	0,11
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	1.152.257.693,00	1.149.223.925,00	1.168.468.513,00	1.168.468.513,00	1.168.468.513,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	1.152.257.693,00	1.149.223.925,00	1.168.468.513,00	1.168.468.513,00	1.168.468.513,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	111.510.923.002,97	111.972.326.859,84	110.355.851.489,88	153.224.768.370,21	161.347.865.817,37	0,11
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	111.510.923.002,97	111.972.326.859,84	110.355.851.489,88	153.224.768.370,21	161.347.865.817,37	0,11
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-



Bab III Gambaran Keuangan Daerah

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RERATA PERTUMBUHAN (%)
ASET TETAP	9.444.656.145.871,36	8.783.055.931.743,54	8.877.912.241.009,60	9.163.876.081.365,98	8.657.353.156.629,45	-0,02
Tanah	1.572.482.620.503,00	1.563.589.624.441,00	1.596.317.371.077,00	1.619.834.634.972,00	1.653.719.241.907,00	0,01
Peralatan dan Mesin	1.319.882.132.739,78	1.372.265.745.958,64	1.512.252.192.519,54	1.701.559.983.888,44	1.832.936.707.003,31	0,09
Gedung dan Bangunan	3.781.057.864.044,97	3.263.363.882.236,39	3.367.087.202.410,71	3.564.528.662.858,49	3.751.592.753.585,46	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.161.964.029.900,85	5.553.153.804.835,85	5.800.069.445.880,85	6.128.704.475.748,58	6.239.710.506.175,56	0,05
Aset Tetap Lainnya	107.128.148.574,68	129.997.654.512,68	179.371.000.884,18	179.459.773.802,18	88.570.780.327,03	0,02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.737.353.883,00	70.029.116.968,00	196.585.393.804,00	312.078.103.838,00	336.178.792.219,00	0,68
Akumulasi Penyusutan	2.554.596.003.774,92	3.169.343.897.209,02	3.773.770.365.566,68	4.342.289.553.741,71	5.245.355.624.587,91	0,20
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	19.151.465.338,66	531.468.984.415,17	110.585.028.350,47	173.329.094.593,40	584.492.040.868,99	7,22
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	785.130.000,33	10.273.831.300,00	14.784.675.057,00	39.555.084.769,00	55.972.213.204,39	3,65
Aset Lain-Lain	18.516.391.921,66	610.720.711.158,79	97.492.083.149,55	155.880.237.599,03	563.258.891.906,47	8,59
Akumulasi Amortisasi	150.056.583,33	548.499.267,08	1.691.729.856,08	22.106.227.774,63	34.739.064.241,87	4,34
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	88.977.058.776,54	-	-	-	-
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.899.475.230.857,18	9.654.516.664.765,83	9.368.599.850.533,87	9.780.644.494.000,34	9.889.919.115.439,58	0,00
KEWAJIBAN	1.283.536.739.343,89	1.274.384.203.031,98	721.716.989.967,59	397.254.605.794,08	344.257.590.702,43	-0,26
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.283.536.739.343,89	1.274.384.203.031,98	721.716.989.967,59	397.254.605.794,08	344.257.590.702,43	-0,26
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	17.744.310.064,56	2.550.656.013,50	503.711.262,56	2.400,00	63.200,00	5,67
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	22.994.583,33	647.402.400,72	367.770.198,33	287.836.311,59	546.097.750,00	6,85
Utang Beban	137.104.910.416,60	199.769.374.428,22	319.137.403.158,00	97.680.857.001,00	114.289.882.366,54	0,13
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.128.664.524.279,40	1.071.416.770.189,54	401.708.105.348,70	299.285.910.081,49	229.421.547.385,89	-0,29
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	8.615.938.491.513,29	8.380.132.461.733,85	8.646.882.860.566,28	9.383.389.888.206,26	9.545.661.524.737,15	0,03



Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek

Tabel 3.11
Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Kutai Timur, 2016-2020

RASIO	RUMUS	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	323.004	226.870	268.578	289.046	485.557
	Kewajiban Jangka Pendek	1.283.536	1.274.384	721.716	397.254	344.257
	Rasio Lancar	0,252	0,178	0,372	0,728	1,410
	Aset Lancar-Persediaan	203.305	157.626	174.811	214.193	377.252
	Kewajiban Jangka Pendek	1.283.536	1.274.384	721.716	397.254	344.257
	Rasio Cepat	0,158	0,124	0,242	0,539	1,096
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	1.283.536	1.274.384	721.716	397.254	344.257
	Total Aset	9.899.475	9.654.516	9.368.599	9.780.644	9.889.919
	Rasio Total Hutang (%)	0,130	0,132	0,077	0,041	0,035
	Total Hutang	1.283.536	1.274.384	721.716	397.254	344.257
	Total Ekuitas	8.615.938	8.380.132	8.646.882	9.383.389	9.545.661
	Rasio Hutang/Ekuitas	0,149	0,152	0,083	0,042	0,036

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Kutai Timur, 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.11, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengindikasikan bahwa Pemerintah susah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 relatif berfluktuasi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengalami perubahan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2016 mencapai 0,252 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah 0,252 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan



masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio cepat lebih akurat dibandingkan rasio lancar karena telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan seperti tampak dalam Tabel Analisis Rasio Neraca Daerah, diperoleh nilai rasio cepat neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang fluktuatif dan dibawah 1.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 sebesar 0,130% artinya sebesar Rp0,13 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

3.2 ANALISIS KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, dan belanja tertentu. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked*; ditentukan penggunaannya). Semakin besar Kapasitas Fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan untuk melaksanakan inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara teknis, kapasitas fiskal dapat dihitung menggunakan formula berikut ini:



Kapasitas Fiskal	= [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya + Belanja]
Penerimaan Umum APBD	= Pendapatan + silpa
Pendapatan Mengikat	= DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus
Belanja Mengikat	= Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil + Belanja langsung terkait dengan Rutin OPD
Belanja Wajib	= Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Belanja Wajib lainnya

Sesuai dengan hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020 ditemukan bahwa kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Kutai Timur sangat berfluktuatif. Tabel berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2020, kapasitas fiskal daerah yang tercipta cukup berimplikasi pada terbatasnya kesediaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah.

Tabel 3.12
Kapasitas Fiskal Kabupaten Kutai Timur, 2016-2020

		2016	2017	2018	2019	2020
	Penerimaan	3.122.663.213.603,80	2.313.030.073.128,44	3.159.094.050.724,79	3.967.561.463.077,27	3.309.865.794.397,59
a	Pendapatan mengikat					
	DAK	126.262.261.630,00	126.825.965.024,00	158.879.642.260,00	191.707.610.176,00	236.609.326.344,00
	Hibah	0	45.533.263.328,85	44.652.798.981,69	55.630.598.217,10	65.960.865.000,00
	Dana Penyesuaian	0	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	33.274.329.000,00	33.027.245.000,00
b	Belanja mengikat					
	Pegawai	699.871.976.143,00	593.902.968.771,00	703.515.152.924,25	710.044.009.363,76	1.047.254.979.350,73
	bunga					
	bagi hasil	190.279.162.475,00	177.952.440.719,00	309.297.625.474,00	448.609.105.388,00	230.784.784.933,00
c	Belanja Wajib					
	Pendidikan	624.532.642.721	462.606.014.626	631.818.810.145	793.512.292.615	661.973.158.880
	Kesehatan	312.266.321.360	231.303.007.313	315.909.405.072	396.756.146.308	330.986.579.440
	Infrastruktur	132.226.873.348	141.379.435.819	138.194.127.500	146.213.985.250	142.561.990.250



		2016	2017	2018	2019	2020
	Total a+b+c	2.085.439.237.677,14	1.787.003.095.599,88	2.311.267.562.357,38	2.775.748.076.318,04	2.749.158.929.197,01
	Kapasitas Fiskal	1.037.223.975.926,66	526.026.977.528,56	847.826.488.367,41	1.191.813.386.759,23	560.706.865.200,58

3.2.2 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Sesuai dengan kebutuhan perhitungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI menyusun peta kapasitas fiskal daerah yang merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah

Formulasi yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah sebelum tahun 2017 mengacu pada formula berikut :

$$KF = \frac{(\text{PAD} + \text{DAU} + \text{DBH} + \text{OTSUS} + \text{TRANSFER PROV} + \text{LP}) - \text{BP}}{\text{JUMLAH PENDUDUK MISKIN}}$$

Keterangan

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- Transfer Prov = Transfer= Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
- LP= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BP= Belanja Pegawai

Sedangkan mulai tahun 2017, formula yang digunakan dalam menghitung kapasitas fiskal daerah adalah ditampilkan sebagai berikut:

$$KFDi = [\text{Penerimaan Umum APBD}] - [\text{Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya} + \text{Belanja}]$$

$$KFDi = [\text{PAD} + \text{BHP} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{Otsus} + \text{TPG/Tamsil}] -$$



[DTK + PR TDP + DBH DR TDP + DBH CHT TDP + BBH + BH DOB + DD + ADD + Otsus + BP + BB]

$$IKFDi = \frac{KFDi}{(\sum KFDi)/n}$$

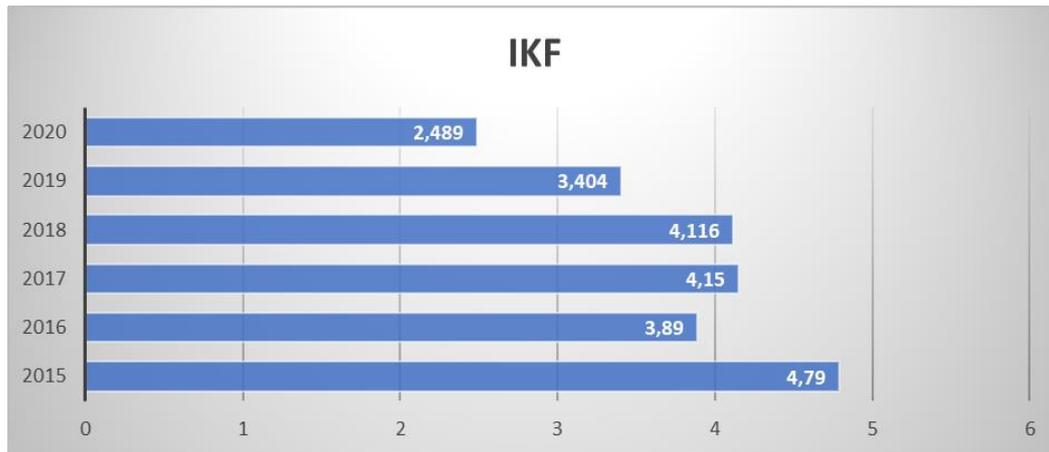
Keterangan:

- KFD = Kapasitas Fiskal Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BHP = Bagi Hasil Provinsi
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- TPG/Tamsil = Tunjangan Penghasilan Guru /Tambahan Penghasilan
- DBHDR TDP = DEB Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya
- DBHCHT TDP = DEB Cukai Basil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya
- BBH = Belanja Bagi Hasil
- BH DOB = Bagi Hasil untuk daerah otonom baru
- DD = Dana Desa
- ADD = Alokasi Dana Desa
- BP = Belanja Pegawai
- BB = Belanja Bunga
- IKFDi = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Kutai Timur dalam enam tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun perubahan tersebut masih dalam kategori nilai IKF yang sangat tinggi. Berikut tabel IKF Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2015-2020 :

Tahun	IKF	Keterangan
2015	4,79	Sangat Tinggi
2016	3,89	Sangat Tinggi
2017	4,15	Sangat Tinggi
2018	4,116	Sangat Tinggi
2019	3,404	Sangat Tinggi
2020	2,489	Sangat Tinggi

Sumber Data : Permenkeu Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2015-2020

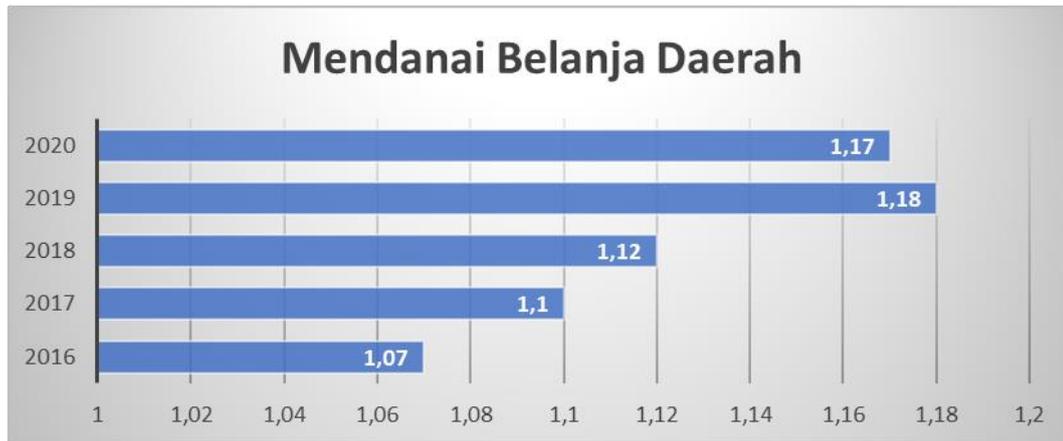


Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2020

3.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kutai Timur selama periode tahun 2016-2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada diatas angka 1,berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Kemampuan mendanai belanja daerah, dari sebesar 1,07 pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,10 pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 1,12 pada tahun 2018,serta 1,18 pada tahun 2019, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,17



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Timur 2016-2020 (diolah)

Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah

3.2.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang dicerminkan dengan peran Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah maupun belanja daerah. Daerah-daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Tabel berikut menunjukkan perbandingan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020. Selama periode tersebut peran PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur. Peran PAD terhadap total pendapatan daerah tertinggi pada tahun 2016 sebesar 15,30% dan terus turun sampai pada yang terendah di tahun 2018 sebesar 4,58%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD mempunyai proporsi yang sangat kecil terhadap total pendapatan daerah dengan kata lain pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Peran PAD terhadap total belanja daerah tertinggi pada juga ada pada tahun 2016 sebesar 16,29% dan terus turun sampai yang terendah di tahun 2018 sebesar 5,07%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah sebagian besar bahkan sangat tergantung dibiayai dari dana transfer.

Tabel 3.13
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Tahun	PAD terhadap Total Pendapatan	PAD terhadap Total Belanja
2016	15,30%	16,29%
2017	7,55%	8,23%
2018	4,58%	5,07%
2019	5,24%	6,16%
2020	6,47%	7,22%

Sumber: Laporan Realisasi APBD, DJPK 2016-2020 (diolah)



3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan adalah proyeksi pendapatan dan belanja. Proyeksi tersebut bertujuan memberi gambaran kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selain itu, kerangka pendanaan digunakan untuk alokasi belanja prioritas utama dan program-program pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur mengacu pada data dan informasi yang dapat memengaruhi besaran dan pertumbuhannya. Data dan informasi tersebut meliputi: (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; (4) Kebijakan transfer ke daerah oleh Pemerintah. Sedangkan proyeksi belanja dan pembiayaan disusun dengan mengutamakan atau memprioritaskan belanja yang menjadi kewajiban dan sifatnya mengikat.



Tabel 3.14
Proyeksi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN	2.849.283.632.000	3.063.067.319.000	3.183.489.967.000	3.298.848.121.000	3.418.906.370.000	3.543.861.947.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.833.612.000	210.875.291.000	221.419.052.000	232.489.991.000	244.114.486.000	256.320.209.000
4.1.01	Pajak Daerah	111.450.500.000	117.023.024.000	122.874.173.500	129.017.874.000	135.468.766.000	142.242.201.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.367.000.000	6.685.350.000	7.019.616.500	7.370.594.000	7.739.121.000	8.126.080.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.750.000.000	7.087.500.000	7.441.875.000	7.813.968.000	8.204.667.000	8.614.900.000
4.1.04	Lain - lain PAD yang sah	76.266.112.000	80.079.417.000	84.083.387.000	88.287.555.000	92.701.932.000	97.337.028.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.584.764.520.000	2.785.322.253.000	2.893.863.745.000	2.996.786.817.000	3.103.829.144.000	3.215.159.744.000
4.2.01	Pendapatan Transfer pusat	2,172,764,520,000	2,245,465,255,000	2,343,209,607,000	2,435,119,598,000	2,530,928,579,000	2,630,801,168,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	412,000,000,000	539,856,998,000	550,654,138,000	561,667,219,000	572,900,565,000	584,358,576,000
4.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63,685,500,000	66,869,775,000	68,207,170,000	69,571,313,000	70,962,740,000	72,381,994,000
5	BELANJA	2,790,565,651,686	3,047,560,448,190	3,183,480,126,182	3,298,835,583,466	3,418,892,811,798	3,543,849,200,292
5.1	BELANJA OPERASI	1,889,791,692,954	1,900,656,647,704	1,909,815,775,576	1,919,839,858,198	1,930,656,647,704	1,944,656,647,704
5.1.1	Belanja Pegawai	975,509,632,227	976,509,632,227	980,509,632,227	985,374,586,977	989,509,632,227	992,509,632,227
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	849,989,690,623	859,854,645,373	865,013,773,245	870,172,901,117	876,854,645,373	887,854,645,373
5.1.5	Belanja Hibah	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	371,750,000	371,750,000	371,750,000	371,750,000	371,750,000	371,750,000
5.2	BELANJA MODAL	608,289,538,396	818,073,225,396	937,495,873,396	999,506,585,036	1,062,987,228,174	1,110,992,328,022
5.2.1	Belanja Modal Tanah	29,606,024,400	34,606,024,400	38,606,024,400	39,606,024,400	44,606,024,400	51,606,024,400
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,796,248,461	80,796,248,461	83,796,248,461	87,796,248,461	90,796,248,461	97,796,248,461
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135,436,938,361	246,558,430,361	280,162,561,664	332,162,561,664	380,594,152,113	408,011,532,324
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	364,191,245,944	452,853,440,944	530,671,957,641	535,182,669,281	539,731,721,970	544,319,441,607
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,259,081,230	3,259,081,230	4,259,081,230	4,759,081,230	7,259,081,230	9,259,081,230
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24,432,572,871	28,671,477,669	33,645,807,015	39,483,152,657	46,333,242,745	54,371,782,361



Bab III Gambaran Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	24,432,572,871	28,671,477,669	33,645,807,015	39,483,152,657	46,333,242,745	54,371,782,361
5.4	BELANJA TRANSFER						
5.4.1	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	268,051,847,465	300,159,097,421	302,522,670,195	340,005,987,575	378,915,693,175	433,828,442,206
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	267,594,958,130	299,706,353,106	302,074,033,295	339,561,420,827	378,475,159,654	433,391,905,320
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	456,889,335	452,744,315	448,636,900	444,566,748	440,533,521	436,536,886
	Surplus/Defisit	58,717,980,314	15,506,870,810	9,840,818	12,537,534	13,558,202	12,746,708
7	PEMBIAYAAN DAERAH						
7.1	Penerimaan Pembiayaan	272,605,635,759.65	326,323,616,073.65	336,830,486,884.05	331,840,327,701.68	326,852,865,235.19	321,866,423,437.51
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
7.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembiayaan Netto	267,605,635,760	321,323,616,074	331,830,486,884	326,840,327,702	321,852,865,235	316,866,423,438
	SILPA	326,323,616,074	336,830,486,884	331,840,327,702	326,852,865,235	321,866,423,438	316,879,170,145

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah diharapkan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Soares et al., 2015). Pembangunan daerah sebenarnya merupakan kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat (Rosana, 2018). Pembangunan daerah yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan strategis yang memadai. Langkah penting dalam dalam proses perencanaan strategis adalah identifikasi isu-isu strategis merupakan langkah penting.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Ditinjau dari Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu harus mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Sehubungan pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, maka permasalahan pembangunan dapat ditinjau dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Menurut Bruntland (1987) pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kemampuan bumi beserta isinya untuk bertahan dari kepunahan. Ketiga pilar tersebut terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial (SDM). Hal ini berarti pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan ekonomi yang sekaligus juga melindungi lingkungan serta melakukan tanggungjawab sosial.



Sumber: GRI (2018)



Gambar 4.1
Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Permasalahan Pembangunan Daerah Ditinjau dari Pilar Pembangunan Berkelanjutan
diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Pilar Pembangunan	Permasalahan yang Teridentifikasi
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. PAD cenderung menurun2. Belanja kurang efisien3. Kurangnya kontribusi Sektor pertanian dalam ekonomi4. Infrastruktur pertanian kurang memadai5. Nilai tukar petani yang masih fluktuatif sehingga belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan petani6. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan7. Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih bersifat konvensional8. Target menjadi swasembada pangan belum terpenuhi9. Kondisi infrastruktur jalan banyak yang rusak dan kurang mendukung triple agro10. Masih ada kecamatan yang belum teraliri jaringan listrik, yakni kecamatan sandaran, Kaubun, dan Busang11. Ketersediaan jaringan internet dan telekomunikasi yang merata diseluruh wilayah menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya daya saing daerah.
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Pencemaran lingkungan (Tanah, air, dan udara)2. Emisi Gas Karbon dan Gas Rumah Kaca3. Belum tersedianya pengelolaan sampah yang memadai dan gerakan masif pengurangan sampah plastik.4. Jangkauan pelayanan PDAM belum mampu melayani seluruh kebutuhan air bersih masyarakat.5. Adanya permukiman di Taman Nasional Kutai6. Pemanfaatan lahan yang masih belum berkesesuaian, sehingga kepatuhan ketentuan tata ruang (RTRW) masih kurang.7. Kondisi Infrastruktur masih banyak yang kurang memadai dan kurang merata.8. Pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum memadai9. Masih terdapat kawasan kumuh di daerah padat penduduk.10. Masih terjadi alih fungsi lahan
Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya prosentase penduduk miskin.2. Terdapatnya tenaga pendidik yang kualifikasi pendidikannya tidak bergelar sarjana sesuai bidangnya.3. Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular4. Masih Terdapat kasus stunting5. Kurangnya tenaga dokter spesialis, staf kesehatan, dan Sarpras penunjang kesehatan6. Terdapat pekerja yang kualifikasinya tidak sesuai pasar kerja.7. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka



Pilar Pembangunan	Permasalahan yang Teridentifikasi
	8. Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba dan NAPZA 9. Meningkatnya kasus kriminalitas 10. Kurangnya tatalaksana Good Governance 11. Kurangnya akses layanan komunikasi dan informasi 12. Kurang Optimalnya Program Tribina (Bina Balita, Bina Remaja, dan Bina Lansia)

Sumber: data olahan

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Per Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan per urusan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, menjadi fokus utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis di Kabupaten Kutai Timur. Adapun permasalahan yang dimaksud, disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan/ Permasalahan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan
	a. Masih kurangnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan. b. Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan kurang merata. c. Terbatasnya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil khususnya tingkat SMP. d. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau seluruh masyarakat.
2.	Kesehatan
	a. Terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersebar secara merata dan proporsional di setiap wilayah. b. Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan. c. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman, perbatasan dan terpencil. d. Belum optimalnya penanganan kasus gizi buruk dan bayi lahir dengan berat badan rendah e. Masih terdapat prevalensi HIV/AIDS
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. Kurangnya pemerataan infrastruktur dasar: air minum, listrik , dan kualitas jalan terutama di wilayah pedesaan. b. Kurangnya kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah. c. Kurangnya kapasitas monitoring kepatuhan tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang d. Pengembangan pedestrian dan kelengkapan jalan, khususnya penerangan Jalan Umum kurang memadai. e. Kurang memadainya jaringan drainase, khususnya yang terkait penanganan air limpasan dan lokasi genangan air/ banjir (penanganan air limpasan dan air genangan saat hujan).



No	Urusan/ Permasalahan
	f. Jaringan irigasi kurang mendukung tersedianya air khususnya di wilayah sentra produksi pangan.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	a. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan b. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan c. Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman.
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	a. Masih kurangnya penegakan Perda terkait ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat b. Sarana dan prasarana (<i>early warning system</i>) penanggulangan bencana, serta penanganan pasca bencana belum memadai. c. Meningkatkan status dan “Desa Tangguh Bencana” di beberapa kecamatan yang rawan mengalami rawan kebakaran hutan dan lahan (kahutla); khususnya Kecamatan Bengalon dan Rantau Pulung.
6.	Sosial
	a. Belum memadainya <i>data base</i> Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). b. Kuantitas dan kualitas panti sosial belum memadai. c. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait penanganan PMKS. d. Belum optimalnya pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen pelayanan PMKS. e. Belum optimalnya Program-program pemberdayaan PMKS.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
1.	Tenaga Kerja
	a. Masih terdapatnya angka pengangguran terbuka yang masih tinggi. b. Belum optimalnya fungsi BLK dan lembaga ketenagakerjaan lainnya dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	a. Kurangnya pembinaan peran perempuan dalam ekonomi keluarga. b. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Kabupaten layak anak. c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender.
3.	Pangan
	a. Tingkat diversifikasi sumber bahan pangan masih rendah b. Belum optimalnya program ketahanan pangan dalam mendukung ketersediaan dan kecukupan pangan utama.
4.	Pertanahan
	a. Terdapatnya tumpang tindih kepemilikan tanah/lahan b. Masih terdapat sengketa tanah Garapan c. Masih terdapat masalah tanah ulayat d. Belum tersedianya inventarisasi tanah kosong e. Belum tersedianya perencanaan penggunaan tanah f. Belum tersedianya penetapan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA)
5.	Lingkungan Hidup
	a. Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan b. Belum optimalnya pengelolaan residu perkebunan dan pertambangan yang mempengaruhi kualitas lingkungan



No	Urusan/ Permasalahan
	c. Kurangnya ketaatan Penataan RTH khususnya di wilayah perkotaan. d. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
6.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)
	a. Masih rendahnya kuantitas pelayanan kependudukan.
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	a. Belum optimalnya penyiapan dan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Belum optimalnya upaya penguatan peran lembaga-lembaga yang ada di desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. c. Belum optimalnya penggalan potensi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di desa serta penggunaan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa.
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	a. Belum optimalnya upaya penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia dalam upaya penyelenggaraan program penunjang pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. b. Belum optimalnya ketersediaan layanan Keluarga Berencana. c. Belum optimalnya upaya pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajemen usaha khususnya keluarga pra sejahtera. d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan
9.	Perhubungan
	a. Belum tersedianya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Minimnya perlengkapan jalan c. Belum tersedianya rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan yang menghubungkan daerah Kabupaten. d. Kurangnya moda transportasi massal antar kecamatan dan desa. e. Kurang optimalnya Ketersediaan database Urusan Perhubungan.
10.	Komunikasi dan Informatika
	a. Belum meratanya pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi (BTS) khususnya di wilayah perdesaan b. Belum optimalnya Layanan masyarakat berbasis ICT (<i>Information and Communication Technology</i>). c. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. d. Belum terintegrasinya program aplikasi pemerintahan dan layanan publik.
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	a. Lemahnya jiwa kewirausahaan masyarakat. b. Belum optimalnya pembinaan aktivitas koperasi c. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UKM (inovasi) dalam menumbuhkan wirausaha baru d. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM e. Kurangnya pembinaan UKM f. Rendahnya akses perbankan bagi Koperasi dan UKM.
12.	Penanaman Modal
	a. Belum tersedianya peta investasi b. Belum optimalnya Informasi dan promosi tentang peluang investasi. c. Belum optimalnya kualitas layanan perizinan terpadu



No	Urusan/ Permasalahan
13.	Kepemudaan dan Olahraga
	a. Kurangnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dapat mencegah pengaruh NAPZA. b. Sarana dan prasarana olahraga baik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta belum dimanfaatkan secara optimal.
14.	Statistik
	Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah
15.	Persandian
	Belum optimalnya pengamanan informasi pemerintah daerah
16.	Kebudayaan
	a. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai sumberdaya wisata b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. c. Belum tersedianya road map event budaya.
17.	Perpustakaan
	a. Kurangnya budaya literasi (penumbuhan minat baca). b. Kurangnya inovasi pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
18.	Kearsipan
	Kurang inovatifnya pengelolaan kearsipan berbasis digital.
Urusan Pilihan	
1.	Kelautan dan Perikanan
	a. Masih kurangnya produksi budidaya ikan air tawar; b. Belum optimalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI); c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh. d. Kurangnya upaya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah.
2.	Pariwisata
	a. Pengembangan destinasi wisata belum menjadi prioritas; b. Pengelolaan pariwisata masih bersifat sektoral.
3.	Pertanian
	a. Kurangnya fasilitasi pemasaran komoditas unggulan; b. Kurang optimalnya penyediaan pangan utama; c. Belum optimalnya dukungan untuk peningkatan produktivitas perkebunan; d. Kurangnya dukungan pengembangan agribisnis dan agro industri; e. Kurangnya dukungan kemitraan petani dengan pemilik modal; f. Kurang optimalnya pelaksanaan <i>mini ranch</i> .
4.	Perdagangan dan Perindustrian
	a. Banyak produk IKM yang belum tersertifikasi b. Penyediaan sarpras pasar di wilayah kecamatan dan desa kurang memadai c. Pemantauan harga kebutuhan pokok, gas rumah tangga dan BBM belum dilakukan secara kontinu d. Belum optimalnya pemantauan perizinan usaha dan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk peningkatan PAD e. Pemasaran produk IKM belum memanfaatkan <i>e-commerce</i> .
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
1.	Administrasi Pemerintahan



No	Urusan/ Permasalahan
	a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan <i>Good Government Governance</i> . b. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan sektor publik. c. Belum optimalnya tata batas antar desa, antar kecamatan dan perbatasan.
2.	Pengawasan Belum optimalnya review pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.
3.	Perencanaan
	a. Kurang optimalnya dukungan data dalam menyusun perencanaan; b. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
4.	Keuangan
	a. Perlunya peningkatan tata kelola keuangan daerah. b. Lemahnya penerapan standarisasi belanja. c. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.
5.	Kepegawaian
	a. Alokasi SDM belum mengacu analisis beban kerja. b. Kurangnya penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi.
6.	Penelitian dan Pengembangan
	a. penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. b. Hasil penelitian belum dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

4.2. TELAHAH DOKUMEN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur mengacu pada RPJPD Kutai Timur (2006-2025), hasil review RPJMD periode 2016- 2021, dengan acuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mempertimbangkan harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal (RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur), serta secara horisontal yaitu dengan RPJMD Kabupaten terdekat, periode yang berlaku. Harmonisasi dan sinkronisasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh sinergi, integrasi dan kesinambungan program-program pembangunan baik di Kabupaten Kutai Timur, daerah kabupaten sekitarnya, Provinsi Kalimantan Timur maupun pembangunan nasional.

4.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN 2020- 2024)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dengan cara melakukan telaah. Hasil telaah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh arah kebijakan dan merumuskan strategi serta penentuan target-target pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang mendukung pencapaian prioritas nasional. Adapun hasil telaah dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Telaah RPJMN Tahun 2020-2024

Uraian	Nasional
Visi	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan
Prioritas Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan kawasan strategis2. Pengembangan sektor unggulan3. Pengembangan kawasan perkotaan4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Arah Kebijakan umum	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa dan luar jawa2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
Isu strategis	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan<ol style="list-style-type: none">a. Keberlanjutan Sumber Daya Alamb. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomic. Transformasi struktur berjalan lambatd. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi digital2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan<ol style="list-style-type: none">a. Tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)b. Masih adanya ketimpangan pendapatanc. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI utamanya di Pulau Jawad. Terbatasnya sarana prasaranan dan kawasan perbatasane. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing<ol style="list-style-type: none">a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukanb. Perlindungan sosial bagi seluruh pendudukc. Pemenuhan layanan dasard. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemudae. Pengentasan kemiskinanf. Peningkatan Produktivitas dan Daya saing4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan<ol style="list-style-type: none">a. Melemahnya Ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsab. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia



Uraian	Nasional
	<ul style="list-style-type: none">c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekertid. Masih melemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agamae. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan Kerukunanf. Belum optimalnya peran keluargag. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas <p>5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkaub. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan amanc. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutand. Keselamatan dan kesamaan transportasie. Ketahanan Kebencanaan Infrastrukturf. Waduk multiguna dan modrenisasi irigasig. Konektivitas jalanh. Konektivitas kereta apii. Konektivitas lautj. Konektivitas udarak. Konektivitas daratl. Transportasi perkotaanm. Energi dan ketenagalistrikan perkotaann. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaano. Penyediaan Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaanp. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaanq. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikanr. Akses serta Keterjangkauan dan Ketenagalistrikans. Kecukupan Penyediaan energy dan ketenagalistrikant. Penuntasan Infrastruktur TIKu. Pemanfaatan Infrastruktur TIK <p>6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidupb. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklimc. Pembangunan rendah karbon <p>7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dinamika geopolitik globalb. Lingkungan strategis nasionalc. Kerangka pembangunan polhukhankamd. Konsolidasi demokrasie. Optimalisasi kebijakan luar negerif. Penegakan Hukum Nasionalg. Reformasi Birokrasi dan tata kelolah. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, target dan prioritas pembangunan nasional yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:



1) Target Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Lampiran 4 dokumen RPJMN tahun 2020-2024, adapun target pembangunan wilayah Kalimantan Timur sebagaimana tampak pada Tabel 4.4. Target pembangunan menggunakan tiga indikator yang meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Target ini dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan isu-isu pembangunannya.

Tabel 4.4
Target Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur Pada RPJMN Tahun 2020-2024

Indikator Pembangunan	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	2,67	5,6	5,8	6,7	7,1	8	8,5
Tingkat Kemiskinan (%)	6,03	5,94	5,58	5,25	4,66	4,11	3,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,6	6,09	6,2	6	5,8	5,4	5,1

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan target pembangunan nasional di wilayah Kalimantan Timur, maka Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan yang sangat berat. Target-target pembangunan tersebut jauh lebih tinggi dibanding kondisi atau capaian Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara sebesar -0,37 persen di tahun 2020. Penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 berjumlah 35.314 orang (9,48 persen) dengan garis kemiskinan sebesar Rp610.858,00.

2) Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur

Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan Timur tahun 2020-2024 tidak lepas dari rencana pemindahan ibukota Republik Indonesia di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, prioritas pembangunan wilayah Kalimantan mencakup:

- a. Pengembangan sektor unggulan
Kalimantan Timur: kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya, minyak dan gas bumi, serta batubara
- b. Pengembangan kawasan strategis
Di Kabupaten Kutai Timur: jalan akses KEK Maloy
- c. Pengembangan kawasan perkotaan



- d. Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan
- e. Penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah

Sedangkan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Terkait dengan prioritas pembangunan ini, Kabupaten Kutai Timur termasuk lokasi dengan koridor pemerataan.

4.2.2. Telaah Dokumen RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian wilayah administrasi Kalimantan Timur, maka acuan harmonisasi dalam penyusunan RPJMD Kutai Timur 2021- 2026 adalah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berlaku periode saat ini. Berikut disajikan hasil telaahan dokumen RPJMD Tahun 2019-2023:

Tabel 4.5
Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Provinsi Kalimantan Timur
Visi	BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan public
Tujuan dan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan msyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 76,87. b. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat lewat Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 77,50. c. Meningkatnya taraf pendidikan masyrakat melalui Rata-rata lama sekolah (9 Tahun) dan Harapan lama sekolah (14,96 Tahun). d. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat melalui Usia Haraoan Hidup (73,8 Tahun). 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Menurunnya Tingkat Kemiskinan sebesar 5,70 persen. b. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 56,75.



Uraian	Provinsi Kalimantan Timur
	<ul style="list-style-type: none">c. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda melalui Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 58,86.d. Meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui Presentase Penempatan Tenaga Kerja sebesar 55 persen.3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5± 1persen.b. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM melalui kontribusi koperasi dan UKM terhadap PDRB sebesar 4,90 persen.c. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan melalui jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 368 desa.d. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 1,03 persen.4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara sebesar 6±1 persen.b. Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah melalui kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 21 persenc. Meningkatnya realisasi investasi melalui nilai investasi sebesar Rp38,29 Triliun.d. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah melalui kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB sebesar 5,07 persen serta rasio pemenuhan beras sebesar 84,53 persen.e. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah melalui Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB sebesar 0,37 persen.f. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah melalui Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 6,3 persen.g. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah melalui Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB sebesar 1,78 persen.h. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah melalui Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 1,2 persen.i. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah melalui persentase peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 3,84.5. Meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar<ul style="list-style-type: none">a. Menurunnya Indeks Gini menjadi 0,326.b. Meningkatnya aksesibilitas wilayah melalui jumlah penumpang yang terlayani sebanyak 12.050.000 orang dan jumlah barang sebanyak 376.900.000.c. Meningkatnya konektivitas antar kawasan melalui jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi sebanyak 6 kawasan.d. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air melalui: (i) cakupan



Uraian	Provinsi Kalimantan Timur
	<p>layanan air minum sebesar 85 persen; (ii) luas lahan pertanian yang beririgasi sebesar 16.925,5 H; dan (iii) luas genangan banjir perkotaan sebesar 365 Ha.</p> <p>e. Menurunnya kawasan kumuh melalui luas kawasan kumuh sebesar 359,56 Ha.</p> <p>f. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah melalui rasio elektrifikasi sebesar 95 persen.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>a. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,15.</p> <p>b. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Persentase penurunan emisi dan BAU menjadi 29,33 persen.</p> <p>c. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana melalui Indeks Resiko Bencana menjadi 125.</p> <p>d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang melalui Skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi 83,09 persen.</p> <p>7. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik</p> <p>a. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi katagori B dengan nilai 74,50.</p> <p>b. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien melalui nilai akuntabilitas kinerja sebesar 80.</p> <p>c. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas melalui Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 83.</p> <p>d. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui Tingkat maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Daerah pada level 4.</p>
Strategi/Prioritas Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja; 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah. 3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi. 4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. 5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. 6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.
Isu Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. 2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertical maupun horizontal. 3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 5. Pemerintahan yang professional dan akuntabel. <p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018.</p>

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

4.2.3. Telaah Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 telah memberikan arah atau garis besar yang perlu untuk dilakukan pada RPJMD



Kabupaten Kutai Timur tahap keempat (2021-2025) guna pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur. Dalam rangka penyusunan penyusunan RPJMD Kutai Timur 2021-2026, perlu direview substansi yang terkandung di dalam dokumen RPJPD tersebut, agar tahapan pembangunan yang dijalankan senantiasa berjalan selaras dengan acuan (truct) yang telah ditetapkan, meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Tahapan Pembangunan yang diharapkan setiap periode Pembangunan Jangka Menengah, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026.

Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal menuju Kemandirian Daerah

Berikut ini adalah penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 -2025:

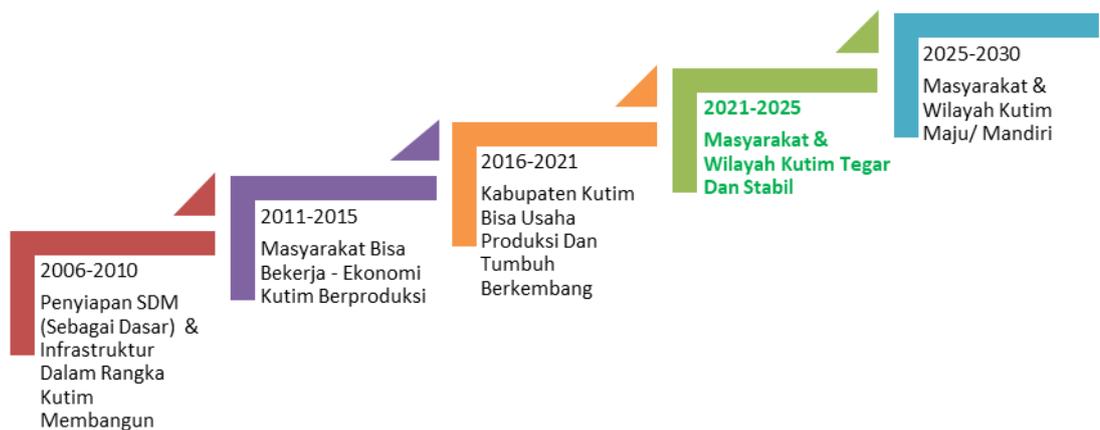


Gambar 4.2
Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025

Pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten kutai Timur tahun 2006-2025 telah dirumuskan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat/SDM yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Mewujudkan perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan berbasis pengetahuan.

3. Mewujudkan pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan sektor pembangunan.
4. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor *economic base* yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing.
5. Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang aman, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai IPTEK.



Gambar 4.3

Skenario RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

Kabupaten Kutai Timur memasuki tahap ke IV pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam gambar 4.4.



Gambar 4.4
Skenario Pembangunan Tahun 2021-2025 berdasarkan RPJPD Tahun 2006-2030

4.2.4. Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2032

Integrasi RTRW dengan kebijakan pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integrasi ini harus sejalan dan terintegrasi, agar dapat dijadikan acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan.

Dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTRK, RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial. Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW,



sehingga dalam menyusun suatu perencanaan perlu mengacu pada perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di lapangan.

Rencana Tata Ruang memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan, sedangkan RPJPD dan RPJMD memberikan payung konseptual bagi pembangunan secara spasial. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam implementasi pembangunan daerah.

Tabel 4.6
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2032

Tujuan	Kebijakan	Strategi
Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan kabupaten dalam rangka menuju Kutai Timur Mandiri bertumpu pada pembangunan agribisnis yang mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar kawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur	1. Mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang ada secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; dan 2. Meningkatkan keterlibatan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan sumber daya sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	2. Pemanfaatan potensi-potensi agribisnis secara optimal sebagai salah satu sector utama pembangunan Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kutai Timur	1. Mengoptimalkan rencana pemanfaatan dan pengembangan agribisnis wilayah secara terintegrasi dan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta daya dukung lingkungan; 2. Meningkatkan seluruh potensi masyarakat yang ada dalam melakukan pembangunan dan pengembangan agribisnis wilayah sebagai upaya optimal pelibatan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 3. Menetapkan dan melakukan pembangunan kawasan agribisnis di lokasi yang mendukung pemanfaatan sumberdaya yang sesuai serta mendukung terciptanya optimalisasi sistem koleksi dan distribusi.
	3. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan	1. Mengoptimalkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sektor pertambangan; 2. Menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; 3. Menciptakan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta; 4. Menetapkan aturan dalam pengelolaan kawasan



Tujuan	Kebijakan	Strategi
		<p>pertambangan yang dapat menjamin terjaganya kondisi lingkungan hidup kabupaten, baik selama masa penambangan maupun pasca penambangan;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan6. Menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan kawasan pertambangan yang dapat menjamin keikutsertaan/keterlibatan masyarakat sekitar dalam usaha pertambangan yang bersangkutan.
	4. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan batasan kawasan hutan berdasarkan fungsinya melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional;2. Mengembangkan potensi-potensi sektor kehutanan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan wilayah kabupaten serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat;3. Menciptakan mekanisme pengelolaan potensi hutan yang berwawasan lingkungan, serta melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta;4. Menetapkan peraturan tentang mekanisme pengelolaan Potensi Kehutanan yang berwawasan lingkungan;5. Menetapkan aturan dan mekanisme yang dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi dan juga peningkatan perekonomian Wilayah Kabupaten secara keseluruhan; dan6. Menetapkan aturan dan mekanisme pengelolaan potensi kehutanan yang dapat menjamin keikutsertaan/ keterlibatan masyarakat sekitar.
	5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagai bagian dari pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan batasan kawasan lindung melalui peraturan yang jelas dan diakui secara nasional;2. Menetapkan Peraturan tentang mekanisme pengelolaan kawasan lindung yang dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat;3. Menetapkan aturan dan mekanisme sanksi yang jelas terhadap setiap jenis pelanggaran terhadap fungsi kawasan lindung;4. Menetapkan aturan yang jelas terkait keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di dalam Kawasan Lindung dalam upaya tetap menjaga eksistensi masyarakat yang ada disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan tanpa mengganggu fungsi lindung dari kawasan yang bersangkutan;5. Melakukan rehabilitasi terhadap kawasan lindung



Tujuan	Kebijakan	Strategi
		<p>yang sudah rusak;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Mengembalikan fungsi kawasan lindung ke fungsi semula terutama karena adanya penggunaan lahan budidaya di dalam kawasan lindung.7. Selektif dalam memberikan Rekomendasi terhadap Rencana Izin HTI, HPH dan pertambangan yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat khususnya menyangkut Kawasan lindung;8. Mempertegas syarat minimal 30% dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pada proporsi kawasan yang merupakan bagian wilayah DAS terkait;9. Mempertahankan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai sebagai kawasan lindung;10. Melakukan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Kutai terkait Zonasi TNK untuk memudahkan pemeliharaan dan pemantauan; dan11. Menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung.
	<ol style="list-style-type: none">6. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan dengan menentukan fungsi untuk setiap pusat-pusat kegiatan tersebut sesuai dengan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya; dan2. Merencanakan dan menentukan jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat kegiatan dengan menempatkan fasilitas pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis dan skala pelayanan dari setiap pusat kegiatan.
	<ol style="list-style-type: none">7. Pengembangan prasarana wilayah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan konsep sistem jaringan jalan dengan mengintegrasikan jaringan jalan fungsi arteri/kolektor primer dengan jaringan jalan baru yang akan dikembangkan (arteri/kolektor primer maupun arteri/kolektor sekunder), sehingga dapat memperlancar arus antar pusat kegiatan dengan kawasan;2. Mengembangkan pembangunan beberapa jaringan jalan regional prioritas untuk mendukung sistem jaringan jalan;3. Menegaskan fungsi tiap segmen ruas jalan terutama fungsi primer dan sekunder di Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk membagi tanggung jawab pemeliharaan antara pendanaan pusat, provinsi, atau kabupaten;4. Melakukan pembangunan jalan baru serta peningkatan fungsi serta kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan kota-kota sekitarnya;5. Mengembangkan terminal angkutan darat di pusat kegiatan serta kawasan dan mengusahakan



Tujuan	Kebijakan	Strategi
		<p>keterpaduan pelayanan transportasi antar moda, seperti angkutan darat, laut serta sungai;</p> <p>6. Mengembangkan kualitas pelayanan angkutan umum yang melayani pergerakan di dalam dan antar kawasan terutama pengoperasian angkutan umum yang diarahkan secara terintegrasi dengan moda angkutan lainnya baik dengan angkutan laut, angkutan udara maupun dengan angkutan darat lainnya;</p> <p>7. Meningkatkan fungsi dan peranan pelabuhan baik sebagai pelabuhan ekspor maupun pelabuhan penumpang dan barang; dan</p> <p>8. Meningkatkan fungsi dan kelas bandara serta penegasan kembali penggunaan bandara yang telah ada.</p>
	<p>8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara</p>	<p>1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>2. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;</p> <p>3. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.</p>

4.2.5. Telaah Dokumen Perencanaan Lainnya

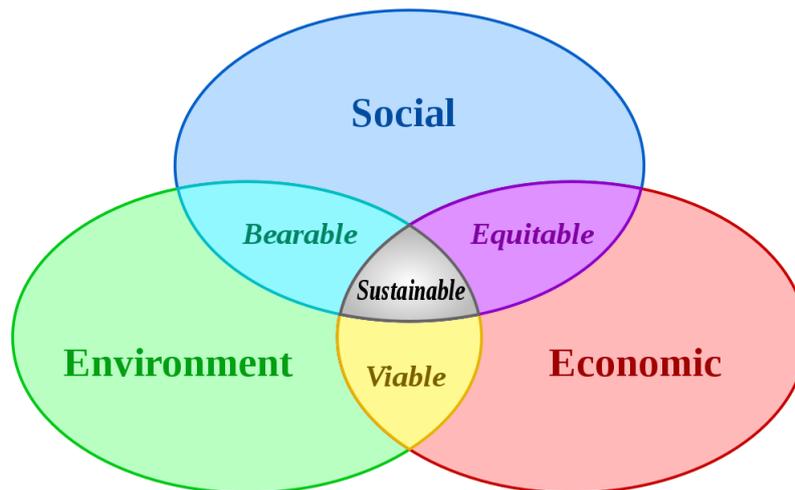
Berikut adalah dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026:

1) Dokumen Pembangunan Ekonomi Hijau

Akhir tahun 2016 Pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen *Nationally Determined Contribution* kepada *Secretariat United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia: (i) untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional sampai dengan tahun 2030; (ii) tetap mempertahankan target 7 persen pertumbuhan ekonomi. Komitmen ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Meskipun belum semua daerah dijadikan wilayah yang wajib menindaklanjuti aturan tersebut

diatas, setiap pemerintah daerah hendaknya tetap mengacunya dalam rangka mewujudkan ekonomi yang berbasis pembangunan berkelanjutan yang juga banyak dikenal sebagai pembangunan ekonomi hijau.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menciptakan kesinambungan antar dimensi pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Prinsip dalam pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang sebagaimana tampak pada Gambar 4.5 berikut.



Sumber: Global Reporting Initiation, 2019

Gambar 4.5
Skema pembangunan berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, namun lebih luas daripada itu yakni mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Implikasi pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat terutama pelaku bisnis. Bukti bahwa suatu daerah atau wilayah telah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercermin dari laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*). Laporan tersebut mengungkapkan implementasi pembangunan dari 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan laporan tersebut dapat diukur indeks pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.



Karakteristik pembangunan ekonomi hijau dapat ditinjau dari berbagai upaya yang dilakukan, yaitu: (i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO₂ dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful consumption). Sedangkan daerah yang telah melaksanakan pembangunan ekonomi hijau dapat mengukur pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu: (i) mendorong ekonomi yang berkelanjutan; (ii) mengakui nilai modal alam; (iii) meningkatkan ketahanan; (iv) membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan; dan (v) berperan aktif dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

2) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk perwujudan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) perlu adanya penyesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030. Sebagai implementasi dari TPB maka diperlukan peta jalan nasional TPB yakni dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017-2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dalam merencanakan pembangunannya harus mengacu Prepres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun poin-poin SDGs yang perlu mendapat perhatian dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah: (i) Masalah Kemiskinan; (ii) Masalah Kelaparan dan Ketahanan Pangan; (iii) Masalah indikator kesehatan; (iv) Masalah pendidikan inklusif; (v) Akses infrastruktur dasar yang mencakup: energi listrik, air bersih, dan sanitasi; (vi) Masalah ketenagakerjaan dan pertumbuhan inklusif.



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 35.314 orang atau sebesar 9,48 persen pada bulan Maret 2020. Persentase penduduk miskin ini termasuk katagori tinggi di Indonesia. Salah satu penyebab tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur adalah: (i) daya beli yang rendah, dan (ii) faktor multi dimensi kemiskinan, seperti: akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta kualitas rumah dan lingkungan.

Kontribusi pertanian di Kabupaten Kutai Timur masih terbatas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Di samping itu hasil pertanian tidak bersifat kontinu. Hanya lima dari delapan belas kecamatan yang produktif menghasilkan tanaman pangan (padi sawah), dan sisanya masih bertumpu pada hasil padi ladang (BPS Kutai Timur, 2020). Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hendaknya fokus pada program untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan utama, agar ketersediaan pangan berkesinambungan.

Sebelum merebaknya pandemi Covid-19, beberapa penyakit sudah banyak terjadi di Kabupaten Kutai Timur dan membutuhkan program penanganan khusus. Kelompok penyakit menular (*communicable diseases*) diantaranya: Tuberculosis (TB), diare, DB, dan HIV-AIDS. Kelompok penyakit tidak menular diantaranya: hipertensi, diabetes, gagal ginjal, jantung, kanker dan masalah serius lainnya adalah Napsa dan *stunting*. Selain itu, masih terdapat masalah kesehatan terkait angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Di samping masalah penyakit dan wabah Covid-19; Kabupaten Kutai Timur juga masih mengalami kendala dalam: distribusi Fasyankes, distribusi SDM kesehatan dan pembiayaan kesehatan secara universal (*universal health coverage/UHC*).

Kabupaten Kutai Timur belum menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat penting, karena dapat menampung tidak hanya anak yang normal namun juga anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian Kabupaten Kutai Timur belum sepenuhnya dapat disebut sebagai “Kabupaten Ramah Anak”.

Akses pelayanan dasar yang mencakup: listrik, air bersih, sanitasi lingkungan, akses teknologi informasi dan komunikasi belum terpenuhi secara merata di delapan belas kecamatan Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ketimpangan ini diduga berkontribusi secara signifikan pada masalah kemiskinan multidimensi di Kabupaten Kutai Timur.



Ketenagakerjaan dan pertumbuhan inklusif masih merupakan masalah yang harus dipecahkan di Kabupaten Kutai Timur. Komposisi unskilled labor masih tinggi dan arus migrasi tenaga kerja dari luar Kalimantan semakin memperburuk keadaan. Di samping itu migrasi tenaga kerja tersebut mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal.

3) **Berbagai Aturan Perundangan terkait Pandemi Covid-19**

Kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan, sehingga tidak cukup bila penyelenggara pemerintahan hanya merencanakan, mendistribusikan anggaran ataupun memberikan bansos, tetapi juga perlu memastikan tersampainya dan diterimanya bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penyelenggara pemerintahan diharapkan kehadirannya untuk menyelesaikan setiap keluhan/ laporan warga atas bantuan sosial secara cepat dan terukur selama masa darurat pandemi *Covid-19*. Sejak awal adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penerapan PSBB memiliki konsekuensi hukum, dalam Pasal 4 ayat (3) PP No.21/2020 menyatakan bahwa, PSBB dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, bukan berarti pembatasan kegiatan masyarakat, penyelenggara pemerintahan tidak berkewajiban memperhatikan kebutuhan warga. Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik juga telah menerima laporan masyarakat selama masa darurat *Covid-19*.
- b) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penangan Pandemi *Covid-19* dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Covid-19* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, yang diundangkan tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini merupakan landasan hukum pemerintah dalam menangani dan menetapkan langkah-langkah luar biasa di



- bidang keuangan negara, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan akibat dampak pandemi *Covid-19* yang merupakan kejadian *unprecedented* atau belum pernah terjadi sebelumnya.
- c) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, Mencermati Keppres No. 11/2020, intinya menegaskan bahwa upaya penanggulangan *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan ini dapat membatasi penyelenggara pemerintahan dalam bertindak. Sebenarnya sifat kedaruratan dan mendesak maka penyelenggara pemerintahan dapat mengambil kebijakan dengan diskresi dalam menyelesaikan, dan bertindak konkrit dalam upaya penanggulangan *Covid-19* sebagaimana diatur dalam UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Dalam ketentuan Pasal 11 ayat menyatakan, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* daerah, dan ayat (2) dinyatakan bahwa penanganan *Covid-19* di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19*. Dimasa transisi gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* merupakan momentum untuk mengidentifikasi tugas yang belum dilaksanakan. Untuk itu pemerintah akan melaksanakan sejumlah program:
1. Program di bidang kesehatan.
Peningkatan surveillance (pengawasan dengan: tes, lacak, kontak, dan isolasi meningkatkan komunikasi publik secara efektif menerapkan protokol kesehatan, mempercepat penelitian terkait vaksin dan obat-obatan.
 2. Program pemulihan ekonomi
Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal tahun 2020-2021, percepatan penyerapan anggaran tahun 2020 oleh K/L, non K/L, Pemda, dan Belanja Kesehatan serta restrukturisasi UMKM dan Koperasi.
- e) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.
- f) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi

4.3. ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis merupakan salah satu komponen utama dari proses perencanaan strategis, dan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, melalui penyajian isu-isu utama kepada pihak pengambil keputusan. Isu strategis disusun dari kompilasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.



Gambar 4.6
Formulasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kutai Timur



4.3.1. Isu Eksternal

Isu-isu eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah isu global, nasional, dan regional. Berikut uraian dan analisis isu-isu eksternal tersebut.

4.3.1.1. Isu Global

Isu global yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah isu-isu eksternal yang berasal dari lingkungan global. Adapun uraian isu global tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Salah satu kesepakatan global yang diratifikasi oleh negara Indonesia adalah *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB). SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia. Terdapat 17 tujuan poin yang disepakati oleh negara-negara penandatanganan konsensus tersebut yang perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Target SDGs di Indonesia yang belum tercapai pasca evaluasi tahun 2015 adalah lima target, yaitu: *goal* 1 mengakhiri kemiskinan; *goal* 3 menjamin hidup sehat; *goal* 6 menjamin tersedianya akses air bersih dan sanitasi; serta *goal* 7 membangun ketahanan energi berkelanjutan.

Kabupaten Kutai Timur masih perlu memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama untuk fokus berikut:

- a. Mengakhiri kelaparan, menuntaskan kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (tujuan 1 dan 2);
- b. Menjamin hidup sehat dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan (tujuan 3 dan 4); dan
- c. Menjamin tersedianya air bersih dan sanitasi, sumber energi yang terjangkau, serta infrastruktur untuk menunjang industri berinovasi (tujuan 6,7 dan 9).



2) Perang Dagang Amerika – Cina

Defisit neraca pembayaran yang dipicu oleh defisit perdagangan barang dan jasa berkepanjangan yang dialami oleh Amerika Serikat, mendorong presiden Trump mengeluarkan kebijakan anti perdagangan bebas kepada Cina sejak tahun 2018. Cina selama ini adalah salah satu mitra dagang utama Amerika. Selain masalah defisit neraca pembayaran, konflik diantara dua negara besar ini diduga juga dipicu oleh permintaan Cina untuk melakukan transfer teknologi, khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual kepada Cina.

Perang dagang dua negara ini berimplikasi positif dan negatif bagi Indonesia. Implikasi negatif yaitu ekspor Indonesia tertekan, pengaruhi pasar modal, dan pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perang dagang ini juga berimplikasi positif bagi Indonesia. Adapun dampak positif perang dagang antara Negara Amerika dan Negara Cina bagi Indonesia adalah mengisi kekosongan barang yang diperdagangkan oleh Amerika dan Cina. Namun, bagi Kabupaten Kutai Timur perang dagang tersebut tidak memberikan implikasi langsung yang signifikan.

3) Isu Fokus Komite Pembangunan Bank Dunia

Hasil pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali tahun 2018, Komite Pembangunan (*Development Committee*) Bank Dunia menekankan adanya tiga isu, yaitu mengenai ekonomi global, human capital, dan pengembangan teknologi keuangan atau *fintech*. Pengaruh *fintech* tidak dapat dihindari di Kabupaten Kutai Timur, yaitu dengan adanya pergeseran transaksi pembayaran konvensional ke transaksi pembayaran digital. Kondisi ini menuntut masyarakat dan pelaku usaha melakukan adaptasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berperan mendukung dengan menyediakan fasilitas guna memudahkan proses adaptasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi global saat itu dinilai tetap kuat, namun masih terdapat ketidakseimbangan di mana pertumbuhan perdagangan dan sektor manufaktur cenderung moderat. Resiko penurunan (*downside risk*) terhadap pertumbuhan global terjadi karena beberapa alasan seperti ketidakpastian kebijakan, perkembangan geo-politik dan pengetatan keuangan global, juga kenaikan level utang dan volatilitas mata uang. Pada tahun-tahun terakhir, kondisi ekonomi global mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19.



4) **Global Warming**

Pemanasan global kini jadi ancaman serius bagi bumi dan makhluk hidup. Di sisi lain, banyak juga yang menganggap pemanasan global hanya mitos. Manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di bumi, membutuhkan panas untuk bisa hidup. Panas berasal dari pancaran atau radiasi matahari. Sebagian panas ini ditahan di bumi oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 persen nitrogen, 21 persen oksigen, dan 1 persen gas lainnya. Sebagian gas-gas dalam 1 persen itu disebut gas rumah kaca. Gas rumah kaca meliputi: uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida (NO_2) digunakan sebagai bahan sintesis untuk pembuatan asam nitrit, yang produksinya mencapai jutaan ton tiap tahunnya. Gas ini berwarna merah-kecoklatan dan merupakan gas beracun, baunya menyengat, dan merupakan salah satu polutan udara utama.

Gas rumah kaca menjaga suhu bumi agar tidak terlalu dingin, yaitu sekitar 35 derajat celsius. Tanpa gas ini, suhu di bumi bisa sangat dingin, mencapai minus 20 derajat celsius. Penyumbang pemanasan global terbesar dari sektor energi adalah proses peningkatan suhu bumi yang berlebihan akibat gas rumah kaca. Dalam 200 tahun terakhir, manusia menghasilkan karbon dioksida melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi (Chomsan, 2006). Pembakaran yang masif ini dimulai sejak abad ke-18, ketika dunia memasuki Revolusi Industri. Gas rumah kaca yang makin tebal ini membuat panas matahari lebih banyak terperangkap di bumi. Akibatnya, bumi makin hangat. Dibanding masa sebelum Revolusi Industri, bumi makin panas sekitar 1,1 derajat celsius. Inilah yang dimaksud dengan pemanasan global.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (2017) sebaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia menurut jenis sektor (dalam ribu ton CO_2) sebagian besar berasal dari energi (49 persen), sedangkan 11 persen pertanian, limbah 10 persen, dan kebakaran hutan hanya 1 persen. Dengan demikian, Kalimantan Timur sebagai penghasil batu bara beresiko sebagai penyumbang tingginya emisi GRK. Kondisi serupa juga dialami Kabupaten Kutai Timur.

Dampak pemanasan global pemanasan ini memberi dampak yang berbahaya bagi para penghuni bumi. Secara langsung, peningkatan suhu membuat es atau gletser di kutub bumi meleleh. Es itu meleleh menjadi air di lautan. Kenaikan permukaan air laut membuat tanah yang tadinya daratan, kini menjadi laut. Dikutip dari *The Uninhabitable Earth: Life After Warming* (2019), pada 2017, terungkap bahwa dua gletser di Antartika Timur meleleh hingga 18 juta ton per tahun. Hal yang sama terjadi di Greenland. Es di sana meleleh hampir sejuta ton setiap



harinya. Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Beberapa prediksi menyebut daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang (<https://www.kompas.com>).

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengantisipasi dampak global warming dengan pengembangan sektor pertanian. Pengembangan tersebut dilakukan dengan memilih komoditas pangan maupun perkebunan yang lebih tahan (tidak rentan) terhadap adanya pemanasan global serta memanfaatkan limbah pertanian menjadi produk yang bernilai ekonomis. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pertanian dan peternakan berkontribusi kecil pada GRK, yaitu masing-masing sebesar 11 persen dan 2 persen. Selain itu, mengacu pada Dewarani (2019) beberapa hal yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengurangi efek rumah kaca antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan energi listrik, dengan mematikan lampu yang tidak digunakan serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik;
- b. Mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi;
- c. Mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik. Gunakan tempat minum dan sedotan yang dapat dipakai ulang;
- d. Mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan nonorganik; dan
- e. Kurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak balik atau menggunakan kertas bekas.

5) Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0

Revolusi Industri (RI) 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi ini ditandai dengan munculnya *cyber-physical-system*, *Internet of Thing* (IoT), *Big Data*, dan aneka layanan memanfaatkan *IT*. Selain itu RI 4.0 dapat dikatakan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika Teknologi Informasi diterapkan pada semua Industri. Aspek utama RI 4.0 yaitu pada:

- a) Aspek *physical* meliputi *Autonomous Vehicle*, *3D printing*, *Advance robotic*, dan material baru;



- b) Aspek digital yang ditandai dengan telah hadirnya *Internet of Things (IoT)*, *Big data*, *Blockchain*, dan *Platforms*; dan
- c) Aspek Biologi yang progresnya telah mulai dirasakan yaitu *Genome* dan biologi sintetis.

Pengaruh revolusi industri 4.0 berdampak pada berbagai aspek, yaitu bisnis, ekonomi, negara, masyarakat, dan individu. Koneksi global, kecerdasan buatan, dan otomasi telah membuat disrupsi dibidang ekonomi. Teknologi dan inovasi telah bersinergi menumbuhkan produktifitas pada perusahaan. Jenis pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Pekerjaan rutin yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia berangsur digantikan oleh tenaga robot.

Revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan sosial, teknologi profesi, kebiasaan-kebiasaan baru dan bisnis model pada institusi publik dan organisasi lainnya. Perubahan model tersebut membutuhkan pengambilan keputusan dan respon yang cepat, sehingga perlu memanfaatkan *disruptive technology* sebagai hasil inovasi yang berupa *Big Data* di semua sektor, *artificial intelligence (AI)*, dan *web community based* (Laudon dan Laudon, 2020).

Respon institusi terhadap revolusi industri 4.0 adalah dengan dimilikinya karakter kreatif untuk menciptakan daya saing. Institusi membutuhkan teknologi dan mengakui/mendukung keberadaan SDM yang menjadi sentral dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Dengan demikian, respon institusi terhadap revolusi industri 4.0 adalah mendukung adopsi dan menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Disisi lain, institusi hendaknya mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk membuat organisasi lebih kreatif. Demikian juga Kabupaten Kutai Timur harus segera mengadopsi teknologi sebagai pendukung tata kelola dan pelayanan publik. Perubahan teknologi berdampak pada perilaku organisasi ditinjau dari struktur dan proses aktivitasnya. Namun demikian perubahan tersebut terkendala adanya perilaku yang tidak mau berubah (*resistance change*). Kendala ini dapat diatasi oleh organisasi termasuk Kabupaten Kutai Timur, yaitu dengan melakukan adaptasi meliputi: 1) struktur organisasi; 2) perubahan tugas/pekerjaan; 3) perubahan teknologi; dan 4) perubahan SDM sejak diterapkannya teknologi informasi baru (Laudon dan Laudon, 2020).

6) Pandemi Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (2020) resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Perekonomian global mengalami kontraksi. Salah satu dampak berantai dari



kontraksi ekonomi dunia itu ialah sektor investasi, yang sebelumnya menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi global. Pandemi ini juga membatasi ruang gerak antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang warga negaranya dibatasi memasuki wilayah negara lain (nasional.kontan.com)

Pandemi Covid-19 yang merupakan isu kesehatan global memaksa kondisi global tatanan dunia untuk berubah. Segala dinamika politik internasional sangat berfokus pada upaya penanganan virus ini. Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan politik global. Alasannya adalah, semua negara terkena dampak pandemi ini. Upaya untuk menyelamatkan nyawa manusia dari penularan virus covid-19 menjadi agenda utama dari semua negara. Sehingga, kegiatan pembangunan lainnya dan investasi bukan lagi menjadi prioritas penting. Apabila kegiatan investasi tetap harus dijalankan, perlu dicermati mengenai sumber pembiayaannya dari mana, khususnya untuk investasi yang memerlukan biaya besar. Bank sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kegiatan investasi tentunya akan sangat selektif dan sangat konservatif. Selain perbankan, pasar modal juga menjadi alternatif lain dalam pembiayaan investasi global.

World Bank telah memberikan pinjaman lunak untuk berbagai kegiatan investasi pembangunan infrastruktur di negara-negara yang sedang berkembang. Sejak pandemi Covid-19 memfokuskan dana bantuan darurat untuk menangani penyebaran Covid-19. Permasalahan utama ialah belum tentu sepenuhnya terserap pasar dan faktor *credit rating* dari korporasi tersebut. Secara garis besar implikasi jangka panjang Pandemi Covid-19 terhadap sektor komoditas dapat dijabarkan oleh Bank Dunia dalam beberapa poin: 1) peningkatan biaya transportasi, 2) ketidakpastian sistem rantai pasok, 3) meningkatnya pemanfaatan komoditas substitusi, dan 4) perubahan perilaku konsumen (ICDX, 2020). Sementara itu, telah banyak korporasi mengalami penurunan *credit rating*. Bukan hanya korporasi, upaya berbagai negara untuk menerbitkan surat berharga juga tidaklah mudah dalam kondisi sekarang ini.

Aspek *investment grade* bagi suatu negara sangat menentukan sekali, obligasi tersebut dapat diterima investor dengan imbal hasil yang wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi global melalui pembiayaan dari jalur investasi tampaknya sulit diwujudkan dalam waktu yang cepat. Kesulitan likuiditas global telah menghantui semua negara, tidak terkecuali negara-negara maju. Sehingga, perlu dicarikan jalan keluar atau terobosan baru. Upaya ini sudah mendesak sekali dan diharapkan dapat memulihkan kembali perekonomian



global dalam jangka pendek dan menengah. Melemahnya pembiayaan untuk investasi global juga memiliki dampak yang luar biasa terhadap *foreign direct investment* (FDI). Khususnya, bagi negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Menurunnya jumlah FDI di negara-negara sedang berkembang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi mereka, khususnya dalam mengurangi pengangguran dan pembukaan lapangan kerja baru.

4.3.1.2. Isu Nasional

Terdapat beberapa isu nasional yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Berikut adalah uraian dari isu-isu nasional tersebut. Lima Program Lanjutan NAWACITA Jokowi Ma'ruf. Terdapat lima program lanjutan NAWACITA, yang terdiri dari 1) Pembangunan SDM, 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah (Konektivitas dan kemaritiman), 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya, 4) Pemantapan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dan 5) Ketahanan nasional dan Suksesnya pemilu.

1) Isu Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan secara nasional yang tidak terduga sebelumnya. Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat (Kemendagri, 2020). Pandemi Covid-19 ini mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang luar biasa. Kebijakan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dengan jaminan sosial, dan menjaga dunia usaha jadi prioritasnya. Realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan, serta penyesuaian besaran belanja wajib adalah cara utama pemerintah untuk mendanai kebutuhan penanganan Covid-19 (www.kemenkeu.go.id/covid19).

Ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, telah menimbulkan permasalahan kesehatan yang serius. Munculnya virus jenis baru yang disebut Covid-19 ini menjangkit seluruh populasi manusia. Virus ini menular dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lain melalui droplet yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Pandemi ini menyerang pasien dengan berbagai macam gejala, mulai dari tanpa gejala, dengan gejala



demam, sesak nafas hingga kematian yang mendadak. Covid-19 mewabah ke segala kelompok, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan lansia. Wabah ini juga menyebar ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat biasa sampai dengan pejabat negara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Pada saat pandemi berlangsung, sistem kesehatan di Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi di satu sisi, serta pemenuhan pelayanan kesehatan rutin di sisi lain menuntut adanya adaptasi kehidupan baru maupun tata pengelolaan pelayanan kesehatan baru. Seluruh fasilitas kesehatan harus terintegrasi dalam sistem penanganan Covid-19, sehingga terbentuk sistem pelacakan kasus dan penerapan mekanisme rujukan yang efektif. Selain dituntut untuk menangani pasien Covid-19 juga harus kembali pelayanan esensial yang tertunda terutama pelayanan imunisasi, kesehatan ibu dan anak, pelayanan pada pasien dengan penyakit menular, seperti TB Paru, HIV, Malaria, dan beberapa penyakit menular lainnya.

Pandemi ini selain membahayakan kesehatan penduduk dunia juga mengganggu kestabilan perekonomian dunia, termasuk ekonomi Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur. Banyak kalangan menyatakan bahwa kontraksi perekonomian dunia sebagai akibat dari pandemi Covid-19 adalah lebih buruk dibandingkan dengan krisis global 1998. Pandemi Covid-19 memengaruhi sisi supply (pelaku produsen) dan sisi demand (pelaku rumah tangga). Arah kebijakan ekonomi daerah harus mampu memulihkan fluktuasi ekonomi pandemi Covid-19. Berikut adalah uraian pengaruh kondisi perekonomian global, nasional, dan regional terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

Covid-19 membawa dampak serius pada semua bidang perekonomian dan kesehatan masyarakat baik di level nasional hingga pedesaan. Pola penyebaran Covid-19 sangat cepat, sehingga pemerintah pusat mengeluarkan himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Himbuan PSBB menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi (produksi dan distribusi barang) menjadi terhambat. Produksi jauh menurun karena pabrik-pabrik dan perusahaan tutup sementara atau mengurangi jam kerja. Di sisi yang lain, pembatasan jalur transportasi berdampak pada distribusi barang. Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah yang mempunyai ketergantungan pasokan dari daerah lain mengalami rawan pangan. Hal ini yang mendorong kebijakan PSBB harus diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8



Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa bertujuan sebagai acuan bagi pemerintah dalam menggunakan dana desa untuk menolong masyarakat melawan pandemi Covid-19. Adanya kebutuhan peningkatan belanja di desa untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha masyarakat desa, membuat dipandang perlu ada suatu kebijakan yang pro masyarakat desa agar mengurangi kepanikan masyarakat desa karena berbagai informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang Covid-19.

Pendidikan di Indonesia menjadi kunci kesuksesan generasi penerus bangsa. Pandemi Covid-19 telah merubah struktural yang sangat cepat di bidang pendidikan baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun tekanan finansial institusi penyelenggara pendidikan. Namun proses belajar mengajar ini harus tetap berjalan meskipun pandemi sedang berlangsung. Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dituntut untuk cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, sedangkan di sisi lain banyak sekolah dan penyelenggara pendidikan mendapat tekanan karena orang tua dan siswa meminta rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya sekolah. Agar kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya dan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 maka pemerintah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi angka penularan tersebut, salah satunya diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia berupa kegiatan belajar mengajar dengan sistem *online* atau sistem dalam jaringan (*daring*) sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Sarana pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pembelajaran tersebut di antaranya aplikasi *google meet*, aplikasi *zoom*, *google classroom*, *youtube*, televisi, maupun media sosial *whatsapp*. Di mana semua sarana tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju.



2) Isu Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini sekitar 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua adalah sebesar minus 5,32 persen. Pertumbuhan ini menurun sangat signifikan dibanding pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang masih positif sebesar 2,97 persen (www.cnnindonesia.com). Kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan kembali minus 2,9 persen hingga 1 persen. Sehingga Indonesia dapat dikategorikan mengalami resesi. Akibat perlambatan ekonomi Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang cukup agresif. Kebijakan tersebut dengan menargetkan defisit APBN 2020 menjadi lebih besar hingga 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Perekonomian Indonesia pada kuartal empat diharapkan kembali positif karena kebijakan agresif berjalan efektif. Keberhasilan ini berlanjut hingga tahun 2021, perekonomian kembali pulih dan defisit anggaran mengecil hingga tahun 2023 berada di bawah 3 persen dari PDB. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diharapkan pulih lebih cepat, minimal di 4,5 persen target sampai 5,5 persen. Harapan tersebut dapat terwujud apabila semua kebijakan terkait dengan Covid-19 terutama kebijakan ekonomi dapat berjalan dengan efektif sesuai skenario.

Perekonomian Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian serius, selain dampak pandemi Covid-19, yaitu beberapa isu pembangunan ekonomi. Isu-isu tersebut sangat perlu dipertimbangkan dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur di masa mendatang, meliputi:

1. Daya saing investasi rendah;
2. Proses Deindustrialisasi lebih cepat dari negara ASEAN lainnya
3. Performa logistik Indonesia masih lemah;
4. *Tax ratio* yang sangat rendah sementara terjadi defisit anggaran peningkatan risiko utang;
5. Problematika dana desa; dan
6. Kebijakan subsidi energi bersifat inkonsisten.

3) Isu Pertanian Indonesia

Kabupaten Kutai Timur yang telah membangun sektor agribisnis dan agro industri perlu mempertimbangkan isu pertanian dalam merumuskan isu strategis pembangunannya. Secara umum, pertanian di Indonesia menghadapi beberapa isu yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Produktivitas pertanian masih rendah



Persoalan pembangunan pertanian di Indonesia masih bersifat klasik. Persoalan itu mencakup masih belum tercapainya produktivitas potensi untuk sebagian besar komoditas, rantai tata niaga masih belum efisien dan berkeadilan, serta fluktuasi harga ditingkat produsen dan konsumen masih tinggi.

Produktivitas komoditas sektor pertanian secara jangka Panjang dapat menjaga kelangsungan pertanian dan perkebunan besar maupun kecil. Seiring dengan harga komoditas yang dinamis yang berbeda-beda pada tiap periodenya. Namun petani rakyat yang merupakan salah satu bagian rantai pasok utama masih belum memproduksi secara optimal, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. dan juga pemilik lahan cenderung mengikuti jenis komoditas yang paling kompetitif di pasar, sehingga dapat mempengaruhi diversifikasi komoditas.

b) Kebijakan pembangunan kurang berpihak pada sektor pertanian:

Kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian terutama pada tataran instrumen kebijakan, seperti pajak impor, nilai tukar rendah, dan bahkan kuota tertentu bagi industri infant telah mengakibatkan konsumen domestik, termasuk petani, harus membayar harga beli saprodi, seperti pupuk, alat dan mesin pertanian lebih mahal dari harga sebenarnya di tingkat internasional. Begitu juga dengan kebijakan makro ekonomi, seperti kredit perbankan yang kurang mendukung kegiatan sektor pertanian.

c) Harga input produksi yang tinggi dan NTP yang tidak seimbang

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, yang dihitung melalui perbandingan indeks harga yang diterima dengan harga yang dibayar petani, sehingga harga input produksi dan subsidi sangat mempengaruhi pendapatan petani. Meskipun sejak masa pandemic, laju ekonomi pertanian tahun 2020 dapat mendorong NTP naik, tetapi trend umum masih memiliki kecenderungan penurunan, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan input produksi, pemberian subsidi atau menekan tingkat suku bunga perbankan agar petani bisa mengembangkan usahanya melalui dana perbankan. Pemerintah saat ini telah memberikan subsidi bunga kredit untuk meringankan beban petani pada skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta penjaminan bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun penyaluran kredit program tersebut masih sangat rendah.



d) Distribusi hasil pertanian ke konsumen

Adanya pandemi Covid-19 membawa akibat pada pasokan pangan, karena adanya hambatan pergerakan pangan. Moda transportasi pangan di Indonesia masih sangat terbatas, baik lewat darat maupun lewat udara, dan belum menjadi prioritas, sehingga distribusi pangan terhambat dan menyebabkan disparitas harga.

e) Ancaman krisis pangan dan Covid-19

Perkembangan populasi penduduk di Indonesia yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan pangan, akan berpotensi pada krisis pangan. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim menyebabkan resesi ekonomi dan sekaligus krisis pangan. Ancaman tersebut semakin besar karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia dan peningkatan pendapatan kelas menengah yang menyebabkan peningkatan pangan.

f) Regenerasi petani milenial untuk pertanian 4.0

Bekerja di sektor pertanian saat ini dipandang sudah tidak menguntungkan untuk para petani. Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan dari sektor pertanian tidak menjanjikan dan secara sosial sektor ini dipandang rendah. Hal ini tampak dari generasi tua yang sudah enggan kembali bertani begitu juga dengan generasi muda yang mulai kehilangan semangat meneruskan usaha orang tua untuk menggarap lahan pertanian. Berdasarkan Survey Pertanian Antar Sensus (SUPAS) tahun 2018, untuk menjaga kesinambungan sektor pertanian sampai dengan tahun 2040, dibutuhkan jumlah petani sebanyak 10,2 juta, dimana 2 juta diantaranya adalah petani dengan usia kurang dari 25 tahun, atau petani milenial.

Isu pertanian nasional tersebut juga merupakan isu di Kabupaten Timur, sehingga harus merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi dan memperkecil dampak negatif dari isu-isu pertanian tersebut. Berdasarkan isu-isu di atas, isu regenerasi petani dijadikan sebagai momentum untuk melakukan transformasi petani konvensional menuju petani modern yang mampu mengikuti dinamika perubahan lingkungan menuju petani berdaya saing.



4) Isu Pembangunan Sosial

Isu pembangunan sosial meliputi:

a. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Beberapa dampak dari diberlakukannya PSBB di beberapa provinsi menyebabkan aktivitas perekonomian khususnya sektor pariwisata, perhubungan, akomodasi dan transportasi mengalami penurunan cukup signifikan. Akibatnya terjadi pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja. Situasi ini menimbulkan tingkat pengangguran yang memicu daya beli rendah, sehingga menyebabkan angka kemiskinan meningkat.

b. Pengangguran

Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 5,32 persen. Hal ini membuat para pelaku usaha mengurangi jam kerja hingga pemutusan hubungan pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran.

c. Kriminalitas

Secara nasional selama tahun 2016-2018 terdapat sembilan jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan menurut kepolisian. Kedelapan tindak kejahatan tersebut adalah: 1) Kejahatan terhadap nyawa, 2) Kejahatan terhadap fisik/badan, 3) Kejahatan terhadap kesusilaan, 4) Kejahatan kemerdekaan orang, 5) Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, 6) Kejahatan terhadap hak milik/barang, 7) Kejahatan terhadap narkoba, 8) Kejahatan terkait ketertiban umum, dan 9) Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi. Berdasarkan laporan regional kejahatan tertinggi terhadap fisik/badan, hak milik/barang dengan dan tanpa kekerasan tercatat di Sumatera Utara. Kejahatan total, kejahatan terkait narkoba, penipuan, penggelapan dan korupsi tertinggi di Pulau Jawa. Di pulau Kalimantan khususnya Kaltara kejahatan dilaporkan cukup rendah, namun masih ada laporan tentang kejahatan terhadap fisik/badan dan kejahatan terhadap kesusilaan.



Kepulauan Maluku dilaporkan memiliki kejahatan yang paling rendah dalam hal: kekerasan terhadap hak milik/barang dengan atau tanpa kekerasan, penipuan, penggelapan, dan korupsi. Berikutnya kepulauan Nusa Tenggara dilaporkan memiliki kejahatan paling rendah yaitu narkoba.

d. NAPZA

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Menurut BNN Indonesia angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018 meningkat mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Mengingat kalangan remaja yang terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab, mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengonsumsi narkoba. Sinergi segenap komponen masyarakat termasuk institusi pendidikan berkontribusi penting untuk memerangi narkoba agar tidak ada lagi kalangan remaja yang mengonsumsi narkoba. Peran aktif pelajar dan mahasiswa sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah dan menangkal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

e. Ketenagakerjaan dan produktivitas kerja

Indonesia adalah negara berkembang yang dicirikan dengan kontribusi sektor informal yang cukup signifikan. Menurut data BPS selama tiga tahun terakhir komposisi lapangan kerja sektor formal dan sektor informal masih menunjukkan terdapat celah antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Lapangan kerja sektor informal di wilayah perkotaan sebesar 38,48 persen tahun 2017 naik menjadi 39,07 tahun 2018 menjadi sebesar 39,48 persen pada tahun 2019. Hal ini berarti komposisi di wilayah perdesaan cenderung menurun: sebesar 54,82 tahun 2017 menjadi 52,77 tahun 2019.

Bila dilihat dari kategori sektoral lapangan kerja informal diluar sektor pertanian rata-rata nasional berkisar pada angka 44,13 mengalami penurunan menjadi 43,75. Beberapa provinsi yang mempunyai lapangan kerja informal diluar sektor pertanian



dias rata-rata nasional adalah: 1) Sulawesi Barat sebesar 53,82; 2) Lampung sebesar 55,88; dan 3) Nusa Tenggara Barat sebesar 60,68. Hal sebaliknya berlaku di Provinsi Banten, lapangan kerja informal diluar pertanian hanya sebesar 34 persen dan Provinsi Bali sebesar 38,62 persen.

Menurut kelompok umur jumlah yang bekerja di sektor informal mengikuti karakteristik sebagai berikut: kelompok umur dibawah 20 tahun (15-19) yang bekerja di sektor informal selama tahun 2017-2019 ada pada kisaran 38,27 hingga 42,78 persen, selanjutnya untuk kelompok 30 tahun hingga usia pensiun jumlah pekerja yang masuk sektor informal semakin tinggi. Pada rentang umur 30-34 tahun pekerja sektor informal diluar pertanian sebesar 38 persen. Sementara untuk kelompok 60 tahun keatas, jumlah ini mencapai 75 persen. Selanjutnya bila diklasifikasikan dalam jenjang pendidikan semakin rendah tingkat pendidikan pekerja, semakin besar proporsi yang bekerja secara informal diluar sektor pertanian. Pada tahun 2017 sampai 2018 pekerja informal yang berpendidikan setara SD sebesar 66,69 persen, setara SMP 52 persen, setara SMA umum 38 persen, SMK kejuruan sebesar 29 persen, diploma I-IV sebesar 17 persen, dan setingkat universitas sebesar 11,48 persen (BPS, indikator utama, 2020).

f. Jaminan kesehatan dan jaminan sosial

Jumlah peserta BPJS hingga akhir November 2019 baru sekitar 222.815.475 orang atau sekitar 84 persen dari total penduduk tahun 2019 menurut data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) adalah 266.534.836 jiwa. Jumlah kepesertaan tersebut terus bergerak, namun dipastikan tidak akan mencapai target. Berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat mendaftar, seperti memperluas kanal pendaftaran seperti lewat telepon seluler, namun faktanya banyak yang belum mendaftar. Adapun peserta yang belum terdaftar adalah segmen pekerja atau bukan pekerja yang memiliki kemampuan finansial. Sedangkan penduduk miskin atau kurang mampu diperkirakan sudah terkover semua dalam segmen peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat maupun pemda, dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III. Selain itu peserta JKN-KIS yang masih belum mendaftar adalah yang merasa belum membutuhkan perlindungan kesehatan, dan mereka yang masih menggunakan



asuransi lain. Dengan kemampuan finansial yang dimiliki mereka sudah merasa terlindungi tanpa harus berkontribusi pada JKN-KIS. Tantangan kedepan adalah menyadarkan orang-orang ini bahwa program JKN-KIS sifatnya mandatori. Penyebab lainnya yakni adanya ketakutan utilitas meningkat dan menyebabkan pengeluaran untuk biaya layanan peserta makin besar. Pengeluaran besar tidak diikuti dengan kecukupan pendapatan menyebabkan BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit. Faktanya, menurut Iqbal, pihaknya semakin mempermudah pendaftaran untuk masyarakat tanpa dibatasi. Selain itu juga menaikkan iuran peserta yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres 75/2019 berpotensi menghambat tercapainya UHC. Sejumlah pemda akan melakukan penyesuaian jumlah peserta yang ditanggung dalam program JKN-KIS.

g. Inovasi dan adaptasi teknologi

Adanya disrupsi teknologi di berbagai sektor menuntut ekosistem kerja yang selama ini terbentuk harus mulai diubah dengan adaptif terhadap: 1) Adaptasi pemanfaatan teknologi informasi, 2) Adaptasi perkembangan inovasi pelayanan, 3) Adaptasi perubahan teknologi 5.0 untuk mendukung pelayanan *online*. Dalam kondisi ini para *talent* perlu dipersiapkan memiliki spesifikasi keahlian tertentu.

h. Kesetaraan gender

Data BPS menunjukkan indeks kesetaraan gender Indonesia tahun 2019 sebesar 91,07 meningkat dari indeks tahun 2018 sebesar 90,99. Secara umum di wilayah Indonesia bagian barat (IBB) indeks kesetaraan gender relatif sudah tinggi (indeks diatas 80). Kesenjangan antar kabupaten kota dalam satu provinsi relatif kecil. Namun demikian untuk Indonesia bagian timur (IBT) disamping masih memiliki indeks yang variatif, juga mendapat ketimpangan yang sangat tinggi antar kabupaten. Di Provinsi Maluku rata-rata indeks kesetaraan gender jauh diatas rata-rata nasional yaitu sebesar 97,84. Hal ini sangat kontras dengan indeks kesetaraan gender pada beberapa kabupaten di Irian Jaya. Kabupaten Puncak Wijaya memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 65,25, Kabupaten Tolikara memiliki IPG sebesar 59,83; dan Kabupaten Asmat hanya sebesar 53,71. Di Kalimantan Timur Indeks Kesetaraan Gender sebesar 85,98. Kabupaten Kutai Timur memiliki skor IPG sebesar 76,51. Skor ini merupakan kategori rendah di antara sepuluh kabupaten kota



yang ada di Kalimantan Timur. IPG Kutai Timur hanya sedikit lebih tinggi dibanding IPG Kabupaten Paser. Delapan kabupaten kota lain memiliki IPG pada kisaran 80, sementara Kota Samarinda dan Balikpapan masing-masing memiliki IPG sebesar 89,71 dan 89,41.

i. Perlindungan anak

Menurut KPAI pada tahun 2019 situasi perlindungan anak di Indonesia belum membaik. Terdapat 4.369 kasus pelanggaran hak anak dari hasil pengawasan dan pengaduan yang dilaporkan. Kasus ini menurun sebesar 5,5 persen dibanding tahun 2018 (4.885 kasus). Data menunjukkan masih ada anak Indonesia yang terlibat dengan permasalahan hukum (2.685 kasus) : 1) Korban pornografi dan cyber crime (1.332 kasus); 2) Korban trafficking dan eksploitasi (573 kasus); 3) Pelanggaran hak pengasuhan keluarga; 4) Hak pendidikan; 5) Bahaya kesehatan dan narkoba; 6) Pelanggaran hak agama dan budaya; serta 7) Berada dalam kondisi darurat.

Kajian KPAI pada 2019 melaporkan terdapat 48,3 persen dari 119 responden di 23 provinsi menunjukkan bahwa hanya hak rehabilitasi anak yang tuntas sehingga kualitas perlindungan anak belum optimal. Temuan KPAI dalam survey ini sebagai berikut: 1) Pentingnya pencegahan perkawinan anak lewat pengawasan yang efektif. Menindak lanjuti temuan ini KPAI menghimbau pemerintah untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan anak menjadi 19 tahun. 2) pemerintah mengawasi anak dari potensi menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) serta infiltrasi radikalisme terorisme (www.aa.com.tr/id).

5) Isu Infrastruktur

Infrastruktur yang semakin kompetitif merupakan kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Banyak wilayah di Indonesia yang hanya memiliki infrastruktur fisik dan digital di bawah standar atau bahkan tidak sama sekali, biasanya karena kurangnya investasi. Di sisi lain, pertumbuhan, industrialisasi, dan urbanisasi Indonesia yang cepat selama 20 tahun terakhir menyebabkan kebutuhan infrastruktur-infrastruktur tersebut pun meningkat. Terdapat empat tantangan dalam pembangunan infrastruktur dasar:



- a. *Pertama*, disparitas antar wilayah terutama kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia
- b. *Kedua*, yakni mengenai daya saing nasional yang perlu terus didorong di antaranya dengan peningkatan konektivitas
- c. *Ketiga*, tingkat urbanisasi yang tinggi hingga mencapai 53 persen penduduk tinggal di kawasan perkotaan
- d. Keempat adalah pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi

6) Rendahnya Pemanfaatan Kapasitas Teknologi Informasi Di Pemerintahan

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan mengembangkan *e-government* guna meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan terbitnya INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (RI, 2003). Pengembangan *e-government* tersebut didukung pembangunan *broadband* (pitalebar) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (RI, 2014a). Kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* ini tidak saja direspon oleh pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Implementasi *e-government* pada pemerintah daerah berbeda satu sama lain sehingga tingkat keberhasilannya berbeda pula. Kondisi tersebut diatasi dengan mengharuskan pemerintah daerah untuk menerapkan *e-government* sesuai yang diatur dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (RI, 2018a).

Berdasarkan hasil evaluasi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh hasil berikut (Kompas.com, 2019):

- a) Optimalisasi pemanfaatan TI dari 616 kementerian dan lembaga hanya 82 instansi (13,31 persen) yang berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Terdapat 86,69 persen instansi pemerintah berpredikat cukup dan kurang atau dengan indeks SPBE < 2,6.
- b) Optimalisasi pemanfaatan TI pada tingkat pemerintah provinsi dengan predikat indeks SPBE > 2,6 (baik 2 provinsi dan sangat baik 1 provinsi).



- c) Optimalisasi pemanfaatan TI pada tingkat pemerintah kabupaten/ kota dengan predikat baik atau indeks SPBE > 2,6 hanya ada 3 kabupaten/kota.

Prinsip penerapan SPBE adalah efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, inter operabilitas, dan keamanan. Penerapan SPBE dilakukan demi mendukung pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun unsur utama penerapan SPBE di daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, meliputi: i) infrastruktur telekomunikasi; ii) konektivitas (inter dan antar sistem); iii) kapasitas; iv) kelembagaan dan tatakelola; v) Sumber Daya Manusia; serta vi) penyebaran informasi dalam kerangka layanan kepada masyarakat berbasis digital dengan mengedepankan unsur inovasi dan kreativitas melalui teknologi informasi.

Penguatan kelembagaan terkait SPBE di Pemerintah Kabupaten Timur dapat dipusatkan pada Dinas Kominfo dan Perstik. Dinas ini seharusnya menjadi *leading sector* berbagai kegiatan yang masuk dalam program informasi dan komunikasi publik serta program aplikasi informatika. Hal ini sebagaimana diatur dalam: i) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; ii) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur tersebut diperlukan untuk mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

7) **Isu 100 Smart City**

Indonesia telah mencanangkan gerakan menuju 100 *smart city* sejak tahun 2015 ditandai adanya penyusunan *masterplan* 35 wilayah pengembangan strategis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengembangan *smart city* merupakan solusi perkotaan akibat adanya peningkatan jumlah penduduk. Konsep dan istilah terkait *smart city* bervariasi (Eremia et al., 2017)

Arah kebijakan pengembangan smart city di Indonesia merupakan upaya mendorong transformasi digital pada pemerintah daerah. Prioritas pengembangan *smart city* diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar terlebih dahulu. Konsep *smart city* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dirancang secara berkesinambungan dan terus



berkembang agar: 1) membantu dan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat; 2) mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien; 3) memberikan peningkatan pelayanan publik yang menunjang peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat; dan 4) dapat mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Apabila ditinjau dari dimensi *smart city* terdapat antara lain dimensi institusional, dimensi manusia, dan dimensi teknologi. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hanya berperan sebagai *enabler*. Adapun komponen dasar non teknologi yang perlu diperhatikan adalah pemerintahan dan kelembagaan, kebijakan politik, manajemen dan organisasi, serta masyarakat.

Pada tahun 2018 Kabupaten Kutai Timur telah terpilih dan ditetapkan menjadi salah satu kabupaten/kota yang mengikuti Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Program smart city ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan. Bagi Kutai Timur dengan mengikuti program dalam gerakan smart city adalah untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi guna menjawab tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, investasi teknologi di masa lima tahun mendatang adalah sangat penting dan harus diikuti pemanfaatannya yang efektif untuk tatakelola internal dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

4.3.1.3. Isu Regional

Terdapat beberapa isu regional Provinsi Kalimantan Timur yang berpotensi mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi:

1) Isu Kualitas Lingkungan Hidup

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi hijau di Indonesia dan telah menjadi pelopor keberlanjutan, salah satunya yang dikenalkan melalui program FCPF (Forest Carbon Partnership Facilities) World Bank. Sebagai salah satu provinsi dengan tutupan hutan yang besar, Kalimantan Timur juga dihadapkan pada perkembangan pesat regional terutama untuk kegiatan-kegiatan berbasis lahan seperti pertambangan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan tersebut diduga menyebabkan turunnya tutupan hutan, fragmentasi habitat satwa liar dan langka, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilihat dari angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja



program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum dari tahun 2015 hingga tahun 2018 IKLH Kalimantan Timur (85,90) lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH nasional (65,10). Meskipun demikian, provinsi Kalimantan Timur harus tetap waspada dalam rangka menerapkan *Green Economy*. Kewaspadaan ini harus diwujudkan dalam bentuk komitmen pembangunan *Green Economy* yang tertuang dalam perencanaan pembangunan baik provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten/Kota di wilayah provinsi ini. Pengelolaan limbah di semua sektor merupakan isu yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara nyata. Solusi penanganan limbah tersebut ditujukan untuk perbaikan kelestarian lingkungan, kualitas hidup, dan peningkatan nilai ekonomi. Sedangkan isu-isu regional baik Kalimantan secara umum maupun Kalimantan Timur secara khusus akan mempengaruhi isu pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Kalimantan Timur telah memiliki Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang tugasnya diantaranya melakukan konservasi terhadap satwa liar dan langka, serta melarang pembukaan lahan secara besar-besaran. Hal ini ditujukan untuk menjamin keseimbangan lingkungan sehingga tetap terjaga dan terpelihara. Pengelolaan kawasan bernilai konservasi yang berfungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi. Kawasan ini merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebarannya terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (*viable population*). Masyarakat umum dapat mendukung program konservasi baik langsung maupun tidak langsung, misalnya tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi. Apalagi bekantan dan orangutan merupakan endemik pulau Kalimantan yang harus dilindungi (Melawati dkk, 2010).

2) Isu Covid-19

Pandemi Covid-19 berdampak pada berkurangnya kapasitas produksi hingga menurunnya pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur kuartal II mengalami kontraksi sebesar minus 5,46 persen. Namun kinerja investasi masih tumbuh 0,20 persen (y.o.y). Berdasarkan lapangan usaha, penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan II bersumber pada lesunya kinerja utama khususnya pertambangan. Penurunan kinerja pertambangan akibat melemahnya permintaan batubara negara tujuan ekspor. Kinerja perdagangan, transportasi serta akomodasi serta makan dan minum juga mengalami penurunan sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat di tengah adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Kaltim (kalimantan.bisnis.com).



3) Isu Pembangunan Regional Berdasarkan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Isu pembangunan di Kalimantan dan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

- a) Isu pembangunan di Kalimantan mengacu pada RPJMN 2020-2024, yaitu:
 1. Penguatan konektivitas wilayah
 2. Pengembangan industri pengolahan SDA (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang
 3. Percepatan pembangunan desa tertinggal dan desa perbatasan
- b) Isu Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:
 1. Kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
 2. Ketergantungan yang tinggi pada pertambangan
 3. Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, air, pasar, dan sanitasi)
 4. Perpindahan ibukota negara
 5. Daya saing daerah
 6. Lingkungan Hidup berkelanjutan

4) Isu Perpindahan Ibukota Negara

Presiden telah mengumumkan pemindahan ibukota negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Pemindahan ibukota ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Rencananya ibukota negara baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi undang-undang yang mengatur seluruh tata kelola, bentuk dan susunan pemerintah IKN sekaligus juga memuat mekanisme pemindahan ibukota negara. Sementara saat ini terdapat undang-undang nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibukota Jakarta dan undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang tata ruang JABODETABEK, Puncak-Cianjur untuk waktu pelaksanaan 2020-2039 tertanggal 16 April 2020.

Pemindahan ibukota negara harus berdasarkan kekuatan hukum tetap. Sementara itu pendanaan pembangunan tahap I berupa infrastruktur dasar yang ditargetkan dimulai pada akhir tahun 2020 belum juga dimulai meskipun sejak awal telah direncanakan tercukupi dari dana



APBN. Hal ini disebabkan karena pembangunan ibukota negara masih menunggu pengesahan rancangan undang-undang sebagai payung hukum yang bersifat tetap.

4.2.1.1. Sinkronisasi Isu Eksternal

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu global, nasional, dan regional maka dapat disusun sinkronisasi isu eksternal. Isu eksternal merupakan isu yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding isu internal terkait dalam penyusunan rencana strategis. Sinkronisasi isu eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu eksternal Kabupaten Kutai Timur ditinjau dari 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah uraian sinkronisasi isu-isu eksternal:

1) Ekonomi

- a) Pertumbuhan ekonomi melambat dan pekerjaan layak (SDGs fokus *goal 8*);
- b) Penurunan permintaan komoditas batubara dari negara tujuan ekspor;
- c) Krisis pangan dan kriminalitas (SDGs fokus *goal 1*); dan
- d) Disrupsi Teknologi.

2) Lingkungan (fisik dan infrastuktur)

- a) Gas Rumah Kaca di berbagai sektor dan entitas (SDGs fokus *goal 13*);
- b) Pengelolaan limbah dan sumber daya air (SDGs fokus *goal 6*);
- c) Konservasi *biodiversity* satwa liar dan langka (SGDs fokus *goal 15*); dan
- d) 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*).

3) Sosial

- a) Pandemi Covid-19;
- b) Digitalisasi aktivitas sosial;
- c) Regenerasi petani milenial;
- d) Pembatasan mobilisasi sosial lintas dan antar negara;
- e) SDGs fokus *goal 1, 2, 3, 4, 5*; dan
- f) *Smart City*.

4.3.2. Isu Internal

Selain isu eksternal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membutuhkan identifikasi isu internal dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Berikut adalah uraian isu internal yang telah diidentifikasi.



4.2.2.1 Isu Yang Belum terselesaikan Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMD Kutim 2016-2021

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 dapat diidentifikasi isu berikut.

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa hal yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat adalah: pertumbuhan output; aktivitas sektoral dan capaian Produk Domestik Bruto (PDRB); persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), bidang ketenagakerjaan, bidang kependudukan. Selama lima tahun terakhir, 2016-2020 PDRB mengalami trend peningkatan secara signifikan, dengan capaian pertumbuhan sebesar 3,71 persen pada tahun 2015 dan target capaian sebesar 3,79 persen pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang mewabah pada awal tahun 2020 di seluruh dunia, menyebabkan target capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur harus direvisi. Di level regional provinsi, ekonomi Kalimantan Timur dilaporkan turun sebesar 5,34 persen selama tahun 2020. Hal yang tidak jauh berbeda diperkirakan berlaku bagi Kutai Timur, pertumbuhan ekonomi turun secara signifikan yang disebabkan oleh kondisi pembatasan sosial berskala besar. Dilihat dari kontribusi lapangan usaha (sektoral) PDRB, sektor pertanian untuk subsektor tanaman pangan tumbuh antara 5,62 persen (2015) menjadi 8,75 persen pada tahun 2020. Di sisi yang lain, sub sektor palawija memberi kontribusi antara 0,62 persen (2015) hingga mencapai 0,68 persen (2020). Capaian lain dari sektor pertanian adalah peningkatan nilai tukar petani (NTP) selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 95,29 (2015) meningkat menjadi 100,33 (2020). NTP ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan kesejahteraan petani selama tahun 2015-2020. NTP juga mencerminkan aspek daya saing wilayah. Capaian ini hendaknya dipertahankan agar kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian dapat meningkat. Berikut adalah permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat:

1. Ketergantungan yang tinggi pada kontribusi PDRB dari sektor Migas dan Batu Bara, yaitu sekitar 81 persen.
2. Pertanian belum mampu berkontribusi optimal pada PDRB (masih 8 persen) meskipun menjadi sektor unggulan.



3. Kesehatan (Tingginya AKI, AKB dan *Stunting*; Beban Penyakit (Menular dan Tidak Menular); Akses dan mutu pelayanan kesehatan; Pembiayaan Kesehatan (UHC); Distribusi SDM Kesehatan; Kompetensi Fasyankes).

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Kutai Timur telah meningkat cukup baik; selama 69 tahun (2016) naik menjadi 73,36 tahun (2020). Dapat dikatakan tiap tahun terjadi kenaikan rata-rata usia penduduk sekitar 11 bulan. Meningkatnya rata-rata AHH penduduk secara teoritis dipandang sebagai keberhasilan dalam bidang kesehatan. Ditinjau dari indikator angka kematian bayi (AKB), dilaporkan sebanyak 15 kematian per 1.000 kelahiran (2015), telah turun menjadi 9 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 2020. Cakupan imunisasi bayi meningkat dari 84 persen (2015) menjadi 92 persen (2020). Yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan lima tahun berikutnya adalah angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. AKI dilaporkan sebanyak 204 kematian (2015), meningkat menjadi 271 kematian (2017), dan sebanyak 238 kematian (2020). Catatan lain dibidang kesehatan adalah untuk kebijakan pembangunan lima tahun berikutnya adalah prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk. Tahun 2015 tercatat sebanyak 162 kasus, namun tahun 2020 dilaporkan telah meningkat menjadi 231 kasus.

4. Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah)

Beberapa capaian bidang pendidikan diantaranya: angka putus sekolah dan angka kelulusan siswa, baik di tingkat SD sederajat dan SMP sederajat. Angka putus sekolah SD sederajat sebesar 0,13 (2015) turun menjadi 0,10 (2020); sementara untuk SMP sederajat sebesar 0,46 (2015) turun menjadi 0,07 (2020). Angka kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat sudah optimal, telah tercapai 100 persen sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Rasio guru/murid baik di jenjang SD sederajat maupun SMP sederajat telah memenuhi standard, yaitu 1 orang Guru melayani 20 murid. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bidang pelajaran yang diajarkan hendaknya sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki Guru. Untukantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, seperti kondisi belajar dari rumah di masa pandemik, maka ketrampilan Guru menggunakan sarana pembelajaran daring (*online*) hendaknya menjadi prioritas kebijakan dinas pendidikan lima tahun mendatang.



B. Aspek Pelayanan Umum

- 1) Distribusi tenaga kesehatan (jumlah, distribusi dan kualitas), terutama dokter spesialis masih terpusat di Sangatta Utara.
- 2) Penanggulangan penyakit menular (TB dan HIV AIDS) dan tidak menular, di beberapa kecamatan terutama di wilayah perkebunan.
- 3) Pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil masih terbatas terutama di kecamatan perbatasan dengan kabupaten lain.
- 4) Penanganan sampah dan limbah, terutama limbah pasca tambang.
- 5) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
Indikator di bidang ini mencakup: ketersediaan pangan utama dan ketersediaan regulasi ketahanan pangan. Indikator pertama telah dicapai sebesar 82 persen (2015) dan naik menjadi 99 persen (2020). Indikator yang kedua tercapai sebanyak 1 dokumen (2015) meningkat 1 dokumen pada tahun 2020. Sedangkan data mengenai indikator-indikator lainnya belum tersedia.
- 6) Ketersediaan pangan masih bertumpu pada padi-padian. Diversifikasi pangan masih belum memanfaatkan potensi produk pangan lokal sebagai sumber karbohidrat.
- 7) Pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan masih memerlukan penanganan pasca tangkap yang memadai.
- 8) Pelayanan dan partisipasi KB masih memerlukan tenaga penyuluh lapangan untuk meningkatkan jangkauan terutama untuk daerah
- 9) Nilai investasi agribisnis masih rendah karena belum mampu menarik investor dan pembinaan UMKM perlu ditingkatkan dengan memperhatikan tren pasar serta optimalisasi penggunaan bahan baku lokal.
- 10) Potensi pariwisata memerlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang termasuk mengakomodasi pariwisata kekinian sesuai dengan tren pariwisata. Pariwisata kekinian tersebut dapat menjadi daya ungkit ekonomi wilayah Kutai Timur termasuk potensi wisata yang sudah ada.
- 11) Ketenagakerjaan
Salah satu indikator bidang ketenagakerjaan mencakup besaran pencari kerja yang ditempatkan. Tahun 2015 indikator ini sebanyak 684 orang, dan tahun 2020 menjadi sebanyak 1.050 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja formal belum



mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia. Sehingga diperlukan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD).

12) Sosial

Beberapa indikator pembangunan di bidang sosial diantaranya: a). persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan b). persentase penyandang cacat fisik, mental dan lansia yang mendapat jaminan sosial. Untuk indikator yang pertama, capaian pada tahun 2015 sebesar 61 persen naik menjadi 79 persen pada tahun 2020. Terkait dengan jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik, mental dan lansia; sebesar 52 persen (2015) naik menjadi 60 persen (2020).

13) Ketahanan Pangan

Kecukupan pangan masih dipenuhi dari daerah lain sehingga diperlukan penguatan kemampuan produksi pangan dan ditunjang dengan pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi.

14) Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Indikator pemberdayaan perempuan dan anak, diantaranya: rasio KDRT; cakupan layanan pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan; dan proporsi wanita di lembaga eksekutif dan legislatif. Rasio KDRT dilaporkan sebesar 0,018 (2015) turun menjadi 0,012 (2020). Cakupan layanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dilaporkan sebanyak 15,20 persen (2015) turun menjadi 5 persen (2020). Rasio wanita dalam lembaga pemerintahan dan di lembaga legislatif telah mencapai 40 persen, hal ini telah dicapai sejak 2015 hingga tahun 2020.

15) Administrasi kependudukan diantaranya:

- a) rasio penduduk ber-KTP, Indikator kinerja rasio penduduk ber-KTP sebanyak 66 persen (2015) naik menjadi 95 persen (2020);
- b) rasio pasangan yang memiliki akte nikah, penerbitan akte nikah sebanyak 22 persen (2015) dan naik menjadi 99 persen (2020)
- c) rasio penerbitan akte kelahiran, untuk penerbitan akte kelahiran, baru sebesar 30 persen (2015) telah mencapai 99 persen (2020).

Ketiga indikator ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik di bidang administrasi kependudukan



C. Aspek Daya Saing Daerah

- 1) Infrastruktur belum sepenuhnya pendukung konektivitas antar wilayah terutama di daerah perbatasan.
- 2) Jaminan ketersediaan listrik masih belum memadai, terutama di daerah kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berupa lereng perbukitan dan DAS.
- 3) Investasi agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah masih belum mampu menjadi daya ungkit perekonomian daerah
- 4) Kualitas SDM yang berdaya saing global masih belum mampu bersaing dengan daerah lain ditinjau dari aspek kesehatan dan pendidikan. Sehingga perlu penguatan melalui program kegiatan preventif-promotif bidang kesehatan dan pendidikan vokasional penunjang agribisnis-agroindustri.
- 5) Inovasi berbasis teknologi dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan dan tantangan di era revolusi industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga peran kelibangan perlu ditingkatkan tidak hanya dalam penyusunan kebijakan namun juga pada program/ kegiatan inovasi daerah.

4.2.2.2 Sinkronisasi Isu Internal

Berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder dapat diidentifikasi isu-isu internal Kabupaten Kutai Timur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan social adalah sebagai berikut :

1) Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi masih lambat dan bertumpu sumberdaya alam tak terbarukan
 1. Ketergantungan pada batu bara masih tinggi, menjadi ancaman keberlanjutan Sumber Daya Alam;
 2. Kurangnya Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi berbasis non batubara;
 3. Transformasi struktur ekonomi daerah berjalan lambat; dan
 4. Transformasi aktivitas transaksi ekonomi digital masih terbatas.
- b. Kesenjangan dan kurang meratanya pembangunan wilayah
 1. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan pelambatan penurunan di kawasan pesisir dan pedalaman;
 2. Masih rendahnya Nilai tukar Petani dan Nelayan (NTP);



3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota kabupaten (Sangatta);
4. Terbatasnya sarana prasarana pada kawasan pesisir, pedalaman dan perbatasan; dan
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi local (hulu hilir) yang bertumpu pada pertanian di kawasan perdesaan.

2) Lingkungan (fisik dan infrastuktur)

- a. Kurang memadainya infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
 1. Terbatasnya penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau diperkotaan;
 2. Belum optimalnya pengelolaan air tanah dan kualitas air baku berkelanjutan;
 3. Banyaknya saluran irigasi dalam kondisi rusak;
 4. Konektivitas darat antara kecamatan-desa dan terbatasnya moda Transportasi perkotaan-pedesaan;
 5. Minimnya Infrastruktur dan Ekosistem pemukiman kumuh Perkotaan;
 6. Kurangnya penyediaan Akses air minum (PDAM) namun telah dilengkapi dengan program PAMSIMAS dan PAMDES. Program tersebut telah didistribusikan di 10 kecamatan sejak tahun 2017-2020. Selain itu, masih kurang adanya sanitasi yang layak dan aman di pemukiman padar perkotaan;
 7. Terbatasnyaa Akses serta Keterjangkauan dan Ketenagalistrikan; dan
 8. Fasilitas pendukung (jaringan internet, wifi) transformasi digital masih terbatas.
- b. Kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim
 1. Penurunan kualitas Lingkungan Hidup karena berbagai cemaran dan peningkatan karbon;
 2. Kerentanan Bencana serta perubahan Iklim; dan
 3. Kerentanan terhadap gangguan ketahanan pangan.

3) Sosial

- a. SDM kurang berkualitas dan berdaya saing
 1. Pengendalian penduduk dengan tribina belum optimal;
 2. Cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat belum merata;
 3. Jangkauan dan kualitas layanan dasar belum optimal;



4. Belum memadainya perlindungan anak, perempuan dan pembinaan generasi muda;
 5. Lambatnya pengentasan kemiskinan; dan
 6. Masih rendahnya Produktivitas dan Daya saing SDM.
- b. Pelemahan karakter dan Memudarnya kecintaan kearifan lokal
1. Melemahnya kecintaan budaya lokal;
 2. Belum optimalnya pendidikan karakter dan budi pekerti;
 3. Belum kukuhnya toleransi dan kerukunan beragama dan beragam etnis;
 4. Belum optimalnya peran keluarga sebagai penguat ketahanan keluarga; dan
 5. Kurang tumbuhnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas generasi muda.
- c. Keamanan belum stabil dan transformasi pelayanan publik kurang optimal
1. Maraknya demonstrasi masyarakat
 2. Penegakan Hukum dan ketertiban umum belum optimal
 3. Reformasi Birokrasi dan tata Kelola penyelenggaraan pelayanan public belum optimal
 4. Meningkatnya kriminal dan tindak pidana

4.4. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa permasalahan utama pembangunan yang mengemuka berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan masalah perurusan pemerintahan. Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yang antara lain:

1. Penyediaan layanan dasar dan fasilitas dasar untuk mendukung daya saing ekonomi
2. Peningkatan jaminan sosial
3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak
7. Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Sektor Pertanian



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025.

5.1. VISI

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

Visi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

“ Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua ”



Gambar 5.1.
Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

5.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:



Gambar 5.2
Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Dalam upaya untuk menyamakan persepsi agar misi tersebut dapat dicapai, maka perlu penjelasan dari masing-masing misi diatas, yang diuraikan sebagai berikut:



Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Iman, takwa dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolok ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukkan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk merajut kehidupan bersama.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Budaya lokal merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas masyarakat. Hal ini menjadi benteng pertahanan yang sangat efektif untuk menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan. Pada sisi lain, budaya ini juga merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup manusia.

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang sejahtera dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan juga program penurunan angka pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan program pengentasan kemiskinan dan program penurunan angka pengangguran. Program ini dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fungsi sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kesehatan juga dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.



Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan, dan juga perlu adanya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi. Selain itu juga diperlukan peningkatan pengembangan ketrampilan petani, dan peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah, dan UMKM.

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat), tingkat pendidikan, kesehatan dan daya saing daerah terutama pada keberlangsungan pergerakan barang dan jasa beserta akses antar wilayah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.

Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan dan juga memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perubahan pola berfikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/ pemukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga



meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing, diperlukan suatu upaya yang antara lain: peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan kebijakan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan



lingkungan, dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawsan penataan ruang.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 “Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu”

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 adalah “Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera;
- b. Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat;
- c. Meningkatnya derajat Kesehatan;
- d. Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada Misi 2 adalah “Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan”, yang sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan;
- b. Meningkatnya pendapatan Petani;

Tujuan 2 (kedua) yang akan dicapai pada Misi 2 adalah “Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah.



3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 “Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada Misi 3 adalah “Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah;
- b. Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman;
- c. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi;
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana Pendidikan;
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana Kesehatan;
- f. Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi.

4. Tujuan dan Sasaran Misi 4 “Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada Misi 4 adalah “Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan 2 (kedua) yang akan dicapai pada Misi 4 adalah “Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah.

5. Tujuan dan Sasaran Misi 5 “Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan”

Tujuan 1 (pertama) yang akan dicapai pada Misi 5 adalah “Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan.



Tujuan 2 (kedua) yang akan dicapai pada Misi 5 adalah “Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan”, yang sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada setiap misi dapat dilihat pada tabel5.1.



Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Visi : “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu	Tujuan 1: Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: X1 = Indeks Harapan Hidup X2 = Indeks Pendidikan X3 = Indeks standart hidup layak		73	74.03	74.56	75.1	75.64	76.18	76.72	76,72
	Sasaran 1: Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	5.45	5.61	5.73	5.61	5.56	5.44	5.34	5.34
		2. Tingkat Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	%	9.55	9.6	9.65	9.57	9.5	9.43	9.36	9.36
		3. Persentase PAD terhadap pendapatan	$\frac{PAD}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$	%	5	7,05	6,88	6,98	7,05	7,14	7,23	7,23
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	4. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Tahun	12,89	12,89	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,30
		5. Rata - Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang	Tahun	9,19	9,19	9,2	9,35	9,45	9,55	10,00	10,00



Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			diduduki dan pendidikan yang ditamatkan									
	Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)	6. Angka Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup	Tahun	73,16	74,33	75,11	75,89	76,67	77,45	78,23	78,23
	Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	7. Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/SMP yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SD/SMP}} \times 100\%$	Persen (%)	> SD= 98,67 > SMP= 86,21	> SD= 98,67 > SMP= 86,21	> SD= 100 > SMP= 91,95	> SD= 100 > SMP= 94,25	> SD= 100 > SMP= 95,40	> SD= 100 > SMP=96,55	> SD= 100 > SMP=100	> SD= 100 > SMP=100
		8. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	5	5	5	6	6	7	7
		9. Penyelenggaraan Festival keagamaan	Penyelenggaraan Festival keagamaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	Tujuan 2: Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dan sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	%	9.16	9.34	9.53	9.82	10.11	10.41	10.73	10.73
	Sasaran 5: Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)	10. Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	43.66	43.66	44.16	44.66	45.16	45.66	46.16	46.16
		11. Produksi sektor pertanian	Jumlah Produksi komoditas pertanian	Ton	37,187	37,187	40,098	43,168	46,765	50,630	54,830	54,830
		12. Produksi sektor perkebunan	Jumlah Produksi komoditas perkebunan	Ton	6.456.662	6.456.662	6.956.662	7.456.662	7.956.662	8.456.662	8.956.662	8.956.662
		13. Produksi perikanan	Jumlah produksi ikan	Ton	8.085.61	8.085.61	8.085.61	8.085.86	8.086.11	8.086.36	8.086.61	8.086.61
Sasaran 6: Meningkatnya	14. Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$		111,9	109,66	108,57	107,48	108,55	109,64	110,74	110,74	



Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pendapatan Petani (M2.T1.S2)											
	Tujuan 3: Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$		-3,21	1,99	2,05	2,10	2,14	2,19	2,25	2,25
	Sasaran 7: Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	15. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	unit	1.265	1.341	1.425	1.518	1.620	1.733	1.860	1.860
		16. Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	Nib 720	688	722	759	796	836	876	876
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Tujuan 4: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Indek Pembangunan Desa (IPD)	$IPD = \frac{b_1 V_1 + b_2 V_2 + b_3 V_3 + \dots + b_{42} V_{42}}{20}$ <p>Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0 - 100) V₁ = Skor indikator ke - 1 V₂ = Skor indikator ke - 2 V₃ = Skor indikator ke - 3 . . . V₄₂ = Skor indikator ke - 42 b₁ = Penimbang/pembobot indikator ke - 1 b₂ = Penimbang/pembobot indikator ke - 2 b₃ = Penimbang/pembobot indikator ke - 3 . . . b₄₂ = Penimbang/pembobot indikator ke - 42</p>	Indeks	64,12	66,5	68,11	69,72	71,32	72,93	74,53	74,53
		Indeks Gini	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})}{2}$ <p>dimana: P_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau penghasilan sampai kelas ke-i</p>	Indeks	0,325	0,340	0,344	0,347	0,348	0,349	0,348	0,348
	Sasaran 8: Meningkatnya Konektivitas Antar	17. Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten (Km)}} \times 100\%$	%	51.88	51.98	52.84	53.26	53.72	54.21	54.71	54.71



Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Wilayah (M3.T1.S1)	18. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100-% Jumlah unit rumah kab/kota		13.705%	15.076%	18.091%	21.709%	26.051%	31%	37.514 %	37.514%
	Sasaran 9: Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)	19. Capaian Akses Air Minum Layak	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	43,43	48,70	53,81	53,86	53,90	53,95	53,99	53,99
		20. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	$\frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengelolaan Bersus Cakok 40(s) + Jumlah rumah yang memiliki SP dan limbahnya di olah di IPALD 20(s) + Jumlah rumah yang jumlah limbahnya telah diolah di PPT}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	%	65,69	76,45	76,75 (1%aman)	76,92 (aman 1,49%)	77,08 (aman 2,03%)	77,38 (aman 2,6%)	77,59 (aman 3,18%)	77,59 (aman 3,18%)
		21. Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	$\frac{\text{Kapasitas Infrastruktur Pengelolaan sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}} \times 100\%$	%	73,00	75,32	82,65	89,30	90,75	93,08	93,26	93,26
		22. Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	%	97,83	97,83	97,83	97,83	98,83	98,83	98,83	98,83
		23. Berkurangnya jumlah unit RTLH	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota		0.2472	0.2479	0.2486	0.2490	0.2493	0.24942	0.24943	0.24943



Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		24. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$	%	30,67% (3 Lokasi SK 2016)	30,67 % (3 Lokasi SK 2016)	30,67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	22,69 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	47,33 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	47,33%
	Sasaran 10: Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)	25. Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$	%	58.87	73.76	77.37	80.48	83.17	85.48	87.48	87.48
	Sasaran 11: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	26. Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 thn}} \times 10.000$		56,46	56,46	56,48	56,58	56,68	56,78	56,88	56,88
		27. Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 thn}} \times 10.000$		53,06	53,06	53,16	53,26	53,36	53,46	53,56	53,56
	Sasaran 12: Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	28. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$		0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
		29. Rasio rumah sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Sasaran 13: Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	30. Jumlah pasar			12	13	13	14	15	16	17	17
Misi 4 : Mewujudkan	Tujuan 5: Menata Kelola pemerintahan yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)											
	Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	31. Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil opini BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			55,72	55,72	55,72	56,00	56,3	60	63,5	63,5
		33. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$		86,95	86,95	90,00	93,00	95,00	98,00	100	100
		34. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$	%	1,14	35,00	37,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
		Tujuan 6: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$		75,09	75,85	75,87	75,9	75,93	75,95	75,98
	Sasaran 15: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)	35. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Persen (%)	17,14	17,14	25,71	34,29	48,57	62,86	77,14	77,14
Misi 5 :	Tujuan 7:	Indeks Kualitas	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$		69,47	69,47	69,97	70,47	70,97	71,47	71,97	71,97



Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Sinergitas	Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Lingkungan Hidup										
Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Sasaran 16: Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	36. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan		77,48	77,49	77,55	77,57	77,59	77,60	77,61	77,61
	Tujuan 8: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	%	99,94	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 17: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	37. Jumlah Perkada RDTR	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	1	1	1	2	2	2	1	1



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan program pembangunan daerah yang baik merupakan salah satu indikator kehandalan sebuah pemerintahan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan perlu dirumuskan untuk menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yaitu **Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua**.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan merupakan kerangka kerja atau rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dengan langkah-langkah yang berisi program dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Pemaparan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kutai Timur 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU”			
1. Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan	1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran (M1.T1.S1.ST1)	1. Peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (M1.T1.S1.ST1.AK1) 2. Peningkatan Pendapatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu” (M1.T1)			Per-Kapita (M1.T1.S1.ST1.AK2) 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (M1.T1.S1.ST1.AK3) 4. Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial (M1.T1.S1.ST1.AK4)
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (M1.T1.S1.ST2)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawsan sumber-sumber penerimaan daerah (M1.T1.S1.ST2.AK1)
	2. Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)	1. Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas (M1.T1.S2.ST1.AK1) 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2) 3. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3) 4. Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4)
	3. Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)	Peningkatan derajat kesehatan (M1.T1.S3.ST1)	1. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata (M1.T2.S3.ST1.AK1) 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat-Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan (M1.T2.S3.ST1.AK2) 3. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(M1.T2.S3.ST1.AK3)
	4. Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat (M1.T1.S4.ST1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal (M1.T1.S4.ST1.AK1) 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat (M1.T1.S4.ST1.AK2) 3. Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya (M1.T1.S4.ST1.AK3) 4. Pelestarian benda, situs dan cagar budaya (M1.T1.S4.ST1.AK4)
MISI 2 : "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"			
1. Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)	Penguatan Cadangan Pangan (M2.T1.S1.ST1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK1) 2. Peningkatan Diversifikasi Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK2)
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan (M2.T1.S1.ST2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK1) 2. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK2) 3. Pengembangan perikanan tangkap (M2.T1.S1.ST2.AK3) 4. Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK4)
	Meningkatnya Pendapatan Petani (M1.T1.S2)	Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Petani (M1.T1.S2.ST1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keterampilan Petani (M1.T1.S2.ST1.AK1) 2. Peningkatan Produktivitas Lahan (M1.T1.S2.ST1.AK2) 3. Penerapan Teknologi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa (M1.T1.S2.ST1.AK3)
2. Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1)	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1.AK1)
		Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif (M2.T2.S1.ST2)	1. Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif (M2.T2.S1.ST2.AK1) 2. Pengembangan Kepariwisata di Daerah (M2.T3.S1.ST2.AK2) 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata (M2.T2.S1.ST2.AK3)
		Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal (M2.T2.S1.ST3)	Peningkatan investasi di Daerah (M2.T2.S1.ST3.AK1)
MISI 3 : “MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA”			
1. Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi (M3.T1.S1.ST1)	1. Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (M3.T1.S1.ST1.AK1) 2. Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (M3.T1.S1.ST1.AK2)
	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman (M3.T1.S2.ST1)	1. Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan (M3.T1.S2.ST1.AK1) 2. Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (M3.T1.S2.ST1.AK2) 3. Penyediaan Rumah Layak Huni (M3.T1.S2.ST1.AK3) 4. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (M3.T1.S2.ST1.AK4)
	Meningkatnya Infrastruktur	Peningkatan Akses	Kutim Merdeka Sinyal



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)	Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3.ST1)	melalui penerapan inovasi Smartcity (M3.T1.S3.ST1.AK1)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5.ST1)	1. Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (M3.T1.S5.ST1.AK1) 2. Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu (M3.T1.S5.ST1.AK2)
	Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa (M3.T1.S6.ST1)	Peningkatan Jumlah Pasar (M3.T1.S6.ST1.AK1)
MISI 4 : “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”			
1. Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi (M4.T1.S1.ST1)	1. Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan (M4.T1.S1.ST1.AK1) 2. Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>) (M4.T1.S1.ST1.AK2) 3. Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur (M4.T1.S1.ST1.AK3) 4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (M4.T1.S1.ST1.AK4) 5. Peningkatan penelitian dan inovasi daerah (M4.T1.S1.ST1.AK5)
		Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (M4.T1.S1.ST2)	Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optimal (M4.T1.S1.ST2.AK1)
2. Menata kualitas layanan public yang berbasis	Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling	Peningkatan e-Goverment di Pemerintahan Daerah (M4.T2.S1.AK1)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
interoperabilitas (M4.T2)	dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)	berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan (M4.T2.S1.ST1)	
MISI 5 : “MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”			
1. Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (M5.T1.S1.ST1)	1. Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan (M5.T1.S1.ST1.AK1) 2. Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (M5.T1.S1.ST1.AK2) 3. Peningkatan Pengelolaan Sampah (M5.T1.S1.ST1.AK3)
2. Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang (M5.T2.S1.ST1)	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK1) 2. Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK2)

6.2. ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan tahunan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tematik pembangunan setiap tahun diprioritaskan, dengan mengacu pada pelaksanaan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:



Tabel 6.2
Arah Tematik Tahunan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Tahun	Arah Tematik Tahunan
2021	Peningkatan Produk Unggulan Yang Memiliki Daya Saing
2022	Peningkatan Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Daerah
2023	Pengembangan Sentra Ekonomi yang Didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas
2024	Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah
2025	Pemantapan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Daya Saing Daerah
2026	Kutai Timur Tegar dan Stabil

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) yang menjadi Agenda Pembangunan lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, agenda pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah. Agenda Pembangunan tersebut selanjutnya menjadi panduan dalam menyusun Prioritas Pembangunan Tahunan dalam RKPD. Dengan mempedomani tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan di atas, maka Agenda Pembangunan pembangunan daerah tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi
- 2) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- 4) Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah
- 5) Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Sektor Pertanian
- 6) Kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi berbagai bencana

6.3. PROGRAM UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program unggulan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan amanat Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan janji selama kampanye pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas dalam program pembangunan. Program



unggulan kepala daerah terpilih telah dijabarkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan kepala daerah terpilih, yaitu:

1) Ekonomi

- Penyerapan 50.000 tenaga kerja dan perlindungan buruh
- Bantuan modal usaha UMKM dan pelatihan ketrampilan
- Pembangunan dan perbaikan pasar di setiap kecamatan
- Program Rp 50.000.000/ RT/ Tahun
- Membangun Gedung UKM Center
- Bantuan keluarga terdampak Covid-19

2) Infrastruktur

- Enclave TNK untuk Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan
- Perbaikan dan Peningkatan Gang, jembatan dan jalan antar kecamatan
- Penyediaan sambungan listrik dan air bersih setiap kecamatan
- Penyediaan jaringan internet di setiap desa
- Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu

3) Pendidikan

- Gratis bantuan seragam dan buku sekolah
- Beasiswa Kutim Tuntas bagi pelajar dan mahasiswa
- Peningkatan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) negeri dan swasta
- Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan
- Bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta
- Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seluruh kecamatan
- Mendorong pencapaian standar akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta

4) Kesehatan

- Gratis BPJS bagi masyarakat tidak mampu
- Menambah pembangunan Rumah Sakit Pratama
- Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas setiap kecamatan
- Peningkatan insentif tenaga kesehatan
- Gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu

5) Sosial & Kependudukan

- Perekaman dan pencetakan KTP, KK Akta Kelahiran dan akta nikah catatan sipil di kecamatan



- Pemberian insentif bagi doja dan petugas rumah ibadah lainnya
- Peningkatan insentif ketua RT, Kepala Dusun, Ketua Adat

6) Pertanian, Peternakan & Nelayan

- Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani
- Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani lokal
- Pengadaan benih dan bibit bagi petani
- Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
- Program peternakan rakyat mandiri
- Program *replanting* kebun kelapa sawit mandiri

7) Pariwisata & Kebudayaan

- Membangun fasilitas & pengembangan wisata goa, pantai, hutan, goa lautan dan gunung
- Festival tahunan kebudayaan
- Meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pariwisata

Untuk program yang akan dilaksanakan dalam periode kontrak tahun jamak yang antara lain: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penyelenggaraan Jalan.

Penjabaran program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kutai Timur

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
M1	MISI 1 : "MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU"															
M1.T1	Tujuan 1 : Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)															
M1. T1.S1	Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)															
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	65	69	70	891.600,000	71	5,648,600,000	72	6,113,460,000	73	6,224,806,000	75	6,347,286,600	75	Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0	0	20	1,390,405,200	40	2,975,000,000	60	2,975,000,000	80	2,975,000,000	100	2,975,000,000	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	3,94	6,42	8,67	4,533,892,964	10,69	2,000,000,000	12,51	2,000,000,000	14,14	2,000,000,000	15,60	2,000,000,000	15,60	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69.84	69.84	69.84	8,383,385,964.00	69.84	7,885,000,000.00	69.84	8,618,555,000.00	69.84	9,001,211,000.00	69.84	9,181,211,000.00	69.84	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	34.41	34.41	34.41	1,150,000,000.00	100%	2,865,000,000.00	100%	3,175,500,000.00	100	3,213,750,000.00	100	3,313,750,000.00	100	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	33.25	66.51	100	6,500,000,000	100	3,850,000,000	100	4,125,000,000.00	100	4,027,500,000	100	4,027,500,000	100	Dinas Sosial

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	70	70	72	140,000,000.00	74	1,202,847,100.00	76	1,157,619,900.00	78	1,269,317,200.00	78	1,275,565,300.00	78	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi	-	-	50 UMKM	240,000,000	100 UMKM	440,000,000	150 UMKM	640,000,000.00	150 UMKM	670,000,000	150 UMKM	700,000,000	150 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	100	100	100	2,200,000,000.00	100	2,890,000,000.00	100	3,012,000,000.00	100	2,874,000,000.00	100	3,161,200,000.00	100	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	5	7.05	6.88	6,870,000,000.00	6.98	18,450,000,000.00	7.05	19,250,000,000.00	7.14	19,400,000,000.00	7.23	19,550,000,000.00	7.23	Badan Pendapatan Daerah
M1. T1.S2	Sasaran 2 : Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)															
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	12,89	12,90	192,341,437,800.00	13,00	110,447,180,000	13,10	116,197,180,000	13,20	117,947,180,000.00	13,30	119,000,000,000.00	13,30	Dinas Pendidikan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rata - Rata Lama Sekolah	9,19	9,19	9,2	3,000,000,000.00	9,35	4,500,000,000	9,45	4,725,000,000.00	9,55	4,961,250,000.00	10,00	5,209,312,500.00	10,00	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Pendidikan					192,341,437,800.00		27,200,000,000		28,625,000,000.00		29,550,000,000		31,000,000,000		Dinas Pendidikan
M1. T1.S3	Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan (M1.T1.S3)															
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	61,38%	67,38%	100%	1,979,838,688	100%	2,067,822,558	100%	2,192,604,814.00	100%	2,245,865,295	100%	2,529,451,825	100%	Dinas Kesehatan
		Angka Harapan Hidup	73,16	74,33	75,11		75,89		76,67		77,45		78,23		78,23	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Utama	Utama	Utama	12,050,000,000	Utama	39,415,000,000	Utama	23,450,000,000.00	Utama	22,620,000,000	Paripurna	27,310,000,000	Paripurna	RSUD

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56%	95%	100%	121,073,064,420.00	100%	137,125,724,803.00	100%	127,545,697,799.00	100%	128,874,363,954.00	100%	125,763,319,467.00	100%	Dinas Kesehatan
M1. T1.S4	Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)															
	Program Pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	> SD= 98.67 Ø SMP= 86.21	> SD= 98.67 Ø SMP= 86.21	> SD= 100 Ø SMP= 91.95	475,000,000	> SD= 100 Ø SMP= 94.25	1,000,000,000	> SD= 100 Ø SMP= 95.40	1,000,000,000	> SD= 100 Ø SMP= 96.55	1,100,000,000	> SD= 100 Ø SMP= 100	1,100,000,000	> SD= 100 Ø SMP= 100	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	30000 (jumlah)	70%	73%	1,325,000,000.00	76%	1,457,500,000.00	79%	1,503,250,000.00	81%	1,663,575,000.00	84%	1,739,932,500.00	84%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemuka Agama yang menerima Insentif	595 (jumlah)	595	595	10,000,000,000	595	11,500,000,000	595	12,075,000,000	595	12,678,750,000	595	13,312,687,500	595	Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	1	1		1		1		1		1		1	1
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tokoh Adat yang menerima Insentif	0	0	100 (jumlah)	1,145,000,000.00	125	1,259,500,000.00	150	1,285,450,000.00	175	1,323,995,000.00	200	1,476,394,500.00	200	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	5	5	5	175,000,000.00	5	192,500,000.00	6	211,750,000.00	6	222,925,000.00	7	236,217,500.00	7	Dinas Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	76 (jumlah)	76 (jumlah)	63.49	1,200,000,000.00	66.66	1,238,040,000.00	69.84	1,277,409,672.00	73.01	1,280,903,558.00	76.19	1,300,812,891.00	76.19	Dinas Pemuda Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	8 (jumlah)	8 (jumlah)	38.09	4,925,000,000.00	44.96	6,332,047,500.00	33.33	5,595,630,375.00	44.96	5,632,047,500.00	54.75	5,851,954,950.00	54.75	Dinas Pemuda Olahraga
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	42	42	43	150,000,000	43	165,000,000	43	181,500,000	43	199,650,000	43	227,091,400	43	Dinas Kebudayaan
M2	MISI 2 : "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"															
M2.T1	Tujuan 1 : Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan															
M2. T1.S1	Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan															

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	43.66	43.66	44.16	240,000,000.00	44.66	1,100,000,000.00	45.16	1,450,000,000.00	45.66	1,230,000,000.00	46.16	1,330,000,000.00	46.16	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.4	89.4	90.6	230,000,000.00	91.1	600,000,000.00	91.9	620,000,000.00	92.5	740,000,000.00	93.7	700,000,000.00	93.7	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Perikanan	40.86	41	41.86	600,000,000.00	42.10	1,600,000,000.00	42.1	1,700,000,000.00	42.1	1,800,000,000.00	42.1	1,900,000,000.00	42.1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi sektor pertanian	37,187	37,187	40,098	650,000,000.00	43,189	1,350,000,000.00	46,765	1,450,000,000.00	50,630	1,550,000,000.00	54,830	1,625,000,000.00	54,830	Dinas Pertanian
		Produksi sektor perkebunan	6,456,662	6,456,662	6,956,662	3,000,000,000.00	7,456,662	9,000,000,000.00	7,956,662	10,000,000,000.00	8,456,662	10,000,000,000.00	8,956,662	10,500,000,000.00	8,956,662	Dinas Perkebunan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45.03	45.03	62.28	28,400,000,000.00	70.72	18,768,500,992.00	80.11	19,884,154,962.00	89.85	20,642,111,599.00	99.93	21,430,950,042.00	99.93	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan	8,085.61	8,085.61	8,085.61	3,482,141,198.00	8,085.86	3,100,000,000.00	8,086.11	3,200,000,000.00	8,086.36	3,300,000,000.00	8,086.61	3,400,000,000.00	8,086.61	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komuditi utama	5	5	5	470,000,000.00	5	1,100,000,000.00	5	1,200,000,000.00	5	1,300,000,000.00	5	1,550,000,000.00	5	Dinas Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		5	5	5	1,725,000,000.00	5	1,050,000,000.00	5	1,100,000,000.00	5	1,150,000,000.00	5	1,200,000,000.00	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
M2. T1.S2	Sasaran 2 : Meningkatkan Pendapatan Petani (M2.T1.S2)															
	Program Penyuluhan Pertanian	cakupan bina kelompok tani	21.25	21.25	21.31	1,400,000,000.00	21.37	1,650,000,000.00	21.43	1,900,000,000.00	21.49	2,100,000,000.00	21.55	2,400,000,000.00	21.55	1.Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	111.9	109.66	108.57	30,000,000.00	107.48	850,000,000.00	108.55	850,000,000.00	109.64	950,000,000.00	110.74	1,000,000,000.00	110.74	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	3.55	3.79	1,707	100,000,000.00	3.90	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	200,000,000.00	4.06	200,000,000.00	4.06	1.Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas perkebunan	19	19	19	3,000,000,000.00	19.1	9,000,000,000.00	19.2	10,000,000,000.00	19.3	10,000,000,000.00	19.3	10,500,000,000.00	19.3	1. Dinas Perkebunan

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan		1541	1606	500,000,000.00	1671	650,000,000.00	1736	650,000,000.00	1801	650,000,000.00	1866	650,000,000.00	1866	1.Dinas Pertanian
M2.T2	Tujuan 2 : Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat															
M2.T2.S1	Sasaran 1 : Meningkatkan Kemampuan Perekonomian di Daerah															
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	57.21	57.21	57.46	500,000,000.00	57.71	800,000,000.00	57.95	900,000,000.00	58.18	1,000,000,000.00	58.4	1,100,000,000.00	58.4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah UMKM	6942	6942	7242	600,000,000.00	7542	800,000,000.00	7842	900,000,000.00	8142	1,000,000,000.00	8442	1,100,000,000.00	8442	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	1,265	1,341	1,425	280,630,000.00	1,518	150,000,000.00	1,620	200,000,000.00	1,733	250,000,000.00	1,860	300,000,000.00	1,860	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Objek destinasi wisata	15	15	15	3,450,000,000.00	15	4,400,000,000.00	15	4,550,000,000.00	15	4,750,000,000.00	15	4,900,000,000.00	15	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	6	6	7	1,180,000,000.00	9	2,030,000,000.00	11	2,240,000,000.00	13	2,300,000,000.00	16	2,400,000,000.00	16	Dinas Pariwisata
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Nilai 720	688	722	600,000,000.00	759	625,000,000.00	796	675,000,000.00	836	725,000,000.00	876	775,000,000.00	876	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
M3	MISI 3 : "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"															
M3.T1	Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)															
M3.T1.S1	Sasaran 1 : Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)															
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	51.88	51.98	52.84	162,776,559,154	53.26	58,717,098,000	53.72	60,335,903,700.00	54.21	61,707,164,700	54.71	65,175,039,200	54.71	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	13.71%	15.08%	18.09%	33,000,000,000.00	21.71%	23,150,000,000.00	26.05%	23,390,000,000.00	31%	24,143,000,000.00	37.51%	24,860,000,000.00	37.51%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Penyelenggaraan Laku Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Umum	3529	3529	5000	4,400,000,000	5500	7,075,000,000	6000	9,075,000,000.00	6500	8,675,000,000	7000	7,075,000,000	7000	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3/ 1/ 3	4/ 1/ 3	4/ 1/ 4	700,000,000	4/ 1/ 5	40,000,000,000	4/ 1/ 6	40,400,000,000	4/ 1/ 6	39,400,000,000	4/ 1/ 6	40,900,000,000	4/ 1/ 6	
M3 T1.S2	Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)															
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	43,43%	48,70%	53,81%	16,850,000,000	53,86	9,340,116,685	53,90	10,392,968,746.00	53,95	10,770,164,742	53,99	11,162,729,023	53,99	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	65,69%	76,45%	75,75% (1% aman)	5,000,000,000	76,92% (aman 1,49%)	6,957,236,603	77,08% (aman 2,03%)	6,177,863,400.00	77,38% (aman 2,6%)	7,256,905,400	77,59% (aman 3,18%)	8,339,167,900	77,59% (aman 3,18%)	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	73,00%	75,32%	82,65%	6,500,000,000	89,30%	6,871,709,800	90,75%	9,533,590,300.00	93,08%	8,770,716,400	93,26%	8,017,503,900	93,26%	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan)		93,6	94,86	34,938,929,643	95,47	9,786,183,013	96,16	10,889,317,298.83	96,87	11,284,527,463	97,60	11,695,839,873	97,6	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	13,71%	15,08%	18,09%	45,266,691,925	21,71%	34,130,691,925	26,05%	35,178,691,925	31%	35,089,691,925	37,51%	35,656,678,128	37,51%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2,4990	2,4990	2,4990	39,107,264,074	2,4990	6,850,328,109	2,4990	7,322,522,109.18	2,4990	7,599,169,224	2,4990	7,887,087,911	2,4990	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajern Kebakaran (WMK)	97,83	97,83	97,83	2,477,200,000	97,83	8,000,000,000	98,83	6,000,000,000.00	98,83	4,000,000,000	98,83	3,000,000,000	98,83	Dinas Pemadam Kebakaran
		Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajern Kebakaran (WMK)	97,83	97,83	97,83	83,085,000,000.00	98	14,000,000,000.00	98	12,000,000,000.00	98	12,000,000,000.00	98	10,000,000,000.00	98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	52,19%	52,19%	53,54%	35.000.000,00	56,23%	20.954.972.097	59,26%	20.517.093.074.72	60,64%	21.563.349.266	64,31%	22.544.084.897	64,31%	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah per HPLU/HGB	0,306	0,3060	0,3460	4.200.000,00	0,3500	3.340.000,00	0,3550	3.392.968.746,00	0,3600	3.770.164.742	0,3500	4.162.729,023	0,3500	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Penerbitan IUIJK	30,47	43,12	55,73	1.500.000,00	69,03	446.545,753	80,07	722.329,325	89,02	821.131,866	96,07	923.959,968	96,07	
	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Penerbitan Ijin Pembangunan	57,143%	62,857%	62,857%	-	69,143%	-	76,057%	-	83,863%	50.000,000	92,029%	-	92,029%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,2472	0,2479	0,2486	0	0,2490	500.000,00	0,2493	500.000,00	0,24942	500.000,00	0,24943	500.000,00	0,24943	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	0	2.250.000,00	0,9847	2.600.000,00	1,2309	3.625.000,00	1,4771	3.725.000,00	1,7233	4.005.000,00	1,7233	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	30,67% (3 Lokasi SK 2016)	30,67% (3 Lokasi SK 2016)	30,67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	2.000,000,00	22,69% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	6.300.000,00	24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	4.900.000,00	42,35% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	5.300.000,00	47,33% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	6.600.000,00	47,33% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	
M3. T1.S3 Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)																
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	58,87	73,76	77,37	1.145.000,00	80,48	4.275.000,00	83,17	3.325.000,00	85,48	3.225.000,00	87,48	3.225.000,00	87,48	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	58,87	73,76	77,37	1.100.000,00	80,48	6.550.000,00	83,17	6.550.000,00	85,48	6.700.000,00	87,48	5.375.000,00	87,48	
		Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	17,14	17,14	25,71	5.425.000,00	34,29	7.500.000,00	48,57	7.350.000,00	62,86	7.800.000,00	77,14	7.925.000,00	77,14	

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
M3. T1.S4	Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)															
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,46	56,46	56,48	192,341,437,800	56,58	54,189,552,008	56,68	55,200,000,000.00	56,78	55,200,000,000	56,88	55,200,000,000	56,88	Dinas Pendidikan
		Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,06	53,06	53,16		53,26	37,900,000,000	53,36	37,900,000,000.00	53,46	37,900,000,000	53,56	37,900,000,000	53,56	
M3. T1.S5	Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)															
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas, poliklinik, pusat per satuannya penduduk	0,51	0,51	0,51	43,735,679,047.00	0,51	58,367,279,259.00	0,51	69,498,148,160.00	0,51	71,005,708,975.00	0,51	84,277,058,172.00	0,51	Dinas Kesehatan
		Rasio rumah sakit per satuannya penduduk	0,02	0,02	0,02	25,225,000,000.00	0,02	300,000,000.00	0,02	415,600,000.00	0,02	443,493,300.00	0,02	445,183,900.00	0,02	1.Dinas Kesehatan 2. RSUD
M3. T1.S6	Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)															
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar	12	13	13	1,130,237,606.00	14	2,500,000,000.00	15	3,000,000,000.00	16	2,800,000,000.00	17	3,000,000,000.00	17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
M4	MISI 4 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI"															
M4.T1	Tujuan 1 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)															
M4. T1.S1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)															
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah temuan BPK	15	19	18	3,330,938,824	17	8,482,892,000	16	8,507,036,600.00	15	9,000,388,430	14	9,120,007,852	14	Inspektorat Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	5,760,000,000.00	WTP	9,160,000,000.00	WTP	9,220,000,000.00	WTP	9,570,000,000.00	WTP	9,620,000,000.00	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	83.55%	100.00%	100.00%	5,900,000,000.00	100%	4,200,000,000.00	100%	4,519,000,000.00	100%	4,719,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	Badan perencanaan Pembangunan Daerah

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD	Ada	Ada	Ada	23.584.256.846.00	Ada	17.847.500.000.00	Ada	18.632.250.000.00	Ada	20.595.475.000.00	Ada	21.775.022.500.00	Ada	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Keterampilan dan Keterbacaan Umum	Persentase Penegakan Perda	53,99%	53,99%	65,20%	1.980.646.041.00	68,30%	2.178.710.645.10	70,00%	2.196.581.709.61	73,99%	2.416.239.880.57	75,20%	2.657.863.868.63	75,20%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,72	55,72	55,72	200.000.000.00	56	1.420.000.000.00	56,3	1.620.000.000.00	60	1.770.000.000.00	63,5	1.870.000.000.00	63,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					100.000.000.00		650.000.000.00		650.000.000.00		800.000.000.00		800.000.000.00		
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	LSM/Organisasi yang Aktif	72	123	139	230.000.000	169	370.000.000	199	570.000.000.00	229	770.000.000	259	940.000.000	259	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	900.000.000.00	ada	1.475.000.000.00	ada	1.375.000.000.00	ada	1.385.000.000.00	ada	1.400.000.000.00	ada	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	86,95%	86,95%	90%	1.807.626.000	93,00%	2.188.578.599	95,00%	2.304.743.420.00	98,00%	2.388.390.355	100,00%	2.457.445.360	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	92,19%	92,25%	92,30%	100.000.000	93,00%	2.188.578.599	95,00%	2.304.743.420.00	98,00%	2.388.390.355	100,00%	2.457.445.360	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,26%	4,26%	4,26%	1.000.000.000	4,1%	550.000.000	4,0%	700.000.000.00	3,9%	800.000.000	3,7%	900.000.000	3,7%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbang	11,11	50,00	80,00	3.709.798,000.00	80,00	4.006.581,840	80,00	4.127.108,387	80,00	4.357.277,056	80,00	4.513.859,223	80,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.14%	35,00%	37,00%	3.070.000,000.00	40,00%	7.040.000,000.00	40,00%	7.244.000,000.00	50,00%	7.744.000,000.00	50,00%	7.744.000,000.00	50,00%	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	113 hari	260 hari	260 hari		260 hari		260 hari		260 hari		260 hari			
M4.T2	Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)															
M4.T2.S1	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)															
	Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	17,14	17,14	25,71	5.425,000,000.00	34,29	7.500,000,000	48,57	7.350,000,000.00	62,86	7.800,000,000	77,14	7.925,000,000	77,14	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik
M5	MISI 5 : "MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN"															
M5.T1	Tujuan 1 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)															
M5.T1.S1	Sasaran 1 : Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)															
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	77,48	77,49	77,55	910,000,000.00	77,57	1.010,000,000.00	77,59	1.100,000,000.00	77,6	1.200,000,000.00	77,61	1.300,000,000.00	77,61	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketepatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	140	140	140	250,000,000.00	141,4	300,000,000.00	142,8	350,000,000.00	144,2	400,000,000.00	145,6	450,000,000.00	145,6	

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	41,47%	41,57 %	41,66%	8,650,000,000.00	41,75%	8,800,000,000.00	41,84%	8,900,000,000.00	41,92%	9,000,000,000.00	41,99%	9,100,000,000.00	41,99%	

Bab VI Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	PD Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
M5.T2	Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)																
M5. T2.S1	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)																
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Perkada RDTR	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	450,000,000	2 dokumen	3,150,000,000	2 dokumen	3,450,000,000.00	2 dokumen	3,450,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase antara Luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian	86.14%	86.14%	90.00%	30,270,000,000	96.20%	25,320,000,000	97.10%	14,823,874,385.96	99.41%	14,823,874,386	100.00%	3,774,776,054	100.00%		



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dilihat dari sisi kapasitas riil keuangan daerah. Sedangkan program perangkat daerah melalui pelaksanaan program pada urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan disertai dengan penanggung jawab pelaksana.

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Pendanaan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021 – 2026 berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 7.1
Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	2,790,565,651,686	3,047,560,448,190	3,183,480,126,182	3,298,835,583,466	3,418,892,811,798	3,543,849,200,292
5.1	BELANJA OPERASI	1,889,791,692,954	1,900,656,647,704	1,909,815,775,576	1,919,839,858,198	1,930,656,647,704	1,944,656,647,704
5.1.1	Belanja Pegawai	975,509,632,227	976,509,632,227	980,509,632,227	985,374,586,977	989,509,632,227	992,509,632,227
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	849,989,690,623	859,854,645,373	865,013,773,245	870,172,901,117	876,854,645,373	887,854,645,373
5.1.5	Belanja Hibah	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104	63,920,620,104
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	371,750,000	371,750,000	371,750,000	371,750,000	371,750,000	371,750,000
5.2	BELANJA MODAL	608,289,538,396	818,073,225,396	937,495,873,396	999,506,585,036	1,062,987,228,174	1,110,992,328,022
5.2.1	Belanja Modal Tanah	29,606,024,400	34,606,024,400	38,606,024,400	39,606,024,400	44,606,024,400	51,606,024,400
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75,796,248,461	80,796,248,461	83,796,248,461	87,796,248,461	90,796,248,461	97,796,248,461
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135,436,938,361	246,558,430,361	280,162,561,664	332,162,561,664	380,594,152,113	408,011,532,324
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	364,191,245,944	452,853,440,944	530,671,957,641	535,182,669,281	539,731,721,970	544,319,441,607
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,259,081,230	3,259,081,230	4,259,081,230	4,759,081,230	7,259,081,230	9,259,081,230
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24,432,572,871	28,671,477,669	33,645,807,015	39,483,152,657	46,333,242,745	54,371,782,361
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	24,432,572,871	28,671,477,669	33,645,807,015	39,483,152,657	46,333,242,745	54,371,782,361
5.4	BELANJA TRANSFER						
5.4.1	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	268,051,847,465	300,159,097,421	302,522,670,195	340,005,987,575	378,915,693,175	433,828,442,206
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	267,594,958,130	299,706,353,106	302,074,033,295	339,561,420,827	378,475,159,654	433,391,905,320



Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan &
Program Perangkat Daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	456,889,335	452,744,315	448,636,900	444,566,748	440,533,521	436,536,886
	Surplus/Defisit	58,717,980,314	15,506,870,810	9,840,818	12,537,534	13,558,202	12,746,708
7	PEMBIAYAAN DAERAH						
7.1	Penerimaan Pembiayaan	272,605,635,759.65	326,323,616,073.65	336,830,486,884.05	331,840,327,701.68	326,852,865,235.19	321,866,423,437.51
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
7.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembiayaan Netto	267,605,635,760	321,323,616,074	331,830,486,884	326,840,327,702	321,852,865,235	316,866,423,438
	SILPA	326,323,616,074	336,830,486,884	331,840,327,702	326,852,865,235	321,866,423,438	316,879,170,145



7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program Kabupaten Kutai Timur berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Yang Diserahi Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kutai Timur

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Target
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.01	PENDIDIKAN																
	Dinas Pendidikan																
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	SD = 98,67 SMP = 86,21	SD = 98,67 SMP = 86,21	SD = 100 SMP = 91,95	475.000.000	SD = 100 SMP = 94,25	1.000.000.000	SD = 100 SMP = 95,40	1.000.000.000	SD = 100 SMP = 96,55	1.100.000.000	SD = 100 SMP = 100	1.100.000.000	SD = 100 SMP = 100		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	12,89	12,9	192.341.437.800	13,00	110.447.180.000	13,10	116.197.180.000	13,20	117.947.180.000	13,30	119.000.000.000	13,30	Sudah Termasuk BOS Pusat	
		Rata - Rata Lama Sekolah	9,19	9,19	9,2		9,35	27.200.000.000	9,45	28.625.000.000	9,55	29.550.000.000	10,00	31.000.000.000	10,00	Sudah Termasuk BOS Pusat	
		Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk	56,46	56,46	56,48		56,58	54.189.552.008	56,68	55.200.000.000	56,78	55.200.000.000	56,88	55.200.000.000	56,88		
		Rasio ketersediaan SMP/MTS per penduduk	53,06	53,06	53,16		53,26	37.900.000.000	53,36	37.900.000.000	53,46	37.900.000.000	53,56	37.900.000.000	53,56		
1.01.04	PROGRAM PENDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Telah Memenuhi Kualifikasi D4/S1	97,03	97,03	98,03	3.000.000.000	98,53	3.500.000.000	99,03	3.600.000.000	99,53	3.700.000.000	100	3.900.000.000	100		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					409.236.213.100		451.737.834.410		479.637.419.729.49		490.640.079.636		510.364.287.365			
1.02	KESEHATAN																
	Dinas Kesehatan																
		Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56%	95%	100%	121.073.064.420.00	100%	137.125.724.803.00	100%	127.545.697.799.00	100%	128.874.363.954.00	100%	125.763.319.467.00	100%		

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas, poliklinik, pusat per satuan penduduk	0,51	0,51	0,51	43.735.679,047.00	0,51	58.367.279,259.00	0,51	69.498.148,160.00	0,51	71.005.708,975.00	0,51	84.277.058,172.00	0,51	
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02	25.225.000,000.00	0,02	300.000,000.00	0,02	415.600,000.00	0,02	443.493,300.00	0,02	445.183,900.00	0,02	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	61,38%	67,38%	100%	1.979.838,688	100%	2.067.822,558	100%	2.192.604,814.00	100%	2.245.865,295	100%	2.529.451,825	100%	
		Angka Harapan Hidup	73,16	74,33	75,11		75,89		76,67		77,45		78,23		78,23	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase Apotik dan Toko Obat serta ORTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat	66,20%	70,25%	100%	719.958,800.00	100%	884.270,740.00	100%	1.004.184,530.00	100%	1.104.602,983.00	100%	1.215.063,281.00	100%	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	5,40%	11,00%	100%	3.840.000,000.00	100%	3.955.000,000.00	100%	4.030.000,000.00	100%	4.005.000,000.00	100%	4.500.000,000.00	100%	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Penuhunan Layanan Kesekrebrifatan	5,40%	11,00%	100%	204.580,458,091	100%	270.354,497,006	100%	300.147,621,310.00	100%	311.389,726,464	100%	328.283,869,917	100%	
1.02	RSUD Kudungga															
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi RSUD	Utama	Utama	Utama	12.050.000,000	Utama	39.415.000,000	Utama	23.450.000,000.00	Utama	22.620.000,000	Paripurna	27.310.000,000	Paripurna	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	TingkatKepuasan Pelanggan	94,25%	90%	90,5%	104.650,000,000	91%	117.125,900,000	91,5%	126.345,900,000.00	92%	138.370,400,000	92,5%	148.845,500,000	92,5%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG															
	Dinas Pekerjaan Umum															
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DATA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik *	45.03	45.03	62.28	28,400,000,000	70.72	18,768,500,992	80.11	19,884,154,962,000	89.85	20,642,111,599	99.93	21,430,960,042	99.93	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	51.88	51.98	52.84	162,776,559,154	53.26	58,717,098,000	53.72	60,335,903,700,000	54.21	61,707,164,700	54.71	65,175,039,200	54.71	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian Akses Air Minum Layak	43.43%	48.70%	53.81%	16,850,000,000	53.86	9,340,116,685	53.90	10,392,968,746,000	53.95	10,770,164,742	53.99	11,162,729,023	53.99	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	73.00%	75.32%	82.65%	6,500,000,000	89.30%	6,871,709,800	90.75%	9,533,590,300,000	93.08%	8,770,716,400	93.26%	8,017,503,900	93.26%	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	65.69%	76.45%	75.75% (1%aman)	5,000,000,000	76.92% (aman 1.49%)	6,957,236,603	77.08% (aman 2.03%)	6,177,863,400,000	77.38% (aman 2.6%)	7,256,905,400	77.59% (aman 3.16%)	8,339,167,900	77.59% (aman 3.18%)	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air Banjir (Perkotaan)		93.6	94.86	34,938,929,643	95.47	9,786,183,013	96.16	10,889,317,298.83	96.87	11,284,527,463	97.60	11,695,839,873	97.60	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2.4990	2.4990	2.4990	39,107,264,074	2.4990	6,850,328,109	2.4990	7,322,522,109.18	2.4990	7,599,169,224	2.4990	7,887,087,911	2.4990	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	52.19%	52.19%	53.54%	35,000,000,000	56.23%	20,954,972,097	59.26%	20,517,093,074.72	60.64%	21,563,349,266	64.31%	22,544,084,897	64.31%	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPLUHGB	0.306	0.3060	0.3460	4,200,000,000	0.3500	3,340,000,000	0.3550	3,392,968,746,000	0.3600	3,770,164,742	0.3600	4,162,729,023	0.3600	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Penerbitan LUK	30.47	43.12	55.73	1,500,000,000.00	69.03	446,545,753	80.07	722,329,325	89.02	821,131,865	96.07	923,959,968	96.07	
		Rasio tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	3.94	6.42	8.67	4,533,892,964.00	10.69	2,000,000,000	12.51	2,000,000,000	14.14	2,000,000,000	15.60	2,000,000,000	15.60	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan PU			100.00	42,264,635,446	100.00	35,778,466,645	100.00	37,347,907,176.00	100.00	38,482,889,308	100.00	39,654,680,768	100.00	
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang															
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	99.94%	100%	100%	875,000,000	100%	850,000,000	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000	100%	850,000,000	100%	
		Jumlah Perkada RDTR	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	450,000,000	2 dokumen	3,150,000,000	2 dokumen	3,450,000,000.00	2 dokumen	3,450,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	
1.04	PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN															
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	13.705%	15.076%	18.091%	33,000,000,000	21.709%	23,150,000,000	26.051%	23,390,000,000.00	31%	24,143,000,000	37.514%	24,860,000,000	37.514%	
						45,266,691,925		34,130,691,925		35,178,691,925.00		35,089,691,925		35,656,878,128		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	0	2,250,000,000	0.9847	2,600,000,000.00	1.2309	3,625,000,000.00	1.4771	3,725,000,000.00	1.7233	4,005,000,000.00	1.7233	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang dtangani	30.67% (3 Lokasi SK 2016)	30.67 % (3 Lokasi SK 2016)	30.67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	2,000,000,000	22.69 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	6,300,000,000.00	24.51% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	4,900,000,000.00	42.35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	5,300,000,000	47.33 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	6,600,000,000	47.33 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	57.143%	62.857%	62.857%		69.143%		76.057%		83.663%	50,000,000	92.029%		92.03%	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUNJUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	0.2472	0.2479	0.2486	0	0.2490	500,000,000.00	0.2493	500,000,000.00	0.24942	500,000,000	0.24943	500,000,000	0.24943	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				19,247,323,575		17,425,911,709		17,551,584,071.00		17,387,836,020		17,508,667,586			
1.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT															
	DNAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN															
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limij) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMIK)	97.83	97.83	97.83	2,477,200,000	97.83	8,000,000,000	98.83	6,000,000,000.00	98.83	4,000,000,000	98.83	3,000,000,000	98.83	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0.05	0.05	0.05		0.06	5,100,000,000	0.06	5,200,000,000.00	0.07	5,300,000,000	0.07	5,400,000,000	0.07	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				12,871,000,000		19,436,676,564		20,108,510,392.00		20,249,595,496		20,392,091,451			

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Managemn Kebakaran (WМК)	97,83	97,83	97,83	83.085.000.000,00	98	14.000.000.000,00	98	12.000.000.000,00	98	12.000.000.000,00	98	10.000.000.000,00	98	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks Resiko Bencana	190	188	185	6.450.000.000,00	170	5.000.000.000,00	160	4.750.000.000,00	150	4.500.000.000,00	140	4.000.000.000,00	140	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kab/Kota	65	70	75	9.850.000,000	80	11.800.000,000	85	11.600.000.000,00	90	11.850.000,000	100	12.400.000,000	100	
	Satuan Polisi Pamong Praja															
1.05.02	Program Peningkatan Keterlambatan dan Keterlambatan Umum	Persentase Penegakan Perda	53,99%	53,99%	65,20%	1.980.646,041,00	68,30%	2.178.710,645,10	70,00%	2.196.581.709,61	73,99%	2.416.239.880,57	75,20%	2.657.863.868,63	75,20%	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	50,00%	50,00%	55,00%	9.175.953,959,00	60,00%	16.018.200,000	65,00%	16.819.110.000,00	70,00%	16.987.301,100	80,00%	17.157.174,111	80,00%	
1.06 SOSIAL																
Dimas Sosial																
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PKKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69,84	69,84	69,84	8.383.385,964,00	69,84	7.885.000.000,00	69,84	8.618.555.000,00	69,84	9.001.211.000,00	69,84	9.181.211.000,00	69,84	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	100	100	100	2.200.000.000,00	100	2.890.000.000,00	100	3.012.000.000,00	100	2.874.000.000,00	100	3.161.200.000,00	100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	34.41	34.41	34.41	1,150,000,000.00	100%	2,865,000,000.00	100%	3,175,500,000.00	100	3,213,750,000.00	100	3,313,750,000.00	100	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	33.25	66.51	100	6,500,000,000.00	100	3,850,000,000.00	100	4,125,000,000.00	100	4,027,500,000.00	100	4,027,500,000.00	100	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KKERASAN	Persentase Warga Negara Migran yang Dianggap	45%	50%	65%	100,000,000.00	65%	150,000,000.00	65%	165,000,000.00	65%	181,500,000.00	65%	181,500,000.00	65%	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	73.81	73.81	73.81	7,387,814,036.00	75.05	10,210,814,000.00	76.29	10,451,114,000.00	66.51	10,760,444,000.00	77.52	10,760,444,000.00	77.52	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	TENAGA KERJA															
	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi															
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	65	69	70	891,600,000.00	71	5,648,600,000.00	72	6,113,460,000.00	73	6,224,806,000.00	75	6,347,286,600.00	75	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)		20%	35%		50%	600,000,000.00	70%	660,000,000.00	80%	706,000,000.00	100%	710,600,000.00	100%	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	30.62	30.62	35.45	650,000,000.00	40.32	715,000,000.00	53.49	786,500,000.00	57.35	795,150,000.00	66.26	810,665,000.00	66.26	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persenjataan Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PPPKB, LKS Bpartis, Struktur Upah dan terdapat peserta Bgjs Kelenagakerjaan	75.99	75.99	100	1,400,000,000.00	100	1,540,000,000.00	100	1,694,000,000.00	100	1,763,400,000.00	100	1,849,740,000.00	100	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Tahapan Pencapaian Kawasan Transmigrasi	45	45	50	150,000,000.00	55	300,000,000.00	60	324,000,000.00	65	349,920,000.00	70	377,913,600.00	70	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Kawasan Transmigrasi	45	45	50	300,000,000.00	55	450,000,000.00	60	486,000,000.00	65	524,880,000.00	70	566,870,400.00	70	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	45	45	50	150,000,000.00	55	350,000,000.00	60	378,000,000.00	65	408,240,000.00	70	440,899,200.00	70	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	92	93	94	12,258,400,000	95	16,575,000,000	96	17,901,000,000.00	97	19,333,080,000	98	20,879,726,400	98	
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Profil Gender dan Anak	0 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000.00	3 Dokumen	400,000,000.00	3 Dokumen	400,000,000.00	3 Dokumen	450,000,000.00	3 Dokumen	450,000,000.00	3 Dokumen	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.72	55.72	55.72	200,000,000.00	56.00	1,420,000,000.00	56.3	1,620,000,000.00	60	1,770,000,000.00	63.5	1,870,000,000.00	63.5	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0.004	0.004	0.004	150,000,000.00	0.004	1,420,000,000.00	0.003	1,620,000,000.00	0.003	1,770,000,000.00	0.002	1,870,000,000.00	0.002	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.72	55.72	55.72	100,000,000.00	56	650,000,000.00	56.30	650,000,000.00	60	800,000,000.00	63.5	800,000,000.00	63.5	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KLA	Prabima	Prabima	Madya	351,996,913.00	Madya	1,450,000,000.00	Nindya	1,550,000,000.00	Nindya	1,550,000,000.00	Ulma	1,700,000,000.00	Ulma		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasi Kekerasan terhadap anak	0,16	0,16	0,016	260,000,000.00	0,015	2,150,000,000.00	0,014	2,350,000,000.00	0,013	2,450,000,000.00	0,012	2,450,000,000.00	0,012		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Laporan Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6,318,103,087	2 dokumen	5,769,443,354	2 dokumen	6,057,915,521.70	2 dokumen	6,118,494,677	2 dokumen	6,179,679,624	2 dokumen		
2.09	PANGAN																
	Dinas Ketahanan Pangan																
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	43,66	43,66	44,16	240,000,000.00	44,66	1,100,000,000.00	45,16	1,450,000,000.00	45,66	1,230,000,000.00	46,16	1,330,000,000.00	46,16		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	111,9	109,66	108,57	30,000,000.00	107,48	850,000,000.00	108,55	850,000,000.00	109,64	950,000,000.00	110,74	1,000,000,000.00	110,74		
		Penguatan Cadangan Pangan	70	70	72	140,000,000.00	74	1,202,847,100.00	76	1,157,619,900.00	78	1,269,317,200.00	78	1,275,565,300.00	78		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,4	89,4	90,6	230,000,000.00	91,1	600,000,000.00	91,9	620,000,000.00	92,5	740,000,000.00	93,7	700,000,000.00	93,7		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Yang Memiliki Lumbung Pangan	3,54	4,29	4,96	290,000,000.00	5,67	2,300,000,000.00	6,38	4,96	2,500,000,000.00	7,09	2,600,000,000.00	7,80	2,700,000,000.00	7,8	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan	19,51	19,51	20,01	140,000,000.00	20,51	800,000,000.00	21,01	900,000,000.00	21,51	1,000,000,000.00	22,01	1,100,000,000.00	22,01		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95	95	95	210,000,000.00	95	550,000,000.00	95	800,000,000.00	95	650,000,000.00	95	700,000,000.00	95		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				9,150,075,000		9,882,081,000		10,376,185,050.00		10,479,946,901		10,584,746,370				
2.1	PERTANAHAN																
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang																
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus yang terselesaikan	0	7 Kasus	7 kasus	225,000,000	7Kasus	225,000,000	7Kasus	225,000,000.00	7Kasus	225,000,000	7Kasus	225,000,000	7Kasus		

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGAN DAN SANTUNAN TANAH (UNTUK PEMBANGUNAN)	Persentase antara Luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian	86.14%	86.14%	90.00%	30,270,000,000	96.20%	25,320,000,000	97.10%	14,823,874,385.96	99.41%	14,823,874,386	100.00%	3,774,776,054	100%	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terdokumentasinya administrasi perbitan, dan penatagunaan tanah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	175,000,000.00	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah Laporan Izin Yang diterbitkan	1 laporan	1 Laporan	0		1 Laporan	100000000	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	
2.10.02	Program Pengelolaan izin lokasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Pemberian Izin Lokasi (rekomendasi KKPR)			1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Laporan Hasil Survei Tanah Ulayat			1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	
2.10.08	Program Pengelolaan tanah kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi tanah kosong			1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	100,000,000.00	1 laporan	
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan PFR			100	12,680,000,000	100	12,014,173,428	100	12,614,882,099.44	100	12,741,030,920	100	12,868,441,230	100	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP															
	Dinas Lingkungan Hidup															
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	KLH	69.47	69.47	69.97	910,000,000.00	70.47	1,010,000,000.00	70.97	1,100,000,000.00	71.47	1,200,000,000.00	71.97	1,300,000,000.00	71.97	
		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	77.48	77.49	77.55		77.57		77.59		77.60		77.61		77.61	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait kelatib penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	140	140	140	250,000,000.00	141,4	300,000,000.00	142,8	350,000,000.00	144,2	400,000,000.00	145,6	450,000,000.00	145,6	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	41,47%	41,57 %	41,66%	8,650,000,000.00	41,75%	8,800,000,000.00	41,84%	8,900,000,000.00	41,92%	9,000,000,000.00	41,99%	9,100,000,000.00	41,99%	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	1	1	1	800,000,000.00	1,00	850,000,000.00	1,00	900,000,000.00	1,00	950,000,000.00	1,00	1,000,000,000.00	1,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANekarAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas penanaman daerah sempadan sungai (Ha)		227	580	90,100,000,000.00										
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah SK izin TPS LB3	4 izin TPS LB3	4 izin TPS LB3	8 jin TPS LB3	100,000,000.00	8 jin TPS LB3	150,000,000.00	12 jin TPS LB3	200,000,000.00	16 jin TPS LB3	230,000,000.00	20 jin TPS LB3	250,000,000.00	20 jin TPS LB3	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah SK yang diterbitkan	3	3	3	100,000,000.00	3,00	150,000,000.00	3,00	200,000,000.00	3,00	250,000,000.00	3,00	300,000,000.00	3,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Sekolah yang Masuk Dalam Kriteria Sekolah Aktifnya	18	18	6	500,000,000.00	7,00	200,000,000.00	8,00	250,000,000.00	9,00	300,000,000.00	10,00	350,000,000.00	10,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan LH	4	4		100,000,000.00	4,00	150,000,000.00	4,00	200,000,000.00	4,00	250,000,000.00	4,00	300,000,000.00	4,00	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kasus LH yang Ditindaklanjuti	3	3	4	450,000,000.00	5,00	500,000,000.00	6,00	550,000,000.00	7,00	600,000,000.00	8,00	650,000,000.00	8,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20,584,810,300.00		18,550,000,000.00		18,900,000,000.00		19,250,000,000.00		19,600,000,000.00		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2.12.02	Program Pendalaran Penduduk	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	86,95%	86,95%	90%	1,807,626,000	93,00%	2,188,578,599	95,00%	2,304,743,420.00	98,00%	2,388,390,355	100,00%	2,457,445,360	100,00%	
		Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA	22,26%	22,26%	30,58%		33,00%	1,500,000,000	35,00%	100,000,000.00	38,00%	100,000,000	50,00%	100,000,000	50,00%	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akti Kelahiran 0-18 Tahun	92,19%	92,25%	92,30%	100,000,000	93,00%	2,188,578,599	95,00%	2,304,743,420.00	98,00%	2,388,390,355	100,00%	2,457,445,360	100,00%	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN	Rasio Ketersediaan Alat Penekaman di 18 Kecamatan	30,00%	30,00%	34,00%	200,000,000	58,15%	4,452,000,000	76,16%	4,452,000,000.00	86,07%	4,452,000,000	99,98%	4,452,000,000	99,98%	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rasio Ketersediaan data untuk pembangunan lintas sektor	30,00%	30,00%	34,00%	25,044,417	58,15%	200,000,000.00	76,16%	200,000,000.00	86,07%	200,000,000.00	99,98%	200,000,000.00	99,98%	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100	10,023,355,583	100	15,118,355,583	100	15,874,273,362.00	100	16,033,016,096	100	16,193,346,257	100	
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)														
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	%Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	0	0	20	1,390,405,200.00	40	2,975,000,000.00	60	2,975,000,000.00	80	2,975,000,000.00	100	2,975,000,000.00	100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	66,93	76,80	81,84	2.412.000.000,00	86,87	9.000.000.000,00	91,19	9.000.000.000,00	95,51	9.000.000.000,00	99,82	9.000.000.000,00	99,82	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Pertambahan Kerjasama Desa dan/ Antar Desa	62,26	62,26	69,76	350.000.000,00	77,32	575.000.000,00	84,88	600.000.000,00	92,44	625.000.000,00	100	650.000.000,00	100	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes yang berjalan dengan baik,	0	66,19	72,66	269.251.428.294,00	79,13	305.751.750.900,00	85,6	313.202.866.300,00	92,07	323.128.788.300,00	98,54	333.048.257.400,00	98,54	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	100	100	9.296.492.346	100	9.535.000.000	100	10.012.000.000,00	100	10.112.120.000	100	10.213.000.000	100	
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	15,09%	15,09%	14,09%	800.000.000	13,09%	1.590.000.000	12,09%	2.060.000.000,00	11,09%	2.210.000.000	10,09%	2.350.000.000	10,09%	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,26%	4,26%	4,26%	1.000.000.000	4,1%	550.000.000	4,0%	700.000.000,00	3,9%	800.000.000	3,7%	900.000.000	3,7%	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Total fertility rate (TFR)	2,17	2,14	2,11	3.189.268.420	2,08	10.250.000,00	2,04	9.670.000.000,00	2,02	10.550.000,00	2	12.290.000,00	2	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Perangkat Daerah	95%	95%	90%	9.786.200,180	90%	21.760.000,000	90%	23.150.000.000,00	90%	30.850.000,000	90%	36.310.000,000	90%	
2.15	PERHUBUNGAN					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	DINAS PERHUBUNGAN															
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LALU LINTAS)	Jumlah KIR Kendaraan Umum	3529	3529	5000	4.400.000,000	5500	7.075.000,000	6000	9.075.000.000,00	6500	8.675.000,000	7000	7.075.000,000	7000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal	Pelabuhan=3 Bandara=1	Pelabuhan=4 Bandara=1	Pelabuhan=4 Bandara=1	700.000.000	Pelabuhan=4 Bandara=1	40.000.000,000	Pelabuhan=4 Bandara=1	40.400.000.000,00	Pelabuhan=4 Bandara=1	39.400.000,000	Pelabuhan=4 Bandara=1	40.900.000,000	Pelabuhan=4 Bandara=1	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PELAYARAN	Bs	Terminal= 3	Terminal= 3	Terminal= 4		Terminal= 5		Terminal= 6		Terminal= 6		Terminal= 6		Terminal= 6	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,981,950,000		13,139,842,426		13,639,842,426.00		13,139,842,426		14,639,842,426		
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK															
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Telekomunikasi	58.87	73.76	77.37	1,145,000,000.00	80.48	4,275,000,000	83.17	3,325,000,000.00	85.48	3,225,000,000.00	87.48	3,225,000,000.00	87.48	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	58.87	73.76	77.37	1,100,000,000.00	80.48	6,550,000,000.00	83.17	6,550,000,000.00	85.48	6,700,000,000.00	87.48	5,375,000,000.00	87.48	
		Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	17.14	17.14	25.71	5,425,000,000.00	34.29	7,500,000,000.00	48.57	7,350,000,000.00	62.86	7,800,000,000.00	77.14	7,925,000,000.00	77.14	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				9,169,635,160		11,175,000,000.00		12,225,000,000.00		13,475,000,000.00		14,075,000,000.00			
2.17	KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dinas Koperasi, dan UMKM															
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi			50 UMKM	240,000,000.00	100 UMKM	440,000,000.00	150 UMKM	640,000,000.00	150 UMKM	670,000,000.00	150 UMKM	700,000,000.00	150 UMKM	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	57.21	57.21	57.46	500,000,000.00	57.71	800,000,000.00	57.95	900,000,000.00	58.18	1,000,000,000.00	58.4	1,100,000,000.00	58.4	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI	Jumlah KSPUSP yang mendapat Penilaian Kesehatan			15 Koperasi	125,000,000.00	20 Koperasi	175,000,000.00	20 Koperasi	200,000,000.00	20 Koperasi	220,000,000.00	30 Koperasi	300,000,000.00	30 Koperasi	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi, UKM dan Usaha Mikro (KUMKM) yang mengikuti Pelatihan			120 KUMKM	600,000,000.00	210 KUMKM	1,050,000,000.00	240 KUMKM	1,280,000,000.00	240 KUMKM	1,370,000,000.00	240 KUMKM	1,470,000,000.00	240 KUMKM	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN FERILINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Peranaban Manajemen dan Berkekuatan			50 Koperasi	350,000,000.00	90 Koperasi	600,000,000.00	100 Koperasi	750,000,000.00	110 Koperasi	780,000,000.00	150 Koperasi	900,000,000.00	150 Koperasi	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM			7242	600,000,000.00	7542	800,000,000.00	7842	900,000,000.00	8142	1,000,000,000.00	8442	1,100,000,000.00	8442	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					7,367,904,000.00		11,167,904,000.00		13,167,904,000.00		13,137,904,000.00		14,597,904,000.00		
2.18	PENANAMAN MODAL						-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP															

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kajian Potensi Daerah (Dokumen)		1	2	280,000,000	3	200,000,000	4	125,000,000.00	4	150,000,000	4	225,000,000	4	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Promosi		2	3	230,000,000	4	280,000,000	4	380,000,000.00	4	480,000,000	4	580,000,000	4	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Tiliun)		3,01	3,32	600,000,000	3,48	675,000,000	3,66	725,000,000.00	3,84	975,000,000	4,03	1,125,000,000	4,03	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Investor Berskala Nasional (FMDN/PMA)	Nb 720	688	722	600,000,000	759	625,000,000	796	675,000,000.00	836	725,000,000	876	775,000,000	876	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Kerja Informat Terlayani Administrasi (%)		100%	100%	10,076,973,000	100%	12,726,973,000	100%	13,847,973,000.00	100%	16,251,973,000	100%	18,941,973,000	1	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (%)		100%	100%		100%		100%		100%		100%		1	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	76	77	400,000,000	78	575,000,000	79	775,000,000.00	80	975,000,000	81	1,175,000,000	81	
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	Dinas Pemuda & Olahraga															
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	76 (jumlah)	76 (jumlah)	63.49	1,200,000,000.00	66.66	1,238,040,000.00	69.84	1,277,409,672.00	73.01	1,280,903,558.00	76.19	1,300,812,891.00	76.19	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Persentase Prestisi Olahraga	8 (jumlah)	8 (jumlah)	38.09	4,925,000,000.00	44.96	6,332,047,500.00	33.33	5,595,630,375.00	44.96	5,632,047,500.00	54.75	5,851,954,950.00	54.75	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	26	26	16.31	950,000,000.00	18.94	974,985,000.00	21.57	1,000,627,105.00	24.21	1,027,043,660.00	26.84	1,054,054,908.00	26.84	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					11,224,050,000		11,500,000,000		11,500,000,000.00		11,512,000,000		11,532,000,000		
2.2	STATISTIK															

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik															
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sekbral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	900,000,000.00	ada	1,475,000,000.00	ada	1,375,000,000.00	ada	1,385,000,000.00	ada	1,400,000,000.00	ada	
2.21	PERSANDIAN															
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik															
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	450,000,000.00	ada	850,000,000.00	ada	950,000,000.00	ada	900,000,000.00	ada	1,050,000,000.00	ada	
2.22	KEBUDAYAAN															
	Dinas Kebudayaan															
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tokoh Adat yang menerima insentif	0	0	100 (jumlah)	1,145,000,000.00	125	1,259,500,000.00	150	1,285,450,000.00	175	1,323,995,000.00	200	1,476,394,500.00	200	Dinas Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	5	5	5	175,000,000.00	5	192,500,000.00	6	211,750,000.00	6	222,925,000.00	7	236,217,500.00	7	Dinas Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Bendik, situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi	42	42	43	150,000,000.00	43	165,000,000.00	43	181,500,000.00	43	199,650,000.00	43	227,091,400.00	43	Dinas Kebudayaan
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8,325,000,000.00		9,157,500,000.00		10,073,250,000.00		11,080,575,000.00		12,188,632,500.00		Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Fasilitas SDM dan Lembaga Sejarah			8	175,000,000.00	8	192,500,000.00	10	211,750,000.00	11	222,925,000.00	12	236,217,500.00	12	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Terpeliharanya Koleksi Benda Cara Budaya	100	100	100	30,000,000.00	100	33,000,000.00	100	36,300,000.00	100	39,930,000.00	100	43,923,000.00	100	
2.23	PERPUSTAKAAN															
	Dinas Perpustakaan & Kearsipan															

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial diPerpustakaan	30000 (jumlah)	70%	73%	1,325,000,000.00	76%	1,457,500,000.00	79%	1,503,250,000.00	81%	1,663,575,000.00	84%	1,739,932,500.00	84%	
		Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun	18,000	19,000	720	1,750	3,500	7,000	14,000	14,000						
2.24	PERPUSTAKAAN															
	Dinas Perpustakaan & Kearsipan															
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan sesuai Aturan	16 OPD/ desa	2 OPD	5 OPD	500,000,000.00	8 OPD 2 Desa	550,000,000.00	10 OPD 4 Desa 1 BUMD	605,000,000.00	13 OPD 6 Desa 1 BUMD	665,000,000.00	16 OPD 9 Desa 1 BUMD	732,050,000.00	16 OPD 9 Desa 1 BUMD	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Terlindungi dan Terselamatkan	0	1 Dokumen	25 Arsip	100,000,000.00	50 Arsip	110,000,000.00	75 Arsip	121,000,000.00	100 Arsip	133,100,000.00	125 Arsip	146,410,000.00	125 Arsip	
2.24.04	PROGRAM PERUNAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Arsip yang dapat diakses	0	0	1 Dokumen	50,000,000.00	25 Arsip	55,000,000.00	50 Arsip	60,500,000.00	75 Arsip	66,550,000.00	100 Arsip	73,205,000.00	100 Arsip	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				13,530,800,000		14,883,880,000		16,372,268,000.00		18,009,494,800		19,810,444,280			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	Dinas Kelautan dan Perikanan															
3.25.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Perikanan	40.86	41	41.86	600,000,000.00	42.10	1,600,000,000.00	42.1	1,700,000,000.00	42.1	1,800,000,000.00	42.1	1,900,000,000.00	42.1	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan	8,085.61	8085.61	8085.61	3,482,141,198.00	8,085.86	3,100,000,000.00	8,086.11	3,200,000,000.00	8,086.36	3,300,000,000.00	8,086.61	3,400,000,000.00	8086.61	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komoditi utama	5	5	5	1,725,000,000.00	5	1,050,000,000.00	5	1,100,000,000.00	5	1,150,000,000.00	5	1,200,000,000.00	5	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat (Powakmas)	3	4	5	125.000.000,00	5	1.000.000.000,00	6	1.100.000.000,00	7	1.300.000.000,00	7	1.300.000.000,00	7	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 Bulan	12 Bulan	11.543.658.802	12 Bulan	10.835.636.670	12 Bulan	11.377.418.503,00	12 Bulan	11.491.192.688	12 Bulan	11.606.104.615	12 Bulan	
3.26	PARIWISATA															
	Dinas Pariwisata															
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Ojek destinasi wisata	15	15	15	3.450.000.000,00	15	4.400.000.000,00	15	4.550.000.000,00	15	4.750.000.000,00	15	4.900.000.000,00	15	
		Kunjungan Wisata	91,8	91,8	94,25		97,2	97,2	98	98	98	98	98	98	98	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Event Pariwisata dalam dan Luar Negeri	3	3	3	680.000.000,00	3	950.000.000,00	4	1.100.000.000,00	4	1.150.000.000,00	4	1.250.000.000,00	4	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata	0	0	0		1	770.000.000	1	850.000.000,00	1	945.000.000	1	1.065.000.000	1	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kelompok Sektur Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	6	6	7	1.180.000.000	9	2.030.000.000	11	2.240.000.000,00	13	2.300.000.000	16	2.400.000.000	16	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.464.379.590		8.174.800.000		8.583.330.000		9.012.496.500,00		9.102.621.465		9.193.647.680		
3.27	PERTANIAN															
	Dinas Pertanian															
		Produksi sektor pertanian	37.187	37.187	40.098	650.000.000,00	43.189	1.350.000.000,00	46.765	1.450.000.000,00	50.630	1.550.000.000,00	54.830	1.625.000.000,00	54.830	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah jenis bibit benih unggul komoditas utama	5	5	5	470,000,000.00	5	1,100,000,000.00	5	1,200,000,000.00	5	1,300,000,000.00	5	1,550,000,000.00	5	
		Produktivitas padi	3.55	3.79	1.707	100,000,000.00	3.90	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	200,000,000.00	4.06	200,000,000.00	4.06	
		Produksi sektor peternakan	3,218	3,218		1,000,000,000.00	3,258	1,810,000,000.00	3,278	2,050,000,000.00	3,298	2,200,000,000.00	3,318	2,400,000,000.00	3,318	
		Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan		1541	1606	500,000,000.00	1671	650,000,000.00	1736	650,000,000.00	1801	650,000,000.00	1866	650,000,000.00	1,866	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	cakupan bina kelompok tani	21.25	21.25	21.31	1,400,000,000.00	21.37	1,650,000,000.00	21.43	1,900,000,000.00	21.49	2,100,000,000.00	21.55	2,400,000,000.00	21.55	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya panjang jalan pertanian yang dibangun		136	151	1,300,000,000.00	171	2,500,000,000.00	191	3,000,000,000.00	211	3,500,000,000.00	231	4,000,000,000.00	231	
		Pembangunan prasarana pertanian lainnya		1	7	3,350,000,000.00	7	4,000,000,000.00	7	4,350,000,000.00	7	5,100,000,000.00	7	6,150,000,000.00	7	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (E)		400	425	630,000,000.00	450	630,000,000.00	500	750,000,000.00	550	950,000,000.00	550	1,150,000,000.00	550	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50,300,000,000.00		4,931,222,445.68		5,231,953,943.04		5,421,839,251.77		5,619,461,152.66			
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				300,000,000.00											
	Dinas Perkebunan															
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Produksi sektor perkebunan	6,456,662.00	6,456,662	6,956,662.00		7,456,662	7,956,662.00		8,456,662		8,956,662.00		8,956,662.00		
					3,000,000,000.00		9,000,000,000.00		10,000,000,000.00		10,000,000,000.00		10,500,000,000.00			

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	SARANA PERTANIAN	Produktivitas perkebunan	19.00	19.00	19.00		19.10		19.20		19.30		19.30		19.30	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan	0	0	1 Prasarana	450,000,000.00	1 Prasarana	2,000,000,000.00	1 Prasarana							
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya dan teranggulangnya Bencana Pertanian	0	10,200 Ha	1,000 Ha	725,000,000.00	1,000 Ha	3,000,000,000.00	2,000 Ha	2,000,000,000.00	1,000 Ha	2,000,000,000.00	1,000 Ha	2,000,000,000.00	1,000 Ha	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN (USAHA PERTANIAN)	Jumlah PBSKoperasi yang dimonitor dan di evaluasi izinya.	0	20 PBSKop	14 PBSKop	200,000,000.00	20 PBSKop	300,000,000.00	20 PBSKop	300,000,000.00	20 PBSKop	350,000,000.00	20 PBSKop	350,000,000.00	20 PBSKop	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petanian Yang ditingkatkan	0	100 orang	90 Orang	100,000,000.00	150 orang	200,000,000.00	150 orang	215,000,000.00	150 orang	225,000,000.00	150 orang	250,000,000.00	150 orang	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Perkebunan	0	70 %	70%	11,244,200,000.00	71 %	15,000,000,000.00	72%	15,500,000,000.00	73%	16,000,000,000.00	74%	16,500,000,000.00	74%	
3.3	PERDAGANGAN															
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar	12	13	13	1,130,237,606.00	14	2,500,000,000.00	15	3,000,000,000.00	16	2,800,000,000.00	17	3,000,000,000.00	17	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Rekomendasi izin yang Diberikan	7	1	1	95,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Operasi pasar	4	4	4	20,000,000.00	4	800,000,000.00	4	800,000,000.00	4	800,000,000.00	4	800,000,000.00	4	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Ekspor	5	5	6	15,000,000.00	6	200,000,000.00	6	200,000,000.00	6	200,000,000.00	6	200,000,000.00	6	
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Alat UTPP yang berstandarisasi	400	400	400	33,567,000.00	400	350,000,000.00	400	350,000,000.00	400	350,000,000.00	400	350,000,000.00	400	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.31	PERINDUSTRIAN															
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah KM	1,265	1,341	1,425	280.630.000,00	1,518	150.000.000,00	1,620	200.000.000,00	1,733	250.000.000,00	1,860	300.000.000,00	1,860	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pelayanan Publik terhadap Aparatur Disperindag Kabupaten/Kota	18	18	18	12.441.465.105,00	19	12.347.461.205,00	19	12.347.461.205,00	19	12.347.461.205,00	19	12.347.461.205,00	19	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN UIN (USAHA INDUSTRI) KABUPATEN/KOTA				68.567.200,00											
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															
	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemuka Agama yang menerima Insentif	595 (jumlah)	595,00	595	10.000.000,000	595,00	11.500.000,000	595	12.075.000,000	595,00	12.678.750,000	595	13.312.687,500	595	
		Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	1,00	1		1,00		1		1,00		1		1	
		Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	12,89	12,90	3.000.000,000	13,00	4.500.000,000	13,10	4.725.000,000	13,20	4.961.250,000	13,30	5.209.312,500	13,30	
		Rata - Rata Lama Sekolah	9,19	9,19	9,2		9,35		9,45		9,55		10,00		10,00	
		Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Status Tinggi	Predikat Status Tinggi	Predikat Status Tinggi	600.000,000	Predikat Status Tinggi	720.000,000	Predikat Status Tinggi	756.000,000	Predikat Status Tinggi	793.800,000	Predikat Status Tinggi	833.490,000	Predikat Status Tinggi	
		Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama	100%	100%	100%	40.790.000,000	100%	47.577.000,000	100%	49.955.850,000,00	100%	52.453.642.500,00	100%	55.076.324.625,00	100%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam.	100%	100%	100%	4.652.000.000	100%	9.784.996.080	100%	10.853.495.688.00	100%	12.046.845.257	100%	13.381.129.782	100%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	100%	100%	116.510.800.000	100%	157.054.983.920	100%	159.279.233.312.00	100%	167.752.547.033	100%	167.495.404.730	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75,09	75,85	75,87	300.000.000	75,9	360.000.000	75,93	396.000.000	75,95	435.600.000	75,98	479.160.000	75,98	
4.02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH															
	Sekretariat DPRD															
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	tersebutnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA, Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RPJMD	Ada	Ada	Ada	23.584.256.846.00	Ada	17.847.500.000.00	Ada	18.632.250.000.00	Ada	20.595.475.000.00	Ada	21.775.022.500.00	Ada	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98,89%	98,90%	99%	90.964.743,154	99,2%	115.718.900.000	99,3%	120.252.900.000.00	99,4%	129.440.300.000	99,5%	137.346.440.000	99,5%	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.01	PERENCANAAN															
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pertajaman Konsistensi Program RPJMD kedalam RUPD	83,55%	100,00%	100,00%	5.900.000.000.00	100%	4.200.000.000.00	100%	4.519.000.000.00	100%	4.719.000.000.00	100%	5.000.000.000.00	100%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RPMD kedalam Renstra dan Renja OPD	83,55%	100%	100%	10.090.000.000,00	100%	10.199.000.000,00	100%	10.300.000.000,00	100%	10.403.000.000,00	100%	10.508.000.000,00	100%	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	91,30%	100%	100%	19.521.000,000	100%	21.082.680,000	100%	22.136.814.000,00	100%	22.358.182,140	100%	22.581.763,961	100%	
5.02	KEUANGAN															
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	5.760.000.000,00	WTP	9.160.000.000,00	WTP	9.220.000.000,00	WTP	9.570.000.000,00	WTP	9.620.000.000,00	WTP	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MLK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	1.950.000.000,00	WTP	3.150.000.000,00	WTP	3.150.000.000,00	WTP	3.250.000.000,00	WTP	3.250.000.000,00	WTP	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA				30.031.507,503		39.425.507,503		40.575.507,503		40.675.507,503		40.700.000,000			
	Badan Pendapatan Daerah															
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	5	7,05	6,88	6.870.000.000,00	6,98	18.450.000.000,00	7,05	19.250.000.000,00	7,14	19.400.000.000,00	7,23	19.550.000.000,00	7,23	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA				25.157.840,000		31.796.429,515		32.422.992,590,49		35.133.823,148		36.939.157,833			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	Badan Kepegawain, Pendidikan, dan Pelatihan															
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,14%	35,00%	37,00%	3.070.000.000,00	40,00%	7.040.000.000,00	40,00%	7.244.000.000,00	50,00%	7.744.000.000,00	50,00%	7.744.000.000,00	50,00%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	113 hari	260 hari	260 hari		260 hari		260 hari		260 hari		260 hari		260 hari	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Distribusi ASN	2500 SK	2500 SK	2500 SK	3.050.000.000,00	2500 SK	3.355.000.000,00	2500 SK	3.490.500.000,00	2500 SK	3.700.000.000,00	2500 SK	3.800.000.000,00	2500 SK	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	13.100.000,000	100,00%	14.410.000,000	100%	15.000.000.000,00	100%	17.436.100,000	100%	19.179.710,000	100%	
		Sekretariat Korpri														
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Pembinaan dan Fasilitas Anggota Korpri	100%	100%	100%	500.000.000,00	100%	501.000.000,00	100%	502.000.000,00	100%	502.500.000,00	100%	502.500.000,00	100,00%	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	3.675.000,000	100,00%	3.798.500,000	100,00%	3.920.500.000,00	100,00%	3.991.000,000	100,00%	3.991.000,000	100,00%	
		Badan Penelitian dan Pengembangan														
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelibangan	11,11	50,00	80,00	3.709.798.000,00	80,00	4.006.581.840,00	80,00	4.127.108.387,20	80,00	4.357.277.058,18	80,00	4.513.859.222,83	80,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		90,00	90,00	6.105.202,000	90,00	6.355.202,000	90,00	6.590.722.000,00	90,00	7.689.794,000	90,00	8.458.773,000	90,00	
6	UNSUR PENGAWAS															
6.01	UNSUR PENGAWAS															
		Inspektorat Daerah														
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah timuan BPK	15	19	18	3.330.938,824	17	8.482.892,000	16	8.507.036.600,00	15	9.000.388,430	14	9.120.007,852	14	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat	0,00%	0,00%	0,00%	1.233.243.508,00	0,00%	1.485.000.000,00	0,00%	1.509.250.000,00	1,14%	1.637.212.500,00	1,14%	1.719.073.125,00	1,14%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	99,89	99,90%	99,91	16.257.945,948	99,92	17.883.740,542	99,93	18.777.927.569,10	99,94	18.965.706,845	99,95	19.155.363,913	99,95	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.01	KECAMATAN LONG MESANGAT															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	11	12	14	60,000,000	15	100,000,000	17	110,000,000,00	19	130,000,000,00	22	150,000,000,00	22	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	75%	80%	85%	100,000,000	90%	120,000,000	92%	140,000,000,00	95%	165,000,000,00	97%	200,000,000,00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	70,000,000	0	90,000,000	0	100,000,000,00	0	110,000,000,00	0	140,000,000,00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kelangkaan dan Kebijakan Nasional	4	4	5	170,000,000	6	190,000,000	8	235,000,000,00	9	250,000,000,00	10	280,000,000,00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Keasasarakatan	82%	84%	87%	298,500,000	90%	313,425,000	92%	329,096,250,00	95%	345,551,063	98%	362,828,616	98%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	4.230.688,420	92%	4.455.793,378	95%	4.678.583,046,38	96%	4.818.940,538	97%	4.963.508,754	97%	
7.01	KECAMATAN KARANGAN															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	18	19	20	245,000,000	20	257,250,000	20	270,112,500,00	21	283,618,125	21	297,799,031	21	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	80%	80%	90%	120,000,000	90%	150,000,000	90%	180,000,000,00	90%	210,000,000,00	90%	240,000,000,00	90%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	61,000,000	0	80,000,000	0	100,000,000,00	0	120,000,000,00	0	140,000,000,00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kelangkaan dan Kebijakan Nasional	5	5	5	340,000,000	5	360,000,000	5	380,000,000,00	5	400,000,000,00	5	420,000,000,00	5	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	75%	80%	90%	335,000,000	90%	360,000,000	90%	385,000,000.00	90%	420,000,000.00	95%	435,000,000.00	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	85%	85%	90%	2,802,500,000	90%	3,405,015,533	90%	3,575,266,309.44	90%	3,611,018,973	95%	3,647,129,162	95%	
7.01	KECAMATAN TELUK PANDAN															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	16	17	75,000,000	20	82,500,000	22	90,750,000.00	24	99,825,000.00	26	110,000,000.00	26	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	90,000,000	90%	99,000,000	92%	109,000,000.00	95%	120,000,000.00	97%	132,000,000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	75,000,000	0	82,500,000	0	90,750,000.00	0	99,825,000.00	0	110,000,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelembagaan Nasional	4	4	5	175,000,000	6	190,500,000	8	225,000,000.00	9	250,000,000.00	10	275,000,000.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	80%	82%	84%	248,000,000	85%	272,800,000	87%	300,000,000.00	90%	330,000,000.00	95%	365,000,000.00	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	5,587,000,000	92%	6,145,700,000	95%	6,760,270,000.00	96%	7,436,300,000.00	97%	8,180,000,000.00	97%	
7.01	KECAMATAN SANGKULIRANG															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21	21	23	50,000,000	25	55,000,000	27	60,500,000.00	29	66,550,000.00	30	73,205,000.00	30	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	92%	93%	110,000,000	95%	121,000,000	96%	133,100,000.00	97%	146,410,000.00	98%	161,051,000.00	98%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	2	2	2	40,000,000	1	44,000,000	0	48,400,000.00	0	53,240,000.00	0	58,564,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelembagaan Nasional	2	2	3	90,000,000	4	99,000,000	5	108,900,000.00	5	119,790,000.00	6	131,769,000.00	6	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	88%	89%	90%	312,000,000	91%	343,200,000	92%	377,520,000.00	93%	415,272,000.00	95%	456,799,200.00	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	97%	97%	98%	6,350,600,000	98%	7,077,510,000	98%	7,785,261,000.00	99%	8,563,787,100.00	100%	9,420,165,810.00	100%	
7.01	KECAMATAN KALIORANG															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12	15	17	16,632,000	20	42,130,000	22	42,472,600.00	24	42,822,000.00	26	43,200,000.00	26	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	162,699,000	90%	165,953,000	92%	169,272,000.00	95%	174,350,000.00	97%	177,837,000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	7,000,000	0	35,000,000	0	37,000,000.00	0	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelahiran Nasional	4	4	5	98,102,500	6	117,723,000	7	137,343,500.00	7	137,343,500.00	7	137,343,500.00	7	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	12,800,000	90%	105,000,000	92%	115,000,000.00	95%	115,000,000.00	98%	115,000,000.00	98%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	5,318,631,645	92%	5,373,190,594	95%	5,537,536,312.00	96%	5,593,961,675.00	97%	5,650,951,292.00	97%	
7.01	KECAMATAN BATU AMPAR															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	16	17	80,000,000	20	110,000,000	22	130,000,000.00	24	150,000,000.00	26	170,000,000.00	26	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	100,000,000	90%	130,000,000	92%	160,000,000.00	95%	195,000,000.00	97%	225,000,000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	90,000,000	0	110,000,000	0	130,000,000.00	0	165,000,000.00	0	195,000,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelahiran Nasional	4	4	5	170,000,000	6	190,000,000	8	235,000,000.00	9	250,000,000.00	10	280,000,000.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	380,000,000	90%	420,000,000	92%	450,000,000.00	95%	490,000,000.00	98%	520,000,000.00	98%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	3.620.000.000	92%	3.730.000.000	95%	3.835.000.000.00	96%	3.940.000.000.00	97%	4.050.000.000.00	97%	
7.01	KECAMATAN MUARA WAHAU															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	52	52	54	75.000.000	56	109.000.000	58	129.000.000.00	60	149.000.000.00	62	169.000.000.00	62	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	75%	77%	80%	115.000.000	85%	167.900.000	90%	187.900.000.00	95%	207.900.000.00	98%	227.900.000.00	98%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	1	0	0	25.000.000	0	80.000.000	0	100.000.000.00	0	120.000.000.00	0	140.000.000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kemampuan Nasional	8	7	8	30.000.000	8	130.000.000	8	150.000.000.00	8	170.000.000.00	8	190.000.000.00	8	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Komunitas	87%	90%	91%	150.000.000	92%	170.000.000	93%	190.000.000.00	94%	210.000.000.00	95%	230.000.000.00	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	95%	96%	6.334.000.000	97%	6.853.060.000	98%	6.873.060.000.00	98%	6.893.060.000.00	99%	6.933.060.000.00	99%	
7.01	KECAMATAN RANTAU PULUNG															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10	10	10	57.000.000	11	59.850.000	12	62.842.500.00	13	65.984.625.00	14	69.283.856.00	14	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	75%	75%	75%	126.000.000	77%	132.300.000	79%	138.915.000.00	81%	145.860.750.00	83%	153.153.788.00	83%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	15	15	15	40.000.000	13	42.000.000	11	44.100.000.00	9	46.305.000.00	7	48.620.250.00	7	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kemampuan Nasional	2	2	3	138.000.000	4	144.900.000	4	152.145.000.00	5	159.752.250.00	5	167.739.863.00	5	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Komunitas	80%	80%	80%	130.000.000	83%	136.500.000	85%	143.325.000.00	87%	150.491.250.00	90%	158.015.813.00	90%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90%	90	90%	3,334,000,000	91%	3,467,360,000	92%	3,606,054,400.00	93%	3,750,296,576.00	94%	3,900,308,439.00	94%	
7.01 KECAMATAN BENGALON																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	15	17	100,000,000	20	110,000,000	22	130,000,000.00	24	150,000,000.00	25	170,000,000.00	25	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	110,000,000	90%	150,000,000	92%	170,000,000.00	95%	195,000,000.00	97%	220,000,000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	70,000,000	0	130,000,000	0	150,000,000.00	0	170,000,000.00	0	200,000,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelabahan Nasional	4	4	5	100,000,000	6	200,000,000	8	230,000,000.00	9	250,000,000.00	10	280,000,000.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	41,600,000	90%	380,000,000	92%	420,000,000.00	95%	450,000,000.00	98%	480,000,000.00	98%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	5,025,529,510	92%	5,964,640,416	95%	6,262,872,437.00	95%	6,325,501,161.00	97%	6,388,756,173.00	97%	
7.01 KECAMATAN MUARA ANCALONG																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10	13	14	50,000,000	15	55,000,000	17	60,500,000.00	19	66,550,000.00	22	73,205,000.00	22	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	75%	80%	85%	45,000,000	90%	49,500,000	92%	54,450,000.00	95%	59,895,000.00	97%	65,584,500.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	40,000,000	0	44,000,000	0	48,400,000.00	0	53,240,000.00	0	58,564,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelabahan Nasional	4	4	5	120,000,000	6	132,000,000	8	145,200,000.00	9	159,720,000.00	10	175,592,000.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	150,000,000	90%	165,000,000	92%	181,500,000.00	95%	199,650,000.00	95%	219,615,000.00	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	100%	100%	6,715,900,000	100%	7,340,740,000	100%	8,074,814,000.00	100%	8,882,295,400.00	100%	9,770,524,940.00	100%	
7.01 KECAMATAN SANDARAN																

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10	11	13	15,000,000	15	90,000,000	17	145,000,000.00	19	150,000,000.00	22	170,000,000.00	22	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	86%	87%	88%	120,000,000	90%	165,000,000	92%	185,000,000.00	95%	195,000,000.00	97%	225,000,000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	40,000,000	0	100,000,000	0	110,000,000.00	0	120,000,000	0	140,000,000	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keluhan Nasional	9	9	9	200,000,000	9	215,000,000	9	230,000,000.00	9	240,000,000	9	245,000,000	9	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Keperangkatke	75%	80%	85%	306,802,388	87%	260,000,000	90%	280,000,000.00	92%	290,000,000	95%	326,262,500	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90%	92%	94%	5,418,197,612	95%	5,575,000,000	97%	5,775,250,000.00	98%	6,166,512,500	99%	6,391,512,500	99%	
7.01 KECAMATAN BUSANG																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	17	18	19	115,000,000	20	80,500,000	21	90,550,000.00	22	93,205,000.00	23	94,525,500.00	23	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	50%	75%	80%	152,000,000	85%	164,700,000	90%	161,170,000.00	95%	158,344,855.00	100%	162,735,700.00	100%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	124,000,000	0	103,700,000	0	87,653,734.00	0	89,177,000.00	0	98,094,700.00	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Keluhan Nasional	4	5	6	206,000,000	7	226,800,000	8	248,260,000.00	9	254,186,000.00	10	266,664,800.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Keperangkatke	60%	60%	60%	245,050,000	73%	245,050,000	80%	263,700,000.00	90%	265,270,000.00	100%	273,897,000.00	100%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	92%	93%	100%	4,902,661,111	100%	5,277,857,333	100%	5,424,257,710.00	100%	5,592,392,700.00	100%	5,733,641,966.00	100%	
7.01 KECAMATAN KAUBUN																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	16	17	23,745,000	20	57,200,000	22	81,900,000.00	24	74,625,000.00	26	92,000,000.00	26	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	118,642,000	90%	130,600,000	92%	143,500,000.00	95%	153,900,000.00	97%	173,700,000.00	97%	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	41.880.000	0	46.068.000	0	50.500.000.00	0	55.600.000.00	0	61.000.000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelembagaan Nasional	4	4	5	35.732.000	6	39.300.000	8	43.300.000.00	9	47.600.000.00	10	53.300.000.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	111.807.000	90%	123.000.000	92%	135.000.000.00	96%	148.000.000.00	98%	163.000.000.00	98%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	4.008.394.000	92%	4.072.200.000	96%	4.176.350.000.00	96%	4.300.900.000.00	97%	4.437.000.000.00	97%	
7.01 KECAMATAN KONGBENG																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6	7	8	150.000.000	10	170.000.000	12	180.000.000.00	15	190.000.000.00	19	200.000.000.00	19	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	80%	82%	84%	85.000.000	90%	170.000.000	94%	200.000.000.00	96%	230.000.000.00	98%	260.000.000.00	98%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	80.000.000	0	120.000.000	0	140.000.000.00	0	160.000.000.00	0	180.000.000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kelembagaan Nasional	3	3	4	127.000.000	5	140.000.000	7	160.000.000.00	8	180.000.000.00	9	200.000.000.00	9	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	85%	86%	87%	250.000.000	91%	280.000.000	93%	300.000.000.00	95%	320.000.000.00	97%	340.000.000.00	97%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	84%	85%	85%	5.276.963.750	90%	5.370.000.000	92%	5.490.000.000.00	95%	5.620.000.000.00	98%	5.750.000.000.00	98%	
7.01 KECAMATAN MUARA BENGKAL																
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	16	17	59.000.000	20	70.000.000	22	90.000.000.00	24	120.000.000.00	26	140.000.000.00	26	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	52.000.000	90%	65.000.000	92%	100.000.000.00	95%	125.000.000.00	97%	150.000.000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	30.000.000	0	35.000.000	0	60.000.000.00	0	70.000.000.00	0	75.000.000.00	0	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kebharian Nasional	4	4	5	306.000.000	6	310.000.000	8	325.000.000	9	340.000.000	10	360.000.000	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	135.000.000	90%	135.500.000	92%	142.000.000	95%	150.000.000	98%	158.000.000	98%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	8.171.380.000	92%	8.245.000.000	95%	8.355.000.000	96%	9.465.000.000	97%	9.570.000.000	97%	
7.01	KECAMATAN SANGATTA UTARA															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	57	58	59	53.000.000	60	57.922.252	60	60.818.259.000	60	63.859.171.000	60	70.404.735.000	60	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	87%	2.877.463.000	88%	3.820.633.412	89%	4.011.398.082.000	90%	4.211.967.585.000	95%	4.422.566.385.000	95%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	29.002.140	0	52.500.000	0	55.125.000.000	0	57.881.250.000	0	60.775.312.000	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kebharian Nasional	4	4	5	117.000.000	6	126.996.534	7	133.346.360.000	8	140.013.678.000	9	147.014.361.000	9	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	85%	87%	88%	72.000.000	89%	18.832.905	90%	20.763.277.000	95%	121.000.000.000	97%	127.050.000.000	97%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	86.69%	87%	88%	7.011.535.860	89%	7.021.862.985	90%	7.372.956.134.000	95%	7.446.685.696	98%	7.521.152.553	98%	
7.01	KECAMATAN SANGATTA SELATAN															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19	19	19	70.000.000	21	77.000.000	23	84.700.000.000	25	93.170.000.000	27	102.487.000.000	27	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	70%	75%	85%	2.245.000.000	87%	2.634.500.000	90%	2.889.950.000.000	92%	2.921.545.000.000	94%	3.213.699.500.000	94%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	1	0	0	120.000.000	0	132.000.000	0	144.700.000.000	0	168.170.000	0	182.487.000.000	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kebharian Nasional	1	1	2	292.500.000	2	544.750.000	2	598.725.000.000	3	667.597.500.000	3	720.422.750.000	3	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	70%	75%	85%	255,000,000	87%	285,500,000	89%	314,050,000.00	92%	346,055,000.00	95%	380,140,500.00	95%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	75%	85%	88%	7,272,700,429	90%	7,454,517,940	93%	7,640,880,888.00	95%	7,831,902,910	97%	8,027,700,483	97%	
7.01	KECAMATAN TELEN															
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15	16	17	110,000,000	20	60,000,000	22	70,000,000.00	24	80,000,000.00	26	90,000,000.00	26	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	85%	86%	88%	45,000,000	90%	55,000,000	92%	60,000,000.00	95%	70,000,000.00	97%	80,000,000.00	97%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran PERDAPERKADA	0	0	0	7,500,000	0	10,000,000	0	15,000,000.00	0	20,000,000	0	25,000,000.00	0	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	4	5	140,000,000	6	242,000,000	8	245,000,000.00	9	250,000,000.00	10	260,000,000.00	10	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	82%	84%	87%	207,500,000	90%	215,000,000	92%	230,000,000.00	95%	240,000,000.00	96%	250,000,000.00	96%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	80%	85%	89%	5,640,000,000	92%	5,783,820,000	96%	5,931,307,410.00	96%	6,082,555,749.00	97%	6,237,660,921.00	97%	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	LSM/Organisasi yang Aktif	72	123	139	230,000,000	169	370,000,000	199	570,000,000.00	229	770,000,000	259	940,000,000	259	

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dari Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, EPK, dan	0,1875	18,75%	18,75%	250.000.000,00	75,50%	370.000.000,00	75,83%	540.000.000,00	77,83%	710.000.000,00	97,83%	880.000.000,00	97,83%	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik di Wilayah Kutai Timur	11%	11%	22%	511.072.304,00	43%	831.072.304,00	65%	1.031.072.304,00	75%	1.001.072.304,00	86%	1.171.072.304,00	86%	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Forum dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (EKUB EBCN)	20%	20%	20%	300.000.000,00	40%	1.670.000.000,00	60%	1.770.000.000,00	80%	1.920.000.000,00	100%	2.020.000.000,00	100%	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sara	0	0	0	450.000.000,00	0	2.250.000.000,00	0	2.970.000.000,00	0	3.086.000.000,00	0	3.626.000.000,00	0	
		Cakupan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	65%	85%	100%	7.876.200,00	100%	7.974.274.881,43	100%	8.612.216.871,48	100%	9.301.194.221,20	100%	10.045.289.758,89	100%	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator tingkat sasaran (dampak/impact) dan outcome program pembangunan daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah merupakan alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil (outcomes) lebih utama daripada sekedar keluaran (output), karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah disusun untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian, indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan. Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya.

8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama



yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi yang disajikan dalam Tabel 8-1.



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah
Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, DAN BERSATU											
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>Dimana: X1 = Indeks Harapan Hidup X2 = Indeks Pendidikan X3 = Indeks standart hidup layak</p>		73	74.03	74.56	75.1	75.64	76.18	76.72	76,72
MISI 2 : MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN											
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	%	9.16	9.34	9.53	9.82	10.11	10.41	10.73	10.73
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$		-3,21	1,99	2,05	2,10	2,14	2,19	2,25	2,25



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 3 MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT SECARA PROPOSIONAL DAN MERATA											
4	Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	$IPD = (b_1 \cdot V_1 + b_2 \cdot V_2 + b_3 \cdot V_3 + \dots + b_{42} \cdot V_{42}) \cdot 20$ <p>Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (berskala 0 - 100) V₁ = Skor indikator ke - 1 V₂ = Skor indikator ke - 2 V₃ = Skor indikator ke - 3 - - - V₄₂ = Skor indikator ke - 42 b₁ = Penimbang/pembobot indikator ke - 1 b₂ = Penimbang/pembobot indikator ke - 2 b₃ = Penimbang/pembobot indikator ke - 3 - - - b₄₂ = Penimbang/pembobot indikator ke - 42</p>		64,12	66,5	68,11	69,72	71,32	72,93	74,53	74,53
5	Indeks Gini	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i+1})}{2}$ <p>dimana: P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p>		0,325	0,340	0,344	0,347	0,348	0,349	0,348	0,348
MISI 4 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI											
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$		75,09	75,85	75,87	75,9	75,93	75,95	75,98	75,98
MISI 5 MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN											
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$		69,47	69,47	69,97	70,47	70,97	71,47	71,97	71,97
9	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	%	99,94	100	100	100	100	100	100	100



8.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, **Aspek Pelayanan Umum**, serta **Aspek Daya Saing Daerah**. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara rinci disajikan pada Tabel 8.2.



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran
Kabupaten Kutai Timur

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: X1 = Indeks Harapan Hidup X2 = Indeks Pendidikan X3 = Indeks standart hidup layak		73	74.03	74.56	75.1	75.64	76.18	76.72	76,72
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	5.45	5.61	5.73	5.61	5.56	5.44	5.34	5.34
3	Tingkat Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	%	9.55	9.6	9.65	9.57	9.5	9.43	9.36	9.36
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$	%	5	7,05	6,88	6,98	7,05	7,14	7,23	7,23
5	Rata - Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	9,19	9,19	9,2	9,35	9,45	9,55	10,00	10,00



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Angka Harapan Hidup	Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup	Tahun	73,16	74,33	75,11	75,89	76,67	77,45	78,23	78,23
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	%	9.16	9.34	9.53	9.82	10.11	10.41	10.73	10.73
8	Indek Pembangunan Desa (IPD)	$IPD (b_1 \cdot V_1 + b_2 \cdot V_2 + b_3 \cdot V_3 + \dots + b_{42} \cdot V_{42}) \cdot 20$ <p>Keterangan: IPD = Nilai IPD setiap desa (bernilai 0 - 100) V₁ = Skor indikator ke - 1 V₂ = Skor indikator ke - 2 V₃ = Skor indikator ke - 3 . . V₄₂ = Skor indikator ke - 42</p> <p>b₁ = Penimbang/pembobot indikator ke - 1 b₂ = Penimbang/pembobot indikator ke - 2 b₃ = Penimbang/pembobot indikator ke - 3 . . b₄₂ = Penimbang/pembobot indikator ke - 42</p>		64,12	66,5	68,11	69,72	71,32	72,93	74,53	74,53
9	Indek Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: P_i: persentase sumbu-tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i: persentase kumulatif total pendapatan atau penghasilan sampai kelas ke-i</p>		0,325	0.340	0.344	0.347	0.348	0.349	0.348	0.348
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75,09	75,85	75,87	75,9	75,93	75,95	75,98	75,98
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH										



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$		-3,21	1,99	2,05	2,10	2,14	2,19	2,25	2,25
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$		111,9	109,66	108,57	107,48	108,55	109,64	110,74	110,74
C ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Tahun	12,89	12,89	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,30
2	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/SMP yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal}}{\text{Jumlah Sekolah SD/SMP}} \times 100\%$	Persen (%)	➢ SD= 98,67 ➢ SMP= 86,21	➢ SD= 98,67 ➢ SMP= 86,21	➢ SD= 100 ➢ SMP= 91,95	➢ SD= 100 ➢ SMP= 94,25	➢ SD= 100 ➢ SMP= 95,40	➢ SD= 100 ➢ SMP=96,55	➢ SD= 100 ➢ SMP=100	➢ SD= 100 ➢ SMP=100
3	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	5	5	5	5	6	6	7	7
4	Penyelenggaraan Festival keagamaan	Penyelenggaraan Festival keagamaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	43.66	43.66	44.16	44.66	45.16	45.66	46.16	46.16
6	Produksi sektor pertanian	Jumlah Produksi komoditas pertanian	Ton	37,187	37,187	40,098	43,168	46,765	50,630	54,830	54,830
7	Produksi sektor perkebunan	Jumlah Produksi komoditas perkebunan	Ton	6.456.662	6.456.662	6,956,662	7,456,662	7,956,662	8,456,662	8,956,662	8,956,662



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	produksi perikanan	Jumlah produksi ikan	Ton	8,085.61	8,085.61	8,085.61	8,085.86	8,086.11	8,086.36	8,086.61	8,086.61
9	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	unit	1.265	1.341	1.425	1.518	1.620	1,733	1.860	1.860
10	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	Nib 720	688	722	759	796	836	876	876
11	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten (Km)}} \times 100\%$	%	51.88	51.98	52.84	53.26	53.72	54.21	54.71	54.71
12	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$		13.705%	15.076%	18.091%	21.709%	26.051%	31%	37.514%	37.514%
13	Capaian Akses Air Minum Layak	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	43,43	48,70	53,81	53,86	53,90	53,95	53,99	53,99
14	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	$\frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengelolaan Bersisa Cuciuk rajay} + \text{Jumlah rumah yang memiliki SR dan dibelanya diolah di IPAL esaj} + \text{Jumlah rumah yang sampul selanya telah diolah di PPT}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	%	65,69	76,45	76,75 (1%aman)	76,92 (aman 1,49%)	77,08 (aman 2,03%)	77,38 (aman 2,6%)	77,59 (aman 3,18%)	77,59 (aman 3,18%)
15	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	$\frac{\text{Kapasitas Infrastruktur Pengelolaan sampah}}{\text{Potensi Timbulan Sampah}} \times 100\%$	%	73,00	75,32	82,65	89,30	90,75	93,08	93,26	93,26
16	Tingkat Waktu Tanggap (Time)		%	97,83	97,83	97,83	97,83	98,83	98,83	98,83	98,83



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajern Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\%$									
17	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100 \%$		0.2472	0.2479	0.2486	0.2490	0.2493	0.24942	0.24943	0.24943
18	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$	%	30,67% (3 Lokasi SK 2016)	30,67 % (3 Lokasi SK 2016)	30,67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	22,69 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	47,33 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	47,33 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)
19	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$	%	58.87	73.76	77.37	80.48	83.17	85.48	87.48	87.48
20	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 thn}} \times 10.000$		56,46	56,46	56,48	56,58	56,68	56,78	56,88	56,88
21	Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 12 thn}} \times 10.000$		53,06	53,06	53,16	53,26	53,36	53,46	53,56	53,56
22	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$		0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
23	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	Jumlah pasar			12	13	13	14	15	16	17	17
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
26	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil opini BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			55,72	55,72	55,72	56,00	56,3	60	63,5	63,5
28	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah penduduk}}$		86,95	86,95	90,00	93,00	95,00	98,00	100	100
29	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$	%	1,14	35,00	37,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
30	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Persen (%)	17,14	17,14	25,71	34,29	48,57	62,86	77,14	77,14
31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$		69,47	69,47	69,97	70,47	70,97	71,47	71,97	71,97
32	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan		77,48	77,49	77,55	77,57	77,59	77,60	77,61	77,61
33	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	%	99,94	100	100	100	100	100	100	100



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
34	Jumlah Perkada RDTR	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	1	1	1	2	2	2	1	1
35	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi		%	65	69	70	71	72	73	75	75
36	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif		%	0	0	20	40	60	80	100	100
37	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	$\% \text{TKB} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi}} \times 100\%$	%	3,94	6,42	8,67	10,69	12,51	14,14	15,60	15,60
38	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan			69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84
39	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial			34.41	34.41	34.41	100%	100%	100	100	100
40	Persentase PMKS			33.25	66.51	100	100	100	100	100	100



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial										
41	Penguatan Cadangan Pangan			70	70	72	74	76	78	78	78
42	Jumlah UMKM yang difasilitasi			-	-	50 UMKM	100 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM
43	Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial			100	100	100	100	100	100	100	100
44	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		%	61,38	67,38	100	100	100	100	100	100
45	Akreditasi RSUD			Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
46	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan			56,00	95,00	100	100	100	100	100	100



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Upaya Kesehatan Masyarakat										
47	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, dan Sosial di Perpustakaan}}{\text{Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan}} \times 100\%$	Persen (%)	30.000 (jumlah)	70%	73%	76%	79%	81%	84%	84%
48	Pemuka Agama yang menerima Insentif	Jumlah pemuka agama yang menerima insentif	Orang	595 (jumlah)	595	595	595	595	595	595	595
49	Tokoh Adat yang menerima Insentif	Jumlah tokoh adat yang menerima insentif	orang	0	0	100 (jumlah)	125	150	175	200	200
50	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$	Persen (%)	76 (jumlah)	76 (jumlah)	63,49	66.66	69,84	73.01	76,19	76,19
51	Persentase Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah Prestasi Olahraga}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang Diikuti}} \times 100\%$	Persen (%)	8 (jumlah)	8 (jumlah)	38.09	44.96	33.33	44.96	54.75	54.75
52	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	%	42	42	43	43	43	43	43	43
53	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing	%	89.4	89.4	90.6	91.1	91.9	92.5	93.7	93.7



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		kelompok pangan									
54	Konsumsi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	%	40.86	41	41.86	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1
55	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	%	45.03	45.03	62.28	70.72	80.11	89.85	99.93	99.93
56	Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komoditi utama	Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komoditi utama	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5
57	cakupan bina kelompok tani	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan penda Tahun n}}{\text{jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	%	21,25	21,25	21.31	21.37	21.43	21.49	21.55	21.55
58	Produktivitas padi	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$	%	3.55	3.79	1,707	3.90	4	4	4.06	4.06
59	Produktivitas perkebunan			19.00	19.00	19.00	19.10	19.20	19.30	19.40	19.40
60	Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan				1541	1606	1671	1736	1801	1866	1866
61	Persentase koperasi yang aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	%	57,21	57,21	57,46	57,71	57,95	58,18	58,4	58,4



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
62	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM	unit	6.942	6.942	7.242	7.542	7.842	8.142	8.442	8.442
63	Objek destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata	Objek	15	15	15	15	15	15	15	15
64	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekopnmi kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekopnmi kreatif	kelompok	6	6	7	9	11	13	16	16
65	Jumlah KIR Angkutan Umum	Jumlah uji KIR	unit	3529	3529	5000	5500	6000	6500	7000	7000
66	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	Pelabuhan= 3 Bandara=1 Terminal=3	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=3	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=4	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=5	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=6	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=6	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=6	Pelabuhan= 4 Bandara=1 Terminal=6
67	Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Capaian Penanganan (Ton / Tahun)}}{\text{Potensi Timbunan Sampah (Ton / Tahun)}} \times 100\%$	%	41,47	41,57	41,66	41,75	41,84	41,92	41,99	41,99
68	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (perkotaan)	$\frac{\text{Luasan daerah yang tergenang}}{\text{Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang}} \times 100\%$			93.6	94.86	95.47	96.16	96.87	97.60	97.60
69	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$		2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
70	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung Perkantoran yang harus ada}} \times 100\%$		52,19	52,19	53,54	56,23	59,26	60,64	64,31	64,31
71	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$		0,306	0,306	0,346	0,35	0,355	0,36	0,35	0,35
72	Cakupan Penerbitan IUJK	$\frac{\text{Jumlah penerbitan IUJK dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Badan Usaha di Kabupaten}} \times 100\%$	%	71,43	85,71	55,73	69,03	80,07	89,02	96,07	96,07
73	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	$\frac{\text{Jumlah Ijin Pengembangan}}{\text{Jumlah Perumahan Kabupaten}} \times 100\%$	%	57.143	62.857	62.857	69.143	76.057	83.663	92.029	92.029
74	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$		0	0	0	0,9847	1,2309	1,4771	1,7233	1,7233
75	Jumlah temuan BPK	Jumlah Temuan		15	19	18	17	16	15	14	14
76	Penjabaran Konsistensi Program	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	83,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD kedalam RKPD										
77	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
78	Persentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	%	53,99	53,99	65,20	68,30	70,00	73,99	75,20	75,20
79	LSM/Organisasi yang Aktif			72	123	139	169	199	229	259	259
80	Tersedianya sistem data dan statistik	Ada/ tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	yang terintegrasi										
81	Cakupan penerbitan akta kelahiran	$\frac{\text{jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	%	92,19	92,25	92,30	93,00	95,00	98,00	100,00	100,00
82	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan Po	%	4,26%	4,26%	4,26%	4,1%	4,0%	3,9%	3,7%	3,7%
83	Persentase implementasi rencana kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$	%	11,11	50	80	80	80	80	80	80
84	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		Hari	113	260	260	260	260	260	260	260
85	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap			140	140	140	141,4	142,8	144,2	145,6	145,6



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota										
86	Persentase antara luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/ jumlah bidang tanah target ganti kerugian	$\frac{\text{Jumlah ganti rugi lahan yang dibayar}}{\text{Jumlah ganti rugi total}} \times 100\%$	%	86.14	86.14	90.00%	96.20%	97.10	99.41	100.00	100.00

BAB IX PENUTUP

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2022 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2016-2021, perlu disusun RPJMD Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021-2026. Acuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2021-2026;
- b) Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- c) Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026;

- d) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 - 2026;
- e) Penyusunan RPJMD sebagai pengejawantahan perwakilan aspirasi masyarakat, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan kerjasama dan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan target-target RPJMD Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam implementasi RPJMD Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan agar: 1) tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai; 2) penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan transparan dapat dilaksanakan; 3) pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai kewenangannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah) bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur ini dan RKPD tahunan, disamping dengan RTRW Kabupaten Kutai Timur sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya, melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya; demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai hingga akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN